

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL

Perencana



PERAN ASN PERENCANA DALAM MEWUJUDKAN

KEBANGKITAN EKONOMI NASIONAL

WAWANCARA EKSKLUSIF:

SUSIWIJONO MOEGJARSO (SEKRETARIS MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN)
GANJAR PRANOWO (GUBERNUR JAWA TENGAH) | LEONARD V.H. TAMPUBOLON (PAU KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS)
AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI (DEPUTI BIDANG EKONOMI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS)
DIDIK J. RACHBINI (REKTOR UNIVERSITAS PARAMADINA/PENGAMAT EKONOMI)

CALL FOR PAPERS

About The Journal

The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) is a journal published by Centre for Planners' Development, Education, and Training (Pusbindiklatren), Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (Bappenas) and supported by Indonesian Development Planners Association (PPPI).

This journal aimed at studying the issues of sustainable development from around the world to later be used as policy material in sustainable development planning in Indonesia, developing countries, and the world in general. This journal absorbs theoretical scientific studies as well as

empirical experiences from researchers around the world, primarily from researchers who specialize in developing countries, to then publish them all widely to international forums as an applicable and innovative knowledge.

This journal gives important weight to the issue of sustainable development planning with regard to the mental and spiritual development of the people of Indonesia and the people of the world in terms of politics, economics, social, culture, environment, peace and justice, energy, and other strategic issues about sustainable development planning.

... RESEARCH PAPER

... POLICY PAPER

... COMMENTARY

... BOOK REVIEW

Peer Review Process

JISDeP is an open access journal. All of the research article submitted in this journal will be provided in online version and can be free full downloaded. JISDeP also uses peer-review process by blind reviewer. The decision of accepted or not the article is determined by the agreement of both of editor's board and the reviewer.

Publication Frequency

JISDeP are published three times a year which are in April, August, and December of respective year.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. All articles published will be immediately and permanently free for everyone to read and download.

Guidance for Submission

- 1 The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in "Comments to the Editor").
- 2 The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
- 3 Where available, URLs for the references have been provided.
- 4 The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
- 5 The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.
- 6 If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in "Ensuring a Blind Review" have been followed.

Register and Login as Author to:
journal.pusbindiklatren.bappenas.go.id

BEFORE: OCTOBER 15TH, 2021

Indexed by:



Published by:



Supported by:



Follow Us:





Dari Kami

Salam Perencana!

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, 17 Agustus 2021, masih diselimuti suasana pandemi Covid-19 yang masih belum terlihat penurunan kasusnya. Pemerintah pun kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat khusus Jawa dan Bali. Di sisi lain, pemerintah berusaha untuk tetap bekerja dan melayani masyarakat dengan kualitas pelayanan prima dan selalu menjaga protokol kesehatan.

Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, sebagai pengelola Majalah Simpul Perencana, turut bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi-informasi, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan kegiatan-kegiatan pendukung agar tugas dan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat tetap berjalan pada masa pandemi ini.

Majalah Simpul Perencana Volume 40 kali ini mengambil tema tentang "Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana dalam Mewujudkan Kebangkitan Ekonomi Nasional". Tema ini dimaksudkan untuk (1) meyebarluaskan kebijakan pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi pusat dan daerah; (2) menginformasikan peran perencana pusat dan daerah dalam memberikan rekomendasi pemulihan ekonomi nasional; dan (3) mengetahui pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemulihan ekonomi pusat dan daerah.

Dalam rubrik Cakrawala, kami menghadirkan beberapa narasumber untuk membahas tema tersebut, baik dari kalangan birokrat (pusat dan daerah), ekonom, maupun dari ASN perencana. Dalam rubrik Opini, kami juga menyajikan berbagai kajian terkait tema dari para perencana pusat dan daerah. Rubrik-rubrik reguler lainnya kembali hadir dengan informasi seputar Jabatan Fungsional Perencana, sosok alumni program pendidikan dan pelatihan Pusbindiklatren, sosok perencana, profil mitra, ringkasan tesis, liputan kegiatan, dan selingan.

Semoga Majalah Simpul Perencana Volume 40 ini dapat bermanfaat sebagai menjadi referensi dalam berdiskusi dan menemani pembaca saat bekerja dari rumah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, kesuksesan, dan kesejahteraan kepada kita semua. Aamiin.

Karyoto
Pemimpin Redaksi

SIMPUL PERENCANA (SIMPUL)

Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas

PELINDUNG

Menteri PPN/Kepala Bappenas

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas

PEMIMPIN UMUM

Kepala Pusbindiklatren Bappenas

DEWAN REDAKSI

Wignyo Adiyoso, Rita Miranda, Ali Muharam,
Pandu Pradhana, Wily Witarni, Dwi Harini S. Tyas,
Hari Nasiri Mochtar, Lilly Widayati, Teresna Murti,
Feita Puspita Murti, M. Iksan Maolana

PEMIMPIN REDAKSI

Karyoto

EDITOR

Hafidh Aditama

DESAIN SAMPUL & TATA LETAK ISI

Hafidh Aditama, Dian Reza Febriani

DISTRIBUSI DAN PUBLIKASI

Maslakah Murni, Jelita Wiedoko,
Oka Dwi Quarhanda Mugianto

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Agustin Setyaningsih, Nita Agustin

ALAMAT REDAKSI

Pusbindiklatren Bappenas
Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telepon (021) 319 28280, 319 28285
Pos-el: simpul@bappenas.go.id

Unduh majalah versi PDF di:

bit.ly/bacasimpul atau
bit.ly/issuu-pusbindiklatren

Daftar Isi

GERBANG

ASN Perencana dan Kebangkitan Ekonomi Nasional 3



PROLOG

Mencari Keseimbangan Aspek Kesehatan dan Ekonomi pada Masa Pandemi 6

CAKRAWALA

Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian): Mengupas Problematika Kebijakan PC-PEN 8

Amalia Adininggar Widyasanti (Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas): Bangkit dari *Unprecedented Situation* 14

Didik J. Rachbini (Rektor Universitas Paramadina/Pengamat Ekonomi): Meluruskan Kembali Kebijakan PC-PEN 22

Leonard V.H. Tampubolon (Perencana Ahli Utama/Plt. Deputi Pendaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas): Menyelaraskan Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi 28

Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah): Solusi Krusial dari Gubernur Kasual 34

LIPUTAN

Pelatihan Swakelola Tipe II Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2021 42

Kebijakan Evaluasi Pelatihan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas tahun Anggaran 2021 44

Witness dan Pengesahan Lembaga Sertifikasi Perencana Pembangunan Indonesia 47

Sorot Kegiatan 51

SOSOK ALUMNI

Ferlistya Pratita Rari: Pengalaman Menantang, Berkesan, Sekaligus Melegakan Beasiswa Bappenas 54

Alex Francisca: Menambah Wawasan Teoretis dan Praktis tentang *City Planning* 56

SOSOK PPF

John Julius Boekorsjom: Menjadi Perencana untuk Berbakti Kepada Tanah Papua 59

PROFIL MITRA

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA: Keragaman Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Bersama Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas serta Pelaksanaannya pada Masa Pandemi Covid-19 66

AKADEMIKA

Tesis Pilihan: Dampak *Post-Suburbanisasi* Terhadap Pola Komuter di Jabodetabek 74



INFO PPPI

Belajar dan Berinovasi 85

INFO JFP

Tanya Jawab Jabatan Fungsional Perencana Seputar Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali 96

OPINI

Satya Laksana: Orientasi Pembangunan Daerah Jawa Barat Pasca-Pandemi 104

Ananto Noegroho P., Rine Simamora, Deny Sutisna: Digitalisasi UMKM dalam Mendukung Kebangkitan Ekonomi Nasional 111

Kusno Hadiutomo: Peran Fungsional Perencana dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional 119



Sigit Novianto Suhardi:

Konsep Perubahan Pola Pikir, Penguatan Karakter, dan Upaya Menemukembangkan Diri dalam Meningkatkan Peran ASN pada Masa Pemulihan Ekonomi 125

Kartika Sukma Oktanidya: Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemangkasan Anggaran Tidak Bisa Dihindari (Percepatan Penanganan Covid-19 di Badan Pusat Statistik) 133

Agus Nurhudoyo: Dukungan Infrastruktur Energi Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw 138

SELINGAN

Berbisnis pada Masa Pandemi 146



ASN PERENCANA DAN KEBANGKITAN EKONOMI NASIONAL

Oleh: Ali Muharam

DEWAN REDAKSI MAJALAH SIMPUL PERENCANA

Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 memberikan dampak yang luar biasa tidak hanya terhadap sektor kesehatan, tetapi juga terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 secara kumulatif mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Di kawasan ASEAN, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kontraksi pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh Singapura, Malaysia, dan Thailand. Hanya Vietnam yang

masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,9 persen.

Menyikapi perkembangan ekonomi yang kurang menggembirakan tersebut, pada bulan Mei 2020, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* (Covid-19). Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan dengan tujuan di antaranya membantu aktivitas usaha agar tidak mengalami perburukan sebagai akibat Covid-19, menyediakan bunga subsidi bagi debitur usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) sehingga diharapkan dapat mengurangi

risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional, serta mendukung kebijakan keuangan negara.

Dalam tahun 2021, Program PEN terus berlanjut dengan pagu anggaran mencapai sekitar Rp699 triliun. Selain itu, dalam tahun 2021, Program PEN juga diarahkan pada lima sektor yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha. Dilihat dari tujuan besarnya, Program PEN ditujukan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Program ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi warganya sekaligus mendorong roda perekonomian tetap berjalan



Foto: freepik.com

sehingga hantaman Covid-19 tidak meluluhlantakkan perekonomian nasional.

Harus disadari bahwa proses pemulihan ekonomi nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah yang dijalankan oleh mesin birokrasi (*machinery of government*), tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk mereka yang berkecimpung dalam sektor ekonomi (*machinery of economy*). Oleh sebab itu, topik Majalah Simpul Perencana edisi ini mengulas peran ASN Perencana dalam membantu mewujudkan kebangkitan ekonomi nasional melalui Program PEN.

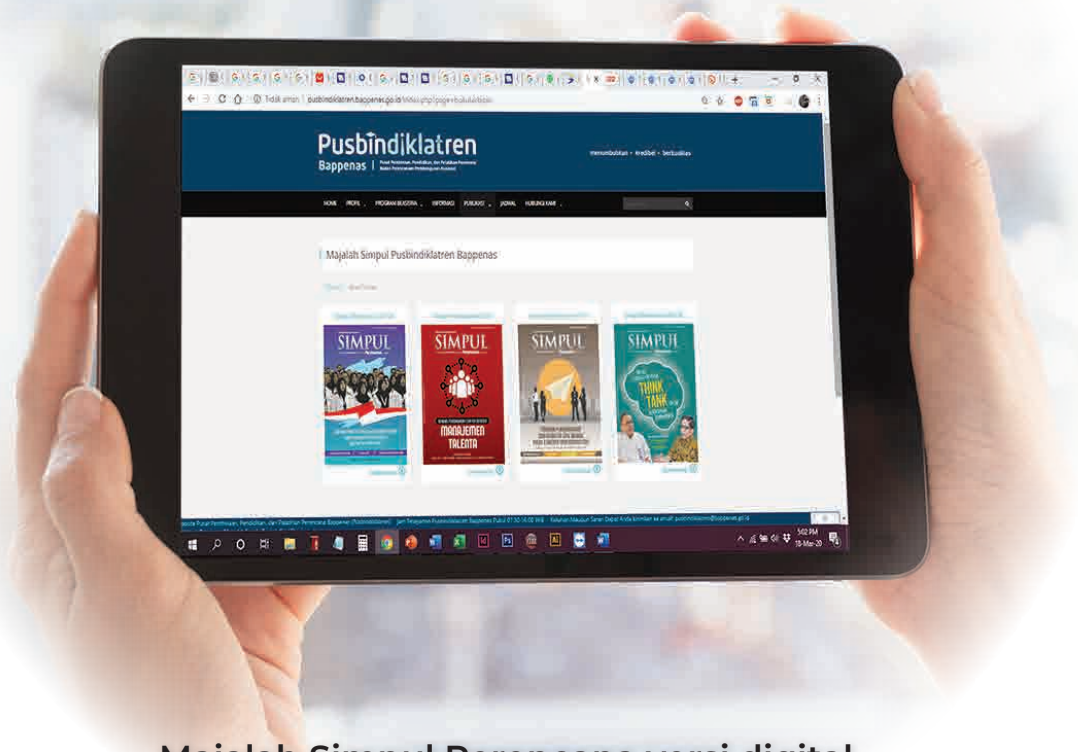
Program PEN merupakan program yang dirancang dan dilaksanakan untuk menjadi bantalan bagi mereka

yang terdampak Covid-19. Dengan demikian, dari sisi desain dan sasaran pun harus tepat sehingga anggaran yang dialokasikan dapat mencapai tujuan program tersebut. Dalam merancang desain dan alokasi sasaran inilah, peran ASN Perencana sangat penting baik dalam perumusan program, penentuan sasaran, dan memberikan pemikirannya sehingga program PEN dapat terlaksana dengan baik. ASN yang berperan sebagai pelaksana program di lapangan juga berperan penting dalam memberikan masukan (*feedback*) atas implementasi Program PEN dan *feedback* tersebut menjadi alat bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengendalian dan evaluasi program.

Meskipun Program PEN dijalankan dalam situasi darurat

karena Covid-19, dari sisi aspek perencanaan, Program PEN yang pada tahun 2021 difokuskan pada lima area utama tetap perlu mengikuti siklus dalam perencanaan program. Melalui siklus yang terencana dengan baik, mulai dari tahapan perencanaan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, pengendalian, serta *monitoring* dan evaluasi, program yang dijalankan diharapkan lebih tepat sasaran, memberikan dampak yang positif bagi upaya perbaikan ekonomi, serta mampu mewujudkan kebangkitan ekonomi pascapandemi Covid-19. Melalui siklus tersebut, peran ASN Perencana maupun ASN Pelaksana Program PEN cukup penting untuk memastikan program ini berjalan di rel yang tepat serta terhindar dari adanya *moral hazard*. ■

#BacaSimpul



Majalah Simpul Perencana versi digital dapat dibaca dan diunduh melalui situs web Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas atau melalui *platform* Issuu:

 bit.ly/bacasimpul

 bit.ly/issuu-pusbindiklatren

Menuju Perencana Profesional

SIMPUL
Perencana



MENCARI KESEIMBANGAN ASPEK KESEHATAN DAN EKONOMI PADA MASA PANDEMI

Oleh: Hari Nasiri Mochtar

DEWAN REDAKSI MAJALAH SIMPUL PERENCANA

Bagai makan buah simalakama, dimakan Ibu mati, tidak dimakan Bapak mati. Peribahasa itu biasa kita dengar pada saat kita menghadapi situasi sulit untuk menentukan satu dari dua pilihan yang ada, yang sama-sama penting tapi saling berbenturan. Memilih salah satu, akan memberikan risiko negatif yang tidak menyenangkan bagi yang lainnya.

Itulah yang terjadi saat ini. Pandemi Covid-19 mewabah ke seluruh dunia dan mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020, memberikan dampak negatif yang

sangat signifikan terhadap aspek kesehatan dan aspek ekonomi.

Jumlah kasus positif Covid-19 terus bertambah dengan varian virus

yang juga semakin berkembang. Hingga saat ini, Covid-19 sudah tersebar di lebih dari 190 negara, terkonfirmasi positif 199.466.211 orang dan meninggal 4.244.541



Foto: freepik.com

orang (sumber: WHO per 4 Agustus 2021 dari situs [web covid19.go.id](https://www.covid19.go.id)). Di Indonesia, jumlah yang positif 3.532.567 orang, sembuh 2.907.920 orang, dan meninggal 100.636 orang (sumber: situs [web Covid19.go.id](https://www.covid19.go.id) per 4 Agustus 2021).

Berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kematian dan penyebaran Covid-19 sudah dilakukan oleh berbagai negara sampai saat ini, antara lain vaksinasi, penerapan 3T (*testing, tracing, and treatment*), penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun), serta *lockdown*.

Beberapa negara memilih kebijakan *lockdown* dengan pertimbangan aspek kesehatan adalah prioritas utama untuk menyelamatkan nyawa manusia. Dalam kebijakan *lockdown* ini, semua kegiatan masyarakat sangat dibatasi. Rumah makan/warung/bar/tempat hiburan/wisata dilarang beroperasi, transportasi dibatasi, sekolah dan kantor ditutup dan diganti secara *online*, pasar dibatasi dan pusat perbelanjaan ditutup kecuali yang menjual kebutuhan harian dan kesehatan. Hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi terganggu/ terhenti dan otomatis pendapatan masyarakat menurun. Pemutusan hubungan kerja (PHK) pun banyak

terjadi, sedangkan kebutuhan hidup sangat diperlukan. Negara-negara seperti Inggris, Jerman, Singapura, Malaysia yang memberlakukan *lockdown* meminta rakyatnya untuk tinggal di rumah saja dan memberikan kompensasi/bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, negara perlu mengalokasikan dana untuk kompensasi/bantuan tersebut, yang jumlahnya cukup besar.

Di sisi lain, apabila aspek ekonomi menjadi prioritas dan kegiatan ekonomi diperbolehkan maka aspek kesehatan dapat terabaikan. Penyebaran Covid-19 akan semakin tidak terkendali dan jumlah kematian akan terus meningkat. Hal ini tentu saja akan membuat masyarakat khususnya para tenaga medis dan dokter protes, seolah negara tidak peduli atas keselamatan rakyatnya. Masyarakat internasional pun akan mengecam keras dan akan menekan negara tersebut dengan berbagai kebijakan.

Bagaimana dengan kita, Indonesia?

Sejak terdeteksi adanya Covid-19 pada awal bulan Maret 2020, pemerintah langsung membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020 untuk

mengoordinasikan kegiatan antarlembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak Covid-19 di Indonesia.

Berbagai kebijakan sudah diterapkan dengan mempertimbangkan kedua aspek penting, yaitu kesehatan dan ekonomi. Namun, pemerintah tidak pernah mengambil kebijakan *lockdown* total. Pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) agar kedua aspek penting itu dapat ditangani secara terstruktur, terkoordinasi, dan terintegrasi dalam satu kelembagaan.

Dengan koordinasi dari KPC-PEN, rangkaian kebijakan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi ditangani secara seksama sebagaimana terangkum dari hasil wawancara Dewan Redaksi SIMPUL dengan tokoh masyarakat dan pengambil kebijakan nasional dan daerah dalam edisi ini.

Semoga pandemi Covid-19 ini dapat segera berlalu dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan normal kembali. Indonesia sehat, ekonomi bangkit! Merdeka! ■



SUSIWIJONO MOEGIARSO

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG EKONOMI

MENGUPAS PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PC-PEN

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dilakukan pemerintah bukanlah perkara mudah. Banyak kendala yang dihadapi, mulai dari masalah komunikasi hingga masalah koordinasi. Dalam wawancara **SIMPUL** berikut, Susi Wijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan mengupas segala problematika tersebut dan memberi jalan keluarnya.

SIMPUL (SP): Kebijakan apa yang sudah diambil pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi ini?

SUSIWIJONO MOEGIARSO (SU): Menurut saya, pemerintah selalu menyiapkan antisipasi kebijakan yang cepat, apapun dinamika yang ada di lapangan. Jika ada perkembangan kasus, kita langsung meresponsnya dengan cepat. Oleh karena itu, kesannya terkadang menjadi tidak konsisten. Hal ini memang menimbulkan banyak dampak negatif. Sebagai contoh, ketika tiba-tiba seluruh aktivitas masyarakat ditutup akibat keluarnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Orang yang punya restoran, yang mungkin masih

punya stok bahan baku, tiba-tiba harus *close*. Kondisi di lapangan memang mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut.

Di sektor kesehatan, banyak sekali masalah yang terjadi, mulai dari masalah hulu sampai masalah hilir. Salah satu masalah hulu adalah ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap Covid-19 termasuk resistensi terhadap vaksinya. Berdasarkan survei SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting), resistensi terhadap vaksin banyak terjadi di beberapa daerah seperti Madura dan Sumatera Barat. Padahal, vaksin ini untuk melindungi mereka dari Covid-19. Di sisi hulu ini memang luar biasa berat.

Sebelumnya, pemerintah juga pernah diprotes terkait kebijakan sisi hilir melalui penambahan ruang perawatan untuk penderita Covid-19 dengan menyiapkan beberapa rumah sakit darurat. Pemerintah diprotes keras seakan-akan hanya memikirkan masalah hilir. Kebijakan tersebut muncul dari peningkatan kasus yang luar biasa. Jika tidak menambah rumah sakit darurat, pemerintah justru disangka menelantarkan/membunuh rakyat. Namun, pemerintah sudah cukup berpengalaman dengan hal ini sehingga tidak perlu terlalu terbawa perasaan.

Penyediaan obat dan vaksin di sisi hulu bukanlah masalah yang mudah saat ini. Demikian pula BOR (*bed occupancy ratio*/ketersediaan kamar perawatan di rumah sakit) di sisi hilir juga bukan masalah yang mudah ditangani. Ketika peningkatan kasus menjadi luar biasa, kapasitas fasilitas kesehatan kita pastinya tidak bisa meng-cover seratus persen. Namun, pemerintah langsung rapat maraton serta berkoordinasi dengan berbagai pihak. Artinya, pemerintah sudah berusaha merespons masalah di sisi hulu dan sisi hilir dengan sangat cepat.

Di sektor ekonomi, dalam situasi pandemi seperti ini, keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi menjadi sangat penting. Namun, titik keseimbangannya akan terus bergeser. Hal tersebut bisa terjadi ketika nantinya kembali terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi sekali, baik akibat munculnya varian baru atau lainnya. Prinsip utamanya, kesehatan nomor satu dan harus terus didorong. Dari sisi kemanusiaan, siapa pun memahami hal itu.

Meskipun kesehatan nomor satu, saat mendesain kebijakan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi harus diseimbangkan. Hal tersebut terwujud melalui terbentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), penanganan Covid-19 di satu sisi dan pemulihan ekonomi di sisi lainnya. Peringatan 76 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2021 ini juga mengangkat kedua aspek tersebut melalui semboyan “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”. Tangguh dahulu melalui penyelesaian kasus Covid-19, baru kemudian tumbuh perekonomiannya. Jadi, strategi pemerintah selalu menggunakan patron/pedoman seperti itu.

”
...dalam situasi pandemi seperti ini, keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi menjadi sangat penting.
 “

SP: Apakah komunikasi masih menjadi masalah bagi pemerintah sehingga terjadi beberapa kesalahpahaman di masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan?

SU: Saya kira ini analisis yang cukup tajam. Problem pemerintah memang di komunikasi. Harus kita akui tidak mudah melakukan komunikasi pada era media sosial

ini. Pemerintah harus punya strategi komunikasi yang bagus kepada masyarakat. Hal-hal atau kebijakan yang sifatnya sangat baik, dengan perencanaan, program, dan pelaksanaan yang juga baik, jika tidak bisa dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat, semuanya bisa menjadi tidak baik. Memang ironi, untuk hal-hal yang baik saja, kita perlu strategi (komunikasi). Padahal hal yang baik itu sebenarnya mudah sekali dipahami.

Strategi komunikasi dari pemerintah memang sangat perlu. Saya bukan ahli komunikasi, saya birokrat. Sebagai birokrat selama lebih dari tiga puluh tahun, saya bekerja saja. Namun, ternyata hal itu tidak cukup. Rekan-rekan maupun Bapak Menko Perekonomian selalu mengingatkan bahwa kadang yang lebih penting bukanlah yang dikerjakan, tetapi yang diberitakan. Ada orang yang tidak mengerjakan apapun, tetapi beritanya kencang sekali, dan masyarakat kadang menjadi berempati/bersimpati, yang penting pintar bercerita dan kemudian diberitakan.

Saya lebih memilih bekerja saja. Saya tidak mau menceritakan atau memberitakan hal tersebut karena bisa jadi nanti justru menjadi salah. Silakan teman-teman di bidang komunikasi yang memberitakan. Kalau kita bukan ahli komunikasi, membicarakan hal yang benar pun akan dilihat dari *angle* yang lain, dan itu bisa luar biasa dampaknya, apalagi kami di Komite PC-PEN yang membawahi dua satgas (penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional).

Terkait komunikasi, saya terus terang belajar banyak dari Undang-Undang Cipta Kerja, karena kami



...bantuan yang dianggap paling bermanfaat terutama untuk UMK adalah restrukturisasi kredit dan BLT.

Foto: suryakepri.com

menjadi penanggung jawab nasionalnya. Beberapa bulan kami terus di-bully di media dan di media sosial. Rekan-rekan dari serikat buruh terus mengejar kami. Sekadar mau menjelaskan kepada mereka, saya harus berpikir ulang. Hal tersebut membuat kita, terutama di birokrat atau pemerintahan, menyadari bahwa pada era sekarang, strategi komunikasi itu sangat penting, bahkan menjadi kunci.

SP: UMK (usaha mikro, kecil, menengah) merupakan tulang punggung ekonomi kita. Namun, pada masa pandemi ini, banyak UMK yang terkena dampaknya. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah kepada UMK melalui program PEN?

SU: Hampir semua sepakat bahwa UMK menjadi tulang punggung

ekonomi kita. Jika dilihat dari sisi angka, jumlah UMK kita sekitar 64,1 juta. *Share*-nya ke PDB (Produk Domestik Bruto) lebih dari 61 persen, kontribusi ke (penyerapan) tenaga kerja kira-kira 97 persen, dan banyak angka-angka yang membuat kita melihat itu sangat ideal sekali.

Kalau kita melihat struktur ekonomi kita, dominasi peran UMK ini sangat besar sekali. Terutama UMK (usaha mikro dan kecil), itu memang banyak yang di sektor informal. UMK pasti menjadi perhatian kita bersama. Nah, apa kira-kira yang paling tepat dilakukan untuk UMK pada masa pandemi ini? Begitu membicarakan sektor informal, UMK inilah yang paling terdampak parah akibat pandemi. Akibat pembatasan mobilitas dan aktivitas, semua sektor informal pun mati. Namun, kalau dilihat berdasarkan jenis sektornya, sektor yang paling

terdampak adalah sektor yang mengandalkan pergerakan orang dan barang, seperti transportasi, akomodasi, dan pariwisata.

Selama ini, program-program untuk penanganan UMK selama pandemi lebih bersifat memberikan bantuan (dana). Banyak yang mengkritik agar memberikan bantuan kepada hal-hal yang lebih produktif. Namun, jangankan untuk produktif, untuk *survive* saja mereka berat. Bantuan dana ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan kami kepada UMK agar mereka bisa *survive*.

Jika dilihat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dari hampir Rp700 triliun anggaran PEN, alokasi untuk UMK sekitar Rp171,77 triliun. Adapun realisasinya sudah sekitar 51,27 persen. Ini cukup tinggi dibandingkan dengan kluster lain, seperti kluster kesehatan (yang

baru terealisasi 25 persen), klaster insentif, klaster program prioritas, dan sebagainya. Dari berbagai program PEN, sebenarnya yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah yang berkaitan dengan dukungan untuk penyelesaian terhadap masalah pembiayaan mereka.

Berdasarkan survei dari Mandiri Institute selama Maret–April 2021 lalu, terkait persepsi UMKM terhadap perekonomian, mereka 93 persen optimis ekonomi akan membaik. Padahal UMKM-lah yang paling terdampak, yang paling merasakan kesulitan dengan adanya kebijakan pengetatan ini. Yang menarik dari survei tersebut adalah bagaimana *shifting* UMKM menjadi *on board* di dunia digital, di *marketplace*. Ini yang harus kami dorong.

Hikmah positif pandemi ini adalah percepatan digitalisasi. Dua tahun lalu, kita tidak terbayang akan melakukan meeting secara *online* berkali-kali seperti saat ini. Kita juga tidak menyangka akan adanya kebijakan PPKM darurat sehingga yang diperbolehkan beraktivitas hanyalah yang menggunakan *platform* digital atau *online*. Oleh karena itu, kami mendorong UMKM ke arah digital. Berdasarkan survei, ternyata lebih dari 53 persen UMKM kita saat ini sudah mempunyai *channel* penjualan *online*, entah sesederhana apapun: melalui Whatsapp, media sosial, dan sebagainya. Jika melihat angka tersebut, kami yakin UMKM memiliki kemampuan *resilience* yang cukup tinggi. Pemerintah hanya perlu menggulirkan program yang konkret.

Berdasarkan survei tersebut, bantuan yang dianggap paling bermanfaat terutama untuk UMK adalah restrukturisasi kredit dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Ini tentunya sejalan dengan program PEN. Pemanfaatan bantuan nantinya terserah dari tiap-tiap UMK, bisa digunakan untuk survive atau mendorong produktivitasnya. Lalu, apakah UMK mengetahui adanya program restrukturisasi kredit dari pemerintah? Apakah UMK mengetahui adanya subsidi bunga memakai KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan non-KUR? Berdasarkan hasil survei, ternyata 82 persen dari mereka mengetahuinya. Jadi, UMK pinggir jalan jangan dianggap tidak memahami adanya BLT UMKM, BPUM (Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro), dan subsidi bunga. Mereka paham betul.

Jika melihat struktur program PEN, angka yang terbesar adalah subsidi bunga untuk UMKM, baik KUR maupun non-KUR, yaitu sebesar Rp42 triliun. Menurut survei, permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah kredit. Oleh karena itu, bantuan paling bermanfaat bagi mereka adalah restrukturisasi kredit dan berikutnya adalah BLT.

Pada era pandemi ini, yang agak menarik adalah masalah *global market*. Faktanya, kenaikan ekspor kita tinggi sekali, bahkan kenaikan ekspor bulan Mei 2021 menjadi yang tertinggi sepanjang beberapa tahun. Neraca perdagangan kita juga sudah tiga belas bulan surplus justru pada masa pandemi ini. Jadi, banyak hal terkait UMKM yang terus kita dorong dengan program-program yang konkret. Saya ingin masyarakat melihat bahwa pemerintah cukup serius

mendorong program UMKM. Untuk bantuan program UMKM maupun bantuan sosial (bansos), terkadang yang menjadi masalah adalah integritas data. Kami sangat memahami kondisi ini, terutama rekan-rekan di Kementerian Sosial. Bansos banyak yang berhenti karena masalah data. Dalam kebijakan UMKM, masalah data ini juga sangatlah penting.

Jadi, dengan adanya pandemi ini, hikmah positifnya adanya percepatan digitalisasi. Selain itu, kita menjadi sadar ternyata di tingkat nasional, integritas data penting sekali. Faktanya, banyak sekali kebijakan program yang terkendala karena masalah data. Uang sudah tersedia, APBN (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara) sudah dialokasikan, rakyatnya sudah sangat menunggu, tetapi karena kekhawatiran data, tidak bisa disalurkan. Itulah kira-kira arah dukungan program PEN terhadap UMKM.

SP: Terkait dengan bahasa yang berbeda di tingkat daerah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, bagaimana Kemenko Perekonomian merangkul Pemerintah Daerah (Pemda) agar memiliki bahasa yang sama?

SU: Dalam penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi, koordinasi melibatkan empat pilar pelaksana, yaitu Pemerintah Pusat, Pemda, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ini dilakukan karena situasinya cukup darurat. Terkait UMKM, kami memang tidak punya tangan secara vertikal ke daerah-daerah. Namun, sejak bulan

Februari 2021, hampir setiap satu minggu, kami selalu mengumpulkan rekan-rekan daerah (mulai dari Gubernur, Walikota, Bupati, Kepala Desa, Lurah, hingga Satgas) untuk membahas evaluasi penanganan Covid-19. Setiap dua minggu, kita juga melakukan evaluasi pelaksanaan PPKM mikro dan mengeluarkan Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) sebagai panduan/regulasi.

Dalam konteks UMKM, unit-unit di daerah, seperti Dinas UMKM atau Dinas Koperasi UMKM, berperan lebih aktif. Memang banyak kasus yang terjadi, seperti penyemprotan disinfektan pada produk makanan yang dijual UMKM di Purwokerto untuk “memaksa” agar tidak berjualan selama PPKM atau tukang bubur di Tasikmalaya yang didenda Rp5 juta karena masih berjualan selama PPKM. Barangkali dari sisi penanganan mungkin memang tidak tepat. Namun, memang tidak mudah mengoordinasikan semua rekan-rekan di Pemda. Kementerian Koperasi dan UMKM juga turun ke lapangan, terutama dengan adanya program BPUM. Kalau bicara berdasarkan kasuistis, saya kira akan ada banyak sekali catatan. Kita tidak bisa menggeneralisasi dari kasus-kasus tadi, yang lebih penting sebenarnya dari tingkat kebijakan. Kasus-kasus tersebut harus kita terjemahkan di dalam kebijakan.

Pemda sekarang juga “sangat tergantung” (kucuran dana Pemerintah Pusat) karena saat ini daerah juga kesulitan *cashflow*, PAD (Pendapatan Asli Daerah) mereka habis, tinggal 20–30 persen dari kondisi normal, *resources*-nya juga sedikit. Kita kemarin juga membuat kebijakan untuk TKDD (Transfer

ke Daerah dan Dana Desa) boleh ada yang di- *earmark* delapan persen, DBH (Dana Bagi Hasil) dan Dana Alokasi Umum (DAU) boleh digunakan untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan lain-lain. Hal itu mengisyaratkan *policy* Pemerintah Pusat yang memberikan ruang lebih kepada Pemda. Mestinya, Pemda lebih memahami kondisi masyarakatnya. Namun, ada juga sebagian Pemda yang “lebih kejam” (dalam praktiknya). Kasuistis ini memang kadang terjadi.

Hal-hal seperti itu memang tidak mudah, karena Pemerintah Pusat tidak bisa menjangkaunya. Jika melihat kebijakannya, Pemerintah Pusat banyak memberikan ruang untuk Pemda, mulai dari mengeksekusi sampai meng-enforce. Yang lebih rumit lagi masalah *enforcement*. Kalau membicarakan tatanan operasional di daerah, jumlah kasuistis luar biasa banyak.

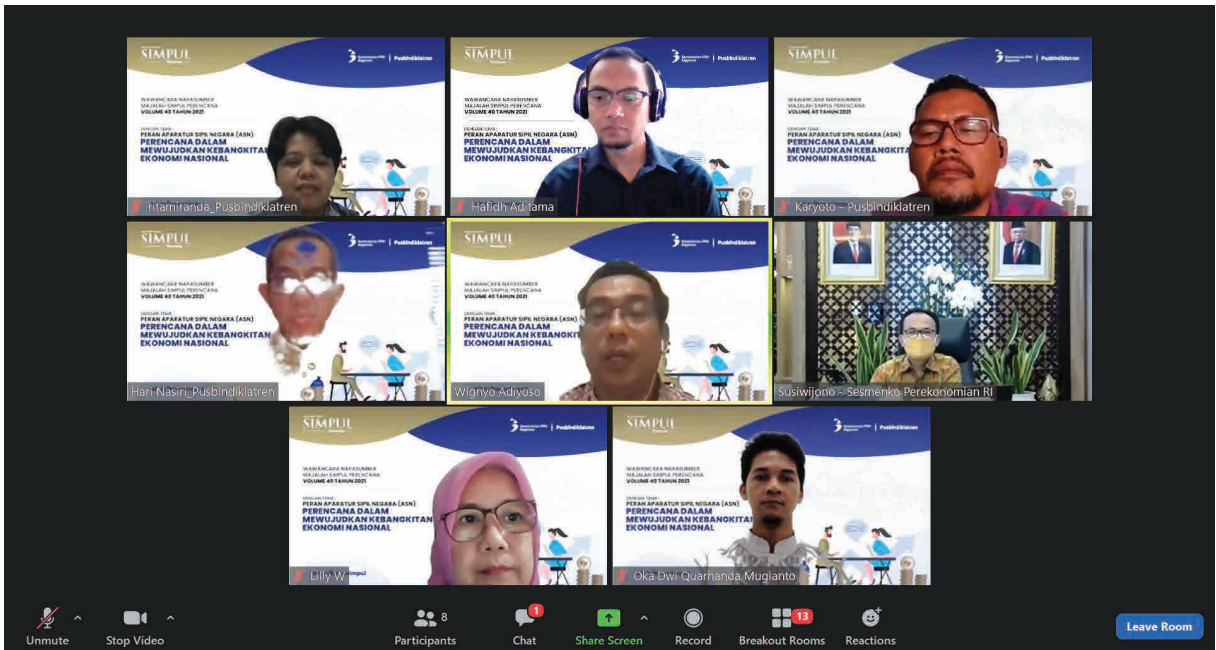
Karena sudah diberikan ruang lebih oleh Pemerintah Pusat, Pemda-lah yang seharusnya lebih empati, jika berbicara terkait pengenaan sanksi (kepada masyarakat yang melanggar PPKM). Saya sangat setuju dengan pemberian ruang lebih kepada Pemda dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di daerah. Namun, pada saat evaluasi, kami cukup kaget. Dua minggu lalu, masih ada 57 kabupaten/kota yang belum memberikan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)-nya untuk penanganan Covid-19.

SP: Bagaimana dengan program vaksinasi untuk para pengusaha nasional dan pekerjanya?

SU: Kami perlu meluruskan terkait dengan vaksinasi untuk pekerja. Vaksin pada prinsipnya gratis untuk masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat program vaksinasi. Namun, untuk mengikuti program tersebut, peserta harus mengantre. Vaksinasi ditargetkan kepada 181,5 juta orang, dengan kebutuhan 420 sekian juta vaksin yang di-supply secara bertahap. Bulan ini, ada banyak *supply* vaksin yang datang, kita sudah punya 78 juta dosis. Kita beruntung karena lebih cepat, dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia atau Korea.

Bagaimana dengan para pekerja industri. Waktu itu ada vaksin gotong royong. Vaksin ini “berbayar” untuk mempercepat pencapaian *herd immunity* (imunitas komunal). Munculnya vaksin gotong royong dikarenakan adanya sebagian masyarakat yang menganggap untuk menunggu vaksin gratis akan cukup lama. Desainnya, perusahaan yang akan membelikan vaksin untuk diberikan secara gratis kepada karyawannya. Faktanya, kedatangan vaksin gotong royong ini mencapai 2–4 juta. Namun, penyerapannya kecil sekali, sekitar 180–230 ribuan. Di sisi lain, banyak masyarakat yang butuh. Ini sebenarnya hanyalah opsi kepada masyarakat.

Pemerintah bukan ingin mencari untung dengan vaksin berbayar, karena harganya dipaskan dengan biaya prosesnya. Tujuannya sama, kita ingin mempercepat *herd immunity*. Pada saat pandemi seperti ini, *game changer* yang kita andalkan adalah vaksinasi. Ini bukan menjual vaksin. Ini adalah mempercepat vaksinasi. Mengapa harus berbayar? Karena ini di luar APBN.



Wawancara dengan SIMPUL secara daring

Selain pekerja, yang paling menunggu vaksin gotong royong adalah WNA (warga negara asing). Jika menunggu vaksin gratis, apakah ada skema untuk mereka mendapat vaksin gratis? Mereka tidak punya KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan tidak punya NIK (Nomor Induk Kependudukan). Mereka hopeless untuk dapat vaksin.

Bagi pekerja, prioritas adalah pada sektor-sektor padat karya yang menggerakkan ekspor. Sektor pariwisata juga kita utamakan. Pekerja sektor pariwisata di Bali, Batam, dan Bintan menjadi nomor satu. Mereka sudah enam puluh persen lebih yang divaksinasi.

SP: Dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah kita tetap membuka investasi asing?

SU: Investasi ini menjadi sangat penting. Kita tidak perlu mendikotomi asing dan non-asing secara tidak proporsional. Sekarang ini eranya ekonomi global. Tidak ada negara yang bisa hidup sendiri. Sekarang masalahnya tinggal membagi proporsinya untuk memberi ruang kepada produk kita sendiri. Kita sudah ada kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) ataupun P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri). Kementerian/lembaga juga diharuskan sekian persen menggunakan produk dalam negeri.

Berbicara mengenai investasi asing, komponen pertumbuhan kita 31 persen berasal dari investasi. PDB dan *growth* kita dari investasi. Menurut rekan-rekan Kemenko Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), harus

berusaha keras mendorong investasi masuk. Pemerintah tidak berhenti untuk menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi karena pandemi ini, investasi menjadi begitu penting karena bisa membuka lapangan kerja baru. Oleh karena itu, kami mendorong pelaksanaan aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kami juga mendorong sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Intinya, kita ingin menarik investasi di luar berbagai insentif fiskal yang kita berikan. Saya kira demikian. **(Tim Pewawancara: Wignyo Adiyoso, Rita Miranda, Hari Nasiri Mochtar, Lilly Widayati)** ■



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

DEPUTI BIDANG EKONOMI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

BANGKIT DARI *UNPRECEDENTED* SITUATION

Berbeda dengan krisis ekonomi sebelumnya, krisis ekonomi saat ini lebih disebabkan oleh krisis kesehatan. Upaya untuk bangkit dari krisis telah dilakukan, tetapi koordinasi dan kedisiplinan bersama juga perlu dikedepankan. Apa saja yang sudah direncanakan pemerintah terkait hal ini? Simak wawancara SIMPUL dengan Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D., Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, berikut ini.

SIMPUL (S): Maret 2020, kasus pertama Covid-19 terjadi di Indonesia. Kemudian pada Mei 2020, pemerintah mengeluarkan PP No. 23 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu dunia usaha. Kebijakan ini menjadi semacam *buffer* (bantalan) agar sektor ekonomi tidak terlalu terpukul akibat pandemi Covid-19. Bagaimana peran Kementerian PPN/Bappenas terkait program PEN tersebut, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauannya?

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI (A): Tahun 2020 merupakan *unprecedented situation*. Artinya situasi yang tidak seperti biasanya dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Mengapa? Karena krisis apapun yang terjadi

sebelum ini selalu diawali dengan krisis keuangan terlebih dahulu. Seperti krisis pada tahun 1998 yang dimulai dengan krisis nilai tukar yang terjadi di Thailand yang kemudian berimbas ke Indonesia. Tahun 2008 juga terjadi lagi krisis yang diawali di Amerika, yang kita kenal dengan *subprime mortgage*. Krisis ini kemudian berimbas ke Eropa. Namun, Indonesia cukup kuat ekonominya sehingga kita tidak terlalu terimbas pada saat itu. *Core of problem* krisis 1998 dan 2008 tersebut adalah krisis keuangan sehingga cara pemecahan untuk mengatasi krisis ekonomi itu adalah dengan menata atau membenahi sektor keuangan dan sisi perekonomian.

Lalu pada tahun 2020, ada *unprecedented situation*. Krisis ekonomi kembali terjadi. Seluruh

dunia terkontraksi. Ini bukan disebabkan masalah keuangan atau sektor finansial, tetapi karena adanya virus Covid-19, yang kita sebut krisis kesehatan. Jadi, krisis kesehatan berdampak pada keharusan kita membatasi mobilitas. Akhirnya mengurangi sisi permintaan perekonomian. Ketika mobilitas berkurang, permintaan dari masyarakat menurun. Begitu permintaan masyarakat menurun, terjadilah pelemahan ekonomi akibat industri atau sektor bisnis tidak memperoleh *order* sehingga tidak ada penjualan. Begitu tidak ada penjualan, sisi produksi terkena imbas. Produksi menurun, *sales* menurun. Akibat *sales* menurun maka harus dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai. Ini saya sebut *double hit* pada sisi permintaan. *Hit* pertama karena mobilitas dibatasi, sedangkan *hit* kedua karena pengurangan jam kerja atau PHK. Akibatnya, perekonomian pun terkontraksi.

Inilah yang harus kita cermati penyebabnya sehingga dikeluarkanlah Program PEN tersebut oleh pemerintah. Program tersebut untuk mengatasi terjadinya tekanan yang luar biasa dari sisi permintaan. Pada saat itu, situasinya sangat *emergency* dan mendesak. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melakukan inisiatif realokasi anggaran. Seperti biasa, kalau sudah tahun berjalan, bukan tahun perencanaan maka Kementerian PPN/Bappenas tidak dilibatkan. Proses perencanaan itu adalah merencanakan tahun perencanaan.

Program PEN sebenarnya hanya realokasi anggaran saja. Anggaran kesehatan dan anggaran sosial dialokasikan lebih besar dan dipertajam lagi program-programnya yang dikemas dalam Program PEN. Pemerintah juga

membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Di dalam KPC-PEN terdapat dua Satuan Tugas (Satgas), yaitu Satgas Penanganan Covid-19 (PC) dan Satgas PEN. Saya merupakan anggota Satgas PEN yang bertugas memonitor implementasi dari pelaksanaan program. Jadi, keterlibatan Kementerian PPN/Bappenas selama ini adalah menjadi anggota Satgas PEN.

”

Krisis ekonomi ini berawal dari krisis kesehatan. Jadi, kita harus menuntaskan *core of problem*-nya dulu (kesehatan), setelah itu, ekonomi akan mengikuti.

“

Saat ini, yang terus digaungkan atau dipertajam oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah dari sisi perencanaan. Pada tahun 2021, kami mempertajam program-program untuk mengatasi situasi dan kondisi yang terjadi akibat Covid-19. Perencanaan itulah yang menjadi kunci penting pada tahun 2021. Dengan masuknya Kementerian PPN/Bappenas, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 benar-benar tertuju pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Artinya, program pembangunan akan diarahkan sebagian untuk pemulihan ekonomi nasional dan sebagian lagi untuk reformasi sosial, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi penanganan bencana nonalam.

Jadi, program PEN adalah seluruh *spending* pemerintah yang dilakukan pada tahun 2021, baik untuk membantu pembelian vaksin, mempertajam bantuan sosial, maupun upaya untuk memfasilitasi industri domestik bergerak untuk memenuhi alat kesehatan, salah satunya kebutuhan oksigen. Secara tidak langsung, pemerintah menciptakan *demand* (permintaan) agar industri bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. PT Pertamina pun siap menyuplai, mengerahkan pabrik-pabrik kimianya untuk sebagian memproduksi oksigen. Begitu juga dengan pabrik pupuk. Apakah itu pemulihan ekonomi? Iya, dalam satu hal memenuhi kesehatan, satu hal untuk menjadikan industri domestik bergerak. Dalam situasi ini, di satu pihak terdapat tekanan, tetapi di pihak lain terdapat *opportunity* yang bisa dimanfaatkan dan dipenuhi oleh industri di dalam negeri.

S: Di masyarakat kadang-kadang ada yang membenturkan antara pemulihan ekonomi dengan pemulihan Covid-19. Apakah ini hanyalah masalah komunikasi ataukah masyarakat belum melihat hal tersebut?

A: Ini adalah masalah komunikasi. Saya ingin *share* bahwa tidak ada *trade off* antara kesehatan dan ekonomi. Saya termasuk penganut mazhab yang mengatakan bahwa (pertumbuhan) ekonomi akan mengikuti setelah penanganan Covid-19 tuntas. Jadi kita tidak boleh menabrakkan antara apakah kepentingan ekonomi ataukah kepentingan kesehatan yang didahulukan. Krisis ekonomi ini berawal dari krisis kesehatan. Jadi, kita harus menuntaskan *core of problem*-nya dulu (kesehatan), setelah itu, ekonomi akan mengikuti.

Jadi, saya kembali ingin menyampaikan bahwa tidak ada

trade off antara kesehatan dan ekonomi. Angus Deaton, seorang ekonom terkenal dunia dan peraih Nobel bidang ekonomi tahun 2015, mengatakan, “No *trade off between life and income, fewer death means more income.*” Kalau sedikit kematian berarti semakin banyak aset yang bisa dipertahankan sehingga *income* tetap bisa bertahan atau bahkan meningkat.

Berdasarkan data empiris (lihat Gambar 1), negara yang berhasil menangani Covid-19 dengan baik, akan mengalami pemulihan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Bahkan negara-negara yang mengalami tingkat kematian yang tinggi akibat Covid-19, akan mengalami penurunan pendapatan per kapita yang lebih besar, artinya tingkat kesejahteraan akan menurun. Inilah yang harus kita cegah. Kalau kita bisa segera menangani penularan Covid-19, ini akan sangat baik untuk proses *recovery*. Sebagai contoh China. *Lockdown* memang

mengakibatkan kontraksi ekonomi, tetapi proses *recovery* ekonominya akan cepat. Ekonomi China kini sudah tumbuh *double digit*, begitu pula Thailand dan Malaysia. Artinya, kalau kita semakin lama dan semakin tidak tegas dalam menangani Covid-19 dan mengendalikan mobilitas masyarakat, *uncertainty* akan semakin tinggi karena pemulihan ekonomi akan tidak maksimal. Saya menyebutnya risiko *W shape*, (pertumbuhan ekonomi) naik lalu turun lagi, karena ada kasus lagi akibat kita tidak disiplin. Saya inginnya *V Shape recovery*, (pertumbuhan ekonomi) naik dan terus akan naik, seperti yang terjadi di China.

Jadi, inilah yang harus kita bahasakan bersama-sama. Tidak boleh sekali-kali menabrakkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan. *Core of problem* krisis saat ini adalah berasal dari krisis kesehatan, artinya kita

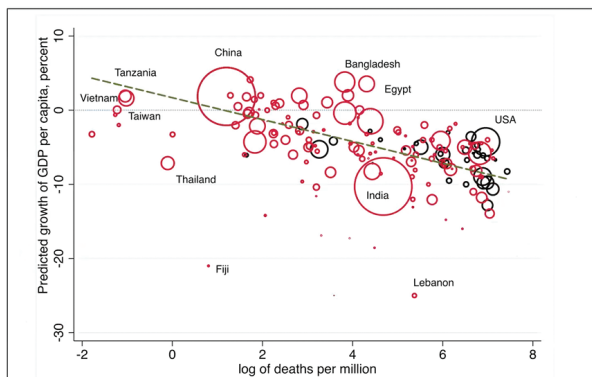
harus menuntaskan *core of problem*-nya dulu. *Economic recovery* akan betul-betul sangat pesat kalau bisa menuntaskan Covid-19. Saya termasuk orang yang sejak tahun lalu sangat mendorong untuk melakukan *lockdown*. Saya mendukung diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan secara tegas. Tidak ada jalan lagi, selain kita mengendalikan.

Kita juga perlu belajar dari Australia. Begitu ada kasus Covid-19, mereka langsung *tracing* dan isolasi sehingga kasus tersebut tidak pernah bergulir. Hal itu butuh ketegasan dan kedisiplinan dari masyarakat. Kita harus ke sana, tidak ada jalan lain. Kita harus disiplin dan membatasi mobilitas untuk betul-betul kita tuntas dalam menangani Covid-19 dan setelah itu, ekonomi akan segera *recovery* dengan lebih cepat lagi.



TIDAK ADA TRADE-OFF ANTARA KESEHATAN DAN EKONOMI

Negara yang berhasil menangani COVID-19, mengalami pemulihan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik



Sumber: Deaton (Januari, 2021), Covid-19 and Global Income Inequality

Negara-negara yang mengalami tingkat kematian yang tinggi akibat COVID-19, mengalami penurunan pendapatan per kapita yang lebih besar.

“...No trade-off between lives and income; fewer deaths means more income...”



Angus Deaton

Pemenang Nobel Bidang Ekonomi tahun 2015

Gambar 1. Tidak ada *trade off* antara kesehatan dan ekonomi

S: Saat ini merupakan masa *emergency*. Program PEN, mau tidak mau, mengalami *crash program* atau *crash policy*. Artinya, program PEN harus cepat dilaksanakan. Bagaimana koordinasi pemerintah terkait hal ini? Apa saja kendala dan tantangannya? Lalu, apa yang sudah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dalam hal implementasinya?

A: Kami sudah menghitung jika pengendalian Covid-19 ini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan selesai sebelum Juli 2021, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4,8% pada sepanjang tahun 2021. Namun, pengendalian Covid-19 ini ternyata belum tuntas karena saat libur lebaran, masyarakat betul-betul tidak disiplin dan memaksakan untuk mudik. Selain itu, muncul juga varian baru Covid-19, yaitu varian delta yang tingkat penularannya jauh lebih tinggi, sehingga pengendalian penyebaran virus Covid-19 memerlukan upaya ekstra keras. Dengan kemunculan varian delta dan pelaksanaan PPKM pada pertengahan tahun 2021 ini, tentunya proyeksi pertumbuhan ekonomi terkoreksi menjadi pada kisaran 3,5–4,3%.

Saya percaya bahwa program pemerintah itu harus kita ikuti. Kalau bukan kita yang mengikuti, siapa yang akan mengikuti program pemerintah ini. Kita harus tegas untuk menegakkan disiplin dan harus berkoordinasi dengan pihak lain untuk sama-sama menegakkan disiplin. Kita tidak kuat menjalankannya sendiri, karena begitu besa tekanannya.

Jika hal tersebut diangkat dalam skala yang lebih besar, misalnya Kementerian Kesehatan menerapkan suatu kebijakan,

tetapi kemudian kementerian lain yang terkait ekonomi mengatakan bahwa ekonomilah yang penting maka penerapan kebijakan ini tidak akan jalan. Kebijakan tersebut menjadi tidak *firm* dan tidak menjadi suatu hal yang solid yang diterima masyarakat. Masyarakat pun masih banyak yang berpandangan, “Bagaimana kami bisa sehat kalau kami tidak punya makanan dan tidak punya pendapatan?”

Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa sinyal yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus solid, tidak boleh ada sinyal lain. Artinya, untuk mencapai hal tersebut diperlukan komunikasi yang solid dari pemerintah dan kesamaan bahasa pada saat penyampaian ke masyarakat. Masyarakat itu sederhana. Mereka tidak pernah menganalisis, mereka hanya menangkap hal yang didengar, tanpa di-*digest*. Misalnya, pemerintah menganggap ekonomi lebih penting, kemudian masyarakat pun merasa dibolehkan untuk bekerja, membuka usaha, atau pergi ke kantor (pada saat pandemi) karena menangkap sinyal “ekonomi penting”. Berbeda jika pemerintah mengatakan kesehatan dan penanganan Covid-19 menjadi prioritas nomor satu. Mereka tentunya akan mengerucut pada sikap yang sama.

Jadi, kita semua belajar sejak tahun kemarin hingga titik ini. Titik terakhir adalah saat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak dipatuhi secara baik oleh masyarakat, seperti masih banyaknya pelaku mudik lebaran. Akibatnya, pemerintah dan masyarakat menanggung biaya yang sangat besar. Pemerintah belajar dari itu, untuk selanjutnya melakukan PPKM ketat, walaupun di beberapa daerah sudah terlanjur muncul persepsi bahwa mereka

harus makan, harus mencari biaya hidup, dan lain-lain. Ini biaya yang harus ditanggung pemerintah, karena memberikan sinyal yang kurang solid, gara-gara mengirimkan sinyal yang tidak kuat. Sinyal ini harus kita suarkan. Kesehatan adalah nomor satu, yaitu menahan penyebaran virus Covid-19. Koordinasi menjadi sangat penting dan sinyal bahasa harus kita samakan.

Bila kita tidak menangani Covid-19 dengan baik, kita tidak hanya harus membayar dampak jangka pendek, tetapi juga dampak jangka menengah dan jangka panjang, bahkan terus sampai anak-cucu kita karena biaya-biaya yang keluar akan terakumulasi. Ini yang harus kita cegah. Dengan demikian, kita harus benar-benar fokus pada penanganan Covid-19 ini.

S: Jadi sebenarnya secara kualitas, kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tidak ada masalah, hanya masalah komunikasi. Terkait kebijakan PPKM, jika memang nantinya berjalan efektif, apakah sudah ada hitung-hitungan lama waktu *recovery*-nya? Jika *recovery* berlangsung lama, bagaimana skenarionya?

A: Semakin cepat kita bisa mengendalikan penyebaran virus maka pertumbuhan ekonomi bisa semakin cepat. Semakin lambat kita mengendalikan virus maka pertumbuhan ekonomi pun berpotensi melambat. Mengapa? Jika penyebaran virus dituntaskan pada kuartal kedua maka konsumsi akan tumbuh pada kuartal tiga dan empat. Jika penyebaran virus tidak dikendalikan, apalagi sampai akhir tahun, tidak ada lagi yang bisa kita andalkan untuk pemulihan ekonomi. Konsumsi dan pertumbuhan ekonomi akan relatif terhambat.

Dengan adanya PPKM, berdasarkan *exercise* terbaru yang kami lakukan, pertumbuhan ekonomi sepertinya akan mencapai kisaran 4,3% jika kebijakan PPKM tersebut berhasil.

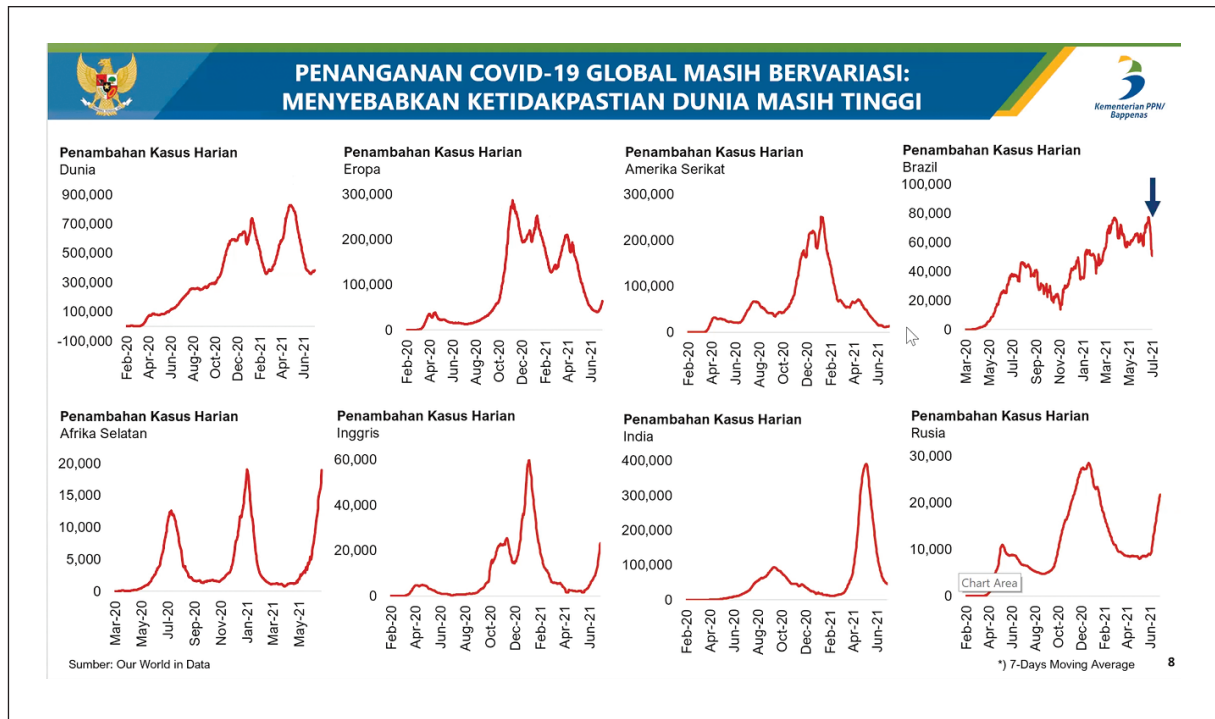
Dunia sedang dalam tren penurunan (lihat Gambar 2). Jumlah kasus Covid-19 di Eropa menurun, di Amerika Serikat juga sudah turun dan mendekati sangat terkendali. Kasus Covid-19 di Brasil mengalami kenaikan, tetapi sudah ada tren menurun. Adapun di India yang sempat naik tinggi dan hampir *chaos*, dengan vaksinasi yang masif, kini trennya mulai menurun. Sementara itu, tren kasus Covid-19 di Afrika Selatan dan Rusia sedang mengalami kenaikan. Demikian juga dengan Indonesia, kasus Covid-19 masih terus meningkat dan belum tahu kapan *peak*-nya. Ini yang harus diwaspadai bersama.

Kita harus sama-sama menyuarakan ke masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan selama PPKM, untuk membantu menurunkan tingkat kasus Covid-19 seperti negara-negara lain. Negara-negara yang sudah mampu menekan pertumbuhan kasus Covid-19 tersebut kini pertumbuhan ekonominya sudah kembali bergeliat naik sehingga *recovery*-nya cepat. Indonesia harus mengikuti hal yang sama. Jangan sampai kita terlambat lagi. Jangan sampai banyak korban berjatuh sehingga *cost* kita menjadi semakin besar.

S: Koordinasi antarpemerintah pusat sering kali mengalami kesulitan, apalagi di daerah. Bagaimana saran Ibu agar kebijakan yang sudah bagus juga akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya?

A: Yang paling utama, pimpinan daerah itu harus punya pemahaman yang sama. Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, sudah menyampaikan bahwa seluruh Gubernur, Walikota, dan Bupati, khususnya di Jawa-Bali, harus patuh terhadap kebijakan PPKM. Jika tidak patuh maka akan ada konsekuensi. Ini merupakan suatu kemajuan jika dibandingkan dengan pelaksanaan kebijakan PPKM sebelumnya. Ini yang harus kita jaga.

Saya merasa *public campaign* ini penting. Suarakan terus ke masyarakat. Sadarkan masyarakat, karena *level of education* masyarakat kita bervariasi. Tidak semua memahami bahwa hal ini penting untuk masa depan mereka dan anak-cucu mereka. Mereka hanya berpikir sangat jangka pendek (*short sighted*). Yang perlu digaungkan



Gambar 2. Fluktuasi kasus Covid-19 di berbagai negara

oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah pertama menyadarkan masyarakat untuk patuh dan disiplin (melaksanakan PPKM dan menjaga protokol kesehatan); kedua, segera salurkan bansosnya, jangan tertunda; ketiga, lakukan pendekatan-pendekatan inovatif.

Pendekatan inovatif misalnya dilakukan untuk pedagang UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) atau pedagang pasar yang berontak karena tidak bisa berjualan selama pandemi. Pemda harus mengedukasi dengan pasar *online*. Pemda menyiapkan *platform* pasar *online*, seperti halnya pasar *online* yang telah diterapkan di Malang. Apalagi ibu-ibu sekarang hampir semua memiliki ponsel. Dengan demikian, pedagang dan pembeli akan sama-sama senang. Jadi, pendekatan inovatif dan kreatif Pemda itu sangat diperlukan. Masyarakat harus difasilitasi dan diberikan *way out* sehingga mereka tetap bisa berusaha dan *survive*, tetapi tidak membahayakan (terhadap penyebaran Covid-19).

S: Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan beberapa skenario pertumbuhan ekonomi dalam pelaksanaan program PEN dan kebijakan PPKM. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2021 ini, bagaimana sebenarnya kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia?

A: Saya melihat pada kuartal kedua tahun 2021, perekonomian Indonesia akan mengalami pertumbuhan positif *year on year*. Hal tersebut dikarenakan adanya *base effect* yang terjadi pada kuartal kedua tahun 2020, dengan pertumbuhan sekitar *-5% year on year*. Artinya, pada kuartal kedua tahun 2020, ekonomi kita memang benar-benar berkontraksi.

Pada kuartal kedua tahun 2021, sebelum puncak kenaikan kasus

Covid-19, selama pertengahan bulan April–Juni 2021, terjadi proses *recovery*. Saya melihat kuartal kedua 2021 ini akan positif. Namun, pertumbuhan ekonomi pada kuartal satu masih negatif, tepatnya *-2,07%*. Nah, sepanjang tahun ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai akibat kita tidak bisa mengendalikan Covid-19 dengan baik, perekonomian pada kuartal ketiga akan berkontraksi sehingga grafiknya menjadi *W-Shape*. Yang kita inginkan adalah *Swoosh Shape Recovery* (lihat Gambar 3).

”
Second round pandemi yang kita alami ini betul-betul harus menjadi perhatian bersama, agar jangan sampai terjadi W-Shape dalam pemulihan ekonominya.
 “

Jika terjadi *W-Shape*, ongkos ekonominya terlalu besar. Nanti kita harus mengurangi biaya infrastruktur dan kita mengalokasikannya untuk pengobatan, tentu saja jumlahnya tidak sedikit, bisa mencapai triliunan yang kita gelontorkan. Belum lagi nanti tingkat produktivitas manusianya menurun akibat sakit. Itu *cost* yang akan kita tanggung dalam jangka pendek dan menengah, karena butuh *recovery*. Belum lagi manusia-manusia unggulan banyak yang meninggal dunia, padahal mereka merupakan aset kita. Pada akhirnya, produktivitas pun menurun.

Biaya produktivitas jangka panjang itu yang harus kita perhatikan.

Jangan melihat penanganan Covid-19 ini untuk jangka pendek. Kita lihat penanganan Covid-19 yang masif, utuh, dan terpadu, untuk keuntungan jangka menengah dan panjang sehingga kita bisa memastikan, bisa produktif, dan bisa tumbuh. Kita bisa *recover* ekonomi dengan cepat. Kita menginginkan *Swoosh Shape Recovery* dan harus mencegah *W-Shape*. *Second round* pandemi yang kita alami ini betul-betul harus menjadi perhatian bersama, agar jangan sampai terjadi *W-Shape* dalam pemulihan ekonominya.

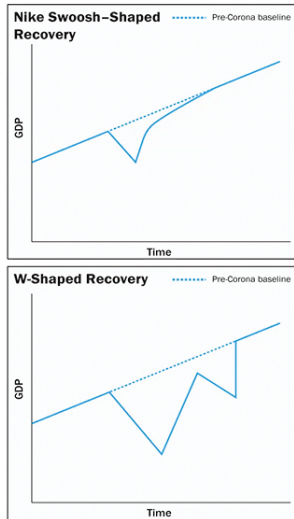
S: Dalam suasana seperti saat ini yang agak “*chaotic*”, program-program yang dijalankan pemerintah banyak dimanfaatkan pihak tertentu sehingga menimbulkan *moral hazard* atau tindakan melawan hukum. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar penggunaan dana triliunan untuk program PEN tetap *on the track* dan tidak terjadi *moral hazard*?

A: Saya melihat transparansi penggunaan dana PEN saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya, *governance*-nya juga sangat lebih baik, karena pemerintah sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Implementasinya pun sekarang sudah cukup baik. Kalau kita melihat realisasi terakhir dari penggunaan dana PEN (lihat Gambar 4), per semester satu 2021, anggaran PC-PEN sudah terealisasi Rp252,3 triliun atau sebesar 36,1% dari pagu-nya. Untuk klaster kesehatan sudah terealisasi 25,7%, perlindungan sosial sudah terealisasi 44,56%, UMKM sudah terealisasi 28,73%, insentif usaha sudah terealisasi 71,73%, dan program prioritas sudah terealisasi 33,99%.

Jadi, dana yang masih tersisa tinggal kita dorong realisasinya



Pola Pemulihan Ekonomi berbentuk Nike-Swoosh Recovery



Sumber: WEF dan Brookings (2020)

World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa kemungkinan besar pola Pemulihan ekonomi global paska COVID-19 mengikuti bentuk *Nike-Swoosh*, dimana akan dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk kembali pada level sebelum krisis

Pola pemulihan ekonomi Indonesia kemungkinan juga akan mengikuti pola *Nike Swoosh*, dengan catatan: (i) penanganan COVID-19 perlu dilakukan dengan kerja keras; dan (ii) program Pemulihan ekonomi nasional dilakukan secara konsisten di pusat dan di daerah

Yang perlu dicegah adalah jangan sampai pola Pemulihan mengikuti bentuk huruf “W”, dimana kondisi ini terjadi jika adanya penyebaran virus kembali (*second round pandemic*), yang menyebabkan ekonomi kembali terkontraksi

Gambar 3. Perbandingan Swoosh Shape Recovery dan W-Shape Recovery



Perkembangan Realisasi Anggaran PC-PEN 2021

Hingga Semester 1 2021, Realisasi anggaran PC-PEN mencapai Rp252,3 Triliun atau sebesar 36,1% pagu..

No	Klaster	Rp Triliun				% Realisasi 2021
		Realisasi Sementara 2020	Alokasi Awal 2021	Alokasi Perubahan setelah PPKM 2021	Realisasi s.d. 30 Juni 2021	
1	Kesehatan	63,51	172,84	185,98	47,71	25,65%
2	Perlindungan Sosial	220,39	148,27	149,08	66,43	44,56%
3	Dukungan UMKM dan Korporasi	173,17	193,74	178,47	51,27	28,73%
4	Insentif Usaha	56,12	56,73	62,83	45,07	71,73%
5	Program Prioritas	66,59	127,85	123,08	41,83	33,99%
Total		579,78	699,44	699,44	252,31	36,07%

Sumber: Kemenkeu, status 30 Juni 2021, diolah

1. Tambahan anggaran Kesehatan sebesar Rp13,01 T untuk percepatan pembayaran klaim perawatan pasien, insentif nakes, vaksinasi, dan penanganan kesehatan di daerah.
2. Percepatan pencairan PKH Triwulan bagi 9,9 juta KPM dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp7,1 T.
3. Pemenuhan target awal 18,8 juta KPM dan percepatan pencairan Kartu Sembako pada awal Juli 2021, dengan indeks bantuan Rp200 ribu per bulan.
4. Perpanjangan Bansos Tunai (BST) dengan tambahan anggaran Rp6,1 T, diberikan kepada 10 juta KPM non-Program Sembako dan Non PKH, dengan indeks bantuan Rp300 ribu per bulan.
5. Perpanjangan diskon listrik 50% bagi 450VA dan 25% bagi 900VA dan diberikan kepada 32,6 juta pelanggan (tambahan anggaran Rp1,91)
6. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) meningkat untuk 3 juta penerima baru dengan indeks bantuan Rp1,2 juta, dibutuhkan tambahan anggaran Rp3,6 T.
7. Tambahan 2,8 juta Kartu Pra Kerja, dengan indeks manfaat pelatihan Rp1 juta, insentif pelatihan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei Rp150 ribu, dibutuhkan anggaran Rp10 T.

Gambar 4. Perkembangan realisasi anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2021

agar segera cair pada semester dua 2021. Kami berharap pada semester dua inilah *timing* untuk menggenjot realisasi program PEN yang sudah dialokasikan, terutama untuk klaster kesehatan dan perlindungan sosial yang masih lebih dari 50%.

S: Selama ini UMKM selalu menjadi andalan pada saat krisis. Hal itu dikarenakan UMKM memiliki jumlah yang besar dan aset yang kecil sehingga *resilience*. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini?

A: Saat terjadi krisis ekonomi 1998, UMKM *resilience* dan bisa menjadi bantalan saat terjadi krisis. Namun, saya ingin mengubah *mindset*, bahwa *core of problem* dari krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini bukanlah dari krisis keuangan. Saat ini, *core of problem*-nya adalah krisis kesehatan. Jadi, UMKM terimbas karena masyarakat terinfeksi Covid-19, sedangkan penanganannya adalah dengan

pembatasan mobilitas. Dengan demikian, orang-orang tidak bisa belanja, UMKM-lah yang terdesak. *Mindset* itulah yang perlu kami ubah.

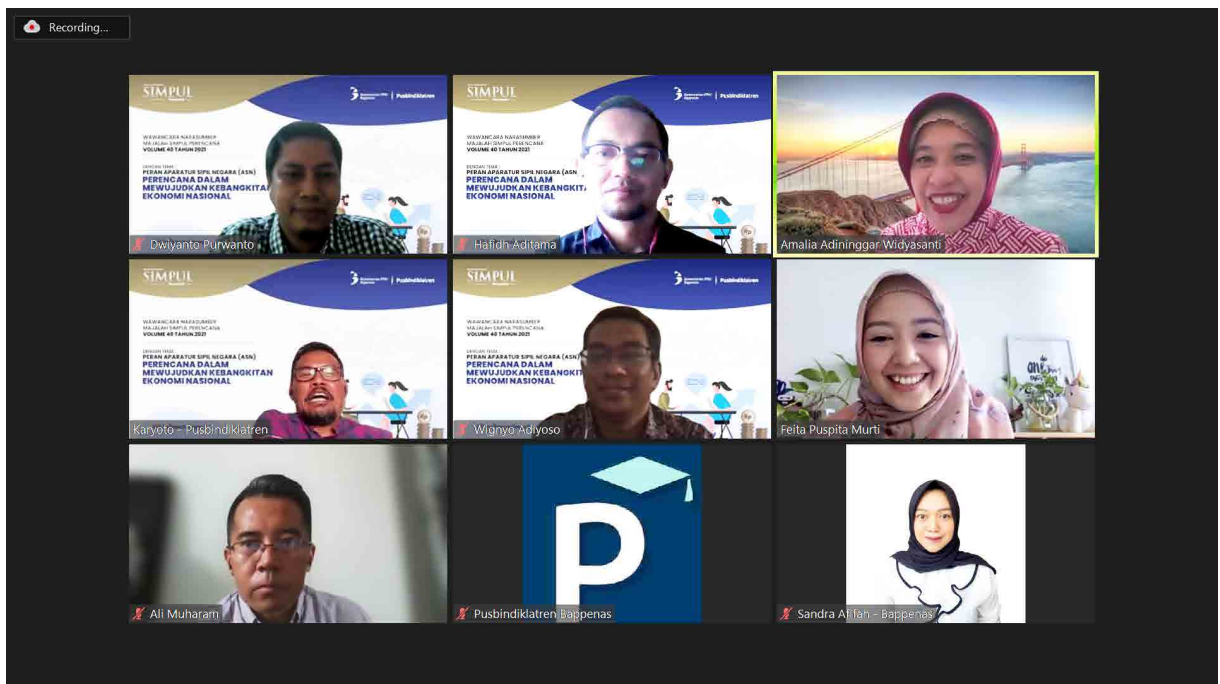
Pada tahun 1998, krisis ekonomi kita berasal dari krisis nilai tukar yang mengakibatkan rupiah terdepresiasi menjadi Rp16 ribu dalam enam bulan. Mengapa pada tahun 1998, UMKM bisa *resilience*? Hal itu terjadi karena UMKM tidak terpengaruh nilai tukar rupiah, karena UMKM tidak mengekspor produknya. Mereka lebih menguasai pasar domestik. *Exposure* UMKM kepada nilai tukar dan kepada perbankan relatif sedikit sehingga UMKM bisa *resilience*.

Jadi, saat ini, UMKM bukannya *resilience* karena kita jadikan bantalan (untuk pertumbuhan ekonomi), tetapi justru UMKM ini sekarang terdampak pandemi akibat tekanan dari sisi permintaan.

Intervensi yang kami lakukan untuk mendukung UMKM adalah memberikan suntikan (dana) agar mereka bisa *survive* atau membantu agar mereka bisa melakukan diversifikasi usaha: yang tadinya berjualan secara fisik, sekarang berjualan *online*; yang sebelumnya memproduksi baju, sekarang memproduksi masker kain atau baju APD (alat pelindung diri). Intinya beradaptasi dengan kebutuhan.

Krisis saat ini berbeda kondisinya dengan krisis 1998. Paradigma ini yang harus kita ubah agar tidak terjadi *mispersepsi*. Jangan sekali-kali merefleksikan dengan krisis sebelumnya, karena kondisinya berbeda. Krisis sekarang ini *unprecedented situation*.

(Tim Pewawancara: Wignyo Adiyoso, Ali Muharam, Feita Puspita Murti) ■



Gambar 5. Wawancara dengan SIMPUL secara daring



DIDIK J. RACHBINI

REKTOR UNIVERSITAS PARAMADINA/
PENGAMAT EKONOMI

MELURUSKAN KEMBALI KEBIJAKAN PC-PEN

Tidak semua kebijakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) dari pemerintah berjalan efektif. Dalam wawancara dengan **SIMPUL**, Rektor Universitas Paramadina sekaligus pengamat ekonomi, Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D. mengoreksi beberapa kelemahannya. Koreksi ini menjadi masukan bagi pemerintah agar implementasi kebijakan menjadi lebih konkret dan optimal.

SIMPUL (S): Bagaimana pendapat Bapak mengenai peran Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini?

DIDIK J. RACHBINI (D): Saya mengamati bahwa ASN berwajah *mix*, bercampur dua sinyal. Ada sinyal wajah yang baik/bagus dan ada sinyal wajah yang kurang bagus. Yang bagus, sudah mulai banyak pemerintahan melakukan seleksi yang baik terhadap pegawai-pegawainya. Saya melihat ada dua kementerian/lembaga yang sangat bagus, di antaranya adalah Bank Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri. Berikutnya, saya melihat Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas yang juga cukup bagus. Kementerian/ Lembaga lain banyak yang kacau dalam rekrutmen pegawainya,

terutama di daerah-daerah yang masih terjadi praktik nepotisme, kompetensi pegawai yang tidak sesuai standar, dan sebagainya. Yang bagus diteruskan, yang buruk harus distandardisasi.

Dalam sejarah, ASN di negara kita pernah memiliki prestasi hebat yang tidak pernah dimiliki oleh ASN negara-negara manapun. Prestasi yang pertama adalah keberhasilan program Keluarga Berencana yang merupakan gabungan antara kepemimpinan dan edukasi. Wujud prestasinya adalah menurunkan tingkat kelahiran penduduk di bawah dua persen pada saat income kita US\$1.000 atau di bawahnya. Ketika itu, Filipina *income*-nya sudah US\$3.000–4.000, tetapi pertumbuhan penduduknya

di atas dua persen, karena gereja setempat tidak menyetujui (program penurunan tingkat kelahiran). Program Keluarga Berencana di Indonesia dikutip atau dipelajari di seluruh dunia sebagai satu keberhasilan yang luar biasa. Hal itu tidak lain karena kepemimpinan dan peran ASN serta ulama. Ini yang harus dilanjutkan.

Prestasi ASN kita yang kedua adalah keberhasilan program Swasembada Pangan. Swasembada Pangan ini melibatkan penyuluh dari Kementerian Pertanian, melibatkan tenaga irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan melibatkan kredit dari Kementerian Keuangan. Program Swasembada Pangan kala itu dipuji oleh lembaga dunia, yaitu FAO (Food and Agriculture Organization). Tidak ada negara di muka bumi ini yang berhasil mencapai swasembada pangan dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,3 hektare per orang. Itu prestasi yang luar biasa.

Jadi, ASN punya dua wajah, wajah terang dan wajah gelap. Yang terang harus dikembangkan terus, diperbaiki, dan dijadikan model yang bagus. Yang gelap, seperti sogok-menyogok, harus dihilangkan, mulai level pusat hingga daerah, mulai level atas hingga bawah.

S: Menurut pengamatan Bapak, dengan kondisi ASN sekarang dan kondisi pandemi seperti saat ini, berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan agar perekonomian nasional bisa pulih lagi?

D: Jadi begini, ASN itu tergantung pemimpinnya. Pemimpin ASN adalah Presiden, Gubernur,

ditambah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Merekalah yang membuat kebijakan.

”

...kalau krisis saat ini ditangani dengan baik, dalam waktu 3–4 tahun (dengan syarat Covid-19 sudah tertangani), pemulihan ekonomi bisa dilakukan.

“

Jika melihat krisis tahun 1982, dengan adanya kebijakan pemerintah, krisis selesai dalam waktu dua tahun. Pada saat krisis tahun 1998, perlu waktu 3–4 tahun untuk krisis selesai. Pada masa Presiden B.J. Habibie (1998–1999), pertumbuhan ekonomi sudah negatif. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001), pertumbuhan ekonomi baru mencapai 1–2%. Setelah itu, pada akhir pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004), kenaikan pertumbuhan ekonomi mulai terlihat. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), pertumbuhan ekonomi kita sudah pulih sama sekali, hingga mencapai 6,5%.

Jadi, menurut saya, kalau krisis saat ini ditangani dengan baik, dalam waktu 3–4 tahun (dengan syarat Covid-19 sudah tertangani), pemulihan ekonomi bisa dilakukan.

Namun, jika Covid-19 tidak berhasil ditangani maka akan diperlukan waktu yang lebih lama lagi. Apalagi kita tidak punya pengalaman dengan penyakit yang luar biasa ini sehingga tidak ada pemulihan ekonomi tanpa membereskan pandemi terlebih dahulu.

S: Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini?

D: Rekan-rekan saya di LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) pernah melakukan *content analysis*. Jadi, berdasarkan riset-riset yang sudah ada, terdapat dua hal penting untuk kesuksesan mengatasi pandemi, yaitu *leadership* dan komunikasi. Saat ini, *leadership* Presiden Joko Widodo sudah terbukti membangun infrastruktur, tetapi belum tentu berhasil ketika mengurus permasalahan sosial. Itu harus dibuktikan sekarang. Terkait komunikasi, LP3ES juga sudah melakukan riset. Tercatat, ada 37 statement dari pemimpin kita terkait Covid-19 yang blunder sehingga membingungkan rakyat. Komunikasi pemerintah pada saat pandemi seperti ini harus diperbaiki. Jadi, pemulihan ekonomi ini tergantung cara menangani Covid-19, yang hingga saat ini, relatif masih belum terkendali. Jika Covid-19 terkendali maka pemulihan ekonomi akan menjadi lebih cepat.

S: Menurut Bapak, apakah konsep Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat ini sudah sesuai? Bagaimana kebijakan PEN bisa berhasil dalam pelaksanaannya?

D: Pada tahun 2019, pemerintah dan DPR merencanakan anggaran untuk menambal defisit sekitar Rp625 triliun. Namun, anggaran dinaikkan menjadi Rp1.226 triliun karena pandemi Covid-19. Selain untuk menambal defisit, anggaran tersebut juga untuk membayar utang pokok dan bunga. Sisa anggaran dialokasikan untuk program lain, seperti PEN.

Anggaran PEN sebesar Rp700 triliun. Namun, anggaran PEN tersebut tidak banyak masuk ke dalam anggaran pemulihan Covid-19. Mengapa? Karena banyak sekali “pelobi” yang menggenjot APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), agar kredit semakin banyak. Dengan alasan darurat, seluruh keputusan untuk APBN sampai tahun 2022 nanti ada di tangan pemerintah, bukan di DPR. Jadi, sekarang DPR tidak punya hak budget. Sebenarnya itu melanggar UUD, tapi dengan alasan darurat maka ini dihilangkan.

Berikutnya saya menyoroti kebijakan pemulihan ekonomi dengan UU (Undang-Undang) Cipta Kerja yang setebal seribu lebih halaman. Kebijakan itu sebenarnya hanyalah kebijakan akrobat kertas saja. Keberhasilan pemulihan ekonomi kita dari krisis tahun 1982 tidak melalui pengobrak-abrikan UU. Padahal pada saat itu, ekonomi kita terjerambap mendekati 0 persen akibat harga minyak jatuh di angka US\$5-7. Para ekonom kemudian melakukan reformasi, deregulasi, debirokratisasi. Hasilnya, tahun 1980–1990-an sebelum krisis 1998, ekonominya kita tumbuh rata-rata 7,1 persen, tanpa kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan tanpa perlu merombak 70 undang-undang.

Apa yang dilakukan tahun 1982? Pertama, pemerintah membereskan birokrasi yang gelap dengan tujuan untuk menutup kekurangan devisa dan dana. Caranya dengan mendorong semua perusahaan direformasi dan dideregulasi. Kedua, pemerintah membereskan hambatan ekspor, yaitu di bea cukai. Kinerja bea cukai di lapangan diperbaiki. Untuk mendorong ekspor, pemerintah memberikan kredit ekspor. Supaya pemasarannya ke luar negeri lebih bagus, seluruh duta besar ditugaskan untuk “berjualan” produk Indonesia di negara yang ditempati. Itu saja, tidak memakai akrobat seribu halaman UU Cipta Kerja.

Menurut saya, pemerintah salah langkah. Membereskan UU itu bagus, tetapi membereskan masalah di lapangan itu lebih penting. Saat ini, energi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/ Bappenas hanya tercurah untuk berdebat membahas kebijakan di atas kertas, bukan membahas eksekusi di lapangan. Saya sudah mengingatkan terkait hal ini melalui KADIN (Kamar Dagang Indonesia). Namun, arus yang sudah terlanjur kencang tersebut, sudah tidak bisa lagi dibendung.

Walaupun anggaran untuk program PEN banyak, sebenarnya sedikit yang diarahkan untuk penanganan Covid-19 sehingga saat ini terjadi kekurangan oksigen maupun rumah sakit (yang menangani pasien Covid-19) tidak dibayar pemerintah. Jadi, program PEN harus dikoreksi, buktinya kasus Covid-19 terus meningkat hingga mencapai 30 ribu orang saat ini, bahkan angka di lapangan mencapai 100 ribu orang, 3–4 kali lipat lebih besar. Program PEN sejauh ini tidak berhasil

mengatasi Covid-19. Ironisnya, para pemimpin justru saling “berkelahi”, saling tarik-menarik. Perkelahian politik seperti itu sebenarnya tidak perlu pada masa krisis ini.

Jadi, masalahnya ada pada masalah *leadership*, komunikasi, dan koordinasi. Alokasi dana PEN untuk kesehatan tidaklah besar karena justru ditarik ke sana ke mari. Pada akhir tahun 2020, seluruh kementerian sibuk menghabiskan anggaran. Anggaran tersebut tidak dilarikan untuk penanganan kesehatan, tetapi justru digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan di hotel-hotel (dengan dalih pemulihan ekonomi masyarakat). Apabila Covid-19 ini tidak diselesaikan terlebih dahulu maka uang yang dikucurkan tersebut seperti air yang mengalir ke ember bocor. Kita bisa mencontoh negara Australia, New Zealand, Jepang, Jerman, maupun Amerika Serikat yang telah berhasil mengatasi Covid-19 sehingga perekonomiannya kembali tumbuh.

S: Bila melihat kondisi yang sudah seperti ini, menurut Bapak, bagaimana rekomendasi atau usulan Bapak bagi pemerintah agar Covid-19 ini bisa ditangani dan ekonomi juga kembali pulih?

D: Pertama, segera lakukan vaksinasi secara maksimal di seluruh Indonesia dengan secepat-cepatnya. Dengan vaksinasi yang bagus maka ketahanan imunitas masyarakat dan tenaga medis akan lebih kuat.

Kedua, tingkatkan kapasitas rumah sakit. Namun, jika kapasitas rumah sakit sudah ditingkatkan, biaya perawatan pasien Covid-19 jangan lupa dibayar. Sarana-sarana di rumah sakit juga perlu ditingkatkan, salah satunya oksigen.



”
 Apabila Covid-19 ini tidak diselesaikan terlebih dahulu maka uang yang dikucurkan tersebut seperti air yang mengalir ke ember bocor.
 “

Ketiga, tidak boleh main-main dengan “pintu dari luar” (kedatangan orang dari luar negeri). Saat ini, kritikan sudah muncul di mana-mana terkait kedatangan ribuan TKA (tenaga kerja asing) China yang diperbolehkan masuk Indonesia dengan alasan investasi. Kalau mereka diperbolehkan masuk dan rakyat kita diusir-usir (terkait kebijakan PPKM), rakyat kita tidak akan tunduk kepada pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus berkorban untuk membuang dahulu investasi asing dan TIDAK seharusnya memasukkan TKA China demi alasan investasi.

Keempat, perbaiki birokrasi. Kepemimpinan harus berjalan sesuai dengan urutan/komandonya. Program Swasembada Pangan dan Keluarga Berencana merupakan contoh keberhasilan birokrasi pada masanya. Saat ini, birokrasi diam di tempatnya masing-masing. Tentara

dan birokrat harus diberdayakan melakukan kegiatan kolektif untuk menyediakan *shelter*. Sekolah yang kosong dijadikan tempat isolasi, kalau perlu Gedung DPR dijadikan tempat isolasi saja. Dengan gerakan kolektif ini maka pemulihan bisa lebih cepat. Sekarang yang terjadi adalah pemerintah ragu-ragu. Kita berbangga ekonomi masih berjalan, padahal Covid-19 juga masih merajalela.

Yang terakhir, buat sistem infrastruktur daring untuk meminimalkan orang-orang bertemu dan bersentuhan. Pemerintah harus membuat revolusi (digital), gratiskan kepada masyarakat, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan secara daring baik komunikasi, transaksi/berjualan, maupun sekolah.

Dengan upaya-upaya yang kuat tersebut, saya yakin kita bisa bangkit

dari pandemi dan krisis ini. Ini bergantung pada kepatuhan rakyat. Kepatuhan rakyat bergantung pada kepemimpinan. Birokrasi kita diisi orang-orang pintar dan hebat. Birokrasi merupakan tempatnya sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, mereka juga harus diberdayakan untuk mengatasi pandemi dan memulihkan perekonomian. Dan yang paling penting, utamakan anggaran untuk kesehatan terlebih dahulu.

S: Ada beberapa daerah di Indonesia yang cukup berhasil menangani Covid-19. Ini terlihat dari menurunnya jumlah kasus positif dan kestabilan ekonominya. Apakah ini terkait dengan birokrasi di daerah tersebut yang cukup baik dan patut dicontoh daerah lain?

D: Peran Pemerintah Daerah sangatlah penting untuk mengendalikan Covid-19. Namun, suatu daerah tentunya tidak bisa mengisolasi wilayahnya sendiri tanpa persetujuan dari Pemerintah Pusat. Yang menjadi masalah saat ini adalah *leadership* dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum beres. Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bagus. Lupakan dahulu perbedaan politik. Ini krisis kesehatan. Jadi, menurut saya, dalam penanganan pandemi di Indonesia tidak bisa dipisahkan antara pusat dan daerah.

Secara umum, tingkat kasus Covid-19 di beberapa daerah di Pulau Jawa relatif berat. Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur masih masuk zona merah. Satu-satunya cara adalah dengan memperluas jangkauan vaksinasi secara maksimal. Ada contoh di Brasil. Di sana, vaksinasi di satu daerah sudah mencapai 70 persen sehingga angka kematiannya sangat berkurang. Meskipun banyak dikritik terkait efektivitasnya, menurut saya, dampak dari vaksinasi akan bagus karena teknologi vaksin sudah berkembang sejak satu abad lalu. Vaksin Sinovac yang dikatakan efektivitasnya hanya 65 persen, sebenarnya tidak masalah untuk digunakan, daripada tidak sama sekali.

S: Bangsa Indonesia memiliki modal sosial yang mungkin bisa mendukung penanganan Covid-19. Bisakah modal sosial ini dimanfaatkan?

D: Modal sosial itu sangat penting. Di daerah tertentu, hal itu sebenarnya bisa berjalan sangat

efektif, contohnya di Yogyakarta. Modal sosial di Yogyakarta itu besar. Kota tersebut memiliki warisan nilai-nilai Jawa dan memiliki Sultan yang dekat dengan rakyatnya. Pada waktu bencana gempa bumi, masyarakat Yogyakarta bisa memulihkan diri dalam sekejap. Rumah-rumah yang rusak/rubuh dapat diselesaikan dengan sangat cepat dengan gotong royong. Jauh lebih baik dibandingkan dengan Aceh yang diguyur dana sangat banyak. Namun, Yogyakarta sekarang lumpuh, tidak bisa bekerja, karena tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat. Oksigen saja tidak dikasih sehingga puluhan orang di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito tidak mendapatkan oksigen. Yogyakarta yang modal sosialnya kuat saja bisa lumpuh karena tidak ada dukungan Pemerintah Pusat. Kalau tidak didukung pemerintah, modal sosial pun akan menjadi nol.

Modal sosial Bali juga sangat kuat. Keamanan di Bali jauh lebih hebat daripada di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Di Jabodetabek, angka kriminalitas tinggi, sedangkan di Bali tidak ada. Namun, jika semua itu tidak didukung sarana dan prasarana pemerintah maka akan percuma. Modal sosial itu berperan penting dan harus dijadikan rujukan pemerintah. Di sisi lain, pemimpinnya juga harus mengerti, memimpin juga membutuhkan kecerdasan.

S: Terkait keadaan sekarang, bagaimana posisi UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) untuk kebangkitan ekonomi nasional?

D: UMKM merupakan sektor paling terkena dampak pandemi

karena bisnis yang dijalankan bisa langsung berhenti. Apa yang harus dilakukan? Pertama, selamatkan dulu keluarganya. Caranya adalah dengan memberikan dukungan beras dan kesehatan. Alokasi APBN senilai Rp3.000 triliun mencukupi untuk hal itu. Kedua, UMKM harus dibantu dengan infrastruktur digital. Mereka perlu dibantu untuk bisa menjual secara daring, minimal melalui Whatsapp. Saat ini, sudah sangat banyak UMKM yang memanfaatkan sarana tersebut.

Sarana prasarana daring sangat dibutuhkan selama pandemi Covid-19. Jadi, itu seperti Hukum Schrumpeter yang menyatakan bahwa kalau ada teknologi baru maka teknologi lama akan hancur. Namun, yang terjadi sekarang justru proses produksi dan dagangan UMKM hancur sebelum ada teknologi baru. Oleh karena itu, teknologi baru harus dibuat sebanyak-banyaknya untuk menggantikan yang lama yang hancur. Dan itu bisa. Pemerintah harus lebih banyak memberikan fasilitas daring dalam format *e-commerce*.

Saya juga perlu menyoroti beberapa *marketplace* daring yang berkembang saat ini, seperti Tokopedia atau Bukalapak. *Marketplace* tersebut sembilan puluh persen lebih banyak menjual barang impor. Hal ini akan memberhancurkan UMKM. Kementerian PPN/Bappenas harus berani menyuarakan bahwa hal ini tidak boleh terjadi karena akan menghancurkan UMKM.

S: Kami dari Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas untuk mendidik dan

melatih para perencana. Apa kira-kira yang perlu kami lakukan untuk menyelamatkan UMKM pada era *marketplace* ini?

D: Kementerian PPN/Bappenas dapat membuat sebuah strategi, mungkin bisa bekerja sama dengan rekan-rekan dari universitas di Indonesia. Teliti satu per satu, mana saja produk-produk impor yang masuk terlalu banyak sehingga menghancurkan UMKM kita. Produk impor yang tidak mengikuti SNI (Standar Nasional Indonesia) bisa dihentikan/dilarang peredarannya. Melalui penelitian tersebut, Kementerian PPN/Bappenas nantinya memiliki *machine learning* untuk mendeteksi arus barang tanpa memerlukan banyak dana dalam rangka melindungi UMKM kita.

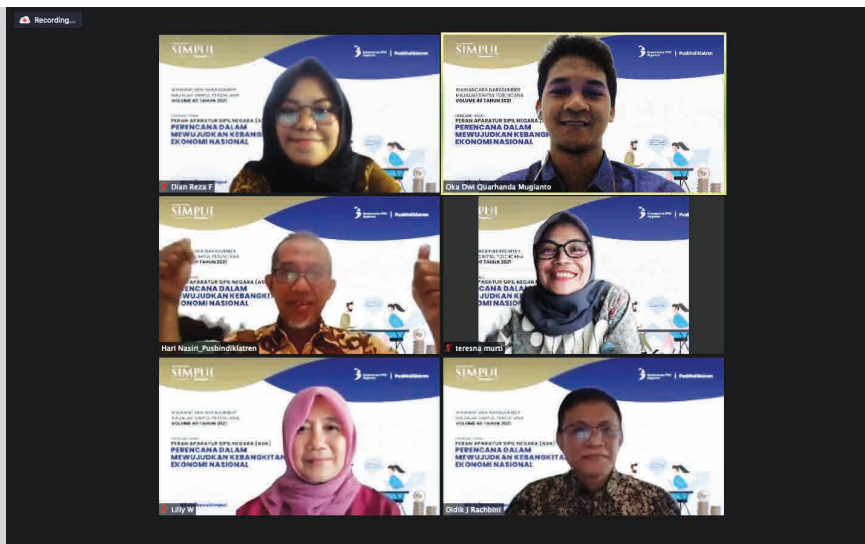
S: Begitu banyak problem yang dihadapi bangsa kita. Perencanaan seperti apa yang perlu dilakukan Kementerian PPN/Bappenas ke depan untuk membawa bangsa kita ke arah lebih baik?

D: Beberapa waktu yang lalu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, memberikan gagasan kepada saya untuk menghidupkan kembali suatu kelompok untuk menggarap industri. Kita sudah punya studi dulu.

Nah, menurut saya harus mulai dari pikiran sang pemimpin dan kekompakan dalam implementasinya. Contohnya tahun 2019, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan ekspor sehingga dilantiklah Wakil Menteri yang tugasnya hanya satu, (mengawal) ekspor. Kementerian PPN/Bappenas sebaiknya turut mendukung kebijakan ini. Di sisi lain, kebijakan itu harus menjadi isu yang kuat di publik. Jangan hanya Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saja yang mengerti. Kebijakan akan kuat itu jika publik mengerti akan kebijakan tersebut sampai ke akar-akarnya. Sekarang

sepertinya belum dilakukan. Memang neraca perdagangan kita bagus, tetapi jika kita tidak ada ekspor, pabriknya tutup.

Ekspor kita harus diperbanyak. Salah satu komoditi ekspor kita, yaitu karet, bisa diolah menjadi *crumb rubber* sehingga nilainya naik 3–4 kali lipat. Lalu ada kakao yang tanaman dan buahnya tumbuh di negara kita, tetapi produksi olahan kakao justru lebih banyak di Eropa. Saat itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menghentikan ekspor kakao dan meminta pabrik pengolahannya dipindahkan ke Indonesia. Kemudian ekspor produk olahan kakao pun mengalami kenaikan luar biasa. Namun, ketika produksi olahan kakao sudah meningkat, bahan mentahnya justru berkurang. Kementerian Pertanian-lah yang seharusnya menyiapkan. Ini terjadi akibat kebijakan yang masih bolong-bolong. **(Tim Pewawancara: Hari Nasiri Mochtar, Lilly Widayati, Teresna Murti)** ■



Wawancara dengan SIMPUL secara daring



LEONARD V.H. TAMPUBOLON

PERENCANA AHLI UTAMA/
PLT. DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

MENYELARASKAN PEMULIHAN KESEHATAN DAN EKONOMI

Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang digagas pemerintah tidak serta merta berjalan mulus jika tidak dibarengi dengan pemulihan kesehatan nasional. Inilah gagasan yang diungkapkan Dr. Ir. Leonard V.H. Tampubolon, M.A., Perencana Ahli Utama sekaligus Plt. Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas kepada SIMPUL. Simak selengkapnya pada petikan wawancara berikut ini.

SIMPUL (S): Menurut pendapat Bapak, pada masa sekarang ini, sebenarnya mana yang lebih utama antara kepentingan untuk kebangkitan ekonomi dan penanganan krisis kesehatan?

LEONARD V.H. TAMPUBOLON (L): Dalam situasi seperti yang dihadapi masa sekarang ini, tentunya upaya untuk mengatasi dampak Covid-19 harus menjadi prioritas utama. Meskipun demikian, upaya ini harus didukung dengan pemulihan ekonomi. Mengapa? Karena tanpa perbaikan ekonomi yang memadai, akan memunculkan permasalahan yang baru, misalnya menimbulkan ketidakmampuan masyarakat untuk membiayai kehidupannya. Ketidakmampuan

ini akan mengakibatkan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk kesehatannya, bisa lebih buruk.

Harus dicatat bahwa meskipun pemulihan kesehatan penting, pemulihan ekonomi juga harus berjalan. Mengapa kita tidak *lockdown* sepenuhnya, karena kita tidak mau ekonomi kita lumpuh. Kalau kita hanya fokus pada pemulihan kesehatan maka ekonominya akan kacau. Oleh sebab itu, keduanya ini harus berjalan bersama-sama. Kebangkitan ekonomi juga harus dijadikan prioritas melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Memang, untuk menghadapi situasi semacam ini, berat dan mengandung dilema, karena kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Kita harus bisa menghadapinya dengan cara menyusun perencanaan dengan sangat cermat. Perlu kita ingat bahwa tujuan akhir dari semua upaya yang dilakukan dalam menyusun perencanaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kesejahteraan masyarakat adalah bagian terpenting yang di dalamnya ada peningkatan kualitas kehidupan manusia, termasuk kesehatan yang lebih baik.

S: Dalam *Global Health Security Index (GHSI)*, Amerika Serikat (AS) dan Inggris menjadi peringkat pertama dan kedua dunia dan dianggap cukup baik dalam penanganan Covid-19. Adapun negara kita masih di peringkat ke-30 dalam GHSI. Sebelumnya, Bapak menyatakan bahwa kita harus seimbang antara pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Menurut Bapak, apa rekomendasi kebijakan yang terintegrasi untuk membangkitkan ekonomi nasional di tengah pandemi ini supaya stabilitas ekonomi kita tidak tertinggal?

L: Memang saat ini negara kita masih fokus untuk membangun infrastruktur, tetapi di tengah upaya menangani pandemi sekarang ini, hal tersebut bisa digeser ke tahun depan, atau ditunda dulu. Itu memang yang sekarang dipikirkan. Jadi, dalam menghadapi situasi sekarang, kebijakan yang harus diambil, pertama, mendukung pengendalian pandemi dan dampak yang ditimbulkannya dan kedua, mengeluarkan kebijakan yang

mendorong pemulihan ekonomi. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan sekarang kita sedang mengalami *peak* yang kedua. Fluktuasi ini juga terjadi di berbagai negara. Kita bisa lihat Australia mulai *lockdown* kembali. AS sempat lepas masker, tetapi sebagian wilayah seperti California wajib pakai masker lagi. Sebagian negara Eropa sudah memperbolehkan membuka masker, tetapi sebagian Eropa lainnya mengharuskan memakai masker kembali.

”

Kalau kita hanya fokus pada pemulihan kesehatan maka ekonominya akan kacau. Oleh sebab itu, keduanya ini harus berjalan bersama-sama.

“

Gelombang pandemi Covid-19 ini akan naik-turun. Saya kira kita harus berjaga-jaga, di mana beberapa kegiatan yang tidak perlu akan kita tahan atau tunda dulu pelaksanaannya. Namun, pemulihan ekonomi yang bisa mendorong ekonomi harus tetap berjalan. Kita tahu, kontraksi ekonomi kita tahun lalu -2%. Oleh sebab itu, kita ingin agar ekonomi bisa membaik. Paling tidak kita tidak mengalami kontraksi lagi.

Kebijakan itu harus terintegrasi. Dari sisi penyediaan anggaran,

pada tahun 2022, PEN akan menyatu dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kalau sekarang masih terpisah. Saat ini, sebagian biaya dimasukkan ke dalam BUN (Bendahara Umum Negara).

S: Terkait dengan kebangkitan ekonomi, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) seperti apa perlu juga didorong untuk maju, karena kenyataannya saat ini, merekah yang bisa mendorong perekonomian nasional. Bagaimana menurut Bapak?

L: UMKM itu peranannya sangat penting. Mengapa? Kalau kita cermati, dalam perekonomian nasional, UMKM itu proporsinya adalah yang terbesar. Sebetulnya kita sudah punya pengalaman, pada krisis tahun 1998. Pada saat itu, UMKM menjadi penopang perekonomian nasional yang sangat besar. Hal itu juga diharapkan dapat diandalkan pada krisis pandemi Covid-19 sekarang ini.

Produk-produk UMKM sangat diperlukan pada saat ini. Dalam situasi sekarang ini, orang tidak akan mencari barang-barang yang wah. Jadi, saya kira ini menjadi peluang UMKM untuk bergerak lebih bagus. Dengan demikian, peran UMKM sangatlah besar. Saat ini, UMKM terus kita dorong. Bahkan, ada keinginan agar semua anggaran-anggaran yang terkait dengan UMKM akan dipindahkan atau berbagai kegiatan yang terkait dengan UMKM dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, supaya bisa dikelola lebih baik untuk mendorong UMKM.

S: Artinya, apakah ada anggaran khusus untuk mendorong UMKM ini?

L: Kita ingin mendorong untuk UMKM lebih maju karena hal itu menjadi sumber untuk mendorong kebangkitan ekonomi. Namun, sebetulnya kita masih menghadapi masalah pada adanya keterbatasan data UMKM. Oleh sebab itu, pada saat sekarang ini perlu dilakukan pendataan yang pendanaannya sudah dianggarkan untuk tahun depan. Hal yang lain adalah UMKM diurus oleh banyak kementerian sehingga tidak fokus. Jadi, sekarang pengelolaan dana yang diperlukan untuk mendorong UMKM tersebut atau pengoordinasiannya diupayakan untuk difokuskan pada satu lembaga, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM.

S: Kenyataan di masyarakat, pada masa pandemi ini, banyak UMKM yang "menjerit". Mereka umumnya terkena kredit macet. Adakah program khusus untuk mengatasi masalah tersebut?

L: Upaya untuk mengatasi masalah tersebut merupakan kewenangan Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun pada dasarnya, kita mendukung gerakan memajukan UMKM. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang dilakukan untuk mendorong UMKM. Pertama, sekarang ini, kita sedang melakukan pendataan UMKM. Kedua, supaya lebih fokus untuk mendorong kemajuan UMKM, ada rencana memindahkan anggaran ke satu kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM; atau tetap berada di tiap-tiap kementerian, tetapi dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Koperasi dan UMKM.

S: Terkait peran perencanaan, kemampuan atau kompetensi apa yang harus ditingkatkan perencana melalui Biro SDM atau Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas selaku pembina perencana?

L: Saya pikir situasi yang kita hadapi ini sebetulnya telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga terutama untuk perencana, untuk melihat perencanaan itu dalam suatu sistem yang lebih komprehensif. Meskipun pandemi ini bersifat khusus, ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa suatu kejadian atau peristiwa bisa memporak-porandakan seluruh perencanaan yang sudah kita susun dengan baik selama ini. Pandemi ini membuat semuanya berubah. Oleh karena itu, dari sisi perencanaan, kita perlu mempertimbangkan berbagai dampak dan risiko yang mungkin timbul ketika menyusun perencanaan.

Selama ini kita sangat kencang dan cenderung fokus untuk mengejar tujuan. Sekarang, kita harus bisa mempertimbangkan dampak dan risiko yang bisa terjadi ketika kita menyusun perencanaan tersebut. Terus terang kita teledor. Kita agak mengabaikan sistem kesehatan selama ini sehingga pelayan kesehatan dan rumah sakit tidak mencukupi. Sebelumnya, kita hanya melihat perencanaan untuk mendorong perekonomian sehingga aspek-aspek lain (di luar kesehatan) yang lebih ditekankan.

Dari sisi kompetensi perencana, selama ini sudah cukup baik. Meskipun demikian, mungkin kita membutuhkan kemampuan lain untuk menjaga agar perencana itu bisa semakin bermanfaat untuk

menghadapi persaingan global pada masa mendatang. Oleh sebab itu, pertama, kita perlu kemampuan dan kompetensi untuk melihat potensi dan keunggulan yang kita miliki sendiri dan memanfaatkannya yang dituangkan dalam perencanaannya. Sebagai contoh, selama ini kita ekspor nikel. Kita tahu, ke depan sumber minyak bumi itu akan pindah ke sumber listrik. Adapun sumber baterai adalah nikel. Oleh sebab itu, kita tidak boleh ekspor nikel lagi dalam bentuk bahan mentah. Jadi, kemampuan melihat seperti itu harus dimiliki dalam perencanaan. Apa yang menjadi tren dunia, harus bisa kita lihat.

Kedua, kita perlu memiliki kemampuan untuk melihat, mencermati, menganalisis, dan merencanakan penyelesaian masalah atas berbagai tren dan persoalan yang diperkirakan bisa muncul pada masa mendatang. Contohnya kejadian pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Selain itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan perencanaan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Terus terang sekarang kita gelagapan untuk menghadapi pandemi ini.

S: Resesi global terjadi pada semua negara karena pandemi ini. Apa yang bisa kita pelajari dan implementasikan dari negara-negara lain, seperti Italia atau Amerika Serikat, yang sudah mampu menangani pandemi ini? Adakah perbedaan yang telah dilakukan negara-negara tersebut dengan negara kita secara *health service*, pemerintahan, maupun masyarakat *grass root*-nya?

”
 Dari sisi pengeluaran, ada empat sumber pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi masyarakat, ekspor, peningkatan belanja pemerintah, dan investasi.
 “



L: Suatu negara disebutkan mengalami resesi apabila terjadi penurunan kegiatan ekonomi atau terkontraksi berturut-turut dalam dua triwulan. Hal ini yang terjadi pada hampir semua negara karena pandemi ini. Oleh sebab itu, kita harus bisa keluar dari situasi ini. Kita harus bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kita.

Dari sisi pengeluaran, ada empat sumber pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi masyarakat, ekspor, peningkatan belanja pemerintah, dan investasi. Kita akan lihat satu per satu.

Dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, konsumsi masyarakat dalam jangka pendek sulit untuk ditingkatkan karena pendapatan masyarakat cenderung menurun. Dengan bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat diharapkan konsumsi masyarakat

tidak menurun terlalu tajam, atau minimal sama.

Kedua, untuk ekspor masih sulit untuk ditingkatkan karena ekspor sangat bergantung pada pendapatan negara lain. Sementara dalam kondisi sekarang, pendapatan berbagai negara turun, jadi agak sulit menaikkan ekspor untuk saat ini. Namun, hal tersebut tetap harus kita lakukan, baik dengan cara memberikan kemudahan ekspor maupun cara lainnya.

Ketiga, belanja pemerintah. Ini sebetulnya yang sering digunakan untuk menstimulus perekonomian. Jadi, kalau kita ingin mendorong perekonomian itu lebih tinggi, kita biasanya menaikkan belanja negara kita. Kalau saat ini, kemampuan untuk melakukan stimulus ini sangat terbatas, memang karena dana yang dimiliki terbatas. Ini dikarenakan

belanja yang dilakukan pemerintah itu bergantung dari penerimaan. Penerimaan pemerintah bergantung pada pajak. Pajak itu bergantung pada pendapatan masyarakat dan kegiatan perekonomian, sedangkan pendapatan masyarakat dan kegiatan perekonomian sedang turun. Jadi kalau kita lihat, kita sulit menaikkan pendapatan pajaknya. Namun, kita sebagai pemerintah harus tetap melakukan stimulus dengan menaikkan belanja pemerintah. Apa yang kita lakukan? Dengan mencari sumber-sumber pembiayaan lainnya. Pemerintah melalui Perpu juga telah menaikkan defisit dari 3% menjadi 6%.

Perlu diperhatikan bahwa dengan kontraksi ekonomi -2% saja kita sudah turun dari negara dengan tingkat pendapatan menengah-atas menjadi negara dengan tingkat pendapatan menengah-bawah. Selain itu, target kita sebelumnya

keluar dari MIT (*middle-income trap*) pada tahun 2036 menjadi terhambat. Oleh sebab itu, kita akan coba mengejanya sampai tahun 2045. Intinya, kita harus keluar dari MIT. Saat ini, kita mengalami penurunan dulu sedikit, semoga nanti kita bisa melompat ke depan. Jadi, mengapa defisit dilonggarkan? Karena, selain kita memerlukan dana untuk mengatasi pandemi, kita juga perlu peningkatan belanja pemerintah untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Keempat adalah investasi, dan inilah yang harus kita dorong, dan ini sudah dilakukan melalui UU *Omnibus Law*. Dengan upaya ini, kita bisa menjaga agar pertumbuhan ekonomi bisa didorong dan ditingkatkan, atau paling tidak

menahan agar tidak terjadi kontraksi ekonomi lagi.

Dari sisi penanganan pandemi, secara prinsip yang dilakukan berbagai negara hampir sama. Perbedaannya adalah tergantung pada pilihan kebijakan yang diambil. Ada negara yang memilih mengutamakan untuk mengatasi pandemi dengan melakukan *total lock down*, ada negara yang melakukan upaya untuk mengatasi pandemi, tetapi tetap menjaga agar perekonomian tetap berjalan. Masing-masing kebijakan ini memiliki risiko sendiri-sendiri. Kalau kita *lockdown*, katakan tiga minggu, pandemi diharapkan akan selesai dalam tiga minggu, tetapi ekonomi akan hancur-hancuran. Kalau kita melakukan pilihan yang kedua,

masa pandemi akan lebih panjang. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa negara yang melakukan *total lockdown*, dampaknya tidak lebih baik seperti negara yang *lockdown* setengah-setengah.

Kebijakan kita adalah berupaya untuk mengatasi pandemi dan dampak yang ditimbulkannya, tetapi ekonomi harus jalan di mana pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan, yang penekanannya sangat bergantung pada situasi.

Dalam mendukung kebijakan ini, yang ditekankan adalah pemberian vaksin, dan ini yang terus dirorong saat ini untuk mencapai *herd immunity*. Mengapa di AS dan Italia bisa ada kebijakan melepas masker?

Recording...



Wawancara dengan SIMPUL secara daring

Itu karena masyarakat yang sudah mendapat vaksin cukup banyak, meskipun belum mencapai target yang diinginkan, yaitu sebesar 60%. Kita akan mengarah ke sana. Masyarakat kita yang sudah menerima vaksin masih sedikit sekali, antara 30–40 juta orang dari 260 juta penduduk Indonesia. Sementara di AS, sudah setengah penduduknya menerima vaksin. Itu yang membuat kita harus mengejar vaksin sebanyak-banyaknya.

S: Terkait antara ekonomi dan pendanaan, kira-kira investasi di sektor apakah, selain sektor-sektor strategis (kesehatan/energi/infrastruktur), yang bisa mendorong pemulihan ekonomi Indonesia ke depan?

L: Sesuai dengan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2021, yaitu Perbaikan Sistem Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi, investasi diharapkan akan terjadi pada hal-hal yang terkait dengan sektor kesehatan dan sektor-sektor yang terkait dengan pemulihan ekonomi.

Jika melihat sistem kesehatan kita saat ini, kita menyadari kalau selama ini kita kurang menyiapkan fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, dalam jangka pendek dan menengah, sektor kesehatan itu bisa menjadi tempat untuk berinvestasi. Tentu saja, kita juga perlu sektor-sektor pendukungnya. Ada industri obat di sana. Saat ini, menurut informasi, Paracetamol saja tidak bisa dibuat di dalam negeri. Kejadian (pandemi) ini akan menjadi pelajaran dan juga akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan untuk investasi yang diharapkan berkembang di sektor ini. Kita tidak punya pabrik obat yang cukup. Kita tidak punya industri yang bisa menghasilkan

alat-alat kesehatan yang bagus. Itu kebutuhannya akan besar dan membuka peluang yang besar juga untuk berinvestasi.

Di samping itu, pendidikan juga membuka peluang untuk meningkatkan investasi. Jumlah tenaga kesehatan dan jumlah dokter sangat terbatas. Saya pikir ke depan akan dibuka sekolah-sekolah khusus untuk tenaga kesehatan, dan memberikan kemudahan untuk membuka sekolah-sekolah kedokteran yang selama ini agak sulit.

Dalam jangka menengah dan panjang, kita mau tidak mau akan mengarahkan investasi ke sektor industri. Arah industri ke depan tidak akan menggunakan *fuel energy*. Nanti semuanya akan menggunakan baterai. Untungnya Indonesia punya nikel yang merupakan sumber bahan baku baterai. Makanya, itu harus kita atur perencanaannya supaya bahan mentahnya tidak diekspor. Ada rencana untuk membangun pabrik di sini.

Untuk lainnya, kita masih membutuhkan investasi pembangunan infrastruktur karena kekurangan infrastruktur kita masih cukup tinggi. Jadi, kalau dilihat dalam jangka pendek-menengah, investasi yang dibutuhkan terkait sektor kesehatan dan pendidikan termasuk infrastruktur dasar. Sementara dalam jangka menengah dan panjang, diperlukan investasi pada sektor industri dan infrastruktur lainnya termasuk energi dan telekomunikasi.

S: Pada masa Presiden Soeharto kita pernah berhasil dalam program Swasembada Pangan.

Apakah ke depan masih ada alokasi sektor pangan?

L: Ketahanan pangan itu sangat penting. Ketahanan pangan akan tetap diperlukan. Kalau kita lihat sekarang, di Kalimantan Tengah sedang dibangun *food estate* besar-besaran untuk menghasilkan peningkatan ketahanan pangan.

Sekarang kita bisa bayangkan, jumlah lahan semua negara sedang turun. Suatu ketika akan muncul masalah ketidakterediaan pangan ini. Oleh sebab itu, hal ini sudah menjadi perhatian kita. Ini tercermin dari meningkatnya anggaran ketahanan pangan kita sekarang ini untuk membangun *food estate*.

S: Menurut Bapak, apa peran para fungsional perencana untuk kebangkitan ekonomi nasional?

L: Sekarang ini kita perlu masukan dari kawan-kawan perencana. Kita kadang-kadang tidak bisa menggunakan intuisi dan perasaan saja. Kita harus membaca dan menganalisis. Peran kita adalah untuk menyusun usulan dan rekomendasi untuk pengambil keputusan. Kalau saya tidak salah mengerti, para fungsional perencana tidak diberikan kebebasan untuk menetapkan judul untuk membuat suatu paper. Menurut saya itu perlu diperbaiki. Menurut saya agak dibebaskan saja. Dengan begitu, bisa fleksibel. Sebetulnya usulan teman-teman perencana sudah bagus-bagus. Namun, usulan tersebut perlu ditulis dengan baik, diusulkan dengan jelas, dan didukung dengan data. **(Tim Pewawancara: Pandu Pradhana, Wiky Witarni, Hari Nasiri Mochtar, Jelita Wiedoko) ■**



GANJAR PRANOWO
GUBERNUR JAWA TENGAH

SOLUSI KRUSIAL DARI GUBERNUR KASUAL

Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi di daerah menjadi pekerjaan rumah para Kepala Daerah dan jajarannya. Tak terkecuali, Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. Dalam wawancara dengan SIMPUL berikut, pemimpin yang dijuluki “Gubernur Kasual” ini membagikan solusi yang dilakukannya dalam menghadapi pandemi beserta cerita-cerita menarik lainnya.

SIMPUL (S): Sejauh ini, apa yang sudah dilakukan Pemerintah Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi?

GANJAR PRANOWO (G): Covid-19 ini luar biasa. Pada saat awal-awal kemunculan Covid-19, saya menghubungi duta besar kita di tiga negara, yaitu Tiongkok, Vietnam, dan Korea Selatan. Ketiganya saya hubungi karena saya ingin tahu yang terjadi sebenarnya di Provinsi Wubai dan Wuhan, Tiongkok (wilayah yang pertama kali terpapar Covid-19). Mereka ternyata memang punya pengalaman bagus. Mereka punya cara memerintah yang berbeda dengan kita. Menurut saya, yang mereka lakukan (untuk

mengatasi pandemi) cukup cepat dan didukung sumber daya yang cukup banyak. Namun, jika kita harus menjadikannya *benchmark*, banyak prasyarat yang tidak memungkinkan.

Mereka punya kekuatan yang cukup bagus dan juga spirit untuk saling membantu. Contohnya, ketika kemudian di suatu wilayah kekurangan dokter, dokter dari provinsi lain bisa digerakkan. Kita belum bisa seperti itu. Tiap-tiap provinsi hanya memikirkan kasus yang terjadi wilayahnya atau hanya memikirkan kasus yang dialami warganya. Akibatnya, sering kali terjadi kasus orang sakit yang tidak bisa dilayani oleh fasilitas kesehatan di sebuah wilayah hanya karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah tersebut.

Pada awal-awal pandemi tersebut, saya juga mengundang para pakar untuk memberikan saran dalam menangani pandemi berdasarkan pengalaman, basis teori, dan data sains mereka. Namun, teori-teori yang disampaikan pada kenyataannya tidak pas dengan kondisi riil di lapangan. Dampak pandemi memang sulit diprediksi. Kita menangani satu penyakit, tetapi dampak yang muncul bisa bermacam-macam. Kita benar-benar harus berimajinasi dalam membuat skenario-skenario untuk menanganinya, hingga akhirnya muncullah diksi “*lockdown*”.

S: Seberapa efektif skenario *lockdown* untuk diterapkan di negara kita? Apakah Bapak menerapkan skenario *lockdown* di Provinsi Jawa Tengah?

G: Saya pernah berdiskusi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Kami melakukan simulasi seandainya *lockdown* diberlakukan: siapa/ sektor mana yang di-*lockdown*? hingga (aktivitas) apa saja yang di-*lockdown*? Yang menarik adalah pembahasan mengenai seberapa besar cakupan wilayah yang akan di-*lockdown*: kota, provinsi, atau pulau? Saya pribadi lebih meyakini “*lockdown* pulau”, mengingat begitu masif dan cepatnya penyebaran virus Covid-19 ini. Selanjutnya, kami melakukan simulasi dan perhitungan jika benar-benar diberlakukan *lockdown*: berapa orang harus tinggal di rumah? berapa logistik yang harus kami sediakan? dari mana sumber logistik tersebut? hingga berapa lama pengiriman logistik? Kami juga membahas cara

kedua seandainya logistik tidak mencukupi dengan cara pertama, salah satunya dengan membuka pasar-pasar untuk suplai bahan pokok.

Jika pemerintah tidak bisa memberikan logistik secara langsung kepada masyarakat maka solusinya bisa diberikan dalam bentuk uang. Kami juga memikirkan jumlah bank yang perlu disediakan untuk penyaluran bantuan dana tersebut. Jika cara tersebut juga tidak bisa artinya masyarakat dipaksa tinggal di rumah, tanpa bantuan dari pemerintah. Kami pun memikirkan terkait respons sosial yang akan terjadi. Kami menyimulasikan seandainya terjadi *social unrest* (kerusuhan sosial) dan seberapa kuat pertahanan kita untuk menanganinya.

”

Dampak pandemi memang sulit diprediksi. Kita menangani satu penyakit, tetapi dampak yang muncul bisa bermacam-macam.

“

Pada akhirnya, saya memilih untuk tidak memberlakukan *lockdown*, karena saya tahu persis kalau aktivitas masyarakat di suatu wilayah dikunci (dengan *lockdown*) maka akan “mati” semuanya. Kalau bicara ideal, memang yang paling bagus masyarakat “dikunci” di rumah sampai sekitar satu bulan. Logikanya,

penyebaran virus akan berhenti lebih cepat. Namun, yang terjadi ternyata tidak sesimpel itu, ada masyarakat yang harus bersekolah, harus berjualan, ataupun harus beribadah. Ini problem yang rumit. Kita menghitung semua aspek, termasuk aspek ekonomi.

S: Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Bagaimana kebijakan Bapak terkait alokasi anggaran untuk kedua hal tersebut?

G: Pada tahun 2020 lalu, ketika wilayah lain belum menghitung, saya sudah sampaikan, “Tolong sediakan uang Rp1 triliun.” Ini proyeksi anggaran waktu itu (untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah) yang sudah saya perhitungkan. *Statement* saya tersebut pastinya akan menimbulkan kontestasi politik sehingga pemimpin-pemimpin daerah lain akan tergerak juga untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi untuk penanganan Covid-19 di wilayahnya. Saya hanya bermaksud memancing pemimpin-pemimpin daerah lain dengan otonominya agar dapat menggunakan seluruh kekuatan untuk mengambil tanggung jawab (penanganan Covid-19) di wilayah pemerintahannya. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, barulah kita menyampaikan ke Pemerintah Pusat untuk dibantu. Intinya, ambil dahulu tanggung jawabnya, jika ada anggaran yang bisa dipangkas, pangkas dahulu (untuk dialihkan ke anggaran penanganan Covid-19).

Beberapa Kepala Daerah lain mengontak saya untuk menanyakan cara yang saya lakukan untuk bisa

memangkas anggaran sehingga memperoleh angka Rp1 triliun untuk penanganan Covid-19. Saya katakan bahwa semua itu tidak mudah. Saya harus melobi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk menyampaikan bahwa kondisinya darurat sehingga kita harus menyiapkan segala hal, baik untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, hingga bansos (bantuan sosial).

S: **Terkait bansos, bagaimana teknis pendistribusiannya kepada masyarakat?**

G: Terkait bansos, kita harus mengakui bahwa pendataan penggunaan bansos kita buruk. Selama ini, pengajuan bansos dari kabupaten/kota sering kali irasional atau berlebihan. Hal ini terjadi karena masih adanya stigma bahwa dana yang diajukan harus dibuat setinggi mungkin agar jika dipotong pada saat pencairan tidak terlalu rendah. Alokasinya seratus, tetapi pengajuannya seribu. Ini masalah integritas, ini masalah kejujuran.

Pada akhirnya, kami menyalurkan bansos secara ketat. Saya sampai mencari staf yang pintar soal data untuk membuat sistem informasi data yang sangat sederhana untuk verifikasi data. Kami melakukan verifikasi terhadap usulan bansos dari kabupaten/kota. Saya memerankan inspektorat sebagai "pintu terakhir" (verifikasi). Kami mengakui masih ada beberapa kendala dalam penyaluran bansos ini, ada data ganda atau ada yang tidak mendapatkan bansos. Ini sangat *complicated* dan semua saya rekam dalam dokumen saya.

S: **UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) merupakan sektor yang paling terdampak pandemi. Bagaimana upaya yang Bapak lakukan untuk membangkitkan kembali UMKM di Provinsi Jawa Tengah?**

G: Untuk pemulihan ekonomi, kami mendata UMKM. Kami memberikan bantuan dan stimulan, salah satunya stimulan dalam bentuk masker yang saat itu masih langka. Kami membuat "Gerakan 35 Juta Masker" sesuai jumlah penduduk di Jawa Tengah. Kami memberdayakan masyarakat yang menganggur dengan anggaran Rp10 miliar untuk membuat masker di bawah arahan para pakar masker. Masker yang dihasilkan kemudian diserahkan kepada kami untuk kemudian kami berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami juga membuatkan APD (alat pelindung diri) untuk tenaga kesehatan.

Pada saat pandemi, UMKM benar-benar terpukul. Untuk itu, kami juga membantu menyediakan kebutuhan dasar bagi UMKM makanan dan minuman dengan memberikan telur, mentega, tepung, dan sebagainya. Setelah itu, kami (para Aparatur Sipil Negara) menjadi *off taker* yang membeli produk yang mereka hasilkan. Saya juga arahkan kepada dinas-dinas di Jawa Tengah agar jangan membeli makanan dan minuman dari *supplier* besar, tetapi lebih memprioritaskan produk makanan dan minuman dari UMKM.

Saat ini, bisnis dari UMKM tersebut bisa berjalan kembali dan mereka telah memiliki modal. Saya pun kini memiliki kegiatan "ekstrakurikuler" baru untuk turut membantu menjualkan produk UMKM tersebut

dengan memanfaatkan media sosial saya yang *follower*-nya sudah mencapai tiga puluh juta. Dengan tagar #LapakGanjar, saya sudah berjualan puluhan kali, bahkan pembelinya ada yang berasal dari Prancis hingga Amerika Serikat. Sekarang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah mengikuti langkah saya untuk berjualan produk UMKM daerah lewat media sosial.

Kami melakukan kurasi terhadap UMKM. Kami juga mendorong UMKM untuk bisa meraih pasar yang lebih luas. Caranya dengan aplikasi digital. Untuk itu, kami mengundang teman-teman dari Bukalapak, Go-Jek, Facebook, Tokopedia, dan Blibli untuk melatih UMKM dalam memanfaatkan aplikasi digital untuk berjualan.

UMKM terus kami genjot dengan mengadakan UMKM *Virtual Expo* dan mengikutkan mereka ke pameran di Santex Singapura bersama lima negara. Kami juga mengajarkan mereka untuk membuat *packaging* (pengemasan produk) yang lebih baik. Melalui *packaging* yang lebih baik, produk bisa laku dengan harga yang lebih tinggi, penyimpanannya lebih lama, dan bisa dikirim ke banyak tempat.

Jadi, dalam menggerakkan UMKM, kami selalu mendampingi, memberikan kurasi, menyediakan bantuan keuangan, sampai dengan membantu pemasarannya. Kami juga mendorong mereka untuk menjadi *entrepreneur* atau menjadi perusahaan *start up* baru dengan mengadakan lomba-lomba UMKM.

”
 Terkait perencana,
 yang kami minta untuk
 diubah dalam kondisi
 pandemi ini bukanlah
 perencanaannya, tetapi
mindset-nya.
 “



Foto: banten.hallo.id

S: Informasi yang Bapak sampaikan menunjukkan betapa kuatnya *leadership* Bapak dalam menangani pandemi ini. Lalu, bagaimana dengan peran ASN perencana di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi?

G: Artinya begini, saat ini *strong leadership* dibutuhkan karena situasinya darurat. Dalam situasi seperti ini dengan peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi, kemunculan varian virus baru, rumah sakit penuh, dokter banyak yang kolaps atau meninggal, sulitnya memperoleh tabung oksigen, artinya negara sudah dalam keadaan bahaya kesehatan, bukan militer.

Jika pandemi ini tidak berangsur mereda, pemerintah sudah seharusnya mengeluarkan Perpu

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebaiknya tidak lagi menggunakan pola desentralisasi, semua harus menggunakan pola sentralisasi, kalau perlu sentralisasi kewilayahan. Yang telah dilakukan pemerintah saat ini sudah benar, contohnya pengelolaan Jawa-Bali secara khusus, ini multi-sentralisasi. Saat ini, kita tidak bisa lagi mengharapkan setiap daerah berjalan sendiri-sendiri dengan otonominya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita butuh persatuan Indonesia. Jangan sampai ada rumah sakit menolak pasien Covid-19 lagi hanya karena berasal dari luar wilayah. Ini bukan sekadar bicara demokrasi. Ini sensitivitas kita pada kondisi.

Terkait perencana, yang kami minta untuk diubah dalam kondisi pandemi ini bukanlah

perencanaannya, tetapi *mindset*-nya. Dalam kondisi darurat, saya kerap meminta Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk menyiapkan *plan B* dan *C*, dan langsung diubah. Dalam perencanaannya, saya meminta Bappeda untuk berubah dengan membuat suatu estimasi dan proyeksi berdasarkan data sains dan tren. Analisis lingkungan eksternal juga harus dipakai. Kondisi-kondisi yang terjadi di negara lain juga perlu dipelajari: apakah kasus Covid-19 di Tiongkok sudah berhenti? adakah *second wave*? bagaimana Malaysia dan Vietnam yang dahulu tingkat kasusnya kecil, tetapi sekarang terjadi *outbreak*? apa dampak terjadi jika menerapkan kebijakan *lockdown* hingga dua kali seperti Singapura? bagaimana dampak yang terjadi pada negara yang menerapkan *lockdown* jika bandara dan pelabuhan ditutup?



Dalam wawancara dengan SIMPUL, Gubernur Ganjar Pranowo menunjukkan produk-produk UMKM yang dijual melalui #LapakGanjar

Ini semua merupakan problem yang terjadi selama pandemi. Saya meminta Bappeda untuk menyiapkan skenario-skenario untuk mengantisipasi problem tersebut.

Terus terang pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memperkirakan akan ada skenario *second wave* dan *outbreak* sehingga kami juga tidak menganggarkannya. Apakah perencanaannya buruk? Tidak, hanya Gubernurnya saja yang buruk. Situasinya memang serba sulit, tidak ada yang tahu yang akan terjadi ke depan. Namun, kita harus berhenti mengeluh. Kita bisa memperbaiki perencanaan dan *mindset*-nya. Rekan-rekan dari Bappeda saya minta untuk berpikir dalam situasi yang krisis sehingga harus ada *plan B, C*, dan seterusnya. Di sisi lain, banyak juga putusan-putusan politik yang memang harus saya sendiri yang *handle*.

Di area eksekutif, kami *refocusing* semua anggaran yang ada untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Tidak ada lagi dinas luar, semua kita ganti dengan rapat daring. Ini hanya membutuhkan

kesadaran yang dibangun sehingga interaksi politik atau *political interplay* kita akan menjadi menarik, kekuatan ini diuji oleh publik, seberapa responsif kita terhadap permasalahan masyarakat.

Ketika kemudian ada yang membutuhkan (anggaran), rekan-rekan di dinas bisa mengusulkan. Karena kondisinya darurat, saya meminta dinas-dinas dan kabupaten/kota untuk punya *call center*. Misalnya, Dinas UMKM saya minta untuk membuat *call center* sendiri untuk mencari UMKM dan PKL (pedagang kaki lima) yang bisa dibantu, begitu pula dengan Dinas Sosial. Ini menurut saya bagian dari *public compatibility* yang masyarakat harus tahu. Ini cara yang kami dorong.

S: Bagaimana koordinasi dengan Pemerintah Pusat?

G: Saya beruntung memiliki kedekatan dengan rekan-rekan yang sudah saya kenal lama dan sekarang memegang jabatan tertinggi di Pemerintah Pusat, termasuk dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Melalui

kedekatan tersebut, kami tidak ada *barrier* untuk bicara dan berdiskusi, termasuk soal data.

Terkait data Covid-19, saya beberapa kali “berkelahi” dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Buat saya, data harus punya integritas yang tinggi sejak awal. Saya pernah mengatakan bahwa seburuk apapun data yang terjadi di Jawa Tengah (baik angka kematian tertinggi, peningkatan kasus tertinggi, maupun layanan terburuk) keluarkan saja. Stempel yang disematkan oleh masyarakat pasti “Gubernurnya tidak becus”. Biarkan saya mendapatkan risiko itu.

Di sisi lain, setelah saya cek bersama rekan-rekan yang lain, saya merasa ada “penghematan” data dari Pemerintah Pusat. Jadi, data yang ada tidak semuanya dirilis. Data bertolak belakang dengan realita di lapangan. Ketika disebutkan angka pertumbuhan kasusnya kecil, angka kematiannya kecil, tetapi justru rumah sakitnya penuh dan tabung oksigennya kurang. Kelak kemudian hari, data-data ini jadi terbongkar. Kami ingin keterbukaan. Kami sampai

empat kali mengundang Pemerintah Pusat untuk *matching data* sehingga ditemukan bahwa beberapa data memang bermasalah. Bahkan pernah terjadi, sekitar 42 ribu data di Jawa Tengah belum diinput Pemerintah Pusat. Dengan demikian, data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (coronajateng.prov.co.id) berbeda dengan data Pemerintah Pusat (covid19.go.id). Jadi, data manakah yang benar? Saya berani mengklaim bahwa yang benar adalah data dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya menekankan lagi bahwa tidak boleh terjadi kesalahan data seperti itu dalam kondisi pandemi seperti ini karena akan berdampak ke berbagai hal, terutama layanan kesehatan kepada masyarakat.

Sebelumnya telah banyak perintah-perintah yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait pandemi. Dalam kondisi seperti ini, beberapa sektor yang harus disentralkan, kita sentralkan saja: kesehatan kita sentralkan, bantuan sosial kita sentralkan, ekonomi kita sentralkan. Tugas saya mengawal. Oleh karena itu, saya terus berkomunikasi intens dengan Pemerintah Pusat, salah satunya dengan Kementerian Sosial, terkait distribusi bansos kepada masyarakat, mulai dari penerima bansos, skenario pembagian, kecepatan pembagian, dan lain-lain. Dengan demikian, saya mengetahui detail dan kendalanya sehingga bisa dicarikan solusinya.

Demikian pula dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat. Kami terus meminta Kementerian Kesehatan mempercepat pendistribusian vaksin ke kami untuk selanjutnya percayakan kepada kami untuk menyalurkannya ke masyarakat. Ini

beberapa contoh *breakthrough* yang bisa kami dorong. Namun, untuk mempercepat vaksinasi, masalahnya bukan metode atau sumber daya manusia, tetapi memang vaksinya belum ada. Saya sudah meminta 2,4 juta vaksin per minggu kepada Menteri Kesehatan, tetapi belum bisa diwujudkan karena jumlah vaksin yang ada belum mencukupi. Jika kondisinya demikian, kami pun perlu berbicara kepada masyarakat untuk bersabar dan selalu menjaga kesehatan agar jangan sampai tertular Covid-19. Jadi, saya mendukung langkah Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, tentunya dengan tiga tahapan, yaitu (1) sosialisasi; (2) peringatan; dan (3) tindakan.

S: Kalau dari skenario #LapakGanjar, berapa persen UMKM di Provinsi Jawa Tengah yang sudah tercover oleh pemerintah daerah?

G: Tagar #LapakGanjar di akun Instagram saya itu hanya "ekstrakurikuler". Jadi sebenarnya sistemnya aktif, masyarakat yang mendaftar, dan tidak hanya Jawa Tengah, sekarang ini Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat juga ikut. Fungsi pemerintah adalah mengcover sehingga Dinas Koperasi UMKM kabupaten dan kota termasuk provinsi semua mengawasi UMKM tersebut. Jadi, *coverage*-nya adalah semua UMKM yang terdata, itu berarti diurus oleh kami.

Sekarang yang yang menjadi masalah adalah UMKM yang tidak terdata. #LapakGanjar sebenarnya lebih di luar urusan *government*. Jadi, saya mohon maaf belum bisa

menilai berapa persentasenya. Namun, yang sudah terdaftar, akan kami urus, meskipun *grading*-nya beda-beda.

S: Apakah inisiatif Bapak untuk mendorong UMKM belajar pemasaran secara digital bertujuan agar mereka bisa menjadi entrepreneur?

G: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah pernah melakukan survei kecil kepada UMKM. Dalam survei tersebut, kami menanyakan problem yang dihadapi UMKM. Hasilnya, problem nomor satu adalah *marketing* (dalam hal ini *digital marketing*), sedangkan problem kedua adalah permodalan. Setelah itu, kami memfasilitasinya dengan pelatihan dan pameran. Kemudian saya mengundang rekan-rekan dari aplikasi *marketplace* besar untuk melatih UMKM berjualan secara online hingga produknya bisa *on board* di aplikasi *marketplace* tersebut. Kami juga meminta bantuan para duta besar kita di luar negeri untuk membantu menjualkan produk UMKM di luar negeri. Kami terus mendorong mereka agar tumbuh spirit *entrepreneurship*-nya.

Kami juga memberikan akses modal kepada UMKM, melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), Bank Jateng, Baznas, dan ZIS Jateng. Ini kami lakukan agar kapasitas usaha UMKM tersebut menjadi besar. Terakhir, mereka membutuhkan pendampingan atau kurator. Kalau ketiga ini sudah, mereka masuk dalam kategori kami, UMKM naik kelas.

Di beberapa kawasan industri baru, seperti di Batang, saya berbicara dengan Presiden, Menteri BUMN, dan pelaksana di sana untuk

meminta *space* bagi UMKM agar masuk dalam *supply chain*, tidak sekadar masuk dalam CSR (*corporate social responsibility*). Tidak sekadar diberi tempat di pinggir jalan, tetapi UMKM bisa melakukan peningkatan untuk naik kelas. Memang belum berhasil betul, tetapi kita mesti *survive* di kondisi yang sulit ini.

S: Bapak telah mengubah *mindset* perangkat di bawah Bapak. Kepemimpinan sangatlah penting, tetapi keterbukaan kepada publik pun diperlukan. Apakah perubahan *mindset* mereka tersebut dapat bertahan lama ataukah hanya berlaku pada masa pandemi? Apakah mereka siap dengan perubahan *mindset* terhadap akuntabilitas dan integritas?

G: *Tagline* saya sejak mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 hingga saat ini tidak saya ganti, yaitu "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*" (Tidak Korupsi, Tidak Berbohong). *Tagline* ini tercipta berdasarkan riset mengenai problem yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah terhadap politisinya. Problem pertama adalah politisi suka mengumbar janji, tetapi lupa akan janjinya ketika sudah menjabat. Problem kedua adalah adanya praktik pungli dan korupsi. Itu bahasa dari rakyat yang menjadi dasar *tagline* saya.

Dari *tagline* tersebut dapat diartikan bahwa nomor satu adalah integritas. Yang paling saya utamakan dalam seleksi calon pemimpin adalah integritasnya, bukan *skill*-nya dan bukan pengalamannya. Kalau integritasnya sudah baik, yang lain akan mengikuti. Saya sudah memulainya di tingkat provinsi. Kalau kita punya spirit yang bagus, praktik korupsi akan mudah dibersihkan.

Namun, kalau spiritnya tidak bagus maka akan *power tense to corrupted*. Semua akan bergantung pada aktor, para elite politiklah yang kemudian menentukan.

Ketika KPK melakukan survei integritas, Provinsi Jawa Tengah nomor satu. Itu dibandingkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada saat itu, kebanggaan saya luar biasa. Kalau sekadar membangun jalan, itu hal mudah, apalagi jika sudah ada dananya. Namun, mengubah perilaku untuk mengatakan "*no thanks*" terhadap segala bentuk korupsi, itu sangat sulit. Saat ini, seluruh pimpinan dan staf di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terbiasa untuk mengatakan hal tersebut.

S: Di media sosial, ada kritik masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah tidak hadir di tingkatan *grassroot*, justru solidaritas sosial yang lebih terasa. Bagaimana Bapak menilai gerakan *grassroot* masyarakat pada masa pandemi tersebut?

G: Kami telah membuat gerakan namanya *Jogo Tonggo* (Jaga Tetangga). *Jogo Tonggo* ini merupakan gerakan aksi sosial yang muncul ketika waktu itu bantuan-bantuan (dari pemerintah) yang sifatnya *top-down* tidak bisa sesuai harapan masyarakat, baik dari segi data, siapa yang menerima, waktunya, jumlahnya, maupun hal lainnya.

Akibat bantuan yang tidak sesuai harapan tersebutlah yang menyebabkan kami di-*bully* di media sosial. Hati kami terkoyak-koyak, kami dicaci-maki, kami dianggap tidak becus bekerja. Namun, kami

juga mengerti, itulah kemarahan rakyat, dan saya menerima kemarahan seperti itu setiap hari. Di sisi lain, protes masyarakat melalui media sosial tersebut juga sering kali disusupi orang-orang yang tidak punya kepentingan secara langsung dan hanya ingin membuat kekacauan. Orang yang seperti itu tentunya akan kami tindak. Perilaku di media sosial memang bermacam-macam. Media sosial adalah dunia bebas, liberal, tidak ada etika, bahkan tidak ada yang bertanggung jawab.

Saya pernah berkali-kali *tweet-war* (beradu argumen) di media sosial Twitter, dan saya menikmati. Ini pendidikan politik yang mahal, seperti debat kandidat Presiden/Kepala Daerah. Saya ini orang media sosial, saya ini juga netizen, sehingga saya merasakan betul sejak saat masih di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) lalu. Daripada media sosial digunakan untuk mem-*bully* atau meneror, kita gunakan untuk bekerja saja. Di Tiongkok, media sosial justru dipergunakan untuk berdagang.

Kami mempunyai pengalaman segudang dalam menggunakan media sosial (dalam dunia politik dan birokrasi). Bahkan sudah ada yang menulis buku tentang keaktifan saya dalam bermedia sosial sehingga saya dijuluki "Gubernur yang Kasual", dengan maksud kasual dalam birokrasi. Di situ saya mengatakan bahwa birokrasi kasual adalah birokrasi yang meminimalkan penggunaan surat. **(Tim Pewawancara: Wignyo Adiyoso, Pandu Pradhana, Hari Nasiri Mochtar, Teresna Murti, Jelita Wiedoko)** ■

PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS 2021

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
Pusbindiklatren Bappenas
@pusbindiklatren



PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS bertujuan mendukung upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah (*institutional capacity building*), dengan menggunakan *institutional approach*, yaitu setiap permohonan menjadi calon penerima beasiswa harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di instansinya.

Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas **KHUSUS DISEDIAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)** yang bekerja di Kementerian PPN/ Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Bappeda atau instansi setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan.

INFO LEBIH LANJUT, HUBUNGI: 021-319 28280/319 28285/319 28279
PUSBINDIKLATREN@BAPPENAS.GO.ID

BEASISWA PROGRAM PENDIDIKAN

S-2 DALAM NEGERI

S-2 TEMATIK DALAM NEGERI SMART CITY

S-2 AFIRMASI DALAM NEGERI

SPLIT-SITE MASTER PROGRAM (SSMP)

PERSYARATAN UMUM:

- Belum pernah mengambil/memiliki pendidikan S-2.
- Telah diangkat menjadi PNS 100% minimal 1 tahun dengan pangkat/golongan minimal III/a.
- Batas usia maksimal 37 tahun (khusus S-2 Afirmasi Dalam Negeri, batas usia maksimal 42 tahun).
- IPK minimal 2,75 (khusus S-2 Afirmasi Dalam Negeri, IPK minimal 2,50)
- Pelamar yang diprioritaskan adalah (a) fungsional perencana; (b) perencana di instansi perencanaan atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan; dan (c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan.
- Diusulkan secara resmi oleh instansi asal melalui pejabat pembina kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II) yang menangani kepegawaian. Surat usulan harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan dan program/topik beasiswa yang diminati.
- Formulir pendaftaran harus dilengkapi dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Human Capital Development Plan (HCDP) yang terdapat di instansi masing-masing.

++ Informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas



BEASISWA PROGRAM PELATIHAN

PELATIHAN TEKNIS

FORUM ILMIAH INTERNASIONAL

STAFF ENHANCEMENT

ACADEMIC EXCHANGE

PERSYARATAN UMUM:

- Peserta merupakan PNS yang bekerja di unit kerja perencanaan minimal 1 tahun.
- Calon peserta diusulkan oleh instansi asalnya melalui pejabat pembina kepegawaian (minimal Pejabat Pimpinan Pratama/Eselon II)
- Pendidikan minimal S-1/D-4 dengan golongan minimal III/a.
- Batas usia maksimal 2 tahun sebelum pensiun (khusus Staff Enhancement, batas usia maksimal 5 tahun sebelum pensiun).
- Peserta Staff Enhancement wajib membuat proposal dalam bahasa Inggris sesuai topik yang dipilih.

++ Informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas

PILIHAN TOPIK PELATIHAN TEKNIS:

Individu: City Planning, Monitoring dan Evaluasi, Perencanaan dan Penganggaran; **Berkelompok:** KPBU/PPP, PPD-RPJMD, Perencanaan Lingkungan, Perencanaan Pengelolaan Bencana, Kelayakan Proyek, LERD, PPDA, Renstra

- Program **Staff Enhancement** dan **Academic Exchange** bekerja sama dengan universitas di Jepang
- Forum Ilmiah Internasional** dapat diikuti di Indonesia, Jepang, Negara Kawasan Asia Pasifik, atau Australia



BEASISWA PROGRAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP)

PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA 7 MINGGU

UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MUDA/AHLI MADYA/AHLI UTAMA 120 MENIT*

WORKSHOP PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) 5 HARI

WORKSHOP ADMINISTRASI PENILAIAN ANGKA KREDIT (APAK) 3 HARI

PERSYARATAN UMUM PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA (FP) DAN UJI KOMPETENSI:

- Pendidikan minimal strata 1 (S-1) atau diploma 4 (D-4) dari semua disiplin ilmu.
- Berasal dari unit kerja perencanaan.
- PNS 100% dengan masa kerja 1 tahun (sejak menjadi PNS 100%).
- Batas usia setinggi-tingginya pada saat mengikuti Uji Kompetensi:
 - 51 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli pertama dan ahli muda;
 - 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli madya; dan
 - 58 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional perencana ahli utama. Bagi JPTI yang akan pindah jabatan, dapat mengikuti ketentuan di satuan **link.ly/setting-PAK-2019**
- PNS pindah jabatan selain butir (4) di atas, juga harus melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan, sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal Pejabat Eselon II.
- Surat usulan harus diandatangani oleh serendah-rendahnya Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab menangani kepegawaian.

- Mengertakan surat pernyataan formal kebutuhan jabatan fungsional perencana dari kepegawaian.
- Bagi Perencana yang akan naik jabatan selain butir (6) di atas, juga wajib melampirkan selain SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Penerimaan Angka Kredit (PAK) terakhir.
- Melampirkan surat rekomendasi dari pengelola kepegawaian perihal pengangkatan dalam JFP selambat-lambatnya 6 bulan sejak persyaratan untuk naik pangkat/jabatan telah terpenuhi.
- Melampirkan surat pernyataan dari pengelola kepegawaian yang mengaitkan bahwa sudah tidak ada alumni pelatihan fungsional perencana yang belum diangkat dalam JFP.
- Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di situs web Pusbindiklatren Bappenas dan mengirim berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan.
- Bagi para calon peserta yang sudah pernah mendaftar pada tahun sebelumnya, tetapi belum terpenggali, silahkan mendaftar kembali dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan persyaratan di atas.
- Dokumen kelengkapan persyaratan pelatihan yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut.

PERSYARATAN UMUM WORKSHOP PAK DAN WORKSHOP APAK:

- Surat usulan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab menangani kepegawaian minimal Pejabat Eselon II;
- Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian daring yang ada di laman www.pusbindiklatren.bappenas.go.id;
- Melampirkan salinan SK PNS dan jajah terakhir;
- Mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran daring sebagai berikut: untuk butir (1) dan (2) adalah dokumen asli sedangkan butir (3) adalah salinan/fotokopi dokumen (data yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan tidak akan diproses lebih lanjut).

++ Informasi selengkapnya dapat disimak di situs web Pusbindiklatren Bappenas





Rapat Pembahasan
Pelaksana Pelatihan
Swakelola Tipe II

PELATIHAN SWAKELOLA TIPE II

PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2021

Pada tahun 2021, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas memberlakukan kebijakan pemilihan pelaksana pelatihan yang berbeda dengan penyelenggaraan program pelatihan pada tahun-tahun sebelumnya.

Lembaga/pusat/program studi (prodi) yang telah bekerja sama dengan Pusbindiklatren selama ini diberikan kesempatan yang sama untuk mengusulkan dan melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren. Seluruh lembaga/pusat/prodi tersebut diundang untuk mengusulkan proposal pelatihan yang diminati dan sesuai dengan pengalaman dan kepakaran masing-masing. Kemudian Pusbindiklatren akan menunjuk pelaksana pelatihan 2021 berdasarkan evaluasi proposal, evaluasi pengalaman pelaksanaan pelatihan pada tahun sebelumnya, dan kebijakan khusus lainnya.

Kriteria penilaian proposal calon pelaksana pelatihan berdasarkan pengalaman melaksanakan pelatihan, kompetensi pengajar, materi dan metode pembelajaran, fasilitas pendukung, serta evaluasi pelaksanaan tahun 2019 dan 2020. Selain itu, kegiatan atau program inovatif dalam pelaksanaan pelatihan akan menjadi nilai tambah. Pusbindiklatren juga akan memeriksa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh calon pelaksana pelatihan. Faktor penentu pelaksana pelatihan adalah pemenuhan nilai minimum penilaian (75) atau mendapat nilai tertinggi pada kelompok topik pelatihan,

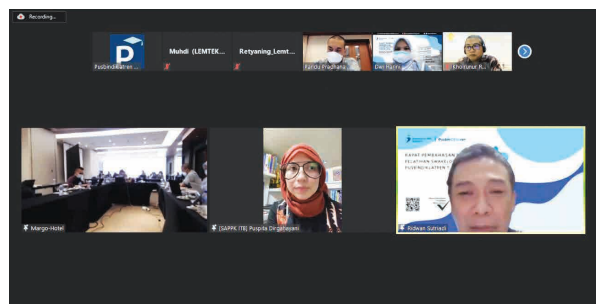
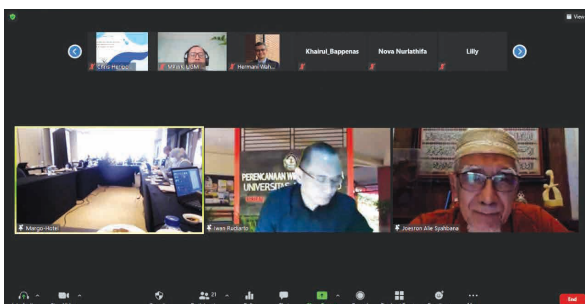
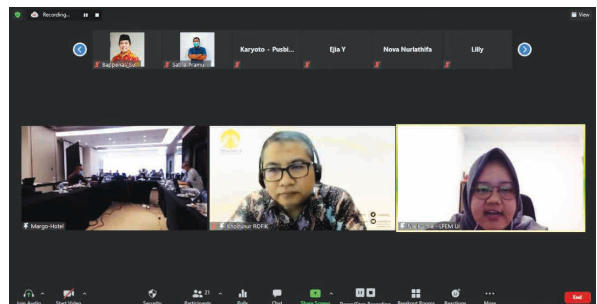
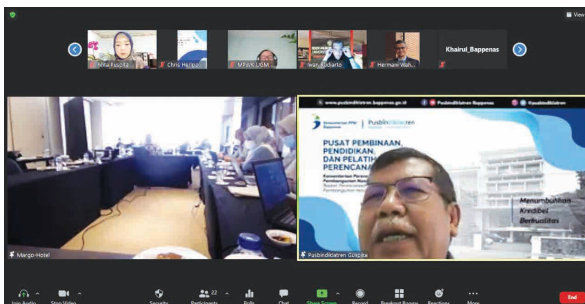
jumlah target rencana pelatihan (DIPA Anggaran Pusbindiklatren Tahun Anggaran 2021), dan jumlah pelamar/peserta. Apabila pelaksana melebihi jumlah pelatihan, akan diprioritaskan pada pelaksana dengan nilai tertinggi. Dari total 24 mitra kerja sama, Pusbindiklatren menerima 53 proposal dari 22 mitra kerja sama.

Dalam rangka mengoordinasikan proposal pelatihan yang diterima, Pusbindiklatren melaksanakan Rapat Pembahasan Pelaksana Pelatihan Swakelola Tipe II Pusbindiklatren Tahun Anggaran 2021. Dalam kegiatan ini, Pusbindiklatren mengundang calon pelaksana pelatihan serta tim penilai, baik internal Pusbindiklatren maupun Direktorat Kementerian PPN/ Bappenas. Calon pelaksana pelatihan mempresentasikan *highlight* dari proposal dan inovasi program yang telah dan akan dilaksanakan. Sementara tim penilai melakukan klarifikasi dan konfirmasi aspek penilaian langsung kepada

calon pelaksana pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) dengan dua seri. Seri pertama dilaksanakan pada hari Senin–Selasa, 24–25 Mei 2021 dan Seri kedua dilaksanakan pada Kamis–Jumat, 27–28 Mei 2021.

Rekomendasi hasil penilaian, dari 22 calon pelaksana pelatihan, didapatkan 21 pelaksana yang *eligible* berdasarkan nilai perolehan penilaian proposal. Pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi gelombang 1 dan gelombang 2. Pelatihan gelombang 1 adalah pelatihan yang dapat segera dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan pelamar/peserta yang telah diperoleh. Pelatihan gelombang 2 adalah pelatihan yang harus menunggu hasil rekrutmen peserta gelombang II yang dijadwalkan hingga akhir Juni 2021. Namun, apabila kuota peserta tetap tidak mencukupi, maka pelatihan tersebut dapat dialihkan ke topik pelatihan lain atau ditiadakan dengan diskusi lebih lanjut.

Tahapan selanjutnya dari proses pemilihan pelaksana pelatihan tersebut, Pusbindiklatren melaksanakan seleksi penempatan peserta sesuai dengan kriteria masing-masing pelatihan yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), melaksanakan Workshop Persiapan Pelaksanaan Pelatihan *Training of Facilitator (ToF)/Micro Teaching* untuk menyamakan persepsi mengenai kurikulum dan bahan ajar, melaksanakan Workshop Familiarisasi Aplikasi SIPENA sebagai fasilitas pendukung yang akan digunakan untuk pelatihan daring, dan melaksanakan *sit-in* pelatihan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelatihan. Melalui perubahan pemilihan pelaksana pelatihan serta tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh Pusbindiklatren, diharapkan akan didapatkan pelatihan yang berkualitas sesuai dengan target/tujuan pelatihan yang ingin dicapai. **(Penulis: Nova Nurlathifa/Pusbindiklatren)**





KEBIJAKAN EVALUASI PELATIHAN PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2021

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam berputarnya roda pemerintahan. Peran ASN ditunjukkan melalui komitmen dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang terlihat dari efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk mengoptimalkan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dilakukan pengembangan kompetensi ASN melalui program pendidikan dan pelatihan. Dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN, Pusbindiklatren melaksanakan program pendidikan dan pelatihan serta pembinaan jabatan fungsional perencana bagi SDM aparatur dari instansi pusat dan daerah. Pengembangan kompetensi terhadap SDM Aparatur diharapkan dapat meningkatkan pula kinerja institusi di mana SDM Aparatur tersebut ditempatkan.

Adanya berbagai perubahan eksternal yang terjadi mengharuskan Pusbindiklatren untuk menetapkan penyesuaian terhadap kebijakan dalam penyelenggaraan program pelatihan. Beberapa perubahan seperti peran Pusbindiklatren menjadi bagian dari *enabler* terhadap perencanaan pembangunan, kebijakan penyederhanaan struktur organisasi, dan pandemi Covid-19 yang belum berakhir, penyelenggaraan Pelatihan Secara Swakelola Tipe II, serta kebijakan lainnya, menjadikan Pusbindiklatren perlu menyesuaikan kembali tata kerja

dan proses kerja internal. Hal ini juga akan memengaruhi kebijakan dalam penyelenggaraan program pengembangan sumber daya manusia.

Agar penyesuaian sebagaimana disebutkan berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan dan persiapan yang komprehensif terhadap faktor pendukung penyelenggaraan pelatihan, yaitu kurikulum, sarana dan prasarana, fasilitator/tenaga pelatihan, peserta, metode, bahan ajar/ materi pelatihan, administrasi dan anggaran, serta lingkungan dan suasana pelatihan. Untuk keperluan tersebut mulai tahun 2021, Pusbindiklatren menyelenggarakan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pelatihan. Mengacu kepada PP Nomer 39 Tahun 2006, evaluasi merupakan serangkaian kegiatan membandingkan antara

realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Hasil evaluasi selanjutnya akan digunakan untuk memandu pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap kelanjutan keseluruhan pelaksanaan pelatihan.

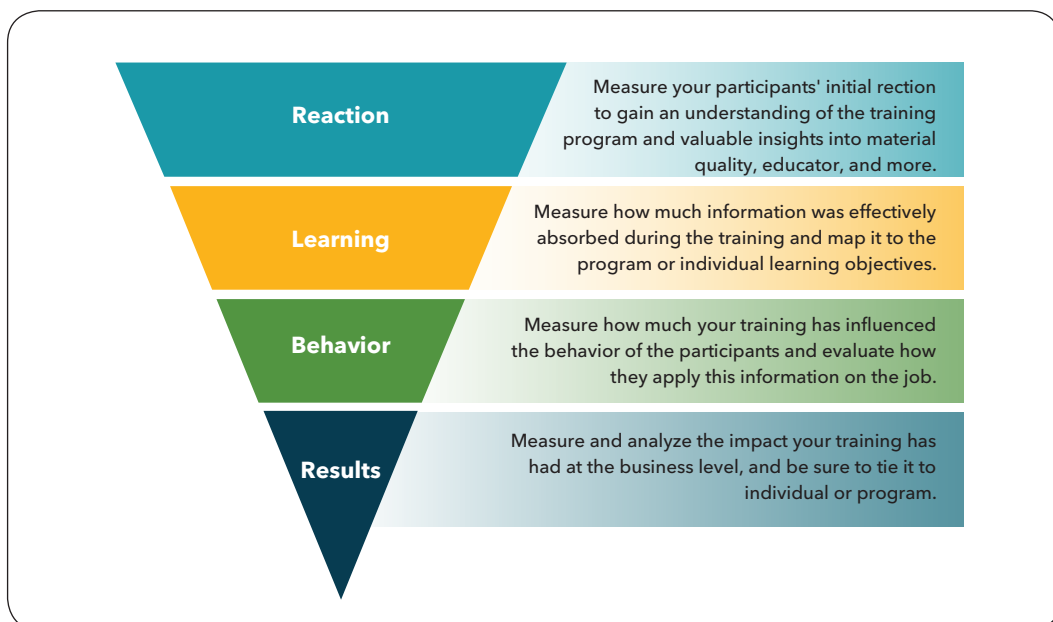
Untuk melihat hasil efektivitas program pelatihan terhadap peserta dapat dilakukan melalui empat level model evaluasi Kirkpatrick (lihat Gambar 1).

Dari evaluasi nantinya akan didapatkan informasi yang relevan tentang efek dari program pelatihan. Tujuan utama mengevaluasi program pelatihan adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang pelaksanaan program pelatihan yaitu

- untuk mengetahui apakah tujuan pelatihan telah tercapai;

- untuk menilai apakah program pelatihan dilaksanakan dengan benar sebagaimana rencana yang telah ditetapkan;
- untuk menilai efektivitas program pelatihan; dan
- untuk melihat bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam pelatihan dipraktikkan oleh peserta yang tepat.

Untuk mendapatkan pemahaman atas pertanyaan di atas, dilakukan evaluasi terhadap faktor pendukung penyelenggaraan pelatihan, yaitu kurikulum dan sarana dan prasarana, juga fasilitator/tenaga pelatihan, peserta, metode, bahan ajar/materi pelatihan, administrasi dan anggaran, serta lingkungan dan suasana pelatihan dari penyelenggaraan pelatihan tahun sebelumnya. Instrumen yang



Gambar 1. Kirkpatrick Model

Sumber: <http://manajemen-sdm.com/training-development/cara-melakukan-evaluasi-pelatihan-4-level-evaluasi-pelatihan-model-kirkpatrick/>

digunakan seperti hasil *sit in* di beberapa pelatihan, kuesioner atau umpan balik dari peserta pelatihan, serta dokumen lainnya yang dapat menjadi bahan masukan untuk dilakukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pelatihan karena adanya keterkaitan antara satu faktor pendukung dengan yang lainnya.

Evaluasi terhadap kurikulum yang telah disusun pada tahun 2020 dilakukan bersama antara penanggung jawab kurikulum dari Pusbindiklatren dan perwakilan dari direktorat terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk memutakhirkan materi yang akan disampaikan, disesuaikan dengan isu dan kebijakan terkini sekaligus memperbaiki metode dan suasana pelatihan. Mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung, pelatihan diselenggarakan sepenuhnya secara *online/daring* (dalam jaringan). Untuk menghindari kejenuhan peserta dalam mengikuti pelatihan melalui daring, metode pembelajaran yang tepat perlu diterapkan. Metode pembelajaran dengan memperhatikan konsep *andragogy* atau pembelajaran orang dewasa dengan lebih meningkatkan keterlibatan peserta dalam kegiatan pembelajaran termasuk penetapan komposisi pelatihan secara sinkronus dan asinkronus.

Kemampuan pelaksana pelatihan dalam mengelola pelatihan, menerjemahkan kurikulum ke dalam modul serta menyediakan fasilitator atau tenaga pengajar yang dapat menyampaikan materi pembelajaran merupakan faktor yang memengaruhi keberhasilan

suatu pelatihan. Di samping itu, ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan menjadi penting untuk mendukung terlaksananya pelatihan secara daring.

Pusbindiklatren menggunakan *platform* Sistem Informasi & Pembelajaran Elektronik Perencana (SIPENA) dalam menyelenggaraan pelatihan. Secara berkala, Pusbindiklatren melakukan penyempurnaan terhadap SIPENA agar lebih *user friendly* sesuai dengan hasil evaluasi penggunaannya. Oleh karena itu, adanya sarana dan prasarana yang mapan menjadi syarat untuk melaksanakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren.

Faktor penting lainnya dalam penyelenggaraan pelatihan adalah peserta itu sendiri. Keberhasilan suatu pelatihan dapat dilihat dari hasil evaluasi peserta sebagaimana model evaluasi Kirkpatrick. Meskipun demikian, proses seleksi keikutsertaan dalam pelatihan juga memengaruhi keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta. Untuk itu, Pusbindiklatren mensyaratkan penyampaian rencana pengembangan SDM atau HCDP (*Human Capital Development Plan*) dari instansi pengusul. Dengan demikian, pelatihan akan diikuti oleh peserta yang tepat, agar mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk dapat meningkatkan kompetensi peserta sehingga dapat mendukung kinerja yang bersangkutan dan organisasinya.

Pelatihan yang diikuti peserta hendaknya bukan saja menjadi pengetahuan yang bersifat "*good to know*" atau hanya baik untuk

diketahui, tetapi tidak dapat diterapkan di bidang pekerjaannya. Pelatihan harus menjadi pengetahuan yang "*need to know*" atau pengetahuan yang harus dimiliki peserta untuk meningkatkan kompetensi diri dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam organisasi.

Evaluasi program pelatihan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis. Evaluasi didukung dengan *monitoring* pada setiap pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat mengantisipasi adanya permasalahan yang terjadi dan kemungkinan terjadi untuk segera diambil tindakan. Tindakan yang diambil pascapelaksanaan *monitoring* dan evaluasi selanjutnya dijadikan masukan dalam menyusun arah kebijakan baru yang dapat berupa *go* atau *no-go* pelaksanaan suatu program pelatihan ataupun menjadi pelaksana program pelatihan.

Pada akhirnya keseluruhan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas mutu dan kuantitas pelayanan Pusbindiklatren khususnya terkait dengan program pengembangan kompetensi SDM Perencana dalam rangka percepatan pembangunan dan memperkuat instansi perencanaan.

**(Penulis: Teresna Murti/
Pusbindiklatren) ■**



WITNESS DAN PENGESAHAN LEMBAGA SERTIFIKASI PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas terus berkomitmen dalam hal pengembangan kapasitas dan kuantitas perencana pembangunan di Indonesia yang salah satunya dengan terus mendukung dan mengawal pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana Pembangunan (LSP Renbang) Indonesia.

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, dilaksanakan serangkaian acara dalam rangka pemenuhan prasyarat pendirian dan lisensi LSP Renbang oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mulai dari pelaksanaan Prakonvensi dan Konvensi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Pembangunan, Penyusunan Materi Uji Kompetensi oleh para asesor, hingga terakhir yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia - Perencanaan Pembangunan.

Pada akhir tahun 2020 terbit Surat Keputusan (SK) Ketua BNSP No. KEP.1880/BNSP/XI/2020 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana Pembangunan Indonesia yang menandakan bahwa pendirian LSP Renbang telah sampai pada tahap akhir sebelum dapat beroperasi di tengah masyarakat. SK lisensi ini menandakan pemberian izin pada LSP Renbang untuk melaksanakan uji sertifikasi kompetensi pada empat skema sertifikasi yang telah diverifikasi lebih dahulu, yaitu



1. Skema Sertifikasi Klaster Menyiapkan Kegiatan Perencanaan Pembangunan;
2. Skema Sertifikasi Klaster Mengelola Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
3. Skema Sertifikasi Klaster Memantau Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan; dan
4. Skema Sertifikasi Klaster Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Terbitnya SK lisensi ini juga menjadi pedoman bagi LSP Renbang agar dalam penyelenggaraan uji sertifikasi kompetensi hendaknya patuh pada Pedoman BNSP versi 2014 serta pedoman-pedoman lainnya yang telah menjadi ketentuan.

Terbitnya SK lisensi menandakan terbitnya izin pada LSP Renbang untuk melaksanakan uji sertifikasi kompetensi. Namun, sebelumnya

LSP Renbang harus melakukan uji sertifikasi kompetensi perdana yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh BNSP sesuai dengan skema yang telah diverifikasi (*witness*). *Witness* adalah proses peninjauan langsung oleh Tim BNSP ke Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP Renbang serta melihat secara langsung prosesi sertifikasi yang dilakukan oleh asesor LSP Renbang, mulai dari penyerahan dokumen portofolio asesi (peserta sertifikasi), wawancara, dan terakhir uji praktik sesuai dengan skema kompetensi seperti disampaikan di atas.

Witness LSP Renbang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 yang berlokasi di TUK Pusbindiklatren. Adapun *Witness* LSP Renbang mendapatkan sebuah kehormatan karena disaksikan langsung oleh Ketua BNSP, Kunjung Masehat, dengan didampingi oleh Moh. Ali Shodiqin dan Fadjar A.

Boenyamin yang juga berasal dari BNSP. Hadir pula dalam pembukaan hingga akhir proses *Witness* yaitu Kepala Pusbindiklatren Bappenas, Dr. Guspika beserta Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P. yang memiliki andil besar dalam pendirian LSP Renbang pada saat menjadi Ketua Umum Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI).

Seperti pelaksanaan *witness* LSP pada umumnya, dalam pelaksanaan *Witness* LSP Renbang ini juga didukung oleh para asesor LSP Renbang, yaitu Indra Hermawan, M. Ali Rouf, M. Iksan Maolana, dan Moh. Tomtom Makmur yang bertugas melaksanakan proses asesmen dengan menghadirkan para asesi antara lain Falikul Fikri, M. Ihyakulumudin, Muhyiddin, dan Deddy S. Bratakusumah. Pelaksanaan *Witness* LSP Renbang mendapatkan apresiasi yang

TABEL 1. PESERTA DAN PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN WITNESS LSP-RENBANG (SABTU, 20 MARET 2021)

No.	Perihal	Nama
1	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> • Indra Hermawan • M. Ali Rouf • M. Iksan Maolana • Moh. Tomtom Makmur
2	Asesi	<ul style="list-style-type: none"> • Falikul Fikri • M. Ihyakulumudin • Muhyiddin • Deddy Supriady Bratakusumah
3	Kementerian PPN/ Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> • Guspika • Suprayoga Hadi • Rita Miranda • Fuad Setiawan • Ivan Budi Susetyo • Roseiga Retno Anggarani • Marsudi • Ikah • Solihin
4	BNSP	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjung Masehat • Moh. Ali Shodiqin • Fadjar A. Boenyamin
5	LSP Renbang (Panitia Acara)	<ul style="list-style-type: none"> • Abiratno • Epik Finilih • Eva Nurlita Sari • Sofa Nurdiyanti • Humairoh • Rina Tumiar • Amelia Stevany • Rizkha Aprida





mengesankan, salah satunya adalah dengan digunakannya sistem uji berbasis digital dalam melaksanakan uji sertifikasi. Sebagai informasi, LSP Renbang telah berupaya mengembangkan dan menggunakan sistem uji sertifikasi berbasis digital dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan uji sertifikasi apalagi melihat tantangan saat ini, yaitu pada masa pandemi Covid-19 dan juga ke depan di mana jarak dan waktu seharusnya tidak lagi menjadi kendala dalam melaksanakan uji sertifikasi. Kehadiran sistem uji sertifikasi digital akan memudahkan peserta uji (asesi) untuk menjalankan uji karena seluruh materi uji sudah tersimpan di dalam *database* sistem. Begitu juga kemudahan bagi asesor, karena seluruh data asesi serta materi uji dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh asesor. Penggunaan kertas yang semakin minimal, merupakan *benefit* lainnya dalam pelaksanaan sistem uji digital,

serta yang paling utama adalah kemudahan dalam pelaksanaannya karena hanya memerlukan perangkat laptop atau komputer (PC) serta jaringan internet untuk mengaksesnya.

Sebagai penutup, pelaksanaan *witness* berjalan dengan lancar, meskipun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pada akhir kegiatan *witness*, Ketua BNSP menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang harus diperhatikan oleh LSP Renbang untuk segera ditindaklanjuti. Setelah catatan perbaikan tersebut disempurnakan barulah akan diterbitkan sertifikat lisensi untuk LSP Renbang. Namun, hal yang paling utama adalah seluruh personel LSP Renbang harus memahami dengan baik prosedur pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 serta pedoman-pedoman lainnya.

Selesaiya pelaksanaan *witness* tentu menjadi satu capaian penting bagi LSP Renbang, terutama setelah dilaksanakannya semua arahan dari Kepala BNSP dan tim pascapelaksanaan *witness* hingga terbit Sertifikat Lisensi bagi LSP Renbang, yaitu Sertifikat Lisensi Nomor: BNSP-LSP-1846-ID. Sertifikat lisensi sendiri sebagai bukti sah LSP Renbang sudah diperbolehkan untuk menyelenggarakan uji sertifikasi secara bebas. Penyaringan terhadap perencana yang kompeten di bidangnya akan semakin dekat dengan telah diizinkan LSP Renbang melaksanakan uji sertifikasi. Dalam waktu dekat LSP Renbang akan mulai menjalani kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan uji sertifikasi kompetensi di bidang perencanaan pembangunan. **(Penulis: M. Iksan Maolana/ Pusbindiklatren) ■**

SOROT KEGIATAN



Kerja Sama Program Pendidikan dengan CQ University dan Universitas Bakrie



Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan Central Queensland University (CQU) dan Universitas Bakrie pada hari Senin, 31 Mei 2021. Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas bersama Prof. Nick Klomp (*Chancellor and President* Central Queensland

University) dan Prof. Ir. Sofia Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., I.P.U. (Rektor Universitas Bakrie).

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi kerja sama perencanaan pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi). Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan (Pusbindiklatren) memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) pembangunan, tidak hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian PPN/Bappenas, tetapi juga ASN Perencana di seluruh Indonesia, baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Kerja sama dengan Central Queensland University berbentuk

pemberian beasiswa kepada ASN Perencana di seluruh Indonesia melalui program master/S-2 *linkage (double degree)*. Berbeda dengan Central Queensland University, kerja sama dengan Universitas Bakrie melalui Pusat Studi Geopark yang akan terlibat aktif dalam pengembangan Geopark Belitong, Geopark Batur, dan Geopark Ciletuh.

Acara ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas; Kepala Pusbindiklatren; Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan; Kepala Biro Sumber Daya Manusia; Kepala Biro Hukum; Kepala Biro Renortala; Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan; serta perwakilan dari Central Queensland University dan Universitas Bakrie. **(Penulis: Ridha Agus/Pusbindiklatren)** ■

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pokja OTAK Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas



Pada tanggal 6 Mei 2021, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat

Koordinasi dan Sinkronisasi Kelompok Kerja (Pokja) Organisasi, Tata Laksana, Administrasi, dan Keuangan (OTAK).

Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka membahas capaian kinerja tiap-tiap tim yang ada di dalam pokja dan membahas program kerja ke depan. Selain itu, pada kegiatan ini juga dibahas tentang pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ke depannya Pokja OTAK akan menyusun peta

risiko serta rencana pengendalian pada program dan kegiatan di lingkup Pusbindiklatren.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusbindiklatren dengan menghadirkan narasumber Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian PPN/Bappenas dan perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). **(Penulis: Ridha Agus/Pusbindiklatren)** ■

SOROT KEGIATAN



Rapat Koordinasi *Annual Progress Report* Proyek PHRD IV



Pada 23 April 2021, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Koordinasi Annual Progress Report Pelaksanaan Proyek *Professional Human Resources Development* (PHRD) IV. Rapat koordinasi ini diselenggarakan Pusbindiklatren dalam rangka membahas perkembangan

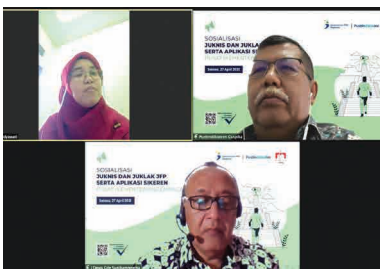
pelaksanaan kegiatan PHRD IV dengan mitra pembangunan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Trippcons Internasional, selaku konsultan PHRD IV.

Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid*, dengan pelaksanaan acara luring di The Margo Hotel, Depok, dan secara daring melalui Zoom Meeting. Adapun agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah (1) penyampaian perkembangan pelaksanaan komponen kegiatan-kegiatan PHRD IV; (2) pembahasan perkembangan *alumni survey/alumni tracer study*; (3) pembahasan rencana dan strategi pelaksanaan komponen kegiatan pendidikan dan pelatihan;

(4) pembahasan isu lainnya, seperti strategi optimasi dana proyek dan manajemen risiko pelaksanaan kegiatan selama masa pandemi; serta (5) diskusi.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan di atas, pada tanggal 27 April 2021, Pusbindiklatren menyelenggarakan kegiatan pemantauan program PHRD IV yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh kurang lebih 75 peserta yang berasal dari berbagai universitas di Jepang, perwakilan JICA, atase pendidikan Indonesia untuk Jepang, perwakilan universitas di Jepang, dan konsultan. **(Penulis: Ridha Agus/Pusbindiklatren)** ■

Sosialisasi Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional Perencana serta Aplikasi SIKEREN



Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) menyelenggarakan Sosialisasi Juklak dan Juknis Jabatan Fungsional Perencana serta Aplikasi Sikeren (Sistem Penilaian Kinerja Perencana). Kegiatan berlangsung

secara daring melalui aplikasi Zoom dan *live streaming* melalui kanal Youtube Pusbindiklatren.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 27–29 April 2021 yang diikuti peserta dari pusat (kementerian/lembaga) dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang mempunyai tugas pekerjaan sebagai pengampu kepegawaian, anggota tim penilai angka kredit perencana, pejabat fungsional perencana, serta para pengurus dan anggota PPPI.

Terkait Jabatan Fungsional Perencana, mulai tahun 2021, Pusbindiklatren menyelenggarakan kegiatan uji

kompetensi dengan mekanisme baru di semua jenjang Jabatan Fungsional Perencana. Tak terkecuali pada Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Ahli Utama yang tahap pertama telah dilaksanakan pada 13 April 2021 dalam bentuk *virtual assessment* yang dilakukan oleh lembaga psikologi kepada seluruh peserta. Adapun untuk tahap selanjutnya, para peserta melaksanakan seminar awal *policy paper* yang dilanjutkan dengan tahap pembimbingan selama satu bulan yang kemudian ditutup dengan seminar akhir. **(Penulis: Ridha Agus/Pusbindiklatren)** ■

VOL. 2 NO. 2 AUGUST 2021



4 RESEARCH PAPERS

2 POLICY PAPERS

1 COMMENTARY

1 BOOK REVIEW

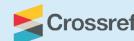
PUBLISHED

Download Online Version on:



journal.pusb̄indiklatren.bappenas.go.id

JISDeP is indexed by





Ferlistya Pratita Rari

Alumni Penerima Beasiswa S-2 Dalam Negeri Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, Program Studi Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia; saat ini bekerja sebagai ASN di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

PENGALAMAN MENANTANG, BERKESAN, SEKALIGUS MELEGAKAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia sebelum pandemi Covid-19 menyerang. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada akhir tahun 2018, pariwisata berhasil menyumbangkan devisa hingga US\$16,4 miliar.

Statistik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pun menunjukkan tren positif sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 lalu. Di antara beberapa negara yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi favorit, Jepang merupakan salah satu negara yang menyumbangkan jumlah wisatawan cukup tinggi ke Indonesia, yaitu sekitar lebih dari

500.000 kunjungan wisatawan ke Indonesia per tahun sepanjang periode tersebut. Berbicara soal Negara Jepang, salah satu hal yang menarik untuk dipelajari adalah karakteristik demografinya yang unik. Mengacu pada data World Bank, pertumbuhan penduduk Jepang sejak tahun 2011 selalu negatif. Bahkan pada tahun 2018, persentase populasi penduduk usia 65 tahun ke atas di Jepang adalah sebesar 27,6 persen, angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia.

Pada tahun 2018, sebagai anggota Tim Pemasaran Area Jepang di Kemenparekraf, hal tersebut menarik minat saya untuk mempelajari karakteristik demografi Negara Jepang yang unik dan korelasinya terhadap jumlah kunjungan wisatawan Jepang ke Indonesia. Lebih lanjut, secara umum, saya ingin mempelajari pemanfaatan ilmu demografi dalam suatu bisnis sehingga saya merasa jurusan Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas

Indonesia yang ditawarkan dalam Beasiswa Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas akan mengakomodasi harapan saya.

Benar saja, sejak semester I, kami telah diberikan kesempatan untuk mengunjungi Kantor Tokopedia dan mempelajari langsung pemanfaatan ilmu demografi bagi riset untuk pengembangan bisnis Tokopedia dari ahlinya. Sayangnya, pada semester II, pandemi Covid-19 mulai menyerang Indonesia dan menimbulkan dampak multidimensi, termasuk berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di Universitas Indonesia. Kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan secara tatap muka, berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam jaringan. Berbagai adaptasi terhadap kebiasaan baru dalam peran kami sebagai mahasiswa harus kami jalani. Di sisi lain, saya juga sedang mempersiapkan pernikahan.



Kunjungan Studi ke Kantor Tokopedia

Target masa studi tiga semester serta *deadline* persiapan pernikahan harus dipenuhi secara berdampingan dan memunculkan tantangan tersendiri. Begadang menjadi sebuah rutinitas yang saya jalani nyaris setiap hari, termasuk pada akhir pekan maupun hari libur lainnya. Selain itu, laptop berisi materi dan tugas kuliah selalu menemani setiap kali saya bepergian mengurus persyaratan pernikahan. Waktu antri di berbagai instansi ketika mengurus persyaratan pernikahan selalu saya manfaatkan untuk menyiapkan tugas presentasi, menulis *paper* ujian maupun melanjutkan *draft* tesis. Pada akhirnya, demi dapat memenuhi target perkuliahan dan pernikahan secara tepat waktu, pelaksanaan sidang tesis saya dilaksanakan secara *online* pada malam hari pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 19.00 WIB, hanya dua belas jam sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pengalaman yang sangat menantang, berkesan, sekaligus melegakan karena atas izin Allah swt. dan *support* banyak pihak, saya berhasil memperoleh gelar master dengan masa studi delapan belas bulan dan mendapatkan peran baru sebagai seorang istri dalam selang waktu dua belas jam setelahnya, *Alhamdulillah*. Bonus atas usaha keras tersebut adalah predikat kelulusan *cumlaude*.

Masa kuliah selama satu setengah tahun membuka wawasan dan memberikan pengalaman yang luar biasa berharga untuk saya. Saya digembleng untuk dapat mengembangkan *skill* berpikir kritis dan terstruktur, membaca artikel-artikel ilmiah berkualitas, menulis karya ilmiah, semakin percaya diri untuk menyampaikan pendapat maupun berbicara di depan umum, bekerja di bawah impitan *deadline*, serta dituntut membuat keputusan secara cepat, tetapi penuh pertimbangan.

Tim pengajar dan tim sekretariat Universitas Indonesia sangat memfasilitasi agar mahasiswa dapat mengembangkan *skill* tersebut. Selain itu, tim Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas juga sangat memfasilitasi dalam hal pemantauan, seperti secara berkala mengumpulkan para kayasiswa untuk memantau *progress* perkuliahan serta mendengar kendala yang dirasakan karyasiswa. Atas nama pribadi, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada tim Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dan Universitas Indonesia atas segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan selama saya menjalani masa studi.

Akhir kata, semoga pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat kita semua untuk belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. *Aamiin*. ■



Alex Francisca

Alumni Peserta Pelatihan City Planning Angkatan I Tahun 2018 di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung; saat ini memegang jabatan sebagai Fungsional Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

MENAMBAH WAWASAN TEORETIS DAN PRAKTIS TENTANG *CITY PLANNING*

Pada tanggal 1–12 Oktober 2018, saya mengikuti Pelatihan *City Planning* yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan ini bekerja sama dengan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung (MPWK ITB), dan dilaksanakan di Gedung Sugijanto Soegijoko, Jalan Ganesha 10, Bandung.

Pelatihan *City Planning* diikuti oleh 25 peserta dari berbagai kantor Dinas dan Badan Perencana Pembangunan Daerah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk menambah pemahaman peserta perihal perencanaan kota, regulasi perencanaan kota baru, serta proses identifikasi permasalahan kota. Peserta diharapkan dapat

memahami permasalahan kota dan mampu memberikan masukan pada proses penyusunan rencana kota, baik berupa rencana aksi maupun rencana strategis, untuk mengatasi permasalahan kota.

TOPIK PELATIHAN *CITY PLANNING*

Pada Pelatihan *City Planning* tersaji topik-topik pelatihan yang diramu dari teori-teori perencanaan tata ruang perkotaan, regulasi-regulasi yang terkait perkotaan, serta permasalahan-permasalahan faktual perkotaan yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan akademisi perguruan tinggi. Secara rinci, terdapat dua belas topik dalam pelatihan tersebut: (1) Pengantar Perencanaan Kota; (2) Karakteristik Kota dan Perkotaan, Perencanaan Kota, dan Persoalan-Persoalannya; (3) Pendekatan dalam Perencanaan Kota; (4) Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang Produk Perencanaan Kota (RTRW, RDTR, Rencana Kawasan Strategis, RTBL); (5) Proses dan Pertimbangan

dalam Perencanaan Kota; (6) Proses Perencanaan Kota di Indonesia; (7) Pertimbangan dalam Proses Perencanaan Kota; (8) Konsep dan Inovasi dalam Perencanaan Kota; (9) Pembiayaan Pembangunan Kota; (10) Pengendalian Pemanfaatan Ruang; (11) Manajemen Perencanaan Pembangunan dan Kelembagaan Kota; serta (12) Konsepsi Ideal Sistem Kelembagaan dalam Penataan Ruang.

KUNJUNGAN LAPANGAN

Pelatihan *City Planning* yang saya ikuti menggunakan dua metode pelatihan, yaitu metode pemberian materi topik pelatihan melalui kelas (penyampaian materi maupun diskusi kelompok) serta metode kunjungan lapangan pada suatu kawasan perkotaan. Adapun metode kunjungan lapangan bertujuan untuk menambah wawasan peserta pelatihan terkait upaya penanganan permasalahan perkotaan oleh otoritas pengelola perkotaan.





Kunjungan lapangan dilaksanakan pada hari Senin, 8 Oktober 2018, bertempat di PT Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan kunjungan lapangan terdiri atas sesi kunjungan ke pengelola PT Jababeka yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke pusat-pusat kegiatan perkotaan di Jababeka. Berdasarkan hasil kunjungan pada kawasan Jababeka telah diatur kawasan-kawasan peruntukan sesuai dengan fungsi ruang seperti fungsi kawasan industri, perdagangan jasa perkantoran, pengolahan dan pelayanan utilitas, serta kawasan penunjang seperti kegiatan pemerintah (termasuk kantor Polres Metro Kabupaten Bekasi).

STUDI KASUS

Dari hasil kunjungan lapangan pada PT Jababeka, saya dan peserta lainnya diharapkan dapat mengimplementasikan materi yang telah didapat pada kegiatan di

kelas dengan kondisi riil kawasan perkotaan di PT Jababeka. Pada pelaksanaannya, peserta pelatihan dikelompokkan dalam tiga kelompok dengan tema Perencanaan Kota Baru, Manajemen Lahan, dan Manajemen Kota Baru. Kegiatan kelompok tersebut dilakukan dengan metode studio perencanaan.

MEMBUAT ARTIKEL

Dari beberapa pelatihan yang dikerjasamakan antara Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas dan perguruan tinggi yang saya pernah ikuti, Pelatihan *City Planning* memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan tersebut adalah peserta pelatihan diwajibkan menyusun artikel yang terkait dengan *city planning* sesuai dengan sistematika penulisan artikel pada Program Studi MPWK ITB.

Hasil penulisan artikel yang telah lolos dari *reviewer*, selanjutnya

dikompilasikan dalam buku *Bunga Rampai Perspektif Pengembangan Kota Baru, Manajemen Lahan, dan Pertanahan di Indonesia* terbitan ITB Press. Judul artikel saya yang dikompilasi dalam buku tersebut adalah "Kajian Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang pada Wilayah Pengembangan Kota Publik Maja sebagai Kota Baru".

Tentu saja pembuatan artikel menjadi tambahan waktu bagi peserta pelatihan. Meskipun demikian, terdapat hikmah di dalamnya, yaitu membiasakan peserta agar dapat menulis karya ilmiah. Hal ini bahkan menjadi keuntungan tambahan bagi peserta pelatihan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional tertentu, selain angka kredit yang akan didapatkan dari sertifikat yang didapat setelah lulus dari pelatihan.



John Julius Boekorsjom

PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA MADYA
DI BAPPEDA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

MENJADI PERENCANA UNTUK BERBAKTI KEPADA TANAH PAPUA

Karier Jabatan atau kekuasaan bisa dibeli atau didapatkan dengan cara yang tidak wajar, tetapi integritas itu jauh lebih bernilai dan lebih berharga dari pada jabatan itu sendiri. Orang yang punya integritas akan terus bersinar dan bercahaya. (Jujur, Tulus, dan Kasih).

Saya John Julius Boekorsjom dengan nama panggilan John. Saya lahir di Sorong, 1 Juli 1969, putra ke-8 dari delapan bersaudara. Ayah saya seorang Pamong Praja, beliau seorang *bestuur* pada pemerintahan zaman Belanda di Papua dan pensiun pada tahun 1990. Nilai-nilai kepamongan menurun kepada anak-anaknya. Ibu saya berpendidikan perawat pada zaman Belanda di Papua. Namun setelah menikah, ibu lebih memilih mengabdikan diri dengan mengurus rumah tangga dan mendidik putra-putrinya agar menjadi berkat bagi orang lain.

Setelah tamat SMA Negeri 1 Jayapura, saya melanjutkan pendidikan ke Universitas Hasanuddin Ujung Pandang (Makassar saat ini), Jurusan

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Saya menamatkan pendidikan S-1 pada tahun 1996 dengan judul skripsi "Masalah dan Prospek Pengembangan Kota Administratif Sorong di Kabupaten Dati II Sorong".

Pada tahun 1997, saya diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Prajabatan Nasional (Prajabnas) Angkatan I Irian Jaya di Resimen Induk Kodam (Rindam) V Brawijaya Malang. Selanjutnya, saya ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Irian Jaya pada tahun yang sama. Selama enam bulan awal, saya bekerja di Bagian Umum Sekretariat Bappeda Irian Jaya. Saat menerima Nota Penempatan Langsung dari Kepala

Bappeda, beliau menasihati saya, "John, saya tempatkan kamu di Bidang Statistik Pelaporan (Stalap) pada Sub-Bidang Analisis Pembangunan. Jangan kecewa karena ini bukan bagian yang basah atau kering (istilah saat itu), tetapi karena bidang ini sangat baik untuk bisa belajar tugas dan fungsi dari Bappeda secara keseluruhan. Suatu saat, kamu akan merasakan manfaat yang luar biasa."

Sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Irian Jaya (Papua saat ini), saya bertekad untuk dapat meraih kesempatan melanjutkan pendidikan pada S-2 dan S-3. Tahun 2005, saya menyelesaikan pendidikan S-2 di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM) Yogyakarta dengan

judul tesis “Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kakao Rakyat dengan Pola Pendampingan di Kecamatan Kemtuk, Kabupaten Jayapura”. Pada tahun 2017, puji Tuhan, atas biaya mandiri dan penuh perjuangan serta didukung oleh keluarga, saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Fisipol Universitas Padjajaran dengan judul disertasi “Otonomi Khusus Provinsi Papua (Studi Tentang Faktor Faktor yang Memengaruhi Majelis Rakyat Papua dalam Mewujudkan Tujuan Otonomi Khusus Provinsi Papua)”.

Tahun 2003, saya mendapat kesempatan mengikuti *Local Government Official Training Program in Japan*. Peserta dari Indonesia ada empat orang: 1 dari Papua (saya sendiri), 2 dari Jawa Timur, dan 1 dari Jambi. Selama tiga bulan, kami belajar bahasa dan budaya Jepang di Japan Intercultural Academy of Municipalities (JIAM) di Kota Otsu, Shiga Prefecture. Kami juga menjalani program magang selama delapan bulan di Kantor Hubungan Internasional, Yamagata Prefecture, dengan fokus observasi otonomi daerah, pendidikan dasar, pertanian dan lingkungan, serta pelayanan publik kota.

PENGALAMAN JABATAN STRUKTURAL

Pada tahun 2004, saya menerima Nota Tugas Kepala Bappeda Provinsi Papua sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub-Bidang Analisis Pembangunan Bidang Statistik dan Pelaporan. Tugas tersebut saya emban sampai dengan tahun 2005. Kemudian, saya menerima Nota Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan atau BP3D (nama baru Bappeda) Provinsi Papua pada tahun 2005 sebagai Plt. Kepala Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Perbatasan Bidang Perencanaan Wilayah. Adapun Bidang Perencanaan Wilayah merupakan bidang baru pada struktur BP3D Provinsi Papua. Selama menjalankan

tugas, saya secara aktif terlibat dalam pertemuan koordinasi antardua belah provinsi wilayah perbatasan antarnegara yang akhirnya melahirkan Lima Kesepakatan Bersama, salah satu kesepakatannya adalah “mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Lembaga Pengelola Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui Peraturan Presiden yang bentuk dan struktur organisasi diserahkan kepada kebijakan Presiden”.

Selama dua tahun (2005–2007), beberapa *output* yang dihasilkan melalui inovasi-inovasi kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Perbatasan antara lain menyusun buku *Profil Perbatasan Papua* dan buku *Selayang Pandang Perbatasan Provinsi Papua*. Kedua buku tersebut merupakan informasi dan data awal tentang wilayah perbatasan di Provinsi Papua. Saya juga menginisiasi Forum Kepala Bappeda Kabupaten Kota Perbatasan di Provinsi Papua yang melahirkan kesepakatan bersama dalam berbagi tugas dan peran dalam perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan Papua yang dikenal dengan “Kesepakatan Matoa”. Dari forum tersebut juga melahirkan Rencana Aksi Perencanaan Pembangunan di Wilayah Perbatasan Papua hasil kerja sama dengan Kementerian Daerah Tertinggal yang melaksanakan rapat kordinasi (rakor) kementerian/lembaga terkait dengan Provinsi Papua di Kota Jayapura. Dalam kegiatan rakor tersebut juga dilakukan kunjungan ke Kabupaten Keerom dan Distrik Waris untuk meninjau tapal batas.

Dalam menjalankan tugas tersebut, saya juga terlibat dalam *Border Leasson Meeting* (BLM) antara Indonesia dan Papua Nugini, baik di Jayapura, Batam, maupun Pontianak. Saya juga terlibat dalam persiaman pembukaan *border* (Pos Lintas Batas/PLB) antara Indonesia dan Papua Nugini di Pos Lintas Batas Skouw (saat

itu digunakan nama tersebut), Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Selama menjalankan tugas, saya melakukan studi kaji ke Badan Otorita Batam, Konsulat Johor, Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur dan Pemerintah Provinsi Hatyai, Thailand (sangat berkesan karena kami diterima secara resmi oleh Wakil Gubernur Provinsi Hatyai, Thailand). Saya juga melakukan Studi Kaji Perencanaan dan Pembangunan *Border* Entikong Kalimantan Barat dan Konsulat Indonesia di Kuching Malaysia.

Sejak tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, saya dilantik dalam jabatan Kepala Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Kabupaten/Kota, Bidang Perencanaan Wilayah. Tugas ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Kabupaten/Kota merupakan sub-bidang baru. Dalam menjalankan tugas tersebut, saya menginisiasi kegiatan Manajemen Perencanaan Wilayah Kota di Papua, dengan menginisiasi pembentukan Forum Kepala Bappeda di Provinsi Papua. Pembentukan forum tersebut dalam rangka menyatukan pemahaman tentang manajemen perkotaan dan menyepakati titik ungit pembangunan pada tiap-tiap wilayah pembangunan (WP/saat itu digunakan untuk pembagian wilayah pembangunan Provinsi Papua) di Provinsi Papua. Forum tersebut juga digunakan untuk saling belajar antarkabupaten/kota dalam menangani permasalahan-permasalahan perencanaan dan pembangunan kota (ibu kota kabupaten/kota). Tempat pelaksanaan pertemuan tersebut setiap tahunnya berpindah dari satu kota ke kota lain sesuai kesepakatan forum.

Pada tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, saya dilantik sebagai Kepala Sub-Bidang Data Dasar Pembangunan, Bidang Data Pembangunan merupakan bidang baru pada struktur kelembagaan



Bappeda Provinsi Papua sehingga merupakan tantangan tersendiri dalam menjalankan tupoksi tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun komunikasi dan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan *Non-Government Organization* (NGO)/Mitra Pembangunan di Papua. Dalam menjalankan tugas tersebut, beberapa kegiatan baru yang kami perjuangkan antara lain manajemen data dasar, reproduksi dokumen, dan kajian data statistik pembangunan. Melalui kegiatan manajemen data dasar bersama dengan BPS serta NGO/mitra pembangunan Papua maka terbentuklah Forum Data Pembangunan Papua. Forum ini bertujuan menyiapkan data perencanaan pembangunan dan mewujudkan Papua Satu Data. Forum Data Pembangunan Papua adalah rumah bagi para wali data, baik vertikal maupun daerah, serta rumah bagi semua sistem data dari berbagai sektor.

Dari tahun 2009–2011, saya melakukan kolaborasi bersama BPS Papua dan seluruh mitra pembangunan Papua mempersiapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Forum Data Pembangunan Papua, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang Forum Data Pembangunan Papua, pemetaan ketersediaan data di kabupaten/kota percontohan, harmonisasi indikator dan metadana antara Bappeda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kabupaten/kota, pembentukan Forum Data Pembangunan tingkat kabupaten/kota (tujuh kabupaten), serta draf SOP Satu Data di Provinsi Papua. Selain itu, saya juga menerbitkan buku *Welcome to Papua* dan *View to Papua*, menyusun buku *Pendidikan Orang Asli Papua (OAP)*, *Sejarah Masa Lalu dan Kini Papua*, *Profil Data Dasar Pembangunan Papua*, dan *Kumpulan Perdatus dan Perdasi Provinsi Papua*. Bersama Unicef, saya mempersiapkan pengenalan *System Dev Info* Papua

dengan melakukan Pelatihan *Dev Info* dan membangun *System Dev Info* di Papua. Pada 21 November 2011, Forum Data Papua diresmikan oleh Plt. Gubernur Provinsi Papua berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 150 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011.

Pada tahun 2013, bersama mitra pembangunan Aus-Aid Antara menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penguatan Forum Data Pembangunan Papua. Kegiatan ini diawali dengan *Workshop* Pusat Data dengan tema “Membangun Papua Melalui Data dan Informasi” yang diikuti oleh para wali data, baik dari SKPD provinsi maupun vertikal serta seluruh mitra pembangunan Papua. Aus-Aid Antara memberikan dukungan dalam melakukan studi kaji ke Pusat Data Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bakti Makassar. Studi Kaji juga dilakukan ke Pusat Data Bappeda Provinsi Jawa Barat, mengunjungi Bandung Digital Valley Telkom Bandung, dan Pusat Data

Bappeda DKI Jakarta. Salah satu *output* dari dukungan Aus-Aid Antara adalah pembangunan gedung dan sarana prasarana Pusat Data dan Analisis Pembangunan Papua, atas dasar permohonan Pemerintah Papua (ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya karena pembangunan fisik dan peralatan data bersumber dari dana Aus-Aid Antara).

Sebelum restrukturisasi lembaga Bappeda yang menghapus Bidang Data Pembangunan, saya mengajukan telaah staf kepada Gubernur Papua tentang pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pusat Data dan Analisis Pembangunan, disertai dengan kajian akademisnya serta draf SK Pembentukan Pusat Data dan Analisis Pembangunan Papua (Pusdalisbang) yang akhirnya melahirkan UPT Bappeda Provinsi Papua, Pusdalisbang Provinsi Papua (ini juga menjadi kebanggaan tersendiri dalam bertugas).

Mulai tahun 2018, saya dilantik menjadi Kepala Bidang Sosial Budaya selama dua tahun (2018–2020). Saat itu, saya melakukan jaringan kerja sama dengan mitra pembangunan Papua dan meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Koordinasi Sosial Budaya dan antarlintas bidang. Selain itu, saya juga memperjuangkan penyusunan Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goals* (RAD SDGs) Provinsi Papua dengan kolaborasi antarmitra pembangunan dan PT Freeport Indonesia, Bank Papua, Bank Indonesia, serta perguruan tinggi. Akhirnya, dokumen RAD SDGs Provinsi Papua dan SK Penetapan RAD SDGs Provinsi Papua dapat selesai. Selama dua tahun tersebut, saya juga mendorong sosialisasi dan koordinasi dalam penanganan stunting di Provinsi Papua bersama mitra pembangunan di Papua.

DINAMIKA SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA

Awal perkenalan saya dengan Jabatan Fungsional Perencana adalah melalui diskusi dengan Pejabat Fungsional Perencana (PFP) senior Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Randy R Wrihatnolo, S.Sos., M.ADM. (yang juga merupakan panutan bagi saya). Tahun 2013, saya mengikuti tes Diklat Fungsional dan tahun 2014 mengikuti Diklat Fungsional Perencana Sosial Tingkat Madya di kampus MAP UGM. Selama mengikuti diklat tersebut, saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai provinsi dan mendapat banyak pencerahan dari teman-teman yang telah lebih awal berstatus PFP. Saya pun semakin tertarik menekuni Jabatan Fungsional Perencana karena para pengajar di MAP UGM sangat memberikan tambahan ilmu perencanaan.

Selama setahun, saya tidak bisa mengurus Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dikarenakan Tim Penilai Provinsi Papua belum ada. Saya kemudian membangun koordinasi dengan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas melalui Bapak Ivan Budi Susetyo serta berkonsultasi dengan Bapak Randy R Wrihatnolo yang selalu menyediakan waktu untuk saya. Akhirnya Penilaian Angka Kredit (PAK) saya ditandatangani oleh Kepala Pusbindiklatren (saya merasa istimewa).

Tahun 2016, saya baru diangkat menjadi PFP berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua, sebuah proses yang panjang karena persepsi yang berbeda atau belum memahami peraturan tentang Jabatan Fungsional Perencana. Saat itu, di Bappeda Provinsi Papua baru memiliki tiga PFP. Dalam Jabatan Fungsional Perencana, saya lebih banyak melakukan sosialisasi dan mendorong teman-teman untuk mengambil jenjang Jabatan Fungsional Perencana

yang saat itu belum tersosialisasikan dengan baik.

Selain menyosialisasikan Jabatan Fungsional Perencana, sebagai PFP, saya diminta untuk mengajar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Papua dan menjadi asisten Profesor Akbar Silo dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Publik pada Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih. Hal ini semakin membuat saya berkeyakinan untuk menekuni Jabatan Fungsional Perencana.

Saya semakin termotivasi untuk bertekun dan berkarya dalam Jabatan Fungsional Perencana karena dilibatkan dalam struktur kepengurusan Pengurus Nasional Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) periode 2015–2018. Saya berterima kasih karena banyak belajar dari para senior PFP dan menambah jejaring komunikasi di antara PFP, baik di tingkat pusat maupun antardaerah.

Pada tahun 2017, bersama Bapak Ir. Iriawan, M.B.A., M.M., PFP Ahli Muda, saya membuat telaahan staf kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Bappeda Provinsi Papua tentang Pembentukan UPT Pusdiklatren Bappeda Provinsi Papua. Dasar pemikirannya adalah Provinsi Papua terdiri atas 29 kabupaten/kota sehingga dibutuhkan sebuah UPT yang tugas fungsinya melatih dan mendidik tenaga-tenaga Perencana, bukan hanya pada Bappeda provinsi/kabupaten/kota, tetapi di setiap OPD yang mempunyai tenaga Perencana. Pemenuhan kebutuhan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Perencana di Provinsi Papua sangat penting sehingga dokumen dan implementasi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua diharapkan akan semakin meningkat dengan baik.



Foto 1. Pengukuhan Pengurus Nasional AP2I oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Dr. Sofyan Djalil, S.H.,M.A.,M.A.L.D.

Foto 2. Mengikuti “2008 Local Government Official Training Program in Japan”

Foto 3. Selama tiga bulan belajar bahasa dan budaya Jepang di Japan Intercultural Academy of Municipalities (JIAM) di Kota Otsu, Shiga Prefecture

Foto 4. Bersama Tim Monitoring BPSDM Provinsi Papua berkunjung ke Kedutaan Besar RI di Den Haag, Belanda, pada tahun 2018

Eksistensi PFP di Bappeda Provinsi Papua secara kuantitas mulai bertambah. Saat ini (2021), sudah terdapat sembilan PFP yang terdiri atas 2 PFP Ahli Pratama, 5 PFP Ahli Muda dan 2 PFP Ahli Madya. Kami

para PFP Bappeda Provinsi Papua sangat berterima kasih kepada Bapak Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si. (Kepala Bappeda Provinsi Papua) yang memberikan dukungan kepada PFP dengan mengeluarkan Nota Tugas

kepada PFP Bappeda Provinsi Papua di lingkungan Bappeda Provinsi Papua. Beliau juga memberikan satu ruangan untuk para PFP. Kami juga berterima kasih atas dukungan Sekretaris Bappeda Provinsi Papua,

Bapak Adolof Kambuaya, S.H., M.Si., yang secara aktif memberdayakan dan melibatkan PFP dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Berdasarkan kesepakatan bersama, saya dipercaya oleh teman-teman PFP Bappeda Provinsi Papua sebagai koordinator Jabatan Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Papua. Beberapa program kegiatan yang rencana kami akan lakukan antara lain pendataan dan konsolidasi PFP di seluruh Provinsi Papua, peningkatan kualitas SDM PFP melalui pelatihan singkat secara daring, persiapan

pembentukan Komisarariat Fungsional Perencana Provinsi Papua, dan lain lain. Jabatan Fungsional Perencana adalah sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Walaupun belum banyak yang saya buat dalam memangku jabatan ini, ada harapan saya untuk setia dan tekun menjalani Jabatan Fungsional Perencana sebagai bagian dalam bakti saya kepada tanah Papua. Jabatan Fungsional Perencana harus semakin tersosialisasikan di seluruh Bappeda di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga dokumen perencanaan pembangunan dan implementasi

perencanaan pembangunan akan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan ke depan.

Semoga pengalaman yang saya tulis ini dapat memberikan nilai tambah dan membangun motivasi berkarya dalam Jabatan Fungsional Perencana. Setiap daerah berbeda, tetapi perbedaan itu akan menjadi peluang bagi kita semua yang mencintai dan menjalankan Jabatan Fungsional Perencana.

Salam Perencana. ■

TABEL 1. PENGALAMAN DIKLAT, PENGALAMAN TUGAS KE LUAR NEGERI, DAN KARYA DALAM TUGAS

RIWAYAT DIKLAT		
No.	Deskripsi	Tahun
1	Pelatihan Strategi Perencanaan di Daerah	1999
2	Diklat Administrasi Umum	2000
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	2009
4	<i>Training of Experts Analisis Potensi Wilayah</i>	2002
5	Sistem Peningkatan Produktivitas dan Pelimpahan Kewenangan Produktivitas bagi Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	2002
6	<i>Trainee on the Overseas Officials Cooperation and Exchange Project of Yamagata Prefecture Government</i>	2003–2004
7	Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Provinsi Papua	2006
8	Diklat Perencanaan Daerah Berbasis Data Spasial	2008
9	<i>Training of District Provincial Reporting and Budget Monitoring</i>	2008
10	Diklat Jabatan Fungsional Perencana Madya Sosial	2014
RIWAYAT TUGAS KE LUAR NEGERI		
No.	Deskripsi	Tahun
1	Belajar Bahasa Jepang di JAIM OTSU Ken Jepang (4 bulan)	2003
2	Magang pada Kantor Hubungan Internasional Kantor Gubernur Yamagata Prefecture Jepang (8 bulan)	2003–2004
3	Mediasi Pelaksanaan Ulang Tahun Kerja Sama Provinsi Kembar Papua-Yamagata di Papua dan Kota Yamagata Jepang (1 Minggu)	2004
4	Ketua Tim Studi Banding Perbatasan Entikong-Sarawak di Kuching Sarawak, Malaysia	2006
5	Anggota Tim Studi Banding Perbatasan Batam-Johor-Kuala Lumpur-Hat Yai, Thailand.	2008
6	Anggota Tim Studi Banding Penyusunan RTRW Provinsi Papua di Malaysia	2009
7	Anggota Tim Provinsi Papua memperingati Ulang tahun Provinsi Kembar Papua-Yamagata di Kota Yamagata Jepang	2010
8	Anggota Tim Provinsi Papua mengikuti "China-Asean Expo (CAExpo), to Celebrate The 20th Anniversary of Asean - China Dialogue Relations", di Kota Nanning, Guang Xi, China	2011

RIWAYAT TUGAS KE LUAR NEGERI		
No.	Deskripsi	Tahun
9	Anggota Tim Provinsi Papua mengikuti Busan International Seafood & Fisheries Expo 2012 di Kota Busan, Korea	2012
10	Anggota Tim Perencanaan Papua 2100, Kelas Khusus di London School of Economics and Political Science (LES) di London bersama Prof. Eve Mitleton-Kelly (Director of the Complexity Research Programme) (1 Minggu), http://www.tlinc.com/Eve_Mitleton_Kelly.html ; http://www.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/complexity/aboutus/emk.aspx	2013
11	Anggota Tim Perencanaan Papua 2100 Kelas Khusus di Glasgow Scotland bersama Dr. Alastair McIntosh (Centre for Human Ecology (CHE)) (2 Minggu) (http://www.alastairmcintosh.com/)	2013
KARYA DALAM TUGAS		
No.	Deskripsi	Tahun
1	Membentuk Forum Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang berbatasan antarnegara di Provinsi Papua (Kota Jayapura, Kabupaten Jatapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Pegunungan Bintang)	2005–2007
2	Menyusun Buku <i>Profil Wilayah Perbatasan Antarnegara di Provinsi Papua</i> , bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan Universitas Cendrawasih	2005–2006
3	Menyusun Buku <i>Selayang Pandang Wilayah Perbatasan Antarnegara di Provinsi Papua</i> , bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan Universitas Cendrawasih	2005–2006
4	Membentuk Forum Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dalam Perencanaan Manajemen Kota melalui kegiatan “Manajemen Perkotaan” di Provinsi Papua	2007–2009
5	Menginisiasi pembentukan Forum Data Dasar Pembangunan Provinsi Papua melalui kegiatan “Manajemen Data Dasar Pembangunan” di Provinsi Papua bekerja sama dengan BPS Provinsi Papua dan mitra pembangunan Papua	2009–2014
6	Menyusun SOP Forum Data Dasar Pembangunan Papua bersama BPS Provinsi Papua dan mitra pembangunan Papua (UNDP, UNICEF, NWPFA, dll)	2013
7	Menginisiasi pembentukan UPT Data dan Analisis Pembangunan Bappeda Provinsi Papua bersama mitra pembangunan Papua	2013–2015
8	Menginisiasi Pembangunan Gedung dan fasilitas UPT Data dan Analisis Pembangunan Bappeda Provinsi Papua dengan sumber pendanaan melalui mitra pembangunan Papua	2013–2015
9	Menyusun buku <i>Profil Data Dasar Pembangunan Papua</i> bersama Unicef dan UNDP	2010–2014
10	Menyusun buku <i>Welcome to Papua</i> dan buku <i>View to Papua</i> yang terbit setiap tahun	2010–2015
11	Bersama Unicef menginisiasi <i>Info Papua</i> berbasis web	2010–2014
12	Menyusun buku <i>Sejarah Papua dari Masa ke Masa</i> bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan Universitas Cendrawasih	2010–2011
13	Menyusun buku <i>Profil Kemiskinan Provinsi Papua</i> , bekerja sama dengan BPS Papua	2012–2013
14	Menyusun buku <i>Profil Pendidikan Provinsi Papua</i> , bekerja sama dengan BPS Papua	2013–2014



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KERAGAMAN KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BERSAMA PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
SERTA PELAKSANAANNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi dan beragam bidang ilmu untuk dapat menyusun perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan secara baik dan berkelanjutan.

LATAR BELAKANG

Upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sifatnya interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner ilmu menjadi alasan didirikannya Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (PPs Unsri) pada tahun 1994, yang akan menjadi *The Centre for Interdisciplinnary, Multidisciplinnary, and Transdisciplinnary Studies*.

Untuk mempercepat kemajuan yang ingin dicapai tersebut, PPs Unsri terus memperbaiki kualitas proses pendidikan dan meningkatkan relevansinya dalam rangka persaingan global. Pada masa mendatang, PPs Unsri akan menjadi pusat pengembangan ilmu interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner unggulan yang sejajar dengan universitas terkemuka di Asia, baik dari segi mutu lulusan maupun mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan yang telah dicapai

PPs Unsri sampai kurun waktu 2020 merupakan langkah yang sangat penting bagi keberhasilan yang lebih besar dan menyeluruh untuk pencapaian rencana strategis PPs Unsri pada periode 2020–2024.

Iklim keterbukaan pasar menuju pusat pengembangan ilmu interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner unggulan mulai memengaruhi PPs Unsri, dengan peningkatan jumlah kerja sama nasional dan internasional. Jenis kerja sama dilakukan dalam bentuk (1) kerja sama bidang pendidikan; (2) kerja sama bidang penelitian; dan (3) kerja sama bidang pengabdian. Kerja sama bidang pendidikan sendiri terdiri atas (1) kerja sama pendidikan; dan (2) kerja sama pelatihan. Hasil survei kepuasan konsumen yang dilakukan PPs Unsri pada tahun 2019 menunjukkan bahwa mitra kerja sama berpersepsi sangat puas 66.66%, puas 29.16 % dan cukup puas 4.17% dari sisi iklim kerja sama, kemanfaatan, kesesuaian dengan lingkup kerja, dan realisasi target kegiatan kerja sama.

Pandemi Covid-19, yang saat ini terjadi di seluruh dunia, berdampak pada iklim kerja sama yang selama ini telah berjalan. Dampak tersebut dapat positif dan negatif. Berdasarkan hasil pengamatan, dampak positif yang muncul berupa makin luasnya cakupan kerja sama nasional dan internasional yang dapat dibangun, karena pandemi Covid-19 membuka peluang terjadinya kerja sama tanpa harus mensyaratkan adanya pertemuan secara *offline* dengan biaya kegiatan yang dapat ditekan. Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga berdampak pada penurunan efektivitas pelaksanaan kerja sama, misalnya koordinasi *online* memerlukan waktu pertemuan yang relatif lebih lama.

Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas) merupakan salah satu lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan PPs Unsri sejak tahun 2002. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama program pendidikan dan pelatihan. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada mekanisme kerja sama pelatihan antara Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dengan PPs Unsri. Pelaksanaan pelatihan, yang sebelum pandemi dilaksanakan secara *offline* (klasikal dalam kelas), kini berubah menjadi bersifat *online*. Kegiatan kunjungan lapangan yang biasanya dilaksanakan langsung ke lokasi berubah menjadi kunjungan virtual. Ujian yang biasanya dilaksanakan di kelas pun berubah menjadi ujian secara *online*. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan mengeksplorasi keragaman program pendidikan dan pelatihan Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas di PPS Unsri dan me-review pelaksanaannya pada masa pandemi Covid-19.

GAMBARAN UMUM PROGRAM KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL PPS UNSRI

Sebagai wujud kiprah secara nasional, sejak tahun 2002 PPs Unsri telah menjalin kerja sama pendidikan dan pelatihan. Kerja sama pendidikan dengan Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren memberikan amanah kepada PPs Unsri untuk menyelenggarakan program pendidikan magister tiga belas bulan bagi aparatur Pemerintah Daerah. Awal kerja sama dituangkan dalam bentuk realisasi penyelenggaraan Program Studi Magister Adminitrasi

Publik (S-2 tiga belas bulan) pada tahun 2005 sesuai Keputusan Rektor Unsri No. 1407/PT11.1.1/ C.6.f/2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) kerja sama Pusbindiklatren Bappenas dengan PPs Unsri Tahun Ajaran 2005/2006 bagi tenaga perencana utusan Pemerintah Daerah dari seluruh Indonesia dengan biaya penuh (format *cost sharing* tipe I) dari Kementerian PPN/Bappenas. Pengembangan kerja sama ini dilakukan pada tahun 2006 dalam bentuk program sejenis bagi Program Studi Ilmu Ekonomi (BKU Perencanaan SDM) dengan format *cost sharing* tipe IV dengan kualifikasi peserta yang sama.

Program kerja sama terus dikembangkan dan pada tahun akademik 2008, PPs Unsri juga telah menyelenggarakan Program Magister Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Akuntansi Publik, kerja sama antara PPs Unsri dengan Depdiknas (Inspektorat Jenderal) melalui program Star-SDP. Peserta program ini merupakan utusan dari Inspektorat se-Sumatera Selatan. Sementara itu, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (Akuntansi Pemerintahan/ Pengawasan Keuangan Negara) dan Program Studi Magister Teknik Kimia (Petrokimia) menyelenggarakan program pendidikan magister yang diperuntukkan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota maupun bagi calon tenaga guru melalui Program Beasiswa Unggulan kerja sama Program Pascasarjana Unsri dengan Depdiknas melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri. Kerja sama lainnya juga dilakukan dengan Kementerian Agama RI dengan format tiga belas bulan untuk Program Studi

Administrasi Publik, juga dengan Kemenristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa beasiswa belajar serta dengan Pemprov Sumsel berupa beasiswa SSNBI yang diperuntukkan bagi guru-guru dari Sekolah Standar Nasional Bertaraf Internasional.

Sejak tahun 2006, iklim keterbukaan pasar mulai memengaruhi PPs Unsri, dengan peningkatan jumlah kerja sama internasional. Pada tahun 2007, PPs Unsri telah mewujudkan kerja sama internasional pendidikan dengan Belanda melalui penyelenggaraan Program *Double Master Degree*. Untuk mendukung Unsri sebagai *scientific leadership* pengembangan lahan rawa, pasang surut dan pesisir, Unsri mendirikan *Double degree Integrated Lowland Development and Management Planning (DDILDM)* dari kerja sama UNSRI dengan Unesco-IHE, Delft, The Netherland yang dimulai sejak tahun 2008 dengan surat izin dari Dikti No.2241/D5.4/T/2008, dengan gelar M.Si. dari Unsri dan M.Sc. dari Unesco-IHE dengan masa studi selama 2 tahun (8 bulan pertama di Unsri; 8 bulan kedua di Unesco-IHE, Delft, The Netherland; dan 8 bulan terakhir untuk penyelesaian tesis master di Unsri dan di Unesco-IHE, Delft, The Netherland.

Untuk menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan maka Program *Double Master Degree* dalam bidang *integrated food production and management planning* dengan Mie University Jepang, dan dalam bidang *energy and environment* dengan AIT Thailand serta dengan King Mongkuts University of Technology Thonburi-Thailand. Kedua program ini terlaksana atas dukungan Biro Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN), Depdiknas, melalui Skema Beasiswa Unggulan. Selain itu, PPs Unsri juga menjalin

kerja sama segitiga antara Unsri-Unesa-Utrecht The Netherlands, dalam penyelenggaraan International Master Program on Mathematics Education. Program yang terakhir ini mulai dilaksanakan pada tahun 2009 dengan dukungan beasiswa dari Dikti dan NESO Belanda, dan masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini merupakan fenomena yang menggembirakan sekaligus menjadi tantangan. Citra Unsri tampaknya telah mulai diperhitungkan sebagai perguruan tinggi yang berkualitas baik dalam skala nasional maupun internasional. Pada saat yang sama, hal ini menunjukkan perbaikan, peningkatan, dan pengembangan institusioanal di segala aspek sehingga standar akademik Program Pascasarjana Unsri benar-benar setara dengan program pascasarjana di luar negeri.

Selain kerja sama bidang pendidikan, kerja sama bidang riset juga terus didorong. Riset yang berkualitas akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Di samping mengikuti perkembangan iptek secara nasional dan global, juga harus mampu mengkaji dan mempublikasikan keunggulan sumber daya dan kearifan lokal secara nasional dan global. Secara kewilayahan, Unsri berada di tengah kawasan dengan kekayaan sumber daya yang beragam dan melimpah. Pada tahun 2010, Senat Unsri telah menggariskan fokus penelitian, yaitu energi, pangan, dan lingkungan. Dewasa ini, di Unsri dilaksanakan penelitian-penelitian yang dapat mewujudkan *centre of excelent* dan pengembangan ilmu dari berbagai bidang ilmu seperti:

- a. **Pada bidang lingkungan** telah berkembang riset mengenai rumah tahan gempa, pengolahan air tambang berbasis *adsorbent*

dan membran. Dibangunnya kolaborasi riset mengenai *socio-forestry* dengan ACIAR Australia, dan berkontribusi dalam restorasi gambut pada level nasional. Selain itu, berkembang riset tentang kimia bahan alam dan pengelolaan sumber daya alam dan energi. Unsri mengembangkan *biodiversity* melalui kerja sama riset nasional tanaman obat dan jamu (RISTOJA) dengan Kementrian Kesehatan yang telah dilaksanakan selama empat tahun. Unsri menjadi motor penelitian dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) sejak tahun 2016. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, Unsri bersama-sama dengan enam Perguruan Tinggi Negeri lain (Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Universitas Mataram, Universitas Jambi, Universitas Udayana, Universitas Nusa Cendana) membentuk Konsorsium "Perguruan Tinggi untuk Indonesia Hijau (PETUAH)" dan mendapatkan Dana Hibah dari United State of America, MCAI (Millennium Challenge Account Indonesia) USAID untuk mengembangkan *green knowledge* dengan tema "*Green Knowledge with Basis of Local Needs and Wisdom to Support Sustainable Development*" berbagai bidang ilmu dan teknologi sesuai dengan keunggulan masing-masing perguruan tinggi tersebut, di mana Unsri mengembangkan konservasi lahan gambut dan upaya meningkatkan produktivitasnya dengan membentuk *center of excellent "Peat Land Conservation and Productivity Improvement (PLACE)"* dengan *output Peatland restoration and ecosystem management*,

law enforcement, productivity strategy, multistakeholders institution management on peatland, forest fire mitigation, SISKAs, water management, integrated agriculture on sub-optimal land. Untuk menopang riset di bidang lingkungan dan keanekaragaman hayati, Unsri telah mengembangkan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Program Magister Pengelolaan Lingkungan dan Doktor Ilmu Lingkungan. Sejak tahun 2017, Unsri juga mengelola Pusat Pengembangan Informasi Data Spasial (PPIDS), hasil kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial dan membangun kerjasama riset mengenai Restorasi Lahan Gambut dengan Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jerman.

- b. **Pada bidang energi** telah dilaksanakan riset untuk mengembangkan biodiesel, energi baru dan terbarukan, gasifikasi batubara, *coal blending, coal dewatering*, dan bioetanol generasi 2. Pusat Unggulan Inovasi Energi (MoU bersama Rektor Unsri, Gubernur Sumatera Selatan dan BUMN Energi). Unsri menjadi koordinator Riset Unggulan Nasional Energi dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Unsri (2007–2011). Untuk mendukung pengembangan energi, pada tahun 2009 dikembangkan *Double Master Degree Energy and Environment* kerja sama Unsri dengan Asean Institute of Technology, Thailand dan dilanjutkan dengan The Joint Graduate School of Energy and Environment King Mongkut's University of Technology Thonburi (JGSEE/KMUTT), Thailand. Sejak tahun 2018, Unsri juga bekerja

sama dengan CIFOR dalam riset *Peatland Restoration in South Sumatera: Paludiculture Strategy using Bioenergy Potential Plant.*

- c. **Kegiatan kerja sama bidang riset pangan** terwujud pula dari adanya pimpinan dan dosen PPs Unsri yang berkontribusi dalam berbagai aktivitas kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Unsri. Unsri mengembangkan Pusat Unggulan Riset Pengembangan Lahan Sub-optimal (PUR PLSO). PUR-PLSO merupakan salah satu dari *center of excellence* yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 244/M/Kp/IX/2011 tanggal 15 September 2011 dan disahkan dengan Surat Keputusan Rektor UNSRI No. 0131.a/UN9/OT/2011. Saat ini, PUR-PLSO merupakan salah satu Pusat Unggulan Iptek yang menjadi binaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. PUR-PLSO ini merupakan konsorsium beberapa institusi di Sumsel, yaitu Unsri (sebagai *leader*), Balitbangnovda (Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah) Sumsel, BPTP (Balai Penerapan Teknologi Pertanian) Pundi Kayu, dan BRPPU (Balai Riset Perikanan dan Perairan Umum) Mariana. Pendirian PUR-PLSO dengan visi menjadi pusat pengembangan ilmu dan teknologi lahan sub-optimal yang unggul dan terkemuka nasional tahun 2018.

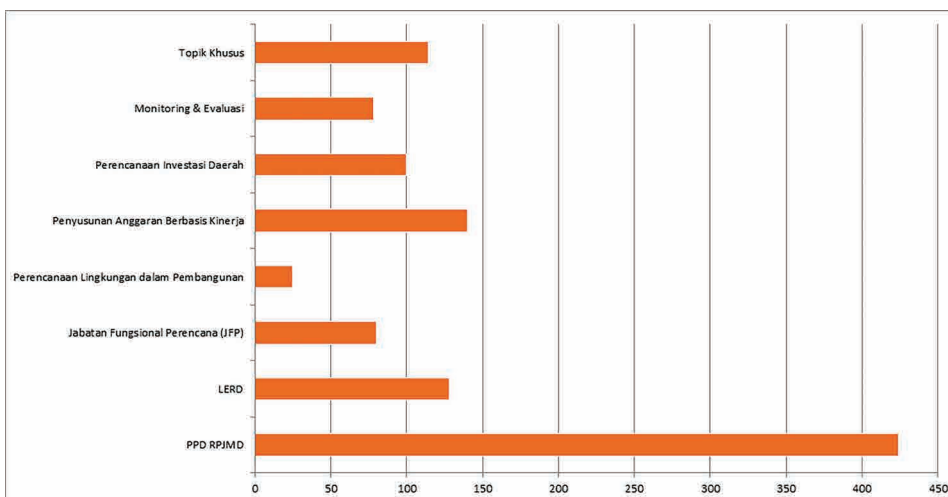
GAMBARAN UMUM PROGRAM KERJA SAMA PUSBINDIKLATREN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS DAN PPS UNSRI

PPs Unsri telah menjalin kerja sama resmi sejak tahun 2002 dengan Puslindiklatren Kementerian PPN/

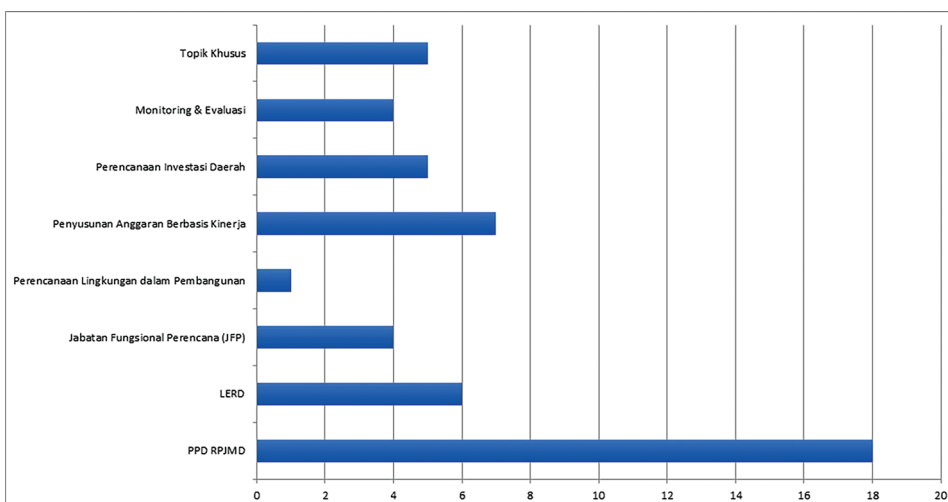
Bappenas. Kegiatan pelatihan mulai dilaksanakan tahun 2003 sampai dengan 2020. Selama tiga belas tahun, PPs Unsri telah melaksanakan 51 pelatihan bekerja sama dengan Pusbindiklatren, dengan total peserta 1.089 orang. Pelatihan pertama yang dilaksanakan pada tahun 2003 adalah Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 3–23 Oktober 2003 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Sementara pelatihan yang terakhir dilaksanakan adalah Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD) pada tanggal 16–28 November 2020 dengan peserta 25 orang. Setiap tahun, PPs Unsri rata-rata menyelenggarakan pelatihan sebanyak empat kali. Gambar 1 menyajikan perkembangan jumlah peserta selama tiga belas tahun terakhir.

Jika ditinjau dari jumlah pelaksanaan pelatihan, Gambar 2 menyajikan bahwa pelatihan yang paling banyak dilaksanakan adalah Pelatihan PPD-RPJMD yang telah dilaksanakan sebanyak 18 kali, sementara Pelatihan Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan dilaksanakan satu kali sejak tahun 2003–2020.

Seperti disampaikan sebelumnya, selain menjalin kerja sama dalam bentuk pelatihan, PPs Unsri bekerja sama dengan Pusbindiklatren juga menyelenggarakan program pendidikan seperti disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1 menyajikan jumlah peserta pelatihan sejak tahun 2015 berjumlah 356 orang atau rata-rata 85 orang pertahun. Kerja sama pendidikan dilaksanakan dalam bentuk (1) Kerja sama *Double Degree*, yaitu DD IRLCDMP. Program



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Peserta Program Pelatihan di PPs UNSRI, 2003—2020



Gambar 2. Jumlah Pelaksanaan Program Pelatihan di PPs UNSRI, 2003—2020

TABEL 1. PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA DALAM KEGIATAN KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PPS UNSRI DENGAN PUSBINDIKLATRENKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS, 2015—2020

NO.	JENIS KERJA SAMA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL (orang)
1.	DD IRLCDMP	8	0	0	0	0	0	8
2.	Pendidikan*	15	21	9	8	16	10	79
3.	Pelatihan	76	20	45	71	75	69	356

Keterangan: *) pada Prodi Magister Administrasi Publik

dilaksanakan tahun 2015 dengan jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa sebanyak 8 orang; dan (2) kerja sama program pendidikan dalam negeri yang dikelola oleh prodi Magister Adminitrasi Publik (MAP). Sejak tahun 2015, sudah memberikan beasiswa kepada 79 orang mahasiswa

PELATIHAN PUSBINDIKLATREN DI PPS UNSRI DAN PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 memengaruhi semua sektor kehidupan. Pendidikan, sosial ekonomi, pemerintahan, swasta, usaha kecil, kesehatan,

ketenagakerjaan, perminyakan, jasa dan sektor lainnya terdampak. Khusus untuk sektor pendidikan, banyak riset yang menunjukkan bahwa Covid-19 berdampak pada penurunan kualitas pendidikan.

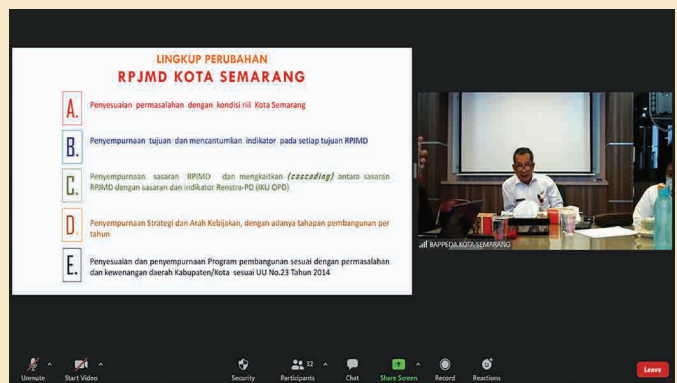
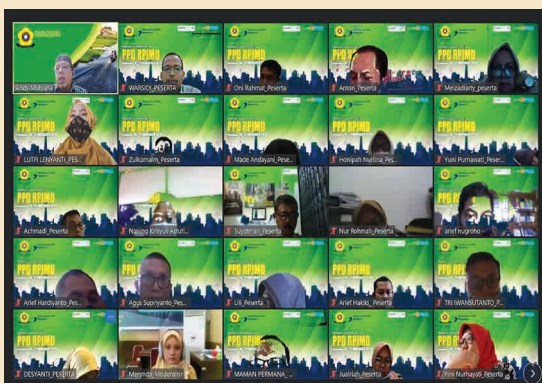
Pandemi Covid-19 juga berdampak pada pelaksanaan pelatihan PPs Unsri yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas. Pelatihan yang seharusnya dilaksanakan secara *offline* di dalam kelas dengan karantina terhadap peserta, diubah menjadi bersifat *online* dengan menggunakan berbagai aplikasi

pembelajaran. Gambar 3 menyajikan perbandingan dokumentasi kegiatan yang diselenggarakan sebelum dan selama masa pandemi Covid-19.

Untuk memperlancar proses pelatihan secara *online*, Pusbindiklatren mengembangkan aplikasi SIPENA yang dapat diakses peserta kapan saja dan dimana saja. Aplikasi ini berisi materi pembelajaran, tugas kelompok dan mandiri, *pre test* dan *post test*. Penggunaan aplikasi SIPENA memberi banyak kemudahan selama pelaksanaan pelatihan, baik sinkronous maupun asinkronous.



Pelaksanaan program pelatihan sebelum pandemi Covid-19



Pelaksanaan program pelatihan setelah pandemi Covid-19

Tabel 2 menyajikan tingkat kepuasan peserta diklat terhadap layanan SIPENA.

Terkait dengan dampak Pandemi Covid-19 terhadap pemahaman peserta pelatihan, Tabel 3 menyajikan perbandingan peningkatan nilai tes peserta selama pelatihan di PPs UNSRI sebelum dan saat Pandemi

Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19, terdapat peserta yang tidak mengalami peningkatan nilai tes dengan nilai minimum 0.00, tetapi terdapat peserta dengan peningkatan nilai tertinggi, yaitu 400 %. Jika dibandingkan dengan selama pandemi Covid-19, peningkatan nilai peserta paling tinggi hanya 121,56 %. Jika dibandingkan, rata-rata peningkatan

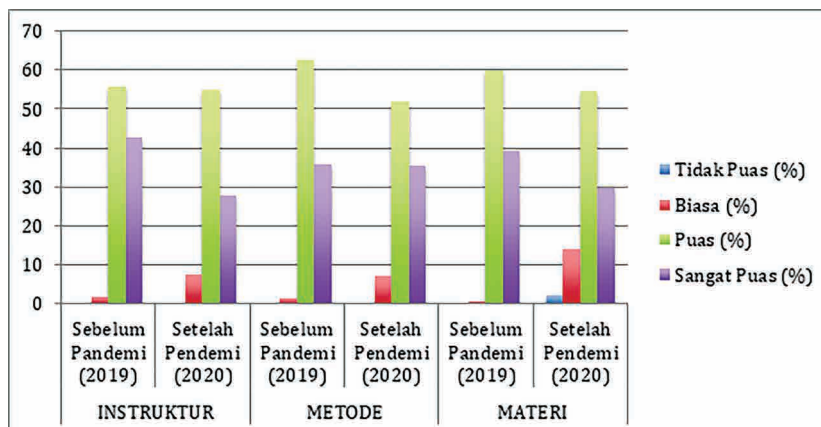
nilai tes selama pandemi Covid-19 lebih rendah 36.40%, menurun dari 41.08% sebelum pandemi Covid 19. Tabel 3 ini setidaknya menunjukkan indikasi awal bahwa pandemi Covid 19 menyebabkan penurunan pemahaman peserta pelatihan yang diselenggarakan PPs UNSRI.

TABEL 2. TINGKAT KEPUASAN PESERTA DIKLAT TERHADAP LAYANAN SIPENA

PERNYATAAN	TIDAK PUAS (%)	BIASA (%)	PUAS (%)	SANGAT PUAS (%)
Penggunaan SIPENA mempermudah dalam pelatihan	0.00	5.00	51.67	41.25

TABEL 3. PENINGKATAN NILAI TES PESERTA SELAMA PELATIHAN DI PPS UNSRI SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID 19

PENINGKATAN NILAI TES PESERTA SELAMA PELATIHAN (%)	SEBELUM PANDEMI (2019)	SELAMA PANDEMI (2020)
Nilai Minimal	0.00	13.39
Nilai Maksimal	400.00	121.56
Rata Rata	41.08	36.40



Gambar 3. Perubahan Penilaian Peserta Terhadap Kinerja Instruktur, Kurikulum/Materi Pembelajaran, dan Metode Pelatihan selama pelaksanaan pelatihan di PPs UNSRI sebelum dan saat pandemi Covid-19

TABEL 4. PENILAIAN PESERTA TERHADAP KINERJA INSTRUKTUR, KURIKULUM/MATERI PEMBELAJARAN, DAN METODE PELATIHAN SELAMA PELATIHAN DI PPS UNSRI SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

ASPEK YANG DINILAI	KONDISI	CAPAIAN KEPUASAN (%)			
		TIDAK PUAS (%)	BIASA (%)	PUAS (%)	SANGAT PUAS (%)
KINERJA INSTRUKTUR	Sebelum Pandemi (2019)	0.00	1.63	55.64	42.77
	Setelah Pandemi (2020)	0.00	7.30	55.09	27.75
	Perubahan (%)	0.00	5.67	-0.55	-15.02
METODE PELATIHAN	Sebelum Pandemi (2019)	0.00	1.44	62.69	35.62
	Setelah Pandemi (2020)	0.00	7.09	51.95	35.27
	Perubahan (%)	0.00	5.65	-10.74	-0.35
KURIKULUM DAN MATERI	Sebelum Pandemi (2019)	0.00	0.69	59.80	39.32
	Setelah Pandemi (2020)	2.00	13.84	54.67	29.63
	Perubahan (%)	2.00	13.15	-5.13	-9.69

Tabel 4 dan Gambar 3 lebih lanjut mencoba menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja instruktur, kurikulum/materi pembelajaran dan metode pelatihan. Tabel 4 dan Gambar 4 menyajikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan kinerja instruktur, kurikulum/materi pembelajaran dan metode pelatihan. Kinerja instruktur mengalami penurunan terlihat peserta yang memilih kategori puas dan sangat puas menurun, sedangkan peserta yang memilih biasa dan tidak puas justru meningkat.

PENUTUP

PPs Unsri menjalin kerja sama dengan banyak mitra nasional

dan internasional. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing PPs Unsri menuju The International Centre for Interdisciplinary, Multidisciplinary and Transdisciplinary Studies. Pusbindiklatren Bappenas adalah salah satu mitra kerjasama utama PPs Unsri. Selama 13 tahun, PPs Unsri telah melaksanakan 51 pendidikan non-gelar (pelatihan) bekerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas dengan total peserta 1.089 orang. Sejak tahun 2015 juga PPs UNSRI bekerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas juga menyelenggarakan pendidikan gelar dalam bentuk (1) Kerjasama Double Degree yaitu DD IRLCDMP. dan (2) Kerjasama Pendidikan Gelar

dalam negeri yang dikelola oleh prodi Magister Adminitrasi Publik (MAP). Pandemi Covid 19 diduga mempengaruhi efektifitas kinerja pendidikan no gelar yang selama ini dilaksanakan. Tulisan sederhana ini menemukan indikasi awal bahwa Pandemi Covid 19 berdampak tidak hanya pada penurunan kinerja peserta, tetapi juga kinerja instruktur, metode pembelajaran dan materi pembelajaran (**Penulis: Dessy Adriani, Merynda Indriyani Syahfitri, dan Nova Wirdalia - Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya**) ■

Erie Sadewo

DAMPAK *POST-SUBURBANISASI* TERHADAP POLA KOMUTER DI JABODETABEK

TESIS PILIHAN

KARYA ALUMNI
PENERIMA BEASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN
PUSBINDIKLATREN
BAPPENAS

Foto: William Manuel Son (unsplash.com)

ABSTRAK

Post-suburbanisasi merupakan fenomena transformasi perkotaan yang telah teridentifikasi sejak lama di kawasan Jabodetabek. Perubahan politik ekonomi telah mendorong fenomena ini untuk bergerak lebih jauh dalam membentuk struktur spasial perkotaan baru dengan daya tarik kawasan pinggiran yang tinggi. Tulisan ini mengulas mengenai pola komuter yang terjadi di Jabodetabek selama satu setengah dekade terakhir sebagai dampak dari post-suburbanisasi. Hasil analisis deskriptif dari berbagai sumber data yang tersedia menunjukkan bahwa pasca 2005, terdapat gejala menurunnya daya tarik Jakarta sebagai tujuan utama komuter. Meskipun munculnya sub-pusat pekerjaan baru di kawasan pinggiran turut berkontribusi pada penurunan tersebut, menunjukkan peran post-suburbanisasi sebagai salah satu bentuk restrukturisasi regional di Jabodetabek.

Kata kunci: Post-suburbanisasi, Komuter, Jabodetabek, Sub-pusat pekerjaan, Restrukturisasi Regional

LATAR BELAKANG

Pada era perkotaan modern, perubahan dan pertumbuhan bergerak keluar dari pusat kota menuju kawasan di sekitarnya. Pada era pos modern, logika tersebut berbalik dengan semakin berkembangnya pusat-pusat perkotaan baru di pinggiran metropolitan (Dear dan Dahmann, 2008). Bentuk suburbanisasi baru ini mendukung pembangunan struktur perkotaan polisentris, dan membangkitkan proses serta bentuk mosaik perkotaan pos modern (Soja, 2000). Proses perubahan tersebut ditandai dengan desentralisasi populasi dan pekerjaan (Bontje, 2004), dan menyebabkan hilangnya keterikatan suburban terhadap inti perkotaan (Wu dan Phelps, 2008). Di kawasan suburban kemudian tumbuh pusat-pusat pekerjaan baru yang memiliki daya tarik tersendiri, dalam metropolitan yang terfragmentasi berdasarkan spesialisasi (Borsdorf, 2004). Struktur yang dihasilkan tersebut dikenal sebagai post-suburbia (Kling dkk., 1995). Istilah ini merupakan konsep yang merangkum berbagai istilah pembangunan struktur

quasi-urban di kawasan pinggiran lainnya seperti 'edge city', 'edgeless city', 'technoburb' (Wu dan Phelps, 2008). Meski lahir dan berkembang di negara maju, fenomena post-suburbia dapat muncul di tempat lain dengan skala dan cara yang berbeda (Soja, 2000). Selain di negara-negara maju, fenomena post-suburbia juga dapat ditemukan di negara berkembang seperti di Chili dan Argentina, serta negara Asia seperti China, dan Indonesia (Phelps dan Wu, 2011).

Di Indonesia, studi mengenai post-suburbia di Indonesia telah bergerak dari upaya untuk mengidentifikasi keberadaan post-suburbanisasi, faktor pendorong, serta elemen-elemen yang menyertainya (Firman, 2011; Firman dan Fahmi, 2017) menuju identifikasi struktur spasial yang terjadi akibat post-suburbanisasi (Sadewo dkk., 2020). Pada satu sisi, berbagai studi yang dilakukan di Jabodetabek menunjukkan bahwa post-suburbanisasi telah mendorong struktur spasial Jabodetabek menjadi semakin polisentris. Namun, menguatnya

polisentrisitas hanya terbatas pada industri manufaktur, sedangkan pada sektor jasa justru terjadi gejala re-konsentrasi kembali ke Jakarta. Perubahan yang terjadi pada struktur spasial tersebut terjadi terutama sejak 2005 dan sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut oleh Herlambang dkk., (2018) sebagai era reskalasi urbanisme neoliberal. Era tersebut ditandai dengan meningkatnya peran sektor swasta dalam perencanaan dan pengembangan lahan di kawasan Jabodetabek. Di sisi lain, berbagai studi juga menunjukkan perubahan struktur spasial perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap pola komuter (Clark dan Kuijpers-Linde, 1994; van der Laan, 1998). Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat studi mengenai perkembangan pola komuter di Jabodetabek akibat pergeseran struktur spasial tersebut.

Tulisan ini berupaya mengulas kembali berbagai sumber data komuter yang tersedia untuk menunjukkan perubahan pola komuter yang terjadi di Jabodetabek selama satu

setengah dekade terakhir. Kawasan Jabodetabek dipilih sebagai satu-satunya metropolitan yang telah menunjukkan proses *post*-suburbanisasi skala besar di Indonesia. Tulisan ini beragumen bahwa perubahan struktur spasial yang terjadi di Jabodetabek akibat *post*-suburbanisasi sejak tahun 2005 telah memberikan dampak terhadap pola komuter yang terjadi di kawasan. Dalam studi ini dilakukan analisis secara deskriptif mengenai perkembangan pola komuter di Jabodetabek sebelum dan setelah 2005. Pemilihan tahun 2005 dilakukan sebagai titik tolak perubahan dari fase urbanisme neoliberal menuju fase reskalasi liberalisme neoliberal yang berimplikasi terhadap perubahan politik ekonomi dalam pembangunan perkotaan di Jabodetabek. Selanjutnya analisis dekomposisi pola komuter dilakukan untuk melihat perubahan arah dan tujuan perjalanan dengan fokus pada pekerja yang tinggal di kawasan pinggiran, sejalan dengan transformasi spasial yang terjadi di lokasi studi. Tulisan ini diakhiri dengan diskusi dan beberapa kesimpulan yang berimplikasi terhadap kebijakan pembangunan di kawasan Jabodetabek.

SUMBER DATA

Terdapat beberapa sumber data yang berkaitan dengan kegiatan komuter di Indonesia. Informasi awal mengenai kegiatan komuter di kawasan Jabodetabek tersedia sejak tahun 2004. Pada saat itu Kementerian PPN/Bappenas dan JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) merilis hasil *Study on Integrated Transportation Master Plan* (SITRAMP) tahun 2002. Pada tahun 2010, Kementerian

Koordinator Ekonomi dan JICA kembali mengadakan survei lanjutan dari SITRAMP untuk keperluan penyusunan proyek Jabodetabek *Urban Transportation Policy Integration* (JUTPI). Sebagaimana SITRAMP, definisi komuter yang digunakan dalam JUTPI adalah setiap perjalanan rutin tanpa dibatasi oleh wilayah administratif. Meskipun demikian, pertumbuhan komuter antarsuburban tidak dilaporkan dalam kegiatan ini.

Pada tahun 2005, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai memasukkan aspek mobilitas sirkuler dalam Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dengan mencantumkan pertanyaan mengenai komuter. Meskipun demikian, pada survei tersebut arah dan tujuan perjalanan ditanyakan sehingga keterangan tersebut tidak dapat diketahui. Pada tahun 2015, BPS kembali melaksanakan SUPAS dengan mencantumkan tujuan komuter pada skala kabupaten/kota. Pengumpulan informasi komuter secara berkala sebenarnya telah dimulai oleh BPS sejak tahun 2008 melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Survei tersebut tersedia setiap tahunnya untuk keperluan estimasi tingkat kabupaten/kota, dengan pengecualian pada tahun 2016. Informasi terakhir mengenai kegiatan komuter disediakan oleh BPS melalui survei komuter pada skala metropolitan. Survei tersebut telah dilaksanakan sebanyak empat putaran. Putaran pertama dilaksanakan di Jabodetabek pada tahun 2014. Putaran kedua dilaksanakan di kawasan Mebidang dan Sarbagita pada tahun 2015. Putaran ketiga dilakukan di kawasan Bandung

Raya dan Gerbang Kertassusila pada tahun 2017. Sementara putaran keempat kembali dilaksanakan di Jabodetabek dan Mebidang pada tahun 2019.

Pada satu sisi, data yang dihasilkan oleh pihak Kementerian PPN/Bappenas, JICA, dan Kementerian Koordinator Perekonomian memiliki perbedaan dengan yang dipergunakan oleh BPS. Hal ini terlihat dari adanya selisih jumlah komuter yang cukup besar antara SITRAMP dan hasil SUPAS 2005. Meskipun menggunakan jumlah sampel yang sangat besar, terdapat kelemahan dalam hal unit *sampling*, serta konsep dan definisi yang berbeda dengan komuter yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Jumlah komuter hasil SITRAMP yang lebih besar dari jumlah penduduk menunjukkan bahwa konsep komuter yang digunakan bersifat umum, yaitu setiap perjalanan keluar rumah. Hal ini berbeda dengan konsep yang dipergunakan oleh BPS, yaitu perjalanan pergi-pulang melewati batas administrasi dalam jangka waktu satu hari. Meskipun menggunakan jumlah sampel yang bervariasi, data yang dihasilkan BPS memiliki metode konsep yang sama.

PERKEMBANGAN KOMUTER SEBELUM TAHUN 2005

Studi pola komuter di Jabodetabek sebelum tahun 2005 menunjukkan bahwa restrukturisasi spasial dalam Jabodetabek juga telah memberi pengaruh pada pola komuter. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah rata-rata perjalanan harian dan panjang perjalanan di Jabodetabek antara 1985 dan 2000 (Susilo dkk., 2007). Sejalan dengan perkembangan populasi

di pinggiran, jumlah penumpang harian pada pertengahan 2000-an mencapai 700.000 orang, sepuluh kali lebih besar dari dua dekade sebelumnya (Dharmowijoyo dkk., 2014). Hakim dan Parolin (2009) menggunakan hasil SITRAMP 2002 telah menunjukkan bahwa sebagian besar perjalanan menuju CBD, sementara sub-pusat lainnya hanya menarik perjalanan komuter lokal. Meskipun Hudalah dkk. (2013) telah menyarankan bahwa suburbanisasi lapangan kerja besar-besaran di Jabodetabek terjadi pada 1990-an, pola perjalanan yang sesuai pada awal 2000 masih didominasi oleh perjalanan tradisional ke CBD.

Transformasi perkotaan pinggiran tercermin dalam pertumbuhan besar-besaran daerah perkotaan di pinggiran kota, dan kenaikan volume perjalanan balik (Firman, 2011). Hasil survei BPS pada tahun 1991 menyebutkan bahwa 96 persen penduduk yang tinggal di Jakarta juga bekerja di Jakarta (Rustiadi dkk., 2002), sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi yang bekerja di Jakarta masing-masing sebesar 47,8 persen, 55,5 persen, dan 59,8 persen. Pada tahun 2004, jumlah komuter dari kawasan Bogor dan sekitarnya mencapai 621 ribu perjalanan, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 1,15 juta perjalanan per hari (Adhi, 2012). Artinya, sebagian besar penduduk di wilayah tersebut melakukan kegiatan komuter ke Jakarta, dan hanya sedikit menyisakan perjalanan ke wilayah lainnya. Namun, bukti baru-baru ini menunjukkan bahwa transformasi spasial perkotaan besar-besaran di Jabodetabek selama dekade terakhir juga diikuti

oleh peningkatan jumlah perjalanan antar kota. Studi sebelumnya dalam skala yang lebih kecil di daerah pinggiran Jabodetabek, menunjukkan bahwa Cikarang sebagai contoh pasca-pinggiran kota telah menjadi tujuan komuter yang baru muncul dari daerah pinggiran kota lainnya (Permatasari dan Hudalah, 2013).

Dalam hal mobilitas, pemisahan sosial terlihat jelas dari preferensi mode perjalanan, karena terdapat kecenderungan di mana peningkatan pendapatan diikuti oleh kenaikan biaya transportasi mereka (Sugiarto dkk., 2014). Meskipun demikian, pertumbuhan komuter mobil stagnan antara 2000–2010 dan penggunaan sepeda motor meningkat 27,5 persen (Susantono dkk., 2011). Di antara banyak alasan, penggunaan sepeda motor oleh warga pinggiran Jakarta dianggap menghemat 30 persen biaya transportasi, dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum (Rukmana dkk., 2018). Pesatnya penggunaan kendaraan pribadi berbiaya rendah untuk memfasilitasi maksimalisasi biaya transportasi tampaknya telah mendorong banyak orang untuk tetap bepergian daripada pindah.

PERKEMBANGAN POLA KOMUTER DI JABODETABEK SETELAH 2005

Perkembangan pola komuter di Jabodetabek setelah tahun 2005 dapat dilihat berdasarkan hasil pengolahan berbagai survei yang telah dilakukan oleh BPS. Berdasarkan hasil SUPAS 2005, diketahui bahwa jumlah komuter di Jabodetabek mencapai 2,68 juta perjalanan harian atau 12 persen

dari seluruh penduduk. Jumlah komuter di Jabodetabek memiliki proporsi rata-rata sebesar 11 persen dari jumlah penduduk dan 29,6 persen dari jumlah tenaga kerja. Jumlah komuter keluar terbesar berasal di Kota Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Daerah-daerah tersebut secara tradisional merupakan kawasan permukiman yang memiliki proporsi komuter lebih dari 15 persen dari jumlah penduduk dan 42 persen dari jumlah pekerja. Sementara itu kawasan terluar seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Tangerang yang memiliki jumlah penduduk terbesar justru memiliki jumlah komuter yang lebih rendah. Pada satu dekade berikutnya, hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa jumlah komuter berjumlah 2,95 juta orang. Angka ini meningkat 10 persen dibandingkan dengan tahun 2005. Artinya, terdapat peningkatan jumlah komuter rata-rata sebesar satu persen per tahun selama periode tersebut. Secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah komuter pada beberapa lokasi di kawasan barat (Jakarta Barat dan Tangerang) dan selatan (Depok dan Kabupaten Bogor). Di kawasan timur terjadi hal yang sebaliknya, di mana komuter dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Kabupaten Bekasi cenderung mengalami penurunan.

Mengikuti studi Sadewo dkk., (2020) wilayah Jakarta Pusat diletakkan sebagai pusat bisnis dan pemerintahan (CBD) untuk kawasan Jabodetabek. Dengan mempertimbangkan jarak antara subpusat masing-masing wilayah terhadap CBD maka diketahui bahwa hubungan antara jumlah pelaku komuter dengan jumlah

penduduk maupun dengan jarak dari pusat kota (CBD) pada kedua periode tersebut terlihat mengikuti kurva cembung. Komuter meningkat di kawasan terdekat dengan Jakarta dan menurun seiring dengan jarak yang semakin jauh. Perbandingan kedua periode tersebut menunjukkan bahwa secara umum peningkatan terjadi hingga radius 15 km dari CBD. Sementara pada rentang 16–50 km dari CBD, jumlah komuter cenderung mengalami penurunan.

Meskipun terdapat kecenderungan bahwa jumlah komuter menurun seiring dengan jarak, namun terdapat variasi dalam hal jarak serta waktu yang ditempuh untuk melakukan komuter. Rata-rata jarak komuter yang ditempuh oleh warga Jabodetabek adalah 21,94 km. Jarak yang terjauh ditempuh oleh mereka yang melakukan komuter dari Kab. Tangerang yaitu 37,03 km. Sementara itu, rata-rata jarak yang rendah di kawasan pinggiran ditemukan di Kab. Bekasi yaitu 15,33 km. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku komuter di Kab. Tangerang cenderung melakukan komuter tradisional ke Jakarta, sementara di Kab. Bekasi komuter keluar cenderung dilakukan pada jarak dekat). Sementara itu, rata-rata waktu tempuh secara keseluruhan pada tahun 2005 adalah 54,78 menit. Waktu tempuh tersebut berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh, di mana kecepatan rata-rata orang sebesar 24 km/jam. Pada tahun 2015, rata-rata waktu tempuh meningkat menjadi 61,87 menit. Peningkatan terutama terjadi dari daerah suburban yang berbatasan dengan Jakarta dan Bogor. Pertumbuhan pesat yang terjadi di Kota Bogor menunjukkan

dua hal. Pertama meningkatnya arus lalu lintas yang menyebabkan menurunnya aksesibilitas. Kedua hal ini mengindikasikan adanya perubahan tujuan komuter dari jarak dekat menjadi jarak jauh.

Sementara itu, dari hasil SAKERNAS diketahui bahwa jumlah komuter di seluruh Jabodetabek mengalami kenaikan dari 2,57 juta pada tahun 2008 menjadi 3,19 juta pada tahun 2018. Pelaku komuter didominasi oleh penduduk suburban dengan proporsi rata-rata sebesar 63 persen. Selama periode tersebut terjadi peningkatan sebesar 623 ribu kegiatan komuter di kawasan suburban, atau meningkat rata-rata 3,6 persen per tahun. Sementara itu, jumlah komuter keluar di Jakarta hampir tidak berubah bahkan cenderung turun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Jakarta cenderung untuk melakukan kegiatan yang semakin dekat dengan lokasi tempat tinggalnya, sedangkan penduduk suburban masih memiliki ketergantungan yang tinggi dengan lokasi lainnya. Adapun tujuan dari komuter di Jabodetabek masih didominasi oleh Jakarta sebagai kawasan inti metropolitan. Selama periode 2008–2018, rata-rata 67 persen komuter mengarah ke Jakarta, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,47 persen per tahun. Meskipun demikian, pertumbuhan yang lebih cepat dialami oleh kawasan suburban. Jumlah komuter masuk ke kawasan suburban pada periode tersebut rata-rata meningkat sebesar 4,56 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pusat tradisional masih menjadi daya tarik utama untuk pekerjaan, kawasan suburban juga tumbuh menjadi semakin penting.

Hasil Survei Komuter di Jabodetabek menunjukkan bahwa jumlah komuter tahun 2014 mencapai 3,5 juta orang per hari. Sebagaimana halnya hasil SUPAS dan SAKERNAS, wilayah dengan jumlah komuter terbesar pada tahun 2014 terdapat di tiga lokasi: Jakarta Timur, Bekasi dan Kabupaten Bogor. Pada tahun 2019, jumlah orang berkurang menjadi 3,2 juta orang per hari. Dengan demikian selama periode tersebut telah terjadi penurunan sebanyak 300 ribu orang atau sebesar 8,57 persen. Penurunan terjadi terutama di kawasan perkotaan, seperti di Jakarta, Bekasi, Tangerang Selatan, Tangerang, dan Bogor. Sementara di kawasan suburban terluar seperti Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi justru terjadi peningkatan jumlah komuter, meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi serta desentralisasi pekerjaan dari pusat ke pinggiran metropolitan Jabodetabek memberikan dampak yang besar bagi meningkatnya sirkulasi pekerja secara lokal. Sementara itu, dua wilayah yang mengalami pertumbuhan pekerjaan dari sektor manufaktur justru menyebabkan meningkatnya ketidaksesuaian antara lokasi permukiman dan pekerjaan.

Hasil survei komuter juga mengindikasikan melemahnya daya tarik Jakarta. Pada tahun 2019 jumlah komuter yang masuk ke Jakarta mengalami penurunan di seluruh kota administratif di bawahnya. Kondisi yang berbeda dapat ditemui di kawasan suburban. Terdapat peningkatan jumlah komuter masuk di lingkaran terdekat dengan Jakarta seperti Depok,



Foto: Adrian Pranata (unsplash.com)

Tangerang Selatan, dan Bekasi. Di suburban terluar, perubahan jumlah komuter beragam. Di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor terjadi peningkatan jumlah komuter masuk, sementara di Kabupaten Tangerang dan Kota Bogor jumlahnya cenderung menurun. Situasi ini berbalikan dengan komuter keluar, mengindikasikan bahwa wilayah tersebut mengalami penurunan daya tarik sebagai lokasi pekerjaan.

Berkurangnya jumlah komuter di Jabodetabek tersebut juga diikuti oleh menurunnya jarak serta waktu yang ditempuh. Jika pada tahun 2014 rata-rata jarak komuter adalah 20,33 km maka pada tahun 2019, rata-rata jarak berkurang menjadi 19,4 km. Penurunan

jarak tempuh terbesar terutama dialami oleh mereka yang tinggal di Bogor. Jarak komuter penduduk Bogor dalam lima tahun terakhir menurun dari 41 km menjadi 23 km. Hal ini memperkuat asumsi bahwa pada periode tersebut memang telah terjadi perubahan tujuan komuter pada penduduk Bogor. Di Tangerang Selatan yang terjadi adalah sebaliknya, di mana peningkatan kesempatan kerja lokal justru turut meningkatkan jarak komuter. Berkurangnya jarak komuter di Jabodetabek tersebut turut mendorong penurunan waktu tempuh. Jika pada tahun 2014 rata-rata lama komuter mencapai 62 menit maka pada tahun 2019, rata-rata waktu tempuh berkurang menjadi 55,39 menit. Sebagaimana

halnya jarak tempuh, penurunan waktu komuter terbesar terjadi di Bogor, yaitu dari 73 menit menjadi 54 menit. Meskipun jarak tempuh komuter di Tangerang Selatan semakin jauh, waktu tempuhnya justru cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara jarak dan waktu tempuh komuter di Jabodetabek.

PERKEMBANGAN KOMUTER DI KAWASAN PINGGIRAN JABODETABEK

Perubahan struktur spasial Jabodetabek mengindikasikan meningkatnya daya tarik di kawasan pinggiran metropolitan. Dampak dari meningkatnya daya tarik kawasan pinggiran tersebut



terlihat dari meningkatnya volume perjalanan menuju sub-pusat pekerjaan yang berada di beberapa lokasi. Berdasarkan publikasi hasil SITRAMP diketahui bahwa 92,9 persen dari keseluruhan perjalanan yang tercatat merupakan perjalanan vertikal, dari kawasan pinggiran menuju Jakarta atau sebaliknya. Hanya 245,7 ribu perjalanan atau 7,1 persen yang merupakan pergerakan antar kawasan pinggiran Kawasan terluar seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Tangerang memiliki *out-going ratio* yang paling rendah dibandingkan wilayah Jabodetabek

lainnya. *Out-going ratio* paling rendah berada di Kabupaten Tangerang sebesar 64,83 persen. Sementara besaran *out-going ratio* di seluruh kawasan terluar tersebut lebih rendah dari 75 persen. Sebagai perbandingan, hasil JUTPI tahun 2010 menunjukkan bahwa telah terjadi pertumbuhan komuter tradisional sebesar 50 persen dari 743 ribu pada tahun 2002 menjadi 1,105 juta perjalanan.

Berdasarkan hasil SUPAS 2015, diketahui bahwa sebanyak 75 persen komuter dari suburban masih terfokus pada orang ke Jakarta.

Meskipun demikian, jumlah komuter menuju kawasan suburban lainnya yang mencapai 746 ribu orang juga tidak dapat diabaikan. Jumlah tersebut terbagi atas 202 ribu orang komuter balik dari Jakarta menuju suburban dan 544 ribu orang komuter silang antar suburban. Di kawasan suburban, jumlah komuter tradisional tertinggi berada di bagian dalam yang berbatasan dengan Jakarta, yaitu Depok dan Bekasi. Dua kota ini masih memegang fungsi sebagai *dormitory town*. Sementara itu, lokasi asal komuter menuju suburban terbesar berasal dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten

Tangerang sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang terbesar. Besarnya jumlah komuter masuk menuju Kota Tangerang dan Kota Bogor dari suburban lainnya menunjukkan bahwa kedua lokasi ini menjadi tujuan utama dari komuter yang berasal dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang.

Implikasi dari meningkatnya komuter antarsuburban adalah jika komuter tradisional menuju Jakarta memerlukan waktu tempuh yang berbanding lurus dengan jarak maka komuter antarsuburban cenderung memiliki waktu tempuh yang konstan bahkan cenderung turun. Rata-rata waktu tempuh dari suburban menuju Jakarta adalah 74 menit, sedangkan komuter balik dari Jakarta menuju suburban sebesar 62 menit, dan komuter antarsuburban hanya ditempuh dalam waktu 50 menit. Artinya, komuter antarsuburban merupakan pola perjalanan yang lebih efisien dibandingkan dengan pola komuter lainnya.

Berdasarkan hasil SAKERNAS diketahui bahwa selama periode 2008–2018, proporsi komuter antarsuburban mencapai 18 hingga 26 persen dari jumlah komuter secara keseluruhan. Jika ditinjau berdasarkan asal, proporsi komuter yang berasal dari suburban dapat mencapai 30 hingga 34 persen. Jika pada tahun 2008 jumlah komuter antarsuburban sebanyak 658 ribu orang maka pada tahun 2018, jumlahnya telah meningkat hingga 818 ribu orang. Dengan demikian, terjadi rata-rata pertumbuhan komuter antarsuburban mencapai 3,05 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan komuter

tradisional yang mencapai 3,69 persen per tahun, tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan komuter balik yang hanya sebesar 0,29 persen per tahun.

Penyumbang terbesar komuter antarsuburban berasal dari dua lokasi, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Jumlah komuter dari Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan dari 182 ribu pada 2008 menjadi 249 ribu pada 2018. Sementara komuter dari Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari 130 ribu menjadi 185 ribu. Proporsi komuter antar suburban dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang rata-rata sebesar 59 dan 57 persen menunjukkan bahwa mayoritas perjalanan keluar kedua wilayah tersebut menuju ke wilayah suburban lainnya. Jika dihubungkan dengan wilayah tujuan utama komuter yang berada di Kota Bogor dan Kota Tangerang maka dapat diketahui bahwa tujuan utama komuter dari Kabupaten Bogor dan Tangerang berada di kedua wilayah tersebut. Selain menjadi tujuan komuter dari suburban, Tangerang juga menjadi tujuan utama komuter dari Jakarta. Sementara itu wilayah suburban dalam lain seperti Bekasi dan Depok merupakan asal dari pelaku komuter tradisional.

Berdasarkan hasil Survei Komuter didapati bahwa jumlah komuter antarsuburban pada tahun 2014 sebanyak 818 ribu orang atau 23,38 persen dari keseluruhan komuter di Jabodetabek. Pada tahun 2019, jumlah komuter meningkat menjadi 853 ribu orang dengan proporsi sebesar 26,69 persen dari keseluruhan. Dibandingkan

jumlah komuter tradisional yang rata-rata turun sebesar 1,83 persen per tahun, komuter antarsuburban justru tumbuh rata-rata sebesar 0,87 persen per tahun. Penurunan komuter tradisional terbesar terjadi di kawasan suburban bagian dalam, yaitu Tangerang Selatan, Bekasi, dan Tangerang. Sementara itu pertumbuhan komuter antarsuburban terjadi di dua lokasi yang mengalami pertumbuhan pekerjaan sektor manufaktur yaitu Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini, *post*-suburbanisasi telah mendorong meningkatnya pekerjaan lokal di kawasan suburban bagian dalam dan meningkatnya komuter keluar ke suburban lainnya di lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan manufaktur.

Di kawasan suburban bagian dalam tidak terjadi perubahan yang signifikan pada jumlah komuter antar suburban, namun jarak yang ditempuh menjadi semakin jauh. Meskipun demikian, waktu komuter yang diperlukan relatif tetap dimana peningkatan waktu komuter hanya terjadi di Bekasi. Di bagian suburban terluar, perubahan yang signifikan hanya terjadi di Bogor. Meskipun terdapat peningkatan jumlah komuter antar suburban, jarak yang ditempuh justru semakin pendek. Rata-rata jarak komuter antar-suburban turun separuhnya menjadi 13,73 km pada tahun 2019 menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk Bogor yang bekerja di wilayah Kabupaten Bogor. Namun, penurunan jarak tersebut hanya diikuti dengan penurunan waktu tempuh sebesar 19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi antarkedua wilayah belum begitu



baik. Sebaliknya, jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja di Bogor semakin berkurang dan beralih ke Jakarta.

DISKUSI

Informasi mengenai komuter di kawasan Jabodetabek telah dipotret melalui beberapa kegiatan survei sejak tahun 2002. Meskipun menggunakan metode dan jumlah sampel yang berbeda, temuan dari berbagai survei menghasilkan kesimpulan yang seragam mengenai perkembangan komuter di Jabodetabek. Pertama, jumlah komuter di Jabodetabek mengalami peningkatan pada dekade 2005 hingga 2015, tetapi cenderung mengalami penurunan sesudahnya. Penurunan komuter keluar dari Jakarta tersebut mengindikasikan struktur spasial yang semakin padu. Selama periode tersebut, peningkatan jumlah komuter keluar terjadi pada radius 15 km dari CBD, kemudian mengalami penurunan setelahnya. Komuter terbesar pada periode tersebut berasal dari kawasan suburban bagian dalam seperti Depok dan Bekasi yang secara tradisional dikenal berfungsi sebagai *dormitory town*.

Kedua, Jakarta tetap menjadi daya tarik terbesar bagi aliran komuter dari suburban, terutama yang berasal dari suburban bagian dalam. Meskipun demikian, pengaruh yang dimiliki Jakarta semakin menurun dari waktu ke waktu digantikan oleh hubungan fungsional dengan suburban lainnya. Selama periode 2008–2015 terdapat dua wilayah suburban yang mengalami pertumbuhan pekerjaan dengan pesat yaitu Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Sebagai salah satu kutub pertumbuhan lapangan kerja terbesar di pinggiran Jabodetabek, Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan 126.000 pekerjaan baru di UMB.

Angka ini merupakan yang terbesar di antara kawasan pinggiran lainnya. Mayoritas pekerjaan ini disediakan oleh industri manufaktur, ditunjukkan oleh meningkatnya proporsi pekerjaan manufaktur dari 30,01 persen pada 2008 menjadi 38,47 persen pada 2015, serta kenaikan upah minimum hampir tiga kali lipat. Kabupaten Tangerang berada di posisi kedua dengan menghasilkan pertumbuhan pekerjaan 19 persen, dengan karakteristik yang serupa namun menghasilkan pola komuter yang berbeda.

Sejak tahun 2008, jumlah komuter masuk ke Kabupaten Bekasi terus mengalami peningkatan. Namun, komuter yang berasal dari Jakarta cenderung mengalami penurunan. Sebagian besar pertumbuhan komuter berasal dari kawasan suburban lainnya seperti Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Penurunan arus komuter balik dari Jakarta tersebut selain memperbarui temuan dari Firman (2011) serta Firman dan Fahmi (2017), juga menunjukkan bahwa di kawasan *post-suburbia* komuter dapat terjadi baik secara vertikal maupun horizontal. Pola komuter di Jabodetabek lebih mencerminkan bentuk *post-suburbanisasi* di Belanda, dimana *post-suburbia* bertindak sebagai tujuan dari komuter balik dan komuter antar suburban, meskipun jumlah komuter tradisional masih mendominasi (Bontje, 2004).

Meningkatnya peran kawasan suburban sebagai tujuan komuter pada derajat tertentu menunjukkan adanya pengaruh perubahan struktur spasial serta meningkatnya peluang pekerjaan yang dihasilkan

oleh pilihan lokasi perusahaan, atau dikenal sebagai restrukturisasi regional (Frey, 1987).

Tulisan ini menunjukkan bahwa meningkatnya peran sektor swasta dalam perencanaan dan pembangunan lahan di kawasan pinggiran mendorong perubahan struktur spasial perkotaan yang berimplikasi pada pola komuter di kawasan suburban. Keberadaan struktur polisentris yang semula diharapkan dapat menghasilkan pembangunan berkelanjutan melalui berkurangnya pergerakan menjadi semakin sulit untuk dicapai.

Proporsi komuter antarsuburban sebagai elemen *post-suburbia* yang lebih besar dibandingkan dengan komuter balik menunjukkan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian para perencana perencanaan guna lahan dan transportasi Jabodetabek di masa mendatang. Dalam konteks *post-suburbanisasi* di Jabodetabek, pertumbuhan kesempatan kerja homogen juga dapat dimaknai sebagai kekurangan kesempatan kerja pada sektor yang lainnya dan menunjukkan dampak dari pembangunan perkotaan yang tidak terencana. Hal ini berimplikasi bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menanggulangi pengangguran perlu dilakukan dengan penyediaan infrastruktur transportasi antarkawasan suburban yang baik dan terjangkau. Selain itu, upaya mengantisipasi pertumbuhan sub-pusat pekerjaan juga perlu memperhatikan karakteristik perilaku dalam pemilihan tempat tinggal untuk menghasilkan pola komuter yang lebih efisien dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, R. P. (2012). Preferensi Pemilihan Moda Dalam Pergerakan Pengalju Koridor Bogor-Jakarta Terkait Dengan Pemilihan Tempat Tinggal (Studi Kasus: Moda Bus AC dan Moda KRL Ekspres). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 23, 18.
- Bontje, M. (2004). From suburbia to post-suburbia in the Netherlands: Potentials and threats for sustainable regional development. *Journal of Housing and the Built Environment*, 19(1), 25-47.
- Borsdorf, A. (2004). On the way to post-suburbia? Changing structures in the outskirts of European cities. In A. Borsdorf dan P. Zembri (Eds.), *European Cities Structures: Insights on Outskirts* (pp. 7-30).
- Clark, W. A. V., dan Kuijpers-Linde, M. (1994). Commuting in Restructuring Urban Regions. *Urban Studies*, 31(3), 465-483. <https://doi.org/10.1080/00420989420080431>
- Dear, M., dan Dahmann, N. (2008). Urban Politics and the Los Angeles School of Urbanism. *Urban Affairs Review*, 44(2), 266-279. <https://doi.org/10.1177/1078087408320240>
- Dharmowijoyo, D. B. E., Susilo, Y. O., dan Karlström, A. (2014). Day-to-Day Interpersonal and Intrapersonal Variability of Individuals' Activity Spaces in a Developing Country. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 41(6), 1063-1076. <https://doi.org/10.1068/b130067p>
- Firman, T. (2011). Post-suburban Elements in an Asian Extended Metropolitan Region: The Case of Jabodetabek (Jakarta Metropolitan Area). In N.

- A. Phelps dan F. Wu (Eds.), *International Perspectives on Suburbanization: A Post-Suburban World?* (pp. 195-209). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230308626_11
- Firman, T., dan Fahmi, F. Z. (2017). The Privatization of Metropolitan Jakarta's (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of "Post-Suburbanization" in Indonesia. *Journal of the American Planning Association*, 83(1), 68-79. <https://doi.org/10.1080/01944363.2016.1249010>
- Frey, W. H. (1987). Migration and Depopulation of the Metropolis: Regional Restructuring or Rural Renaissance? *American Sociological Review*, 52(2), 240. <https://doi.org/10.2307/2095452>
- Hakim, I., dan Parolin, B. (2009). Spatial structure and spatial impacts of the Jakarta metropolitan area: A Southeast Asian EMR perspective. *International Journal of Human and Social Science*, 4(2), 397-405.
- Herlambang, S., Leitner, H., Tjung, L. J., Sheppard, E., dan Anguelov, D. (2018). Jakarta's great land transformation: Hybrid neoliberalisation and informality. *Urban Studies*, 004209801875655. <https://doi.org/10.1177/0042098018756556>
- Hudalah, D., Viantari, D., Firman, T., dan Woltjer, J. (2013). Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta. *Urban Geography*, 34(7), 950-971. <https://doi.org/10.1080/02723638.2013.783281>
- Kling, R., Olin, S. C., dan Poster, M. (1995). The Emergence of Postsuburbia: An Introduction. In R. Kling, S. C. Olin, dan M. Poster (Eds.), *Postsuburban California: The Transformation of Orange County since World War II* (paperback edition). University of California Press.
- Permatasari, P. S., dan Hudalah, D. (2013). Pola Pergerakan dan Dekonsentrasi Pekerjaan di Kawasan Metropolitan: Studi Kasus Pekerja Industri Cikarang, Bekasi. *Jurnal Teknik Sipil*, 20(2), 97-106.
- Phelps, N. A., dan Wu, F. (2011). Conclusion: Post-suburban Worlds? In N. A. Phelps dan F. Wu (Eds.), *International Perspectives on Suburbanization: A Post-Suburban World?* (pp. 245-257). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230308626_11
- Rukmana, D., Fahmi, F. Z., dan Firman, T. (2018). Suburbanization in Asia: A focus on Jakarta. In B. Hanlon dan T. J. Vicino (Eds.), *The Routledge Companion to the Suburbs* (1st ed., pp. 110-120). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315266442-10>
- Rustiadi, E., Zain, A. M., Trisasongko, B. H., dan Carolita, I. (2002). Land Cover Change In Jabotabek Region (Research Report IL-2002-01; pp. 27-32). IGU-LUCC.
- Sadewo, E., Syabri, I., Antipova, A., Pradono, dan Hudalah, D. (2020). Using morphological and functional polycentricity analyses to study the Indonesian urban spatial structure: The case of Medan, Jakarta, and Denpasar. *Asian Geographer*, 1-25. <https://doi.org/10.1080/10225706.2020.1737829>
- Soja, E. W. (2000). *Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions*. Wiley.
- Sugiarto, Miwa, T., Sato, H., dan Morikawa, T. (2014). *Transportation Expenditure Frontier Models in Jakarta Metropolitan Area*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 138, 148-158. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.190>
- Susantono, B., Santosa, W., dan Budiyono, A. (2011). Kepemilikan kendaraan dan pola perjalanan di wilayah Jabodetabek. *Jurnal Transportasi*, 11(3), 153-162.
- Susilo, Y. O., Santosa, W., Joewono, T. B., dan Parikesit, D. (2007). A reflection of motorization and public transport in Jakarta Metropolitan Area. *IATSS Research*, 31(1), 59-68. [https://doi.org/10.1016/S0386-1112\(14\)60184-9](https://doi.org/10.1016/S0386-1112(14)60184-9)
- van der Laan, L. (1998). Changing Urban Systems: An Empirical Analysis at Two Spatial Levels. *Regional Studies*, 32(3), 235-247. <https://doi.org/10.1080/00343409850119733>
- Wu, F., dan Phelps, N. A. (2008). From Suburbia to Post-Suburbia in China? Aspects of the Transformation of the Beijing and Shanghai Global City Regions. *Built Environment*, 34(4), 464-481. <https://doi.org/10.2148/benv.34.4.464> ■

PROFIL PENULIS

Erie Sadewo merupakan Alumni Program Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota ITB dan PHRD IV Pusbindiklatren Bappenas. Bekerja di BPS Provinsi Kepulauan Riau



Foto: vecteezy.com

BELAJAR DAN BERINOVASI

I Dewa Gde Sugihamretha

Dalam rangka meningkatkan layanan kepada para pemangku Jabatan Fungsional Perencana yang terkumpul dalam organisasi profesi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI), sejak ditugaskan sebagai Ketua Umum PPPI bersama-sama pengurus, baik di tingkat nasional maupun di tingkat Sekretariat Kementerian/Lembaga dan Sekretariat Wilayah, sampai saat ini telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain (1) *capacity building* bagi para pemangku JFP; (2) PPPI *Talk Series* 2021; (3) PPPI *Innovation Awards* (PIA) 2021; (4) perkembangan LSP Renbang; dan (5) kegiatan lainnya yang terkait dengan peningkatan kualitas dan harapan perbaikan kesejahteraan para pemangku Jabatan Fungsional Perencana (JFP).

CAPACITY BUILDING

Dalam membangun kapasitas sumber daya manusia, Pengurus Nasional PPPI Periode 2019–2021 telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan di bulan Maret–April 2021 dalam paket “Program Dasar Profesionalitas Perencana Pembangunan”. Walaupun diselenggarakan secara virtual, kegiatan ini mendapat sambutan

sangat baik. Hal ini nampak dari besarnya minat yang hadir mengikuti “Program Dasar Profesionalitas Perencana Pembangunan”. Kegiatan ini bertujuan (1) memfasilitasi pembinaan reguler/rutin dan tematik untuk para Pejabat Fungsional Perencana; (2) meningkatkan kemampuan teknis para JFP; (3) memberikan ruang kepada para

pemegang JFP untuk berkontribusi dalam kegiatan pengumpulan angka kredit secara kontributif, inovatif dan produktif, dan (4) meningkatkan silaturahmi para pemegang JFP. Kegiatan program meliputi (1) Penyusunan Satuan Kinerja PNS (SKP) bagi JFP; (2) Penyusunan Rencana DUPAK sebagai Lampiran SKP; (3) Tata Kelola Penyelenggaraan

Pegiat Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Angka Kreditnya Sesuai Satuan Kerja Instansi Masing-Masing ASN (2 jam); (4) Tata Kelola Penyelenggaraan Kegiatan Penunjang Profesi dan Penyusunan Angka Kreditnya Sesuai Satuan Kerja Instansi Masing-Masing ASN; (5) Tata Kelola Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Profesi dan Penyusunan Angka Kreditnya Sesuai Satuan Kerja Instansi Masing-Masing ASN; dan (6) Tata Kelola Penyusunan DUPAK dan Pemberkasan Dokumen Pendukungnya. Waktu penyelenggaraan *training* masing-masing selama dua jam.

Kegiatan Pelatihan Program Dasar Profesionalitas Perencana Pembangunan ini dilaksanakan dalam bentuk *sharing* dan diskusi terkait mata pelatihan yang berbeda setiap pekan selama enam pekan. Peserta pelatihan "Program Dasar Profesionalitas Perencana Pembangunan" tahun 2021 adalah peserta yang terdiri atas (1) para Pejabat Fungsional Perencana Pembangunan yang sudah menjadi anggota PPPI; (2) para Pejabat Fungsional Perencana Pembangunan yang bukan anggota PPPI; (3) peserta umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan JFP (seperti Tim Penilai JFP).

PPPI TALK SERIES

Delapan topik PPPI *Talk Series* mengupas isu-isu kekinian dilihat dari dimensi penguatan kelembagaan dan SDM Perencana yang berkualitas, dan mencari model-model pembangunan masa depan guna mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia 2045.

Sejak tahap pertama hingga PPPI *Talk Series* #4 yang diselenggarakan pada

tanggal 29 Juni 2021, pelaksanaan PPPI *Talk Series* mendapatkan respons yang positif dari para pemangku JFP. Hal ini ditandai dengan banyaknya peserta yang hadir pada setiap pelaksanaan PPPI *Talk Series* dan dari pelaksanaan survei yang menyatakan sangat senang dengan acara PPPI *Talk Series*. Memasuki bulan Agustus, PPPI *Talk Series* #5 yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2021 mengangkat tema yang juga sedang viral, yaitu "Sistem Ekonomi Pancasila: dalam Perwujudan Jati Diri Nasional yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan (Pekerjaan Rumah Bersama yang Harus Segera Diselesaikan dan Dibumikan Pasca-Covid-19". Sebuah Refleksi 76 Tahun Indonesia Merdeka. Pelaksanaan delapan serial diskusi (*talk series*)

merupakan acara bulanan menuju acara puncak Munas PPPI 2021.

**PPPI Talk Series #1
(30 April 2021)**

PPPI *Talk Series* #1 mengangkat topik "Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Pusat dan Daerah: Peluang, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan". Tema ini menjadi isu kekinian dan viral di kalangan Aparatur Sipil Negara, baik di pusat maupun daerah, khususnya dalam isu kebijakan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Banyak terjadi pro dan kontra terkait kebijakan tersebut. Di samping itu, berbagai peluang dan permasalahan ditemukan dalam penerapannya sehingga berkembanglah beberapa isu antara

WEBINAR
Talk Series #1

PENYEDERHANAAN BIROKRASI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH: PELUANG, PERMASALAHAN, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

📅 30 APR 2021 ⌚ 13:00 - 16:00 WIB

KEYNOTE SPEECH:
Dr. Ir. Himawan Hariyoga, M.Sc. (Sesman PPN/Castama Bappenas)

OPENING SPEECH:
Drs. I Dewa Gde Sugiharmetha, MPH. (Ketua Umum PPPI)

NARASUMBER:

- Aba Subagja, S.Sos., M.Si. (Aspek Mendukung Kerja dan Gelar DOK.AJAB/Aspek Kementerian PPN dan DSS)
- Dr. Chika Vargowantjaya, S.STP., M.E. (Dinas Fasilitas Kementerian dan Pengembangan perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri)
- Dr. Herman, M.Si. (Menteri PPN/Perencanaan, Reformasi dan Tata Laksana Badan Pengawasan Negara)
- Ir. Rohmad Supriyadi, M.Si. (Kasubid, Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PPN Bappenas)

MODERATOR:
Muji Purnomo, SE., M.Si. (Perencana Ahli Utama Provinsi Jawa Tengah)

PEMBAHAS:
Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd. (Perencana Ahli Utama Provinsi Bali)

Membedah:

- Disparitas tunjangan kinerja (Tukin) antara JFP reguler dengan hasil penyetaraan (jabatan koordinator dan Sub koordinator);
- Kelas jabatan supaya seragam pada jabatan yang sama;
- Kedudukan dan Karir jabatan fungsional perencana; dan
- Penggunaan sistem merit menggunakan SIPINTER (BKN, Kemenpan RB)

Live Via
zoom
Link Zoom Meeting: <http://bit.ly/Webinar1PPPI-Nas>

REGISTER NOW!
<https://bit.ly/3gHyExB>

Contact Person:
Iksan Maolana (081808350735)

Tersedia E-Sertifikat®

Diselenggarakan oleh: PERKUMPULAN PERENCANA PEMBANGUNAN INDONESIA (PPPI)

WEBINAR
Talk Series #2
ADAPTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MEMASUKI ERA REFORMASI STRUKTURAL UNTUK MEMPERBAIKI PONDASI EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

Narasumber

- Sri Sultan Hamengku Buwono X**
Gubernur DI Yogyakarta
- Zaenal Arifin, S.IP**
Bupati Magelang
- H. Andi Ibrahim Masdar**
Bupati Polewali Mandar
- Dr. Ir. Son Diamar, M.,Sc.**
Dirut PT. Damar Mitra Kayangan

Pembahas

- Prof. Candra Fajri Ananda, SE.,MSc.,Ph.D.**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brastajati

Moderator

- Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM**
Ketua Umum PPPI

LIVE ON:

zoom

Link Pendaftaran:
<https://s.id/PendaftaranWebinarPPPI>

Tersedia:
E-Sertifikat (khusus anggota PPPI)

SAKSIAH:
Mengupas peran 5 STRATEGIS pemangku JPPF memasuki era Reformasi STRUKTURAL dan OTDA

Selasa, 25 Mei 2021

09:00 - 12:00 WIB

lain disparitas tunjangan kinerja, kelas jabatan, serta kedudukan dan karier JFP dalam birokrasi pemerintahan. Untuk merespons isu yang berkembang tersebut, Pengurus Nasional PPPI berharap melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan. Acara dibuka oleh Bapak Sesmen PPN/Sestama Bappenas, selaku Ketua Badan Pengawas PPPI. PPPI Talk Series #1 diselenggarakan secara virtual dan dihadiri oleh sekitar 800 peserta, jumlah yang sangat besar.

Narasumber yang hadir dalam PPPI Talk Series #1 adalah para narasumber

yang langsung membidangi isu-isu yang menjadi topik bahasan seperti Penyederhanaan Birokrasi dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan oleh Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Dampak Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Pegawai Pemerintah Daerah oleh Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri; Pengaruh Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Disparitas Tunjangan Kinerja, Kenaikan Pangkat, dan Pengembangan Karier oleh Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara; Praktik dan Dinamika Pengalihan

Jabatan Struktural ke Fungsional Perencana oleh Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas. Bertindak sebagai pembahas, yaitu Direktur Pendidikan dan Pelatihan PN PPPI, Drs. I Nyoman Sunata, M.Pd. dan dimoderatori oleh Ketua II PN PPPI, Muji Purnomo, S.E., M. Si.

PPPI Talk Series #2 **(25 Mei 2021)**

Salah satu hasil reformasi adalah lahirnya otonomi daerah yang dicita-citakan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemda harus mampu mewujudkan pelayanan yang dekat

dengan masyarakat, efektif, dan terarah. Semua program kerja, mulai dari pembangunan hingga pelayanan publik harus mempunyai dampak yang signifikan. Semuanya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan dan menghilangkan kemiskinan. Dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, hanya ada 50 Pemda yang melakukan inovasi dan terobosan. Pemda-pemda itu bisa dilihat dari betapa seringnya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), seperti Kota Surabaya, Bandung, Kabupaten Banyuwangi, dan Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung dikenal dengan revitalisasi taman dan mempunyai 394 aplikasi pelayanan publik. Kabupaten Banyuwangi di bawah pimpinan Abdullah Azwar Anas berkembang menjadi salah satu destinasi wisata baru.

Pertanyaan 1:

- a. *Mengapa masih sedikit kabupaten/kota dari 514 yang mampu melakukan inovasi?*
- b. *Apa permasalahan dan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan?*

Kontribusi pembagian fiskal dari pusat ke daerah dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2018, ada sekitar Rp766 triliun atau 36% dari Rp2.221 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikirim ke daerah. Ada sekitar 53% dana APBN yang berkulat di daerah melalui skema transfer untuk perimbangan, otonomi khusus, penyesuaian, dan bantuan.

Pertanyaan 2:

- a. *Apakah kontribusi pembagian fiskal dari pusat ke daerah sudah mampu mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat?*

- b. *Apa permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan.*

Menteri Dalam Negeri menyebut hampir semua daerah memiliki porsi belanja pegawai yang cukup tinggi jika dibandingkan belanja modal. Hal ini berdampak pada belanja yang sampai ke masyarakat tidaklah banyak. Hampir 70%, bahkan 80%, merupakan belanja untuk pegawai atau belanja operasional. Dalam peresmian dan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021, 4 Mei 2021, Presiden menyampaikan bahwa kita harus mempercepat belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. *Demand side* harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar. Pada akhir Maret 2021, di perbankkan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, dan kota Rp182 triliun, yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi.

Pertanyaan 3:

- a. *Apa yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak memiliki perencanaan dan penganggaran yang baik?*
- b. *Apa permasalahan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan?*

Di era otonomi daerah, proses sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dengan perencanaan pembangunan daerah, sering kali dalam tataran pelaksanaan belum optimal. Di samping itu, fenomena Kepala Daerah yang terjerat kasus KKN dan diproses di KPK menggambarkan bahwa konsep otonomi daerah masih banyak titik lemah yang harus diperbaiki.

Pertanyaan 4:

- a. *Apa permasalahan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam mengharmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan pusat?*
- b. *Apa tawaran solusi mengatasi agar anggaran pembangunan yang terbatas tidak mudah disalahgunakan, baik dari aspek administrasi maupun sistem politik?*

Menyikapi berbagai fenomena yang telah dideskripsikan di atas dan dalam rangka mencapai visi PPPI “menjadi organisasi profesi yang mampu membangun profesionalisme fungsional perencanaan dalam mendukung kelembagaan perencanaan di pusat dan daerah”, Pengurus Nasional Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PN-PPPI) mengambil inisiatif untuk mengadakan Seminar dengan mengangkat tema “Adaptasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Memasuki Era Reformasi Struktural Untuk Perbaiki Fondasi Ekonomi dan Kesejahteraan”

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholder* sebagai langkah konkret “terobosan” alternatif-alternatif kebijakan (*policy reform*) desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka beradaptasi dengan reformasi struktural pada lima are fokus, yaitu pengembangan SDM, pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokratisasi, dan mentransformasikan ekonomi, termasuk sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk perbaikan fondasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan hasil webinar yang selanjutnya dapat diserahkan kepada pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) sehingga dapat menjadi program yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.

Pokok bahasan dalam PPPI *Talk Series* #3 ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah beradaptasi dengan langkah reformasi struktural dengan membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran dalam upaya untuk memperbaiki fondasi-fondasi ekonomi Indonesia dan kesejahteraan;
2. Gambaran umum keberhasilan, permasalahan, dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Efektivitas pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional;
4. Faktor-faktor penghambat dan penguat untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran daerah;
5. Bagaimana variabel sumbangan, bantuan, pembiayaan pemerintah memengaruhi derajat otonomi fiskal daerah di kabupaten/kota;
6. Refleksi otonomi daerah dari dimensi administrasi dan sistem politik;
7. Harapan dan strategi meningkatkan peran Pejabat Fungsional Perencana dalam memperkuat inovasi-inovasi implementasi otonomi daerah.

TALK SERIES #3

Perencanaan Pembangunan yang Inovatif dan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS): Antara Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Hasil Evaluasi, dan Tantangan di Daerah

Narasumber

Victor Bungtillu Laikodot, SH, M.Si, Gubernur NTT | Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc, Gubernur NTB | Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail, S.H, Gubernur Maluku | Andi Sudirman Sulaiman, S.T, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan

Keynote Speech | **Moderator** | **Pembahas**

Drs. I Dewa Gde Sughanretha, MPM, Ketua Umum PPPI | Ir. Fakhri Fakhri, Direktur Hukum dan Advokasi PPI-PPPI | Randy R. Wihalnoko, S.Sos, MSc, Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas | Ir. Muhammad Marhum Latif, MM, Perencana Ahli Bidang Bappenas | Dr. Andi Gustang SE, Mui, Ketua TK/Koordinator Wilayah Timur PPI-PPPI

JUNI 23 | 12:00-16:00 WIB | zoom

Link Pendaftaran: <https://s.id/DaftarTalkSeries3>
Meeting ID: 955 5899 0543
Passcode : PPPI

Diselenggarakan oleh: Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI)

Pembicara dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: Drs. Benny Suharsono, M.Si., Kepala Bappeda Provinsi DIY mewakili Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Zainal Arifin, S.I.P., Bupati Magelang; Dr. Budi Santoso, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas; Dr. Ir. Son Damar, M.,Sc. Pembahas pada kegiatan ini, yaitu Prof. Candra Fajri Ananda, S.E.,M. Sc., Ph.D., Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya; dan Dr. Heri Suhermanto, mantan ketua AP2I/PPPI periode pertama.

PPPI Talk Series #3 (23 Juni 2021)

PN PPPI telah menyelenggarakan PPPI *Talk Series* #1 dan PPPI *Talk Series* #2 dari delapan rangkaian *talk*

series webinar. Pada Juni 2021, PN PPPI menyelenggarakan PPPI *Talk Series* #3 dengan topik "Perencanaan Pembangunan yang Inovatif dan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS): Antara Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Hasil Evaluasi, dan Tantangan di Daerah".

Hal-hal penting yang dibahas sebagai berikut. Pertama, peran-peran Pejabat Fungsional Perencana Pembangunan masing-masing Pemerintah Daerah sebagai faktor pemungkin (*enabling-factor*) yang menjadikan pbumian Proses Perencanaan Pembangunan yang Inovatif dan Berbasis THIS seperti: (1) Pejabat Fungsional Perencana Pembangunan secara aktif dan konstruktif bekerja sama dalam penyusunan kebijakan

rencana pembangunan; (2) Pejabat Fungsional Perencana Pembangunan secara aktif dan konstruktif membantu mewujudkan pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan secara efektif; (3) Pejabat Fungsional Perencana Pembangunan secara aktif dan konstruktif membantu melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan secara solutif; (4) Pejabat Fungsional Perencana Pembangunan secara aktif dan konstruktif membantu melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan secara inovatif.

Kedua, kebijakan rencana pembangunan daerahnya masing-masing (dapat yang bersifat lima

tahunan –berbasis RPJMD– ataupun yang bersifat tahunan –berbasis RKPD–). Proses perencanaan pembangunan dan produk kebijakan rencana pembangunan sesuai kebijakan rencana pembangunan daerah (di atas) yang inovatif, tematik, holistik, integarif, spasial, dengan memberikan fokus pada

1. pelaksanaan penyusunan kerangka perencanaan dan pembiayaan;
2. pelaksanaan penetapan tujuan yang berdampak kepada masyarakat.
3. pelaksanaan pengkajian kelayakan kebijakan/program yang efektif.
4. pelaksanaan penelaahan struktur peran dan pembiayaan dalam menjamin pelaksanaan kebijakan di lapangan.

5. pelaksanaan pengkajian prioritas yang sesuai dengan kebutuhan.
6. pelaksanaan pengkajian kerangka logika agar kebijakan prioritas dapat melibatkan kebijakan/sector lain mendorong pencapaian kebijakan prioritas.
7. pelaksanaan pengkajian integrasi spasial agar kebijakan prioritas dapat tepat sasaran dan tepat lokasi di wilayah yang masyarakatnya membutuhkan.
9. pelaksanaan penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan di atas.

LIVE EVENT

Talk Series #4

PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DATE: 29 Juli 2021 | TIME: 12.30-16.00 WIB

OPENING SPEECH

- I Dewa Gde Sugihamretha, Ketua PPI
- Dr. Ir. Leonard VH Tampubolon, MA (PLT), Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
- Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si, Kepala Bappeda Jabar

NARASUMBER

- Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum APINDO
- Misbah Hasan, Sekjen FIERA
- Randy R. Wrihatnolo, Direktur Kebijakan Kalam Bogean PPI

MODERATOR

- Mohamad Tomtom Makmur, BPK-1/PI

PEMBAHAS

- Dr. Ir. Taufik Hanaf, MUP, Deputy PPIP Kementerian PPN/Bappenas
- Dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D, FKM-UI
- I Nyoman Sunata, Direktur Pendidikan dan Latihan PPI

SCAN ME

Link Pendaftaran: <https://s.id/DaftarTalkSeries4>

Contact Person: Surinta B. Sembiring (081219150141)

Live on: **zoom**

PPPI Talk Series #4 (29 Juli 2021)

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respons kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi Covid-19.

Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang (UU) No. 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dalam UU ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0% PDB untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga. Berdasarkan PP Nomor 23

Tahun 2020, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Selanjutnya, seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk itu, Pemda perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020).

Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya. Di samping itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) telah menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat, disusul Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Masa Bencana Nasional Penyebaran Covid 19 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19.

Saat ini, sudah memasuki lebih dari satu tahun Indonesia melawan Covid-19, hasilnya sempat membaik, namun semua merasakan akhir-akhir ini pandemi Covid-19 semakin meningkat. Berbagai kebijakan tersebut di atas dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan seperti kebijakan sama untuk semua, namun kemampuan fiskal masing-masing daerah berbeda, adaptasi birokrasi yang lambat terhadap perubahan postur APBD, data lemah sehingga kurang tepat sasaran. Bertitik tolak dari hal ini maka Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) sebagai organisasi profesi dalam bidang perencanaan

pembangunan ingin berkontribusi agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional ke depan lebih baik melalui pelaksanaan PPPI *Talk Series*#4. Pembahasan dari sudut pandang perencanaan dan penganggaran fokus pada isu fenomena dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional meliputi isu (1) stimulus ekonomi; (2) *refocusing*; (3) realokasi; dan (4) penghematan. Dalam pelaksanaannya, muncul berbagai permasalahan. Kita bedah dari sisi regulasi, administrasi, penegakan hukum, politik anggaran, dan kualitas SDM perencana dan penganggaran pembangunan.

Melalui PPPI *Talk Series*#4, PPPI mengharapkan dapat memberikan pengayaan wawasan dan gagasan, pemahaman yang lebih baik, serta menjadi pembelajaran guna perbaikan perumusan strategi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dalam menghadapi berbagai bentuk bencana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tema PPPI *Talk Series* #4 adalah "Pembelajaran dan Rekomendasi: Perencanaan dan Penganggaran dalam Rangka Penanganan dan Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19".

Pelaksanaan PPPI *Talk Series* #4 ditujukan untuk (1) memperjelas pola perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel sehingga penanganan pandemi Covid-19 dan masalah sejenis ke depan semakin baik; (2) mendorong dan memotivasi para pengambil kebijakan pada Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk siap melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel guna

percepatan penuntasan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional; dan (3) menyempurnakan arah dan strategi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi ke depan yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pembicara pertama, Dr. Leonard Tampubolon, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, dengan paparan berjudul: "Hasil, Permasalahan, dan Tindak Lanjut yang Diperlukan Agar Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Berjalan dengan Efektif dan Efisien". Pembicara kedua, Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si., Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, dengan tema paparan "Hasil, Permasalahan, dan Tindak Lanjut yang Diperlukan untuk Mengatasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program", meliputi isu (1) stimulus ekonomi; (2) *refocusing*; (3) realokasi; dan (4) penghematan. Pembicara ketiga, Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), menyajikan paparan dengan tema "Perencanaan dan Penganggaran dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional". Efektif kah perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam masa pandemi Covid-19 ini untuk melindungi kesehatan masyarakat luas, mempertahankan daya beli masyarakat rentan dan mempertahankan pelaku usaha melakukan kegiatan ekonominya? Pembicara keempat, Misbah Hasan, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dengan paparan "Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Perencanaan

dan Penganggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Tingkat Pusat dan Daerah".

Para pembahas meliputi Dr. Ir. Taufik Hanafi, M.U.P., Deputi PPEP Kementerian PPN/Bappenas; dr. Pandu Riono, M.P.H., Ph.D., epidemiolog FKM UI; dan Nyoman Sunata, Direktur Pendidikan dan Latihan PN PPPI.

Keberhasilan sebuah program kedaruratan sangat bergantung dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik dan benar. Harapan bagi semua pihak khususnya anggota PPPI *Talk Series* #4 dapat memberikan pengayaan wawasan dan gagasan, pemahaman yang lebih baik, serta menjadi pembelajaran perbaikan guna perumusan strategi kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta berbagai bentuk bencana dimasa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam acara juga diadakan kuis, bagi berhasil menjawab pertanyaan diberikan hadiah satu buah buku karya Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho.

PPPI INNOVATION AWARDS (PIA)

Di samping delapan *talk series*, kawan-kawan PN PPPI juga ingin berkontribusi mengatasi lemahnya daya inovasi perencanaan pembangunan. Dalam kerangka memperkuat peran perencana sebagai pemampu (*enabler*), PN PPPI berinisiatif mengadakan PPPI *Innovation Award* (biar mudah melafalkannya disingkat PIA) dalam

bentuk kegiatan *Call for Papers* Inovasi Perencanaan Pembangunan.

Kegiatan ini akan dimulai pertengahan Mei 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Bagi peserta terbaik diberikan *reward*, baik dalam bentuk materi maupun bentuk lainnya seperti karya terbaik akan dimuat di Majalah Perencana Pembangunan, mendapatkan Angka Kredit, menjadi pembicara utama dalam acara puncak Munas PPPI 2021, dan karya-karya terbaik akan difasilitasi untuk mendapatkan perhatian dari pimpinan Kementerian/Lembaga, dan Pimpinan Daerah agar inisiatif-inisiatif baru ini bisa dijadikan kegiatan prioritas dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Kegiatan ini dapat diikuti tanpa berbayar oleh seluruh Pejabat Fungsional Perencana Pembangunan di seluruh Komisarariat PPPI di Indonesia. Ketentuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat dalam undangan dan lampirannya yang dapat diunduh dengan mengklik tautan berikut: <http://bit.ly/paperinovasi2021>. Kegiatan ini adalah hasil kerja sama PPPI dengan Perkumpulan Ahli Data Pembangunan Indonesia (IDDSA) tentang Sinergi Peningkatan Kapasitas Perencana.

Pelaksanaan kegiatan PIA dilakukan dalam lima tahap. Tahap pertama adalah "Seleksi Usulan Judul". Tahap kedua adalah "Pembekalan Peserta Lomba" dengan tujuan (1) peserta mengetahui bentuk dan contoh *paper* yang mendeskripsikan bukti empiris bahwa inovasi yang diandalkan terbukti dapat bermanfaat, dengan kemanfaatan yang juga dapat dibuktikan dengan *robust*; (2) peserta mengetahui format *policy paper* yang dapat dimuat dalam Jurnal

Perencanaan Pembangunan. Tahap ketiga adalah "Penilaian *Policy Paper*". Tahap keempat adalah "Penilaian *Paper* melalui Presentasi, dan Pemaparan Materi Paparan" dengan tujuan agar peserta memaparkan *policy paper*-nya dalam *webinar* PPPI *Talk Series* yang diselenggarakan PN PPPI. Para Peserta finalis dinilai penampilannya untuk ditentukan juara ke- 1, 2, dan 3. Tahap kelima adalah "Pemuatan *Policy Paper* dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan".

Pada tanggal 1 Agustus 2021, pukul 24.00 WIB, Program PPPI *Innovation Awards*, Inovasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2021, telah memasuki tahap ketiga, yaitu "Penilaian *Policy Paper*" dan telah terkumpul enam belas makalah. Dengan telah jatuh temponya batas akhir pengiriman makalah pada hari dan jam tersebut maka pengumpulan makalah dinyatakan ditutup.

Berdasarkan catatan TPPJ PIA 2021, terdapat 26 peserta yang telah diundang TPPJ PIA 2021 untuk mengumpulkan makalah dan dari jumlah tersebut yang mengirimkan makalah adalah 16 peserta (selanjutnya disebut Calon Nominator) untuk berhak mengikuti tahap ketiga, yaitu "Penilaian *Policy Paper*". Dari makalah yang terkumpul, TPPJ PIA 2021 akan memilih 10 makalah terbaik dan akan dinyatakan sebagai Nominator pada Selasa, 17 Agustus 2021.

Para Nominator (10 nominator) yang diumumkan pada Selasa, 17 Agustus 2021, itu berhak mengikuti tahap keempat, yaitu "Penilaian *Policy Paper* melalui Presentasi dan Pemaparan Materi Paparan" dalam bentuk diundang sebagai pembicara untuk mempresentasikan makalahnya dalam

PPPI *Talk Series* #6, pada Senin, 6 September 2021 (tentatif).

Selanjutnya, para Nominator wajib menyusun materi paparan dan diberi waktu untuk menyusunnya antara Rabu, 18 Agustus, sampai dengan 31 Agustus 2021. Berkenaan dengan hal ini, TPPJ menyarankan agar para Calon Nominator diharapkan sudah mempersiapkan materi paparan dalam format PoerPoint (.ppt) dengan durasi paparan masing-masing sepuluh menit. Berdasarkan makalah dan pemaparan tersebut, TPPJ akan memilih lima pemenang. Para pemenang akan menerima hadiah.

Makalah pemenang bila memenuhi syarat penerbitan akan dipublikasikan dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan atau jurnal ilmiah lainnya yang ada dengan pemuatan berkala di edisi yang tersedia (dapat di edisi tahun 2021 dan edisi berikutnya hingga tahun 2022, mengingat keterbatasan jumlah halaman jurnal itu sendiri). Bila makalah belum memenuhi persyaratan maka editor dapat meminta kepada pemenang untuk memperbaiki dan menyesuaikan makalah berdasar persyaratan penerbitan.

LSP PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (LSP RENBANG)

PN PPPI bersama-sama dengan Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sebagai instansi pembina organisasi profesi perencanaan pembangunan indonesia, telah menginisiasi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Perencanaan Pembangunan Indonesia (LSP Renbang) dalam rangka mendukung peningkatan

sertifikasi kompetensi tenaga kerja perencana pembangunan di Indonesia. Dukungan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas disampaikan, dengan harapan bahwa LSP Renbang dapat berperan dalam peningkatan daya saing dan produktivitas SDM tenaga kerja di bidang perencanaan pembangunan.

Setelah melalui jalan panjang PN PPPI bersama-sama Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, pada tanggal 23 November 2021, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memberikan lisensi kepada LSP Renbang melalui Surat Keputusan Nomor: BNSP-LSP-1 846-ID dengan masa berlaku hingga 23 November 2025. LSP Renbang merupakan lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga. Dengan ruang lingkup lisensi yang telah ditetapkan, lembaga sertifikasi tersebut secara konsisten telah memenuhi kompetensinya sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014, Pedoman BNSP 202 versi 2014, dan Pedoman BNSP 210 versi 2017. Badan usaha LSP Renbang memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan daya saing dan produktivitas SDM tenaga kerja di bidang perencanaan pembangunan. Untuk itu, ke depan, sesuai dengan hasil musyawarah dan arahan dari Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, PN PPPI akan mengawal berbagai kegiatan-kegiatan LSP Renbang berkolaborasi dengan semua pihak dengan dukungan dari para *stakeholders* dan sumber daya manusia yang profesional.

KEGIATAN LAINNYA

Dalam rangka memenuhi persyaratan proses permohonan kenaikan tunjangan jabatan fungsional perencana, saya bersama Direktur Hukum dan Advokasi PN PPPI, Falikul Fikri, dan Ketua II PN PPPI, Muji Purnomo, S.E., M.Si. sebagai pemangku jabatan fungsional perencana jenjang ahli utama diundang oleh Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, sebagai instansi pembina organisasi profesi perencanaan pembangunan Indonesia, untuk mengisi lembar/kertas kerja *job assessment* Jabatan Fungsional Perencana Jenjang Ahli Utama yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Pengisian kertas kerja lumayan rumit dimulai dari dasar hukum bekerja sebagai seorang pemangku jabatan fungsional antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015

tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112); dan seterusnya.

Selanjutnya menguraikan (a) tugas pokok; (b) syarat pendidikan, kualifikasi, dan pengalaman; (c) uraian tugas jabatan dari sejak tahap perencanaan sampai dengan pemantauan dan pengendaliannya diuraikan secara detail menurut tahapan kegiatan, waktu, dan dilengkapi dengan ilustrasi; (d) risiko pekerjaan; dan (e) *outcome* pekerjaan. Setelah mengisi kertas kerja dilanjutkan dengan diskusi dengan Pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Harapannya, semoga tahun 2021 langkah-langkah tersebut membuahkan berkah yang bermanfaat bagi seluruh pemangku Jabatan Fungsional Perencana. ■

PROFIL PENULIS

I Dewa Gde Sugihamretha merupakan Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas; saat ini menjabat Ketua Umum Pengurus Nasional PPPI periode 2019–2021

#ZonaIntegritas

#ZonaIntegritas

PIMPINAN DAN STAF

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

MENOLAK SEGALA BENTUK GRATIFIKASI



Kementerian PPN/ Bappenas

Pusbindiklatren
Bappenas | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Instagram: @pusbindiklatren Bappenas | Facebook: @pusbindiklatren

Kementerian PPN/ Bappenas

Pusbindiklatren Bappenas

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pelayanan di Pusbindiklatren Bappenas tidak memungut biaya dalam bentuk apapun. Jika terdapat pihak-pihak yang meminta biaya atas pelayanan di Pusbindiklatren Bappenas, silakan Anda laporkan melalui alamat pos-el (e-mail) berikut:
pusbindiklatren@bappenas.go.id



JAM PELAYANAN
SENIN—JUMAT
08.30—11.30 & 12.30—15.00

PELAYANAN PRIMA

- BEBAS PUNGLI
- BEBAS KORUPSI
- BEBAS KOLUSI
- BEBAS NEPOTISME
- BEBAS GRATIFIKASI

ZONA INTEGRITAS

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id


#ZonaIntegritas

WBS | WHISTLE BLOWING SYSTEM

LAPORKAN SEKARANG JUGA!

SEGALA BENTUK PENYALAHGUNAAN DI SEKITAR ANDA MELALUI:

irtama.bappenas.go.id/wbs



Masukkan tempat kejadian, waktu, pihak terlapor, dan **upload** dokumen seperti: foto, video, rekaman suara, dan lain-lain.

JANGAN KHAWATIR
IDENTITAS PELAPOR DIJAMIN KERAHASIAANNYA

Kementerian PPN/ Bappenas

Pusbindiklatren
Bappenas | Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Instagram: @pusbindiklatren Bappenas | Facebook: @pusbindiklatren

Pada bulan Desember 2020, Pusbindiklatren Bappenas mendapatkan predikat WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) dari Kementerian PANRB





TANYA JAWAB JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

SEPUTAR PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Sumber: Klinik ASN Perencana

PENGANGKATAN PERTAMA KALI - CPNS FORMASI PERENCANA

Pertanyaan 1:

Pengangkatan pertama kali dalam jabatan, khususnya untuk CPNS/PNS yang formasinya sebagai perencana, belum ada kesepemahaman terhadap mekanisme pengangkatannya baik bagi yang bersangkutan maupun institusi yang berkaitan. Mekanisme penerbitan BAPAK sampai dengan PAK-nya apakah harus dari Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas atau bisa oleh masing-masing BKD Provinsi atau kabupaten/kota? Kemudian apakah harus mengikuti Pelatihan Fungsional Ahli Pertama dahulu untuk bisa diangkat dalam jabatan?

Jawaban:

- Ketentuan pengangkatan pertama kali dari CPNS sudah terdapat pada PP 11/2017, PP 17/2020, dan

diperjelas Kembali di SE Menpan Nomor 563.

- Menurut PP 11/2017, persyaratan untuk diangkat ke dalam JFP Ahli Pertama dari CPNS Formasi JFP harus mengikuti diklat (pelatihan). Adapun di PP 17/2020 persyaratan pelatihan tersebut dihilangkan, sehingga tidak perlu lagi pelatihan dan diperjelas lagi di SE (Surat Edaran) MenPANRB nomor B/563/M.SM.02.00/2020 tentang Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama.
- Jadi CPNS formasi JFP tersebut ketika sudah menjadi PNS 100% dapat langsung diangkat menjadi JFP Ahli Pertama dengan AK 0. Jika ingin lebih yakin mengenai aturan tersebut, dapat menunggu juklak BKN tentang JFP, di mana dalam juklak tersebut nanti akan diperjelas ketentuan teknisnya dan contoh SK-nya. Informasi saat ini, juklak BKN tentang JFP sedang

diharmonisasi di Kemenkumham.

- Di dalam SK, untuk pengangkatan ke dalam JFP yang bertanda tangan adalah PPK, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota. Setelah juklak BKN sudah resmi untuk diterbitkan, Pusbindiklatren akan menyebarkan ke seluruh BKD agar tidak ragu dalam pengangkatan pertama ke dalam JFP

Pertanyaan 2:

Saya ingin mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana Muda apakah masih bisa ikut mendaftar? Karena formasi CPNS saya sebagai Calon Perencana mewajibkan saya diangkat menjadi Fungsional Perencana. Saya sekarang gol III/c, belum menjadi Fungsional Perencana. Pada tahun 2015, saya sudah ikut pelatihan, tetapi ada masalah di BKD ketika mengusulkan dengan beberapa teman yang juga CPNS Calon Perencana

jadi tidak bisa diangkat ke dalam JFP. Saat ini, jabatan saya di Bappeda dan menurut data BKD adalah Calon Fungsional Perencana.

Jawaban:

Karena ibu sudah naik ke golongan III/c, ibu nanti bukan mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Muda karena sudah tidak ada berdasarkan PP 17/2020. Tahun ini ibu bisa mendaftar untuk mengikuti Uji Kompetensi JFP Ahli Muda. Hasil pelatihan pada tahun 2015 sudah tidak berlaku karena pelatihan tersebut untuk Fungsional Perencana Ahli Pertama dan saat ini ibu sudah golongan III/C berarti jenjang jabatannya sudah bukan Fungsional Perencana Ahli Pertama.

PENGANGKATAN JFP DARI JABATAN LAIN

Pertanyaan 3:

Bagaimana cara perpindahan jabatan?

Jawaban:

Persyaratan perpindahan jabatan adalah formasi jabatan, memiliki pengalaman minimal dua tahun di bidang perencanaan pembangunan (sedang dilakukan atau pernah melakukan), usia memenuhi persyaratan, dan lulus uji kompetensi. Batas usia pengangkatan untuk JFP Pertama dan JFP Muda adalah 53 tahun, sedangkan untuk JFP Madya 55 tahun.

Pertanyaan 4:

Bagaimana cara ASN baru seperti saya yang bukan formasi JFP untuk dapat mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana agar dapat menjadi Fungsional Perencana, di mana

penempatan kami memang berada pada instansi perencanaan daerah, tetapi belum memiliki Fungsional Perencana?

Jawaban:

Unit kerja Bappeda harus memiliki Pejabat Fungsional Perencana. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah Bappeda bersama BKD/BPSDM menghitung berapa kebutuhan semua jabatan termasuk Jabatan Fungsional Perencana sehingga dapat diketahui kebutuhan JFP di setiap jenjangnya.

Pertanyaan 5:

Mohon penjelasan terkait tahapan apa yg harus kami lalui untuk dapat menjadi Fungsional Perencana dikarenakan di daerah kami belum ada Fungsional Perencana.

Jawaban:

Pertama harus menghitung kebutuhan formasi jabatan serta melampirkan Anjab dan ABK. Setelah kebutuhan formasi jabatan telah dihitung, selanjutnya BKD/BKPSDM mengusulkan ke KemenPANRB dengan usulan dari instansi pembina. Perlu diingat bahwa KemenPANRB akan menyetujui formasi tersebut setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. Setelah formasi jabatan telah tersedia maka Bapak dapat mendaftar Uji Kompetensi.

Pertanyaan 6:

Saya telah memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Muda. Saat ini, saya sedang proses pengajuan JFP Ahli Muda sejak tanggal 26 Januari 2021 dengan proses persuratan dari Direktur saya ke Bagian Kepegawaian

Eselon I yang sama. Namun, sampai saat ini, proses masih terhenti di Bagian Kepegawaian karena masih bingung tentang prosesnya, apakah masuk kategori inspassing atau bukan.

Dari hasil komunikasi dengan Kasubag Administrasi Jabatan Fungsional, saya memperoleh jawaban bahwa sedang dialami mengenai siapa yang melakukan penerbitan rekomendasi PAK, apakah Kementerian PPN/ Bappenas, atau PKTL, atau langsung BKN dalam persteknya. Sebagai informasi, di KLHK, penerbitan/ penandatanganan PAK dilakukan oleh Sesditjen PKTL (Planologi).

Saya menganggap masih ada kebingungan Bagian Kepegawaian dalam tindak lanjut pegawai yang sudah mempunyai Sertifikat Kompetensi Perencana.

Berdasarkan hal tersebut, mohon info proses selanjutnya yang harus dilakukan setelah mendapatkan sertifikat kompetensi dan surat rekomendasi pengangkatan JFP Ahli Muda dari Kementerian PPN/ Bappenas. Jika berkenan, mohon info juga peraturan apa saja yang diacu agar nanti dapat saya sampaikan ke Bagian Kepegawaian.

Jawaban:

- Berdasarkan KepmenPANRB 16/2001, salah satu persyaratan wajib untuk menjadi JFP dan naik jenjang jabatan adalah mengikuti Diklat Penjenjangan JFP (Jalur Reguler). Setelah lulus diklat, yang bersangkutan dapat diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perencana dengan melampirkan sertifikat kelulusan diklat dan Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK).

- BAPAK akan diterbitkan oleh instansi pembina, kemudian disampaikan kepada perencana
- Jadi untuk kasus yang Bapak sampaikan, karena kondisi Bapak sudah memiliki Sertifikat Pelatihan Fungsional Perencana maka proses pengangkatan menjadi JFP tersebut adalah jalur reguler.
- Perlu diperhatikan apakah BAPAK Pascalulus Pelatihan Fungsional Perencana tersebut masih sesuai dengan pangkat golongan sekarang atau tidak.
- Pada dasarnya yang mengeluarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah Bagian Kepegawaian dari instansi masing-masing, sedangkan Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan BAPAK pasca-dikeluarkannya Sertifikat Lulus Uji Kompetensi JFP.

Pertanyaan 7:

Saya seorang apoteker dengan S-2 Rumah Sakit, tetapi ditugaskan di Bappeda. Dulunya saya bekerja di Rumah Sakit. Bagaimana caranya supaya saya diangkat ke dalam JFP seperti di instansi kesehatan?

Jawaban:

JFP bisa bekerja di SKPD selain Bappeda, selama tugas dan fungsi di SKPD tersebut ada yang mengenai perencanaan pembangunan. Tidak mungkin JFP di instansi kesehatan pekerjaannya akan sama persis dengan JFP di Bappeda. Ibu bisa mengikuti jalur perpindahan jabatan untuk menjadi JFP melalui uji kompetensi saja dan tidak perlu mengikuti pelatihan. Karena ibu golongan IV/a maka ibu bisa mengikuti Uji Kompetensi Jenjang JFP Ahli Madya. Untuk ahli madya, setelah

lulus uji kompetensi akan ada tahap wawancara. Pelatihan untuk ahli madya sekarang ini hanya untuk pemenuhan kompetensi.

UJI KOMPETENSI SEBAGAI SYARAT PERPINDAHAN JABATAN DAN KENAIKAN JABATAN (PENGGANTI PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA)

Pertanyaan 8:

Setelah mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan ke dalam jabatan fungsional perencana, langkah apa yang harus dilakukan? Apakah harus mengikuti pelatihan?

Jawaban:

Setelah uji kompetensi langsung diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perencana. Pada peraturan baru, Pelatihan Fungsional Perencana bukan persyaratan wajib, tetapi hanya menjadi pemenuhan kompetensi.

Pertanyaan 9:

Untuk perencana yang tidak lulus uji kompetensi, apakah diberi kesempatan lagi? Berapa jeda waktunya?

Jawaban:

- Uji kompetensi merupakan persyaratan untuk menjadi dan naik ke dalam jenjang jabatan JFP. Uji kompetensi merupakan pengganti dari kewajiban mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana.
- Peraturan bagi yang tidak lulus uji kompetensi masih dalam tahap penyusunan di Petunjuk Teknis PermenPANRB 4/2020. Adapun saat ini masih dalam tahap rencana bagi yang tidak lulus

uji kompetensi akan diberikan Pelatihan Fungsional Perencana untuk pemenuhan kompetensi terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan uji kompetensi kembali.

Pertanyaan 10:

Bagaimana mengenai perencana yang sudah memiliki Sertifikat Pelatihan Fungsional Perencana terkait kenaikan jenjang jabatannya?

Jawaban:

Bagi yang sudah memiliki Sertifikat Pelatihan Fungsional Perencana, tetap dapat digunakan untuk kenaikan pangkat mengacu peraturan lama.

Pertanyaan 11:

Saya sudah mengikuti Tes Materi Pelatihan Fungsional Perencana tahun 2020, tetapi belum ada panggilan untuk pelatihan. Kapan saya bisa mengajukan untuk pelatihan kembali?

Jawaban:

Pada tahun 2021, pelatihan untuk menjadi Fungsional Perencana hanya untuk jenjang ahli pertama, sedangkan bagi yang akan menjadi Fungsional Perencana Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama dilakukan Uji Kompetensi.

Untuk kasus Bapak, bisa dilihat kembali rekomendasi pada Tes Materi, apabila tertulis untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Muda maka pelatihan tersebut diganti menjadi mengikuti uji kompetensi. Pada tahun 2018, sudah mengikuti Tes Materi dan Pelatihan Fungsional Ahli Muda, tetapi belum diangkat menjadi JFP karena Bapak diangkat menjadi struktural.

Pertanyaan 12:

Saat ini, kami menjadi JFP melalui penyetaraan. Apakah sertifikat yang sudah dimiliki masih dapat digunakan atau harus ikut uji kompetensi?

Jawaban:

Untuk penyetaraan tidak perlu uji kompetensi, tetapi ketika akan naik jabatan menjadi JFP Ahli Madya, harus mengikuti uji kompetensi ditambah dengan persyaratan lainnya.

Mengingat Ibu sudah pernah mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Muda sebelumnya, hal tersebut menjadi poin lebih untuk Ibu karena mendapatkan ilmu kompetensi JFP Ahli Muda.

Pertanyaan 13:

Materi tes untuk uji kompetensi pindah jabatan adalah kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan sosio-kultural. Apa yang dimaksud dengan ujian tersebut?

Saat ini, saya sudah dua tahun di bagian perencanaan tapi masih menjadi staf (golongan III/c), apakah ketika ujian kompetensi untuk menjadi Fungsional Perencana Ahli Muda diperlukan tes teknis tentang perencanaan misal terkait penyusunan dokumen, indikator kinerja, evaluasi, dan sejenisnya?

Jawaban:

- PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga kompetensi yang harus dimiliki seorang PNS atau dalam hal ini JFT, yaitu kompetensi sosio-kultural (sikap dan etika profesi);

kompetensi teknis sesuai tugas jabatan; dan kompetensi manajerial. Untuk uji kompetensi formatnya adalah mengerjakan soal yang di dalamnya mencakup tes yang terkait dengan ketiga kompetensi tersebut. Nanti setelah lulus dan diangkat menjadi JFP, Pusbindiklatren akan meningkatkan kapasitas JFP melalui pelatihan-pelatihan yang terkait dengan ketiga kompetensi yang harus dimiliki.

- Uji kompetensi bersifat tertulis dan tidak ada penugasan yang bersifat lisan atau praktik. Hingga saat ini, formatnya masih pengerjaan soal (tahun lalu untuk yang akan menjadi JFP Ahli Pertama dan JFP Ahli Muda mengerjakan ujian pilihan ganda, untuk yang akan menjadi JFP Ahli Madya ada pilihan ganda dan esai, untuk utama mengerjakan *policy paper*).

Pertanyaan 14:

Mengapa syarat setiap uji kompetensi harus memiliki pengalaman? padahal belum tentu yang tidak memiliki pengalaman, tidak mampu menjawab soal-soal uji kompetensi. Bagaimana jika yang tidak memiliki pengalaman ingin mencoba mengikuti uji kompetensi tersebut? Apakah tidak ada toleransi?

Jawaban:

- Tujuan saat ikut Uji Kompetensi JFP seharusnya diperjelas dulu apa manfaatnya untuk peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi atau dengan kata lain saat mengikuti uji kompetensi bukan karena *personal interest*, tetapi lebih kepada kebutuhan organisasi.

- Pengalaman 2009 hingga akhir 2018, Pusbindiklatren menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Perencana untuk setidaknya lebih dari 5.000 orang, tetapi yang diangkat berdasarkan data Pusbindiklatren tahun 2019 akhir tidak lebih dari 1.000 orang. Mohon diperhatikan potensi anggaran negara yang hilang apabila pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi hanya untuk coba-coba personal.

Pertanyaan 15:

Bagaimana kalau dalam uji kompetensi naik jenjang JFP ke ahli muda tidak lulus? sedangkan AK sudah memenuhi?

Jawaban:

Saat ini, belum ada aturan tertulis mengenai peserta yang tidak lulus uji kompetensi, tetapi ada kebijakan dari Kepala Pusbindiklatren, yaitu dapat mengikuti uji kompetensi ulang maksimal dua kali setelah ASN yang bersangkutan tidak lulus uji kompetensi pertama kali. Apabila masih belum lulus maka dipertanyakan kemampuan kompetensinya di bidang perencanaan pembangunan dan dipersilahkan untuk mengikuti ujian jabatan fungsional yang lain. Materi uji kompetensi terkait regulasi perencanaan pembangunan, UU 2004, PP 17/2017, koordinasi perencanaan dan anggaran, PP evaluasi, dan lain-lain.

Pertanyaan 16:

Saya pernah mengikuti Tes Materi Pelatihan Fungsional Perencana pada tahun 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan

Fungsional Perencana Ahli Muda. Namun, sampai tahun 2020, saya masih belum mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan, apakah saya masih bisa/perlu mengikuti pelatihan tersebut?

Jawaban:

Berdasarkan PermenPANRB 4/2020, persyaratan untuk menjadi JFP melalui jalur perpindahan jabatan adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi, setelah lulus akan mendapatkan BAPAK dan bisa langsung diangkat menjadi JFP. Silahkan Ibu mendaftar uji kompetensi gelombang ke-2.

Pertanyaan 17:

Saya sudah dua kali mengajukan Pelatihan Fungsional Perencana, yang pertama ikut tes, tetapi tidak lulus, kemudian saya mengajukan kembali awal tahun ini. Bagaimana caranya supaya bisa ikut pelatihannya lebih cepat?

Jawaban:

Berdasarkan PermenPANRB 4/2020, persyaratan perpindahan jabatan menjadi JFP diganti menjadi mengikuti dan lulus uji kompetensi (dulunya Pelatihan Fungsional Perencana).

Jika sudah daftar *online* untuk mengikuti uji kompetensi dan semua berkas persyaratan sudah dipenuhi serta ibu sudah sesuai kualifikasi maka akan kami panggil untuk uji kompetensi secara *online*. Ketika sudah lulus uji kompetensi dan wawancara maka akan kami berikan BAPAK sebagai landasan diangkat menjadi Fungsional Perencana.

Pertanyaan 18:

Terkait dengan uji kompetensi, apakah ada gambaran mengenai ujiannya, khususnya bagi kami yang baru di bidang perencanaan?

Jawaban:

Untuk saat ini, instansi pembina JFP baru memiliki rencana untuk peserta yang tidak lulus uji kompetensi tersebut akan dilakukan Pelatihan Fungsional Perencana terlebih dahulu, kemudian baru mengikuti uji kompetensi ulang.

Adapun selama ini, Pusbindiklatren juga memiliki Pelatihan Substantif untuk menunjang pekerjaan sebagai perencana, yaitu PPD-RPJMD, *movev, planning and budgeting*, dan lain-lain. Informasi dapat dilihat di *website* Pusbindiklatren. Kelemahan selama ini, informasi tersebut masih ada yang belum sampai ke PNS di daerah (kabupaten/kota)

KENAIKAN JABATAN

Pertanyaan 19:

Pada tahun 2020, saya telah mengikuti dan lulus Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Muda, tetapi berdasarkan SK yang saya terima terakhir, saya belum memenuhi syarat untuk diangkat menjadi JFP Ahli Muda. Mohon informasi apa saja syaratnya?

Jawaban:

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Ibu belum memenuhi persyaratan minimal masa jabatan pada pangkat yang diduduki, yaitu dua tahun untuk kenaikan pangkat golongan dan minimal satu tahun untuk kenaikan jabatan.

Pertanyaan 20:

Bagaimana cara menjadi Pejabat Fungsional Perencana?

Jawaban:

Pada peraturan Pelatihan Fungsional Perencana sebelumnya, salah satu persyaratan adalah pengalaman di bidang perencanaan minimal selama dua tahun dan bekerja di unit kerja perencanaan. Oleh karena itu, pada peraturan baru, yaitu PermenPANRB 4/2020, untuk perpindahan jabatan, persyaratan tetap seperti pada sebelumnya, yaitu memiliki pengalaman di bidang perencanaan minimal dua tahun dan bekerja di unit kerja perencanaan.

Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi dasar bahwa pelamar dapat mengikuti uji kompetensi tersebut karena instansi pembina belum menyediakan pelatihan bimbingan sejenis. Adapun instansi pembina dapat menyarankan untuk mempelajari UU ASN, PP 17, *Movev*, pengendalian, PP Manajemen ASN, dan konsep perencanaan lainnya.

PERBEDAAN AK SAAT DIANGKAT MENJADI JFP

Pertanyaan 21:

Dapatkan kami yang lulus Pelatihan Fungsional Perencana tahun 2019, pangkat IV/a, dengan BAPAK 402, ketika akan diangkat dalam JFP, angka kreditnya disesuaikan dengan pangkat sekarang, yaitu IV/b?

Jawaban:

Peserta dengan pangkat pembina atau IV/a, apabila pada saat pelatihan berubah ke pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) maka tetap direkomendasikan untuk diangkat ke Fungsional

Perencana Ahli Madya dengan angka kredit menjadi 552 tanpa mengubah BAPAK. Dengan catatan, SK pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) tersebut sudah diterima oleh yang bersangkutan

Pertanyaan 22:

Bagaimana jika saat SK golongan IV/a saya sudah keluar perlu pembaharuan database agar bisa mengikuti uji kompetensi periode April–November 2021? Mohon penjelasannya.

Jawaban:

Dipastikan terlebih dahulu kapan keluar SK golongan IV/a. Apabila dalam waktu dekat, SK golongan IV/a tersebut keluar maka disarankan untuk menunggu sampai SK keluar terlebih dahulu, karena untuk golongan III/d ke IV/a ada perbedaan jenjang jabatan, yaitu JFP Ahli Muda ke JFP Ahli Madya. Informasi lebih lanjut bisa dibaca PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2020 tentang JFP dan PerkaBKN Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan JFP.

PENGANGKATAN KEMBALI

Pertanyaan 23:

Saya pertama kali diangkat menjadi JFP jenjang pertama dengan golongan ruang III/c pada bulan Mei 2018. Kemudian tahun 2019, saya off karena menjabat di struktural sampai dengan bulan Juni 2020. Bulan Juli 2020, saya diangkat kembali di JFP.

1. *Apakah beban kerja selama menjabat sebagai struktural bisa diajukan atau tidak?*
2. *Angka kredit pada tahun 2018 yang belum sempat diajukan, apabila akan diajukan mengacu pada peraturan baru atau lama?*

3. *Mengingat pada saat pengangkatan JFP pertama berada pada golongan III/c, apakah bisa langsung mengajukan Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Muda atau tetap memenuhi nilai angka kredit kumulatif dahulu?*

Jawaban:

- Berdasarkan Pasal 48 ayat 4, PermenPANRB 4/2020, dokumen selama menjadi struktural dapat diklaim menjadi angka kredit, penilaian dilakukan saat sudah diangkat kembali menjadi JFP.
- Adapun pengumpulan dokumen sampai akhir Desember 2020 menggunakan aturan lama (Kepmenpan 16/2001) dan penilaian masih dapat dilakukan sampai Mei 2021. Adapun pengumpulan pada tahun 2021 menggunakan aturan baru (PermenPANRB 4/2020)
- Pengumpulan angka kredit yang dilakukan tahun 2021 menggunakan penilaian aturan PermenPANRB 4/2020 dengan ada kewajiban angka kredit minimal setiap tahunnya.
- Jika masih menggunakan aturan lama maka harus memiliki angka kredit minimal 90% dari kenaikan pangkat sebagai persyaratan kenaikan pangkat.
- Berdasarkan Pasal 49, PermenPANRB 4/2020, yang bersangkutan dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang satu tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

PELANTIKAN JFP

Pertanyaan 24:

Apakah pelantikan Fungsional Perencana menjadi kewajiban?

Jawaban:

Berdasarkan PP dan PermenPANRB 4/2020, JFP wajib dilantik dan dapat dilakukan bersama dengan pelantikan struktural.

PENDIDIKAN

Pertanyaan 25:

Apakah calon perencana diperbolehkan mengikuti pendidikan S-2 terlebih dahulu dan mengesampingkan Pelatihan Fungsional Perencana?

Jawaban:

Kembali ke kebutuhan unit kerja apakah yang bersangkutan harus diangkat ke JFP dahulu atau dapat mengikuti pendidikan S-2 terlebih dahulu

Pertanyaan 26:

Saya dapat informasi kalau mulai dari 2021, latar belakang pendidikan harus sesuai dengan tusi perencanaan. Pendidikan S-1 Manajemen, dan S-2 Akuntansi apakah bisa diajukan untuk menjadi Fungsional Perencana?

Jawaban:

Konteks pekerjaan Fungsional Perencana adalah perencanaan pembangunan sehingga dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu. Hal yang terpenting adalah memeriksa kebutuhan formasi jabatan di Kementerian Agama untuk Kabupaten Dharmasraya, jika terdapat formasi

jabatan untuk Fungsional Perencana Ahli Muda maka dapat mengikuti uji kompetensi.

Uji kompetensi akan dilaksanakan secara dalam jaringan (*online*) setiap bulan mulai April–November tahun 2021.

Pertanyaan 27:

Jika angka kredit saya mencukupi untuk kenaikan pangkat/golongan, dapatkah pangkat saya otomatis akan naik, meskipun saya hanya berlatar belakang pendidikan S-1, sementara pada jabatan struktural untuk peralihan dari III/d ke IV/a setidaknya harus mengikuti Diklatpim III atau berlatar pendidikan S-2 (dapat saya tambahkan contoh seperti guru/dosen dapat naik otomatis)

Jawaban:

Untuk persyaratan kenaikan jabatan adalah terpenuhi persyaratan angka kredit (AK), terdapat formasi, untuk jenjang ahli muda ke ahli madya harus memenuhi persyaratan AK di unsur profesi sebesar 6 AK, mengikuti uji kompetensi, dan persyaratan HKM, yaitu publikasi *policy paper* tentang perencanaan pembangunan di tingkat instansi. Jadi untuk persyaratan pendidikan tidak memengaruhi persyaratan kenaikan pangkat atau jabatan.

Pertanyaan 28:

Apakah ijazah S-2 saya bisa diperhitungkan dalam angka kredit nanti? Ijazah S-2 saya Magister Desain Kawasan Binaan di UGM di mana latar pendidikan S-2 saya sesuai dengan pekerjaan saya sebagai staf di Bappeda dan formasi saya sebagai calon perencana.

Jawaban:

Ketika nanti masuk ke dalam JFP, ijazah S-2 tidak bisa diklaim karena yang bisa dinilai adalah yang dihasilkan setelah diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perencana.

Pertanyaan 29:

Saya perencana pertama formasi CPNS tahun 2015, tetapi baru diangkat pertama kali ke dalam Perencana Ahli Pertama per 1 November 2019 setelah menyelesaikan Pelatihan Fungsional Perencana pertama bulan Juli–Agustus 2019. Pada tanggal 20 Juni 2019, saya telah menyelesaikan S-2 prodi administrasi publik. Pertanyaan saya, apakah pendidikan S-2 saya dapat dihitung angka kreditnya? Terima kasih.

Jawaban:

Karena tanggal Ijazah 30 Oktober 2019 dan TMT JFP 1 November 2019 maka ijazah Bapak tidak dapat diklaim menjadi angka kredit, kecuali jika tanggal ijazah setelah TMT pengangkatan JFP.

FORMASI JABATAN UNTUK KEBUTUHAN PERPINDAHAN JABATAN KE DALAM JFP

Pertanyaan 30:

Apabila formasi Fungsional Perencana Ahli Muda sudah terisi penuh? Bolehkah PNS golongan III/c mendaftar Fungsional Perencana Ahli Pertama?

Jawaban:

Biro Kepegawaian melakukan revisi kebutuhan formasi jabatan melalui pengajuan ke KemenPANRB sehingga PNS tersebut dapat pindah jabatan ke Fungsional Perencana Ahli Muda.


Pertanyaan 31:

Saya baru dilantik pada tanggal 22 Maret 2021 menjadi Perencana Ahli Pertama di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Baru. Bulan Juli akan ada perampingan OPD dengan menggabungkan antara dinas pertanian dan dinas ketahanan pangan, masing-masing memiliki Perencana Ahli Pertama. Apakah memungkinkan terdapat dua Perencana ahli Pertama dalam satu dinas?

Jawaban:

Instansi Ibu harus melakukan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) untuk dijadikan formasi jabatan. Di OPD ibu harus membentuk tim pelaksana Anjab dan ABK, terdiri atas ketua tim pelaksana (dengan syarat JPT Pratama atau administrator yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian), sekretaris (yang merupakan pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang membidangi Anjab dan ABK), dan lima anggota yang merupakan PNS atau P3K sudah pernah mengikuti Bimtek Anjab dan ABK, lebih lengkapnya dapat dilihat di PermenPANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Anjab dan ABK.

Untuk JFP memakai pendekatan tugas per tugas per jabatan untuk Anjab dan ABK-nya. Jika sudah dihitung Anjab dan ABK-nya ternyata beban pekerjaan Fungsional Perencana Ahli Pertama memang membutuhkan dua orang maka nantinya masing-masing PNS mempunyai kegiatan masing-masing sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan. ■



**Anda memiliki
masalah/pertanyaan
seputar Jabatan
Fungsional Perencana
atau Program Diklat
Pusb̄indiklatren
Bappenas?**

Konsultasikan secara daring dengan
Tim Pusb̄indiklatren Bappenas melalui

**KLINIKASN
PERENCANA**



Setiap Jumat Terakhir Tiap Bulan
Pukul 14.00–16.00 WIB



Info lengkap & Pendaftaran:

bit.ly/klinik-perencana



Foto: wallpapertrip.com

ORIENTASI PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT PASCA-PANDEMI

Oleh: Satya Laksana

Pandemi Covid-19 berdampak pada hampir seluruh sendi kehidupan. Setelah sektor kesehatan, dampak yang paling dirasakan adalah pada sektor ekonomi dimana terjadi penurunan permintaan barang dan jasa seiring dengan gangguan rantai pasokan (UN DESA,2020).

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat seperti pengangguran meningkat, rumah tangga miskin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan munculnya kriminalitas (Nugroho,et al 2020).

Pandemi juga berdampak bagi sektor publik atau pemerintahan sehingga diperlukan penajaman ulang (*refocusing*) dan pengalokasian ulang (*relocated*) anggaran belanja negara untuk penanganan Covid-19

(Pati,U.K.,2020). *Refocusing* anggaran berkonsekuensi terhadap perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2020 serta mengubah arah (orientasi) dan prioritas RKP dan RKPD pada tahun- tahun berikutnya.

Orientasi pembangunan (daerah) selama masa dan pascapandemi dengan sendirinya beradaptasi dengan kebiasaan baru pola hidup masyarakat pada era yang disebut sebagai normal baru (*new normal*).

Di antara kebiasaan baru adalah bekerja dari rumah (*work from home*), kegiatan belajar mengajar dari rumah (*school from home*) melalui pelajaran jarak jauh dalam jaringan (*daring*), dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari melalui belanja secara *daring*.

Selama masa pandemi, hampir semua pemenuhan kebutuhan barang dan jasa sedapat mungkin dilakukan dari rumah atau disebut dengan istilah “ekonomi dari rumah” (Harian Kompas, Juli 2020). Beberapa adaptasi kebiasaan baru tersebut diprediksi akan permanen, meskipun pandemi telah berakhir.

Dengan demikian, orientasi pembangunan daerah pascapandemi seyogyanya mendukung konsep ekonomi dari rumah seiring dengan dikembangkannya konsep pengembangan revolusi industri 4.0. Penerapan konsep ekonomi dari rumah dan revolusi industri 4.0 mensyaratkan adanya konektivitas jaringan internet sebagai media komunikasi seluruh benda (*things*) sebagai satu kesatuan sistem terpadu (*internet of things/ IoT*).

Meskipun demikian, implementasi IoT di daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat, menghadapi tantangan berupa paradoks ketika dihadapkan pada terbatasnya infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Harian Kompas pada bulan Juli 2020 mengulas bahwa pandemi Covid-19 mengubah perilaku konsumen dan membuka peluang bisnis *daring* yang lebih luas. Namun, peluang belum bisa dimanfaatkan mayoritas pelaku UMKM, terutama soal keterbatasan akses dan penguasaan digital.

Begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan. Tantangan terbesar dalam penerapan pelajaran jarak jauh sebagaimana dikeluhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah fasilitas internet (Penaku.id, 2020).

Tulisan ini mengelaborasi orientasi pembangunan daerah di Jawa Barat pascapandemi pada tiga aspek meliputi (1) pendidikan; (2) infrastruktur; dan (3) reformasi pelayanan birokrasi. Diharapkan, tulisan ini dapat bermanfaat dalam memperkaya referensi/ literatur dalam upaya pemulihan ekonomi pascapandemi pada aspek perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Jawa Barat.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Tulisan ini menawarkan sebuah orientasi (baru) pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat akibat pandemi Covid-19, meskipun belum membahas prioritas pembangunan daerah. Penentuan prioritas perlu menempuh prosedur baku yang didahului dengan penentuan isu strategis daerah secara terintegrasi antar-*stakeholder* pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan demikian, makalah ini hanya sebagai *outlook* dari penulis pribadi sebagai seorang Fungsional Perencana Muda. Opini yang disampaikan merupakan sebuah proyeksi. Pembahasan masalah menggunakan pendekatan deduktif, tematik, dan bersifat refleksi personal sehingga terbuka terhadap koreksi untuk dikembangkan dalam diskusi lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Pada saat makalah ini ditulis, pandemi Covid-19 belum berakhir. Lebih dari itu gelombang kedua Covid-19 terjadi pascamudik Hari Raya Idulfitri (Lebaran) 2021 yang menjadikan Indonesia *epicentrum* baru pandemi setelah India.

Meskipun demikian, jauh sebelum itu, pada tanggal 20 Juli 2020, pemerintah telah melakukan terobosan kebijakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan Perpres ini, pemerintah membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan menggantinya dengan sebuah komite yang mengintegrasikan tugas pemulihan kesehatan dengan pemulihan ekonomi.

Upaya kembali ke kehidupan normal baru menghadapi berbagai tantangan. Angka kasus yang berbeda di setiap daerah menuntut penajaman orientasi pembangunan pascapandemi yang lebih spesifik di setiap daerah dan setiap sektor. Berikut analisis penulis tentang orientasi pembangunan Jawa Barat pascapandemi pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan reformasi birokrasi. Analisis dibingkai dalam logika kerja (*logical framework*) teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK).

1. Orientasi Pembangunan Sektor Pendidikan

Dampak pandemi bagi sektor pendidikan sangat terasa akibat kebijakan pembatasan sosial dan protokol jaga jarak (*social distancing*) sehingga metode pelajaran tatap muka (klasikal) tidak

dapat dilaksanakan. Meskipun pelajaran jarak jauh pada awalnya direncanakan hanya berlaku sampai bulan Desember 2020, tetapi pada kenyataannya sampai semester pertama tahun 2021 pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan hampir di seluruh daerah.

Di sisi lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menekankan bahwa proses pembelajaran secara virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi telah menjadi tren global (*medcom.id*). Metode pembelajaran *blended learning* dengan memanfaatkan teknologi informasi akan digalakkan pascapandemi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Pandemi mempercepat transformasi pendidikan ke arah digitalisasi, tetapi membutuhkan resistemisasi kurikulum akademik (Karim, 2020) sehingga kurikulum fleksibel merupakan jalan keluar pembelajaran pada masa Covid-19 (Gusty, et al, 2020). Konsep "Merdeka Belajar" yang ditawarkan Mendikbud menekankan aspek kemandirian lingkungan pendidikan dalam menentukan cara terbaik dalam proses pembelajaran.

Sebelum pandemi terjadi, banyak pihak yang peduli dengan pendidikan berkontribusi dengan berbagi ilmu pengetahuan kepada sesama anak bangsa melalui teknologi informasi. Misalnya pada tahun 2107, sebuah perusahaan *start up* Indonesia yang fokus kepada dunia pendidikan menggagas *www.ruangguru.com*, sebuah *platform* pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui

video tutorial interaktif oleh guru dan animasi di aplikasi telepon seluler dan komputer. Pada tahun 2019, laman ini telah memiliki 15 juta pelanggan.

Dalam hal peningkatan *life skill* generasi muda angkatan kerja, kaum milenial Indonesia secara gotong-royong membuat laman <http://prakerja.org>. Diciptakan sebagai kritik membangun terhadap program pemerintah, *platform* ini menyajikan pelatihan wirausaha dan ide bisnis, pengembangan diri, bisnis dan keuangan, teknologi dan *software*, serta bisnis digital. Semua layanan yang disediakan gratis untuk pengguna.

Inti dari semua perkembangan ini adalah masyarakat sudah semakin terbantu kemandiriannya untuk menimba ilmu, menambah pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan. Konsep Merdeka Belajar-nya Mas Menteri (sapaan akrab Mendikbud yang berusia muda) sangat relevan dengan perkembangan dunia saat ini.

Sebelum pandemi memaksa aktivitas *school from home* dilaksanakan di Indonesia (dan di hampir seluruh negara), tidak sedikit orang tua yang memilih Sekolah Rumah (*homeschooling*) sebagai pilihan bagi anak-anak mereka. Tidak hanya dilakukan oleh artis cilik, atlet muda, anak-anak diplomat yang sering berpindah tugas antar-negara, ataupun anak berkebutuhan khusus; *home schooling* juga diadopsi anak-anak biasa dari kalangan menengah terutama di kota-kota besar seperti di Bandung, Bogor, dan Depok. Anak-anak *homeschooling* dididik langsung di rumah oleh orang tua

mereka baik secara mandiri maupun melalui lembaga atau sekolah payung.

Selain itu, lembaga pendidikan khusus seperti sekolah atlet dan sebagian lembaga pendidikan agama seperti pesantren, *ma'had*, lembaga *tahfidz* Alquran, maupun sekolah Injil; mengembangkan kurikulum pendidikan sendiri bagi peserta didiknya. Untuk memenuhi ketentuan formal, baik *homeschooler* (anak yang mendapatkan pendidikan rumah) maupun peserta lembaga pendidikan khusus menempuh jalur penyetaraan Paket A, B, dan C.

Komunitas *homeschooling* mandiri biasanya berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota khususnya dengan Bidang Pendidikan Luar Sekolah. Mereka membutuhkan fasilitasi terutama dalam aspek legalitas dan dalam menempuh program kesetaraan.

Dalam pengamatan penulis, masih sedikit Dinas Pendidikan di Jawa Barat yang intens melayani komunitas *homeschooling*, di antaranya Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tidak sedikit *homeschooler* di Jawa Barat yang secara lokasi jauh dari Bandung mengikuti program kesetaraan di kabupaten/kota di luar Jawa Barat. Mereka melakukan hal tersebut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih kooperatif dari Dinas Pendidikan setempat.

Prediksi sektor pendidikan ke depan di antaranya ialah relevan dengan konsep Merdeka Belajar, komunitas *homeschooling* akan mendapat dukungan tambahan secara regulasi. Pusat Kegiatan

Belajar Mengajar (PKBM) sebagai wadah resmi yang dibina Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota akan semakin penting peranannya.

Selain itu, kurikulum ke depan diproyeksikan akan semakin fleksibel. Para guru akan dituntut lebih menguasai media audio visual. Materi pelajaran akan didigitalisasi baik berupa teks dalam format PDF maupun berupa rekaman video pelajaran yang bisa diunduh siswa sebelum atau sesudah jam pelajaran.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan, yang selama ini didominasi oleh usulan pembangunan sekolah dan penambahan atau rehab ruang kelas baru, diproyeksikan akan bergeser menjadi usulan terhadap sarana dan infrastruktur telekomunikasi. Prediksi tentang orientasi pembangunan infrastruktur diulas pada bagian selanjutnya.

2. Orientasi Pembangunan Infrastruktur

Pandemi Covid-19 mengganggu proyek infrastruktur nasional seperti penundaan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan (okezone.com September 2020), penundaan pembangunan MRT Fase 2 di DKI Jakarta (rmco.id, April 2020) dan ketidakjelasan tindak lanjut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (industri.kontan.co.id, April 2020). Resesi ekonomi yang menimpa negara-negara maju sebagai investor dan belum tuntasnya program vaksinasi Covid-19 di berbagai negara menambah ketidakpastian rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Situasi serupa terjadi pada pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Anggaran belanja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat tahun 2020 di-*refocusing* untuk penanganan Covid-19 sehingga hanya 23,9% saja. Sedianya pada tahun 2020 akan diadakan sekitar sembilan puluh paket lelang proyek infrastruktur, yang berjalan hanya enam paket. Proyek pemeliharaan jalan provinsi yang pada target awal 2020 sepanjang 88,59 km menjadi hanya 3,1 km. Proyek Jalan Tol Cisumdawu dan Jalan Tol Cigatas menjadi terlambat dari rencana awal. Begitu pula pengerjaan Masjid Al-Jabar yang seharusnya rampung tahun 2020 menjadi mundur penyelesaiannya (Republika, Juni 2020).

Prediksi pembangunan infrastruktur ke depan akan berorientasi kepada pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Walaupun kewenangan pembangunan infrastruktur energi dan telekomunikasi secara umum adalah kewenangan pemerintah pusat (kementerian) dengan operator BUMN (seperti PT PLN dan PT Indonesia Power untuk sektor energi serta PT Telkom untuk sektor telekomunikasi), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tetap memiliki peranan penting.

Pemerintah Daerah dapat berperan di dalam mengusulkan proyek infrastruktur strategis. Dengan meyakinkan bahwa dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang padat sekaligus calon konsumen maka *return of investment* di Jawa Barat menarik dan prospektif.

Isu selanjutnya adalah dengan disahkannya *Omnibus Law* atau

Undang-Undang Cipta Kerja, diproyeksikan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkurang. Misalnya perizinan terkait tata ruang dan izin lingkungan melalui dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun dokumen lingkungan lainnya akan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah diproyeksikan akan cenderung menjadi penerima manfaat dari pembangunan yang bersifat strategis. Orientasi peranan pemerintah daerah ke depan terkait dengan energi adalah dengan mengisi ceruk/celah yang masih ada.

Sebagai contoh untuk pemenuhan energi di daerah terpencil pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) dapat menjadi *core business* BUMD yang menarik. Pengalaman BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu PT Tirta Gemah Ripah dalam membangun dan mengoperasikan PLTM di Cirompang Kabupaten Garut menjadi *success story* yang dapat dikembangkan pada masa depan.

Rasio elektrifikasi yang relatif masih rendah dan melimpahnya sumber daya air serta sungai dengan topografi curam di Jawa Barat bagian selatan dapat menjadi tantangan dan peluang bisnis BUMD pada masa depan.

Di sektor telekomunikasi, Pemerintah Daerah memiliki peranan yang serupa, di antaranya menjembatani kerja sama antara penyedia jasa internet */Internet*



Gambar 1. PLTM Ciropang di Kabupaten Garut. PLTM dapat menjadi salah satu orientasi pembangunan infrastruktur energi di daerah pasca pandemi dan menjadi core business BUMD di masa depan

Sumber: migas.hulujabar.co.id

Service Provider (ISP) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penyediaan jasa internet di daerah terpencil secara berkelanjutan.

Selain menjadi jembatan bagi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar dunia usaha (*business to business*) untuk layanan internet berbayar bagi pelanggan pedesaan, pemerintah daerah dapat juga mendorong penggunaan Dana Desa untuk akses internet (wi-fi) secara gratis bagi penduduknya.

Prediksi penggunaan Dana Desa ke depan tidak hanya untuk pembangunan jalan desa, jalan lingkungan, atau bangunan

fisik desa lainnya, tetapi akan berorientasi pada infrastruktur telekomunikasi. Orientasi pembangunan ini positif, selain untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam pendidikan, juga dapat mendukung program pengembangan Desa Wisata. Jumlah wisatawan akan meningkat bila di setiap objek wisata desa tersedia akses internet sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

3. Orientasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Refocusing anggaran tahun 2020 mengubah postur belanja negara

menjadi fokus untuk penanganan Covid-19. Anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat ASN dipangkas dengan aturan *work from home* dan rapat-rapat secara virtual sesuai ketentuan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020. Pelayanan publik sedang bertransformasi ke arah digitalisasi.

Transformasi model pelayanan manual melalui pelayanan tatap muka yang beralih ke elektronik terus mengalami pelonjakan yang signifikan pada masa Covid-19. Berbagai aplikasi teknologi dioptimalkan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya pada

pelayanan publik, optimalisasi penggunaan teknologi juga dilakukan dalam rapat kantor, pengisian kinerja pegawai, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Konsep ini diharapkan dapat menjadi bagian dari tatanan baru (*new normal*) dari kehidupan keseharian birokrasi sehingga penerapan telecommuting menjadi suatu keniscayaan (Mungkasa, 2020)

Sebelum pandemi terjadi, Kementerian PPN/Bappenas sudah mewacanakan bekerja dari rumah untuk jenis pelayanan ASN tertentu. Sebetulnya teknologi untuk "bekerja tetapi masyarakat dan birokrasi yang terikat pada pola *business as usual* cenderung mengabaikan peluang pemanfaatannya. Covid-19 membantu penerapannya.

Demikian pula berbagai keahlian teknologi informasi dan komunikasi sekarang dikuasai lebih cepat oleh para pegawai yang harus bekerja dari rumahnya. Sebelumnya, birokrat cenderung mengandalkan pada Tenaga Spesialis Teknologi Informasi (TI) di kantor.

Pandemi dan era *new normal* merupakan momentum yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Meskipun demikian, dari segi efisiensi, pemerintah menghadapi dua pilihan arah kebijakan yang seakan bertentangan. Setelah Perpres Nomor 82 Tahun 2020 terbit, orientasi pemulihan ekonomi cenderung lebih mengemuka daripada pemulihan kesehatan. Perjalanan Dinas ASN ke luar kota dan luar pulau mulai marak kembali. Rapat-rapat dan pertemuan koordinasi di hotel-hotel semakin sering dilakukan.

Dengan alasan untuk mendorong sektor transportasi udara dan pariwisata, terbitlah SE dari salah seorang Menteri Koordinator kepada kementerian di bawah koordinasinya untuk mempercepat serapan anggaran perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan nasional diarahkan untuk dilaksanakan di lokasi objek wisata nasional seperti di Bali, Lombok, dan Batam. Pada bulan September 2020, beberapa media masa memberitakan salah satu objek wisata utama nasional kembali menggeliat dan tingkat okupansi akomodasi hotel meningkat setelah kegiatan pertemuan pemerintahan dilaksanakan di tempat tersebut.

Pada tahun 2021, beberapa Kementerian mengagas *work from Bali* dengan tujuan mendukung *recovery* industri pariwisata di daerah tersebut. Sementara di saat yang sama, Kementerian Keuangan menerbitkan SE tentang Penghematan Belanja Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2021.

Fakta di atas cenderung berulang dan merupakan fenomena unik ditinjau dari konsep efisiensi. Sebagai contoh, pada awal tahun 2015, Menteri PANRB yang baru dilantik membuat gebrakan dalam program seratus harinya dengan mengeluarkan kebijakan larangan bagi ASN rapat di hotel dan mengonsumsi makanan impor. Rapat-rapat aparat pemerintah cukup dilaksanakan di kantor-kantor dan konsumsi yang disajikan cukup pangan lokal yang sederhana seperti ubi dan singkong. Kebijakan yang populis dengan semangat hidup sederhana dan efisien tersebut ternyata kemudian dikeluhkan dunia usaha perhotelan

dan jasa pendukung lainnya sehingga hanya berlaku seumur jagung.

Perspektif mengenai efisiensi dari kegiatan sektor publik mungkin sedikit berbeda dengan perspektif sektor privat atau dunia usaha (swasta). Sektor publik lebih mengedepankan *benefit* bagi komunitas daripada profit bagi korporasi.

Dari pengamatan penulis, hal ini terjadi pula di negara maju. Di negara Jepang sering kali dilaksanakan proyek perbaikan jalan pada ruas jalan yang masih sangat baik dan mulus. Setelah diamati, kebijakan inefisien tersebut diambil bukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan, tetapi semata untuk menjalankan salah satu sektor yang diproteksi dan diusahakan untuk tetap berjalan karena merupakan salah satu *core competence* negara tersebut.

Prediksi tentang pelayanan publik dan birokrasi pascapandemi di antaranya ialah masih akan adanya tarik ulur dan dialog seputar konsep ideal reformasi birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dengan perampingan eselonisasi demi mencapai efisiensi yang telah mulai dilaksanakan di kementerian dan lembaga akan mendapat resistensi di Pemerintah Daerah.

Belanja pemerintah yang dalam teori ekonomi mempunyai *multiplier effect* dalam peningkatan GDP karena menciptakan permintaan barang dan jasa/konsumsi (*create demand*) akan menjadi kontra argumen bagi harapan terhadap efisiensi pada sektor publik.

Prediksi selanjutnya adalah konsep *e-government* yang merupakan tuntutan zaman akan dipercepat proses realisasinya. Aplikasi sejenis *e-planning* dan *e-budgeting* akan diadopsi oleh hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain itu, pelayanan yang sudah dijalankan di beberapa kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh warga, diproyeksikan akan diadopsi pula oleh seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

SARAN DAN REKOMENDASI

Dari pembahasan di atas dapat direkomendasikan sebagai berikut.

1. Pada sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diharapkan dapat merevitalisasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah untuk merespons konsep Merdeka Belajar dari Kemendikbud dan untuk melayani berkembangnya kemandirian masyarakat dalam pendidikan seiring kemajuan TIK;
2. Di sektor pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diprediksi akan lebih cenderung menjadi penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur strategis yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan BUMN. Oleh karena itu, perlu kejelian dalam melihat celah pembangunan yang belum tersentuh seperti peluang membangun PLTM oleh BUMD dan fasilitasi untuk penyediaan akses internet di daerah terpencil;
3. Pandemi mempercepat perwujudan *internet of things/ IoT* dan *e-government* di Jawa

Barat. Meskipun demikian, konsep efisiensi dalam reformasi birokrasi akan terus mencari bentuknya yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusty, S., Nurmiati, N., Muliana, M., Sulaiman, O. K., Ginantra, N. L. W. S. R., Manuhutu, M. A., ...& Hastuti, P. (2020). Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19. Yayasan Kita Menulis.
- Karim, B. A. (2020). Pendidikan Perguruan Tinggi Era 4.0 Dalam Pandemi Covid-19 (Refleksi Sosiologis). *Education and Learning Journal*, 1(2), 102-112.
- Nugroho, R, Suprpto, F. A., Widiastuti, I., & Firdausy, E. (2020). Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi Covid 19. Rumah Reformasi Kebijakan [Institute for Policy Reform].
- Pati, U. K. (2020). Indonesian Government Policy in Mitigating Economic Risks due to the Impact of the Covid-19 Outbreak. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(4).
- UN DESA. (2020). *World Social Report 2020: Inequality in a Rapidly Changing World*.
<https://kompas.id/baca/ekonomi/2020/07/27/waktunya-ekonomi-dari-rumah/>
<https://penaku.id/pembelajaran-jarak-jauh-disdik-jabar-akui-tantangan-terbesar-adalah-akses-internet/>
<https://rmco.id/baca-berita/megapolitan/34073/gegara-corona-pekerjaan-konstruksi-mrt-jakarta-fase-2-ditunda-hingga-juni-2020>
<https://www.medcom.id/pendidikan/news->

pendidikan/0kp01rqk-kemendikbud-meluruskan-makna-pjj-permanen

<https://industri.kontan.co.id/news/luhut-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-tertunda-gara-gara-corona-covid-19>

<https://economy.okezone.com/read/2020/09/08/470/2274357/pembangunan-proyek-ibu-kota-baru-resmi-ditunda>

CATATAN KHUSUS:

Tulisan ini merupakan rangkuman dari artikel dalam bahasa Inggris yang penulis publikasikan di *Jurnal Perencanaan Pembangunan* Edisi April 2021. Laksana, S. (2021). Post Pandemic Indonesian Regional Development Planning, New Normal, New Orientation: The Case of West Java. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 32-50. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.150> ■

PROFIL PENULIS

Satya Laksana merupakan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Tasikmalaya



DIGITALISASI UMKM

DALAM Mendukung Kebangkitan Ekonomi Nasional

Oleh: Ananto Noegroho P., Rine Simamora, Deny Sutisna

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) suatu negara, khususnya Indonesia.

Latar Belakang

Saat ini Indonesia dan dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 paling dirasakan oleh UMKM Indonesia. Padahal UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja dari total 120,5 juta tenaga kerja. Kontribusi dalam ekspor pun mencapai 14% (Ulya, 2020). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak

pandemi Covid-19 (Suryanto, 2020). Sektor UMKM yang terganggu selama pandemi Covid-19 selain dari makanan dan minuman, juga adalah industri kreatif dan pertanian.

Dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia membutuhkan dunia usaha termasuk UMKM untuk segera bangkit dengan melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah memasukkan pelaku UMKM sebagai penerima program bantuan pemerintah seperti Kartu Prakerja,

subsidi tarif listrik, dan program Keluarga Harapan. Pemerintah juga memberikan keringanan pembayaran pajak selama enam bulan, sejak April 2020 hingga September 2020. Selain itu, pemerintah juga merelaksasi dan merestrukturisasi pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Pandemi Covid-19 berdampak buruk terhadap perekonomian negara Indonesia. Pemerintah menggagas agar para pelaku UMKM segera bertransformasi menuju *platform* digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Pada 2021, telah tercatat sekitar 12 juta UMKM sudah *go digital*. Namun, angka ini tergolong kecil jika dibanding dengan total jumlah UMKM sekitar 64 juta unit usaha. Pada tahun 2030 mendatang, pemerintah mematok target UMKM *go digital* mampu tembus angka 30 juta unit usaha.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya dengan memberikan sejumlah insentif pajak untuk memperkuat fondasi perekonomian dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan mempercepat kebangkitan produk-produk buatan Indonesia, diharapkan produk-produk UMKM mampu menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi, menguasai pasar dalam negeri, lebih kompetitif di pasar global, dan UMKM naik kelas. Banyak UMKM masih mengandalkan bisnis secara tradisional atau bertransaksi secara langsung. Namun, dengan kondisi pandemi saat ini mengakibatkan proses jual beli dilakukan dengan jarak jauh atau melalui dalam jaringan (*daring*).

Permasalahan keterbatasan ini perlu dijumpai dengan adanya dukungan teknologi dari model bisnis UMKM dari cara konvensional menjadi digitalisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk

1. menjelaskan peran UMKM sebagai penunjang ekonomi kerakyatan disaat pandemi Covid-19;
2. menjelaskan tentang perubahan omzet bagi para pelaku UMKM;
3. mengetahui perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Digitalisasi UMKM dalam mendukung kebangkitan perekonomian nasional merupakan salah satu cara untuk membantu pelaku usaha membangkitkan usahanya. UMKM memiliki peran sebagai penunjang ekonomi kerakyatan pada saat pandemi Covid-19. Kebangkitan UMKM merupakan kunci penting dalam upaya pemulihan ekonomi. Saat ini, jumlah UMKM mencapai sekitar 64,1 juta unit atau 99% dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia. UMKM juga mampu menyerap sekitar 116 juta tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 58% terhadap PDB. Namun, adanya pandemi Covid-19 membuat UMKM di Indonesia terpuruk, karena tergerus dari sisi omzet (Herman, 2021).

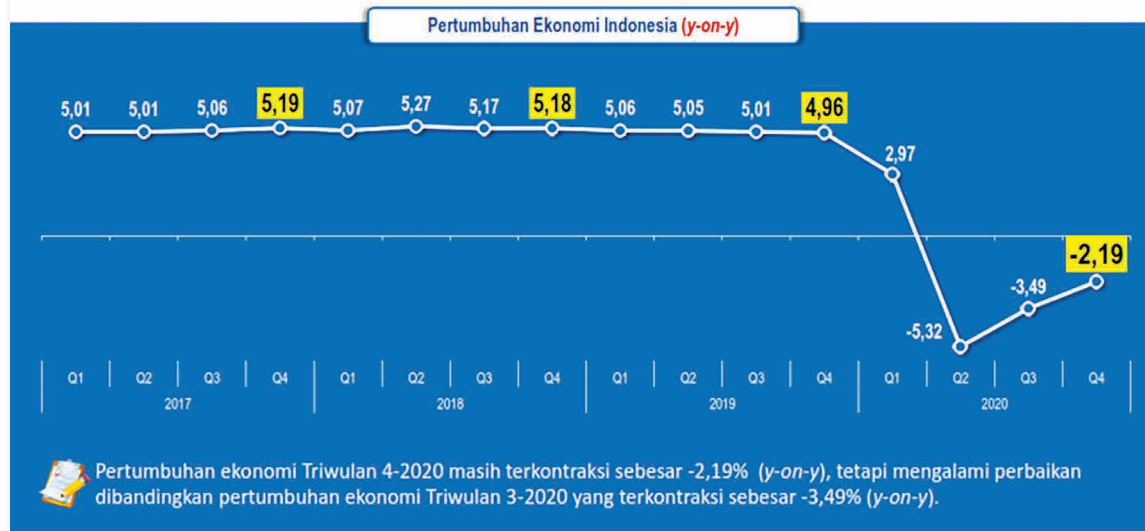
Kerjasama yang terintegrasi berbagai sektor sangat dibutuhkan untuk mendukung kebangkitan UMKM yang sangat terpuruk oleh dampak pandemi Covid-19. Dalam hal ini, sektor bisnis yang dijalankan oleh UMKM dapat menjadi motor untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Kemampuan sektor bisnis dalam memecahkan solusi menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional dapat diandalkan melalui teknologi, inovasi, dan investasi.

Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian. Hal ini merupakan upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui program bantuan dalam memulihkan ekonomi selama pandemi Covid-19 ini. Perbaikan ekonomi juga tidak terlepas dari peran UMKM di antaranya mampu menyerap tenaga kerja, mengatasi masalah kemiskinan, dan membantu pendistribusian hasil pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 sebesar -2,19% (*year on year* atau *yoy*) membaik dari pertumbuhan triwulan III 2020 sebesar -3,49% (*yoy*). Tren perbaikan pada triwulan IV 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi -2,07% pada tahun 2020 dijelaskan pada Gambar 2. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020 diperkirakan dapat meningkat secara bertahap pada 2021.

Perbaikan ekonomi domestik triwulan IV 2020 ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Konsumsi pemerintah tumbuh positif pada 2020 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja

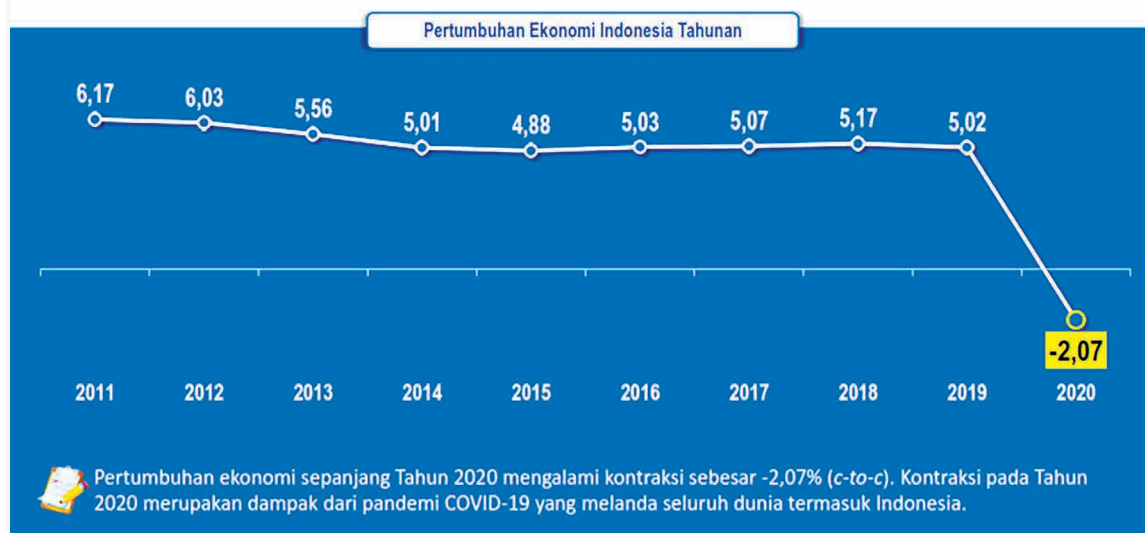
PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN 4-2020: -2,19% (y-on-y)



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV Tahun 2020 (yoy)

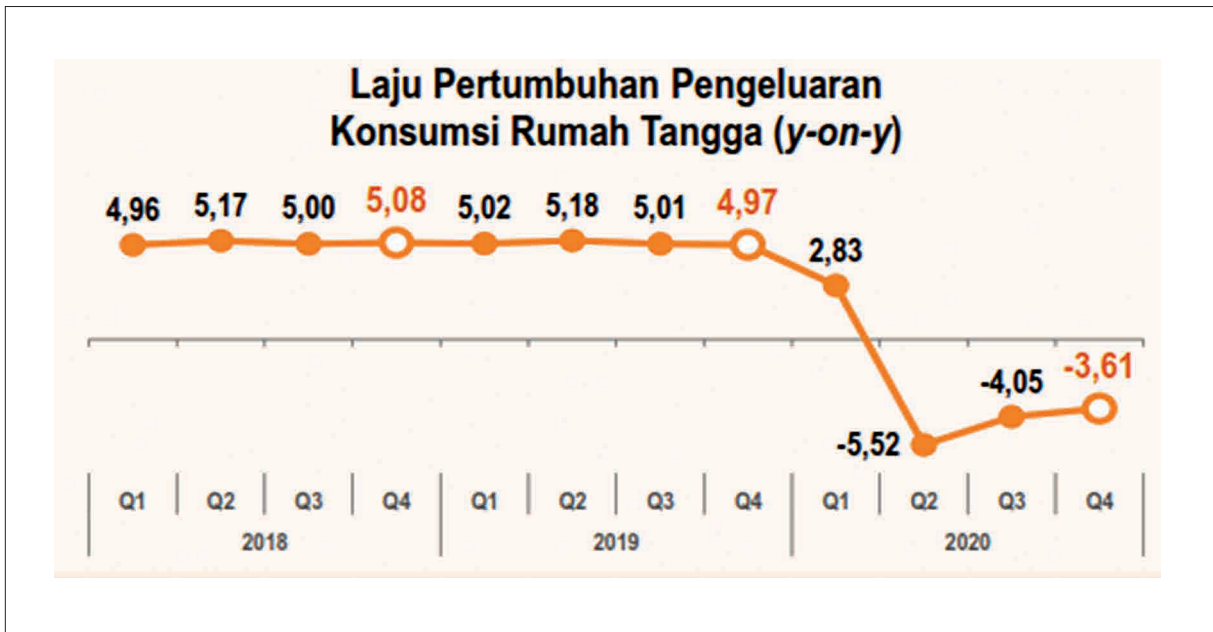
Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2020: -2,07% (c-to-c)



Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 (c to c).

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (yoy)

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik

barang dan jasa lainnya, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga membaik pada triwulan IV 2020, yakni tumbuh -3,61% (yoy) dari -4,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya, seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Secara keseluruhan tahun, konsumsi rumah tangga berkontraksi sebesar 2,63%.

Pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan IV 2020, dari -6,48% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -6,15% (yoy), sehingga secara keseluruhan tahun mengalami kontraksi sebesar 4,95%.

1. Data Omzet dan Jenis Produk UMKM

Gambar 4 merupakan profil data omzet dan jenis produk UMKM berdasarkan survei yang dilakukan KIC pada Juni 2020 terhadap 206

UMKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Sebelum adanya pandemi, data omzet per tahun, menurut Kata Data Insight Center (KIC), mayoritas UMKM di Indonesia memiliki usaha mikro dengan omzet per tahun di bawah 300 juta. Jenis produk usaha yang dominan dan menempati posisi paling atas dan paling banyak diminati UMKM, yaitu berdagang eceran seperti berjualan sembako, pulsa, pakaian, dan sebagainya dengan presentasi sebesar 29,6%. Urutan kedua yang menempati jenis usaha yang paling diminati oleh pelaku UMKM adalah menyediakan makan dan minuman dengan persentasi sebesar 27,2%. Urutan ketiga produk jasa dengan persentasi sebesar 16,5%. Urutan keempat produksi makanan sebesar 16%. Urutan kelima terdapat industri pengolahan dengan

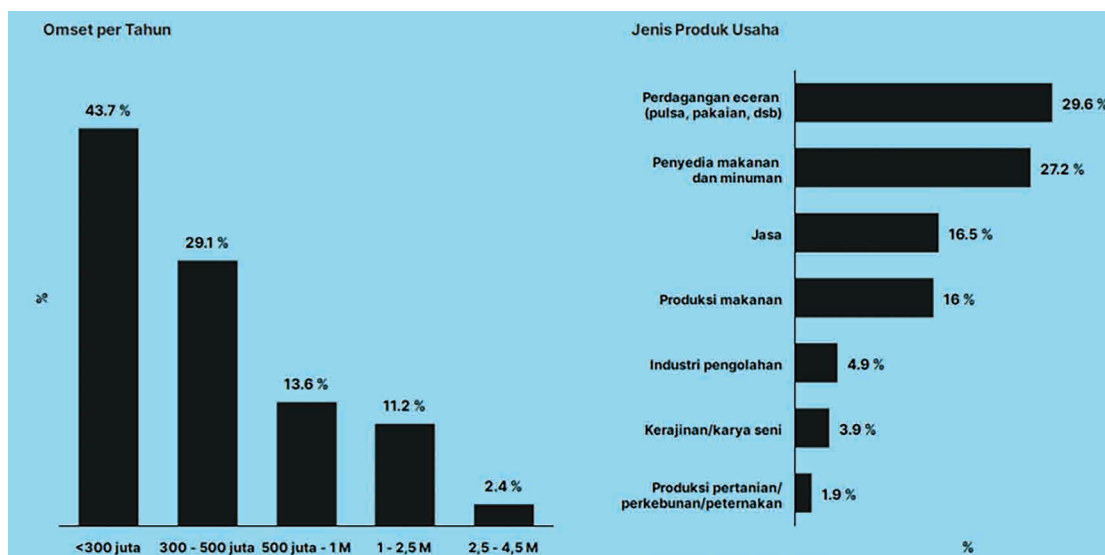
persentasi sebesar 4,9%. Urutan keenam terdapat kerajinan/karya seni dengan persentasi sebesar 3,9% dan urutan ketujuh ditempati produksi pertanian/perkebunan/peternakan dengan persentasi sebesar 1,9%.

2. Perubahan Omzet

Survei yang dilakukan KIC pada Juni 2020 mengukur dampak pandemi Covid-19 terhadap perubahan omzet pada 206 UMKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pandemi menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%, hanya 3,8% UMKM yang mengalami kenaikan omzet.

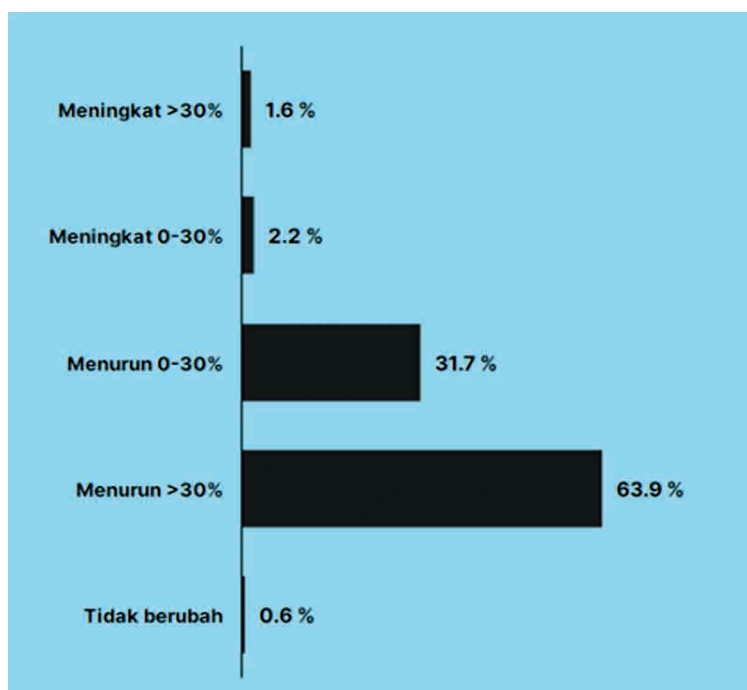
3. Marketplace dan Metode Pembayaran

Survei KIC terhadap 392 UMKM di sejumlah kota di Indonesia, yakni



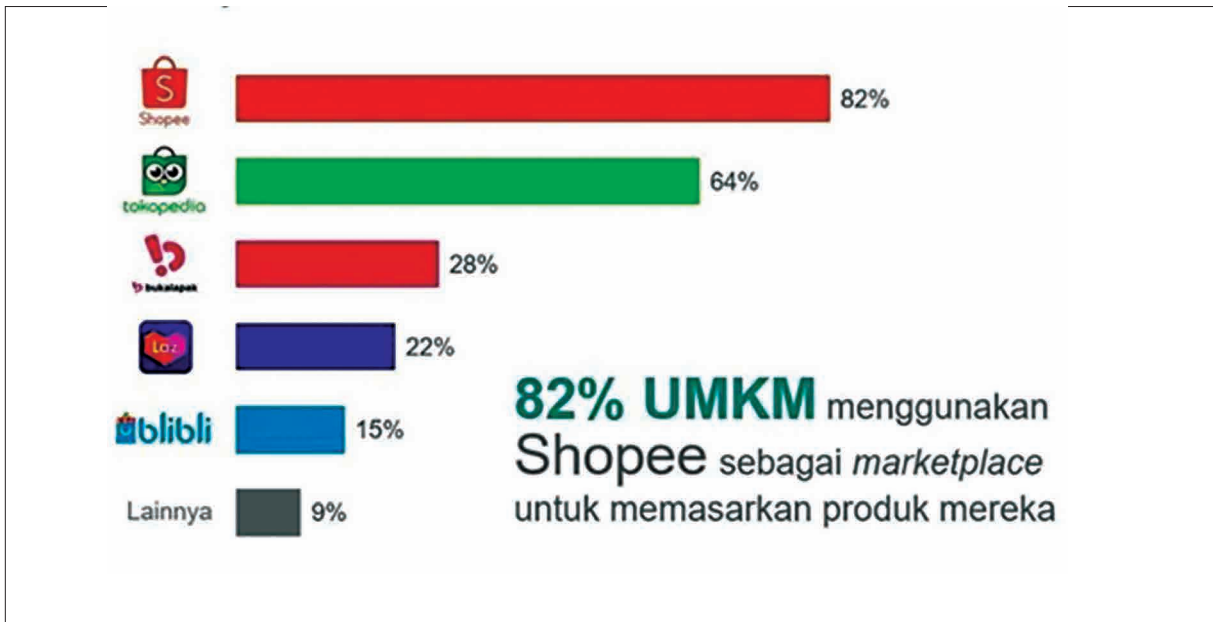
Gambar 4. Data Omzet dan Jenis Produk per Tahun Sebelum Pandemi

Sumber: KIC



Gambar 5. Dampak Pandemi Terhadap Perubahan Omzet UMKM.

Sumber: KIC



Gambar 6. Marketplace Pilihan UMKM

Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan pada periode 24 Maret hingga 9 April 2021 dilakukan untuk melihat peran tentang *marketplace* bagi UMKM (Darmawan, 2021). Berdasarkan hasil survei tersebut disimpulkan bahwa *platform* digital menjawab tuntutan konsumen di masa pandemi yang mewajibkan mereka tak banyak bepergian, tetap berada di rumah serta menjaga jarak. UMKM menyadari adanya tren peralihan konsumen ke belanja digital. Berkaitan dengan hal tersebut, *marketplace* akhirnya menjadi tempat yang diandalkan untuk mempertemukan UMKM dalam jangkauan yang luas, hampir di seluruh Indonesia, banyak pilihan pengiriman dan fitur-fitur untuk mengelola dan mengembangkan toko.

Gambar 6 menunjukkan *marketplace* pilihan UMKM adalah Shopee yang mengungguli

pesaingnya sebanyak 82%, yang disusul oleh Tokopedia sebesar 64%, Bukalapak 28%, Lazada 22%, Blibli 15%.

Dalam mendukung perkembangan *e-commerce*, perlu lebih banyak pembayaran digital untuk kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Tren perilaku pembayaran *e-commerce* serta penggunaan *paylater* dianalisis secara khusus dengan survei *online* pada tanggal 26–30 Maret 2021 dengan 3.560 responden yang dilakukan oleh KIC sebagai berikut: dompet digital atau *e-wallet* menjadi pilihan utama pembayaran *e-commerce* dengan persentase sebesar 65%, yang kemudian diikuti oleh transfer bank/*virtual account* dengan persentase sebesar 51%, Alfamart/Indomaret sebesar 39%, *paylater* sebesar 27%, kartu debit sebesar 11%, dan kartu kredit sebesar 6%.

4. Digitalisasi Nasional (Transformasi Digital)

Pandemi mempercepat transformasi digital, menurut Permadi (2021), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berupaya melakukan tiga langkah dalam transformasi digital.

- Akses internet (infrastruktur digital).** Sebanyak 83.218 kelurahan/desa di Indonesia belum terjangkau internet. Ditargetkan pada akhir tahun 2021, sebagian besar akan terjangkau internet dan akhir 2022 keseluruhan kelurahan/desa terjangkau internet.
- SDM era digital.** Pendekatan komprehensif dalam percepatan SDM digital dengan tiga level kecakapan digital yang dimulai dari bawah, yaitu:
 - basic digital skill* (literasi digital);
 - intermedia digital skill* (*technition skill*); dan

c. *advance digital skill*.

Ketiga *skill* tersebut merupakan persyaratan percepatan UMKM *go online/digital*.

3. **UMKM.** UMKM menyumbang ekonomi di Indonesia 11% dari PAD di Indonesia. Pada tahun 2016, dilakukan inisiasi gerakan UMKM *go online*.

Target UMKM *go digital* tersebut optimistis dapat dicapai karena pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, mendorong penggunaan *platform* digital (*e-commerce*) sebagai sarana efektif UMKM memasarkan produk. Dengan *go digital*, akses pemasaran yang saat ini menjadi kerikil tajam pengembangan UMKM dapat disingkirkan. Ke depan, UMKM dapat memasarkan produk hingga ke pasar luar negeri melalui kegiatan ekspor.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa usaha UMKM merupakan pilar penting bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Presiden Jokowi

menyampaikan bahwa ekosistem usaha bagi UMKM terus dibenahi. Undang-Undang Cipta Kerja juga telah memberikan kemudahan-kemudahan berusaha bagi UMKM, memangkas regulasi yang rumit dan tumpang tindih, sehingga memudahkan UMKM untuk membuka usaha.

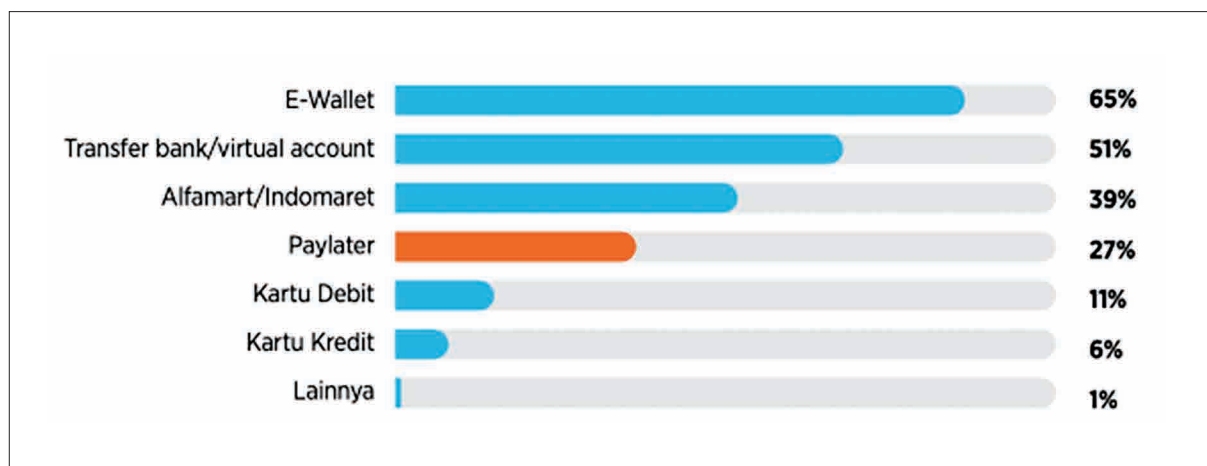
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) demi memelihara momentum kebangkitan sektor ekonomi. Di bidang keuangan, pemerintah telah mengembangkan stimulus berupa kebijakan restrukturisasi pinjaman, bantuan modal usaha, keringanan bayar tagihan listrik, serta dukungan pembiayaan lain. Melalui PEN, pemerintah berharap pelaku UMKM bernapas lega lepas dari jerat krisis karena telah disediakan insentif pengungkit gairah usaha.

Pada tahun 2020, realisasi program PEN mendukung UMKM mencapai lebih dari Rp112 triliun dan telah dinikmati lebih 30 juta UMKM. Pada tahun 2021, pemerintah

menganggarkan lebih dari Rp121 triliun atau naik hampir Rp10 triliun dibanding periode tahun sebelumnya. Komitmen anggaran ini sekaligus dimaksudkan untuk menjaga momentum kebangkitan ekonomi nasional secara berkesinambungan.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara berusaha dan berinteraksi dengan konsumen sehingga perlu beradaptasi untuk menjadi tetap relevan. Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan UMKM, diperlukan teknologi yang dapat menginformasikan dan menawarkan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Oleh karena itu, para UMKM perlu menguasai teknologi dan cara menggunakan teknologi guna mendukung interaksi dengan konsumen secara digital.

Pemberdayaan ekonomi UMKM dilakukan melalui pendampingan dalam hal pemberdayaan teknologi informasi, khususnya pemanfaatan *website* yang berisi profil usaha, katalog produk, dan geliat usaha



Gambar 7. Metode Pembayaran pada Marketplace Pilihan UMKM

Sumber: KIC

UMKM, untuk meningkatkan promosi dan pemasaran produk. Selain hal tersebut, pemanfaatan aplikasi *e-commerce* atau pasar *online* untuk sarana transaksi jual-beli *online* dapat memberikan layanan yang efisien bagi pelanggan UMKM.

REKOMENDASI

UMKM memiliki peran penting dalam mendukung kebangkitan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60%. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan salah satunya dengan memberikan sejumlah insentif pajak untuk memperkuat pondasi perekonomian dalam menghadapi pandemi Covid-19, selain itu pemerintah telah memberikan stimulus dan penguatan *e-commerce* bagi UMKM untuk mendukung kebangkitan perekonomian nasional.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM dalam upaya Digitalisasi UMKM, perlu dilakukan beberapa upaya:

- memperluas akses pasar dengan bekerja sama Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar UMKM dapat berkontribusi sebagai penyedia barang/jasa;
- peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengembangan produk serta penguasaan digital dalam mendistribusikan barang dan jasa secara daring (contoh: pelatihan bahasa Inggris, pemasaran digital);
- mendorong UMKM masuk ke dalam *platform* digital;

- mempercepat infrastruktur atau pendukungnya untuk memudahkan penggunaan internet UMKM di desa/ kelurahan;
- menyatukan beberapa produk lokal UMKM yang sejenis menjadi satu *brand*;
- mengakselerasi transformasi Society 5.0, demi mendukung percepatan Industri Digital 4.0, karena manusia memegang peran; teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial menggunakan sistem yang mengintegrasikan antara ruang dunia maya dan ruang dunia nyata.

REFERENSI

Erlangga Satya Darmawan.2021.

“Survei KIC: Shopee Sumbang Omzet Terbesar untuk UMKM Selama Pandemi”.

<https://money.kompas.com/read/2021/05/04/144914526/survei-kic-shopee-sumbang-omzet-terbesar-untuk-umkm-selama-pandemi?page=all>. Diakses 15 Juni 2021. 13.30 wib;

Februari 2021. “Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Bruto. No. 13/02/Th. XXIV”. Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik;

Fika Nurul Ulya. 18 Januari 2020. “5 Transformasi Agar UMKM Bisa Tumbuh di Era Industri 4.0”

<https://money.kompas.com/read/2020/12/18/130133926/5-transformasi-agar-umkm-bisa-tumbuh-di-era-industri-40?page=all>. Diakses 14 Juni 2021.09.00 wib;

Herman. 18 Januari 2021.

“Kebangkitan UMKM kunci pemulihan ekonomi”. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/721279/kebangkitan-umkm-kunci-pemulihan-ekonomi>. Diakses 17 Juni 2021;

Katadata Insight Center. Juni 2020. “Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19”. <https://katadata.co.id/umkm>. Diakses 15 Juni 2021. 10.00 wib;

Katadata Indonesia. 2020. Kebangkitan UMKM di era pandemi: Peluncuran Survei & Edisi Khusus (Video). Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ab-NatrahKk>;

Venny Suryanto.8 Mei 2020. “Ada 1.785 koperasi dan 16.313 UMKM terdampak pandemic Covid 19”. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-1785-koperasi-dan-16313-umkm-terdampak-pandemi-covid-19>. Diakses 14 Juni 2021.10.00 wib.

PROFIL PENULIS

Ananto Noegroho P., Rine

Simamora, Deny Sutisna merupakan Fungsional Perencana Ahli Madya di Biro Perencanaan dan Keuangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



Foto: vecteezy.com

PERAN FUNGSIONAL PERENCANA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Oleh: Kusno Hadiutomo

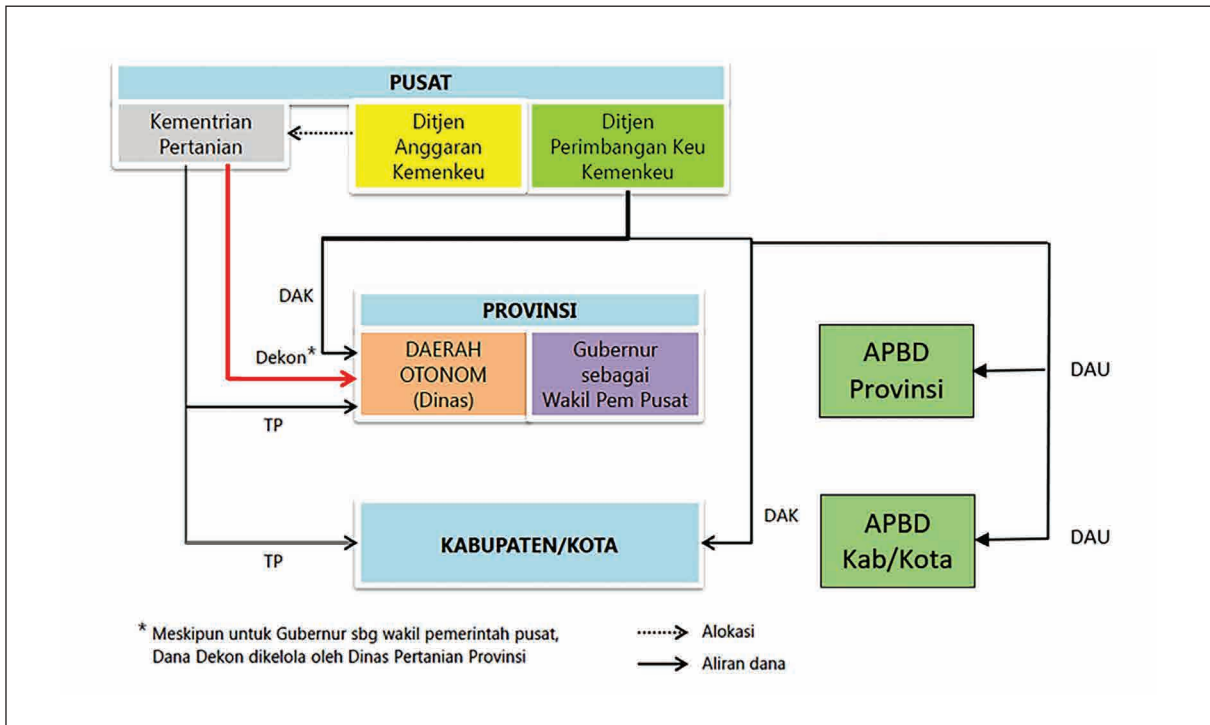
Perencanaan merupakan usaha yang dengan sadar dilakukan pemerintah untuk pencapaian tujuan pembangunan melalui berbagai instrumen kebijakan dan strategi.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan nasional menekankan pada pendekatan program dan kegiatan berbasis kinerja, berjangka menengah (RPJMN) dengan sistem penganggaran terpadu. Dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran berbasis kinerja di Kementerian Pertanian, para Fungsional Perencana dituntut harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan kebijakan, program, kegiatan dengan anggaran kinerja khususnya berkaitan dengan

strategi dan prioritas program yang memiliki nilai taktis strategis bagi pembangunan pertanian.

Target grup atau kelompok sasaran yang akan dituju oleh program dan kegiatan Kementerian Pertanian ditunjukkan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, berdasarkan sumber daya dan inovasi teknologi yang tersedia dalam rangka menyediakan produk pertanian/pangan pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.



Gambar 1. Aliran Dana Pembangunan Pertanian dari Pusat ke Daerah

Tujuan penulisan makalah ini adalah (a) memahami sistem perencanaan pembangunan pertanian; (b) mengetahui permasalahan perencanaan pembangunan pertanian; (c) meningkatkan peran Pejabat Fungsional Perencana dalam melakukan perencanaan pembangunan pertanian; dan (d) memberikan saran rekomendasi perencanaan pembangunan pertanian dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Pertanian berperan mengatur pelaksanaan pembangunan pertanian melalui pembuatan regulasi, perencanaan, pelaksanaan, mengendalikan dan mengevaluasinya agar program dan kegiatan pembangunan pertanian berjalan sesuai dengan semestinya. Kementerian Pertanian

juga berperan sebagai fasilitator agar dalam kegiatan pembangunan pertanian yang berjalan mampu mendayagunakan seluruh potensi nasional. Dalam upaya mengawal pelaksanaan pembangunan pertanian yang terintegrasi dan terdesentralisasi, perlu peran Pejabat Fungsional Perencana sehingga pembangunan pertanian dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pembangunan pertanian hingga saat ini masih menyisakan berbagai masalah baik pada tingkat *output*, misalnya ketersediaan infrastruktur pertanian seperti lahan pertanian (konversi lahan pertanian dan

pembukaan/pencetakan lahan baru), jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan introduksi teknologi serta alat mesin pertanian, terlebih lagi pada tingkat *outcome* seperti peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat (swasembada), dan ekspor pangan, serta kesejahteraan petani.

Perencanaan dan penganggaran adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan tanpa anggaran yang memadai hanyalah angan-angan kosong yang tidak banyak manfaatnya, sedangkan anggaran tanpa suatu perencanaan yang baik akan merupakan pemborosan. Perencanaan dan penganggaran adalah persiapan awal menuju

implementasi. Setidaknya secara analitis perencanaan harus dipisahkan dari implementasi sehingga pengambilan keputusan atas kebijakan yang sangat penting dapat diambil dan implementasinya dapat dipahami lebih awal sebelum diimplementasikan.

Berdasarkan analisis, memperlihatkan bahwa pembangunan pertanian sangat sedikit dibiayai dari anggaran Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Porsi

anggaran Pemerintah Daerah (APBD) untuk pembangunan pertanian tidak lebih dari 25 persen dari total biaya pembangunan pertanian dan sebaliknya dana dari Pemerintah Pusat jauh lebih besar dibanding dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah. Secara rinci, aliran dana Pembangunan Pertanian dari pusat ke daerah dapat dilihat pada Gambar 1, sedangkan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2015–2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

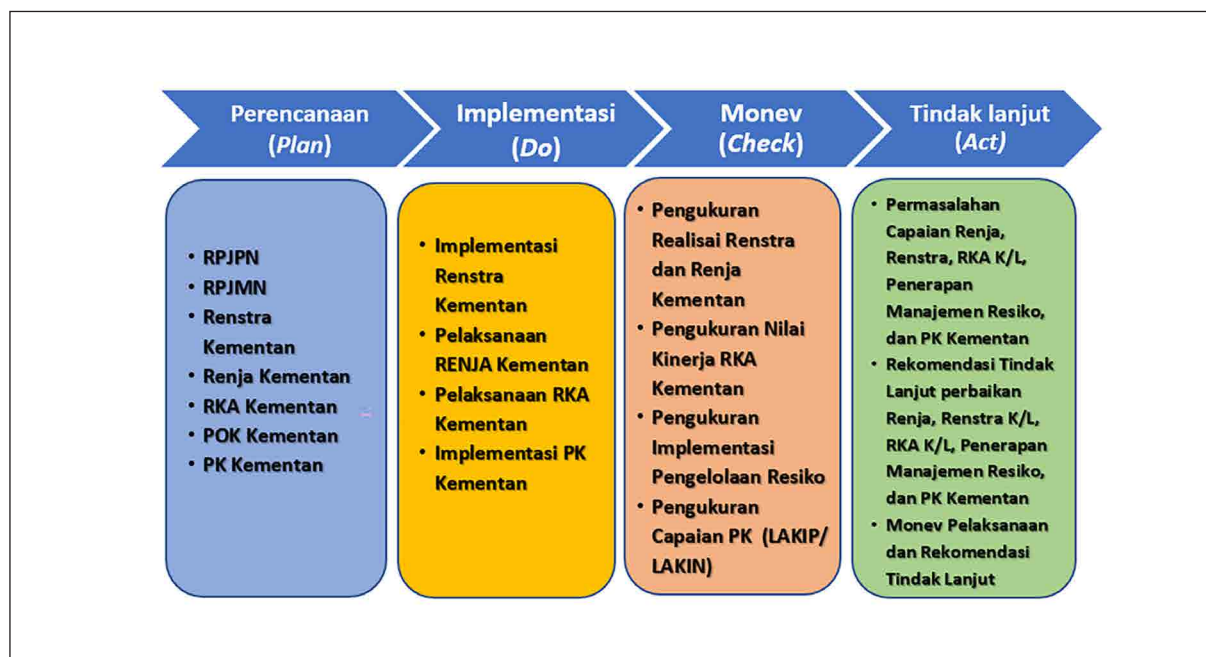
Sistem perencanaan pembangunan pertanian dimulai dari perencanaan (*plan*), implementasi (*do*), *monitoring* dan evaluasi (*check*), serta tindak lanjut/perbaikan (*act*) pembangunan pertanian. Sistem perencanaan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Gambar 2.

Pembangunan pertanian harus bersifat integratif dengan sektor lain dan sejalan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah yang sudah dilaksanakan dapat menjadi

TABEL 1. ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2015–2021

ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN (TRILIUN RUPIAH)						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
28,7	21,1	21,9	21,8	21,8	21,1	19,8

Sumber: <http://data-apbn-kemenkeu.go.id> dan Kementerian Pertanian



Gambar 2. Sistem Perencanaan Pembangunan Pertanian

faktor penentu keberhasilan pembangunan pertanian di daerah. Tanpa adanya keserasian antara pemerintah pusat dan daerah maka program dan kegiatan pembangunan pertanian berpotensi tidak mencapai tujuan, atau pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan.

Peran Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah (a) memfasilitasi, mendinamisasikan, dan menyusun regulasi agar tercipta iklim usaha pertanian yang kondusif untuk memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki masyarakat (petani) di suatu wilayah/daerah, baik potensi sumber daya maupun potensi sistem nilai tradisional/kearifan lokal yang telah membudaya dalam menata kehidupan masyarakat (petani); (b) fasilitasi untuk lebih mendinamiskan masyarakat (petani) dalam bentuk penyediaan infrastruktur/prasarana dan sarana, baik fisik (jalan usahatani, jaringan irigasi, alat mesin pertanian, dan listrik) maupun sosial (pendidikan, kesehatan), akses terhadap inovasi teknologi, pembiayaan, pasar dan lainnya; dan (c) perlindungan masyarakat (petani) dari persaingan usaha yang tidak seimbang.

Beberapa kelemahan perencanaan pembangunan pertanian yang selama ini terjadi antara lain (a) sering kali perencanaan merupakan dokumen politik mengenai cita-cita pembangunan yang dikehendaki atau yang diinginkan dan bukan seharusnya dilaksanakan; (b) kurangnya hubungan dan koordinasi antara penyusun rencana (Fungsional Perencana) dengan pelaksana rencana dan pelaksanaannya di lapangan; (c) adanya kepentingan pihak tertentu

yang menyebabkan dalam pemilihan alternatif kebijakan sering kali menguntungkan bagi suatu pihak dan merugikan bagi pihak lainnya; (d) kurang digunakannya dukungan data statistik, hasil penelitian, dan informasi yang mendukung untuk satu perencanaan; (d) kurang digunakannya teknik-teknik perencanaan; (e) kapasitas pengetahuan dari SDM perencana (Fungsional Perencana) terbatas; (f) kurang disadarinya bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang kompleks; dan (g) kendala administrasi yang menghambat terbangunnya proses perencanaan pembangunan yang baik.

Dari pelaksanaan pembangunan pertanian selama ini, dinilai terdapat empat paradoks antara kebijakan, program, dan pelaksanaan dalam alokasi anggaran.

1. Kesesuaian Kebijakan dengan Permasalahan dan Tujuan Pembangunan

Sering kali kebijakan yang dibangun tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan dan tujuan pembangunan. Terdapat indikasi bahwa pembangunan tidak bernuansa pembangunan jangka panjang, kebijakan yang kurang memperhatikan terhadap aspek kesenjangan wilayah, kebijakan perdagangan yang mematikan berkembangnya usaha pertanian dan lainnya.

2. Kesesuaian Program dengan Kebijakan yang Digariskan

Program yang dirancang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan. Program yang dirancang harus realistis dan tidak ada campur

tangan pihak luar terutama kepentingan politik birokrasi. Mekanisme perencanaan program pembangunan yang diterapkan selama ini merupakan perpaduan antara kebijakan dari atas (*top down policy*) dan perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), tetapi dalam pelaksanaannya, peran kebijakan dari atas lebih kuat dibandingkan unsur dari bawah ke atas.

3. Kesesuaian Alokasi Anggaran dengan Program yang Disusun

Alokasi anggaran ditujukan sebagai bentuk fasilitasi agar program yang disusun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan. Dengan demikian, selayaknya terdapat kesesuaian antara alokasi anggaran dengan program dan kegiatan. Meskipun demikian, masuknya faktor kepentingan politik menyebabkan sering kali adanya ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran.

4. Kesesuaian Implementasi Penggunaan Anggaran Dilapangan

Permasalahan implementasi anggaran berkaitan dengan ketepatan kelompok sasaran, waktu datangnya anggaran, besar anggaran, dan bentuknya. Sering kali terjadi ketidaktepatan kelompok sasaran yang diberi fasilitasi anggaran berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu yang memaksakan untuk memperoleh fasilitasi anggaran. Pada bagian lain, kekakuan sistem anggaran sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan fasilitasi usaha pertanian yang bersifat musiman.

PERAN FUNGSIONAL PERENCANA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Biro Perencanaan sebagai Pembina Teknis Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian Pertanian akan terus berupaya membangun dan menghadirkan Fungsional Perencana sebagai sebuah kekuatan dan profesi yang disegani dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan pertanian di Indonesia. Keyakinan tentang pengakuan sebuah profesi sejatinya tidaklah mudah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh surut pada niat dan tidak boleh berhenti hanya pada karya-karya normatif, lisan, maupun tulisan, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk karya nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat luas serta institusi perencanaan Kementerian Pertanian. Sudah saatnya dan sudah waktunya Fungsional Perencana untuk mengambil peran, ikut andil, dan menjadi bagian dari kekuatan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat nasional dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

PP No. 11 tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pejabat Struktural bertanggung jawab atas koordinasi teknis dan penggunaan sumber daya, sedangkan Fungsional Perencana bertanggung jawab terhadap substansi dan kualitas serta penyelesaian laporan/penyusunan dokumen kegiatan perencanaan pembangunan pertanian. Berdasarkan PermenPANRB No. 4/2020, peran dan tugas pokok Fungsional

Perencana dalam perencanaan pembangunan pertanian adalah melaksanakan penyiapan, mengkaji, merumuskan kebijakan, dan menyelesaikan penyusunan rencana pembangunan pada instansi pemerintah (Kementerian Pertanian) secara teratur dan sistematis termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pertanian.

Pejabat Fungsional Perencana merupakan bagian dari birokrasi yang mempunyai sistem, cara kerja, dan prosedur yang ditentukan oleh pimpinan organisasi/instansi pemerintah dalam upaya mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian dan mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Agar koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik dan efektif mendukung pemulihan ekonomi nasional maka perlu pembagiaan peran, tugas, dan fungsi dari Fungsional Perencana dalam melakukan Perencanaan Pembangunan pertanian di masing-masing tingkat perencanaan, mulai dari (a) perencanaan di Kementerian Pertanian (Biro Perencanaan); (b) perencanaan di Eselon 1 (Bagian Perencanaan di Sekditjen/Sekbadan lingkup Kementerian Pertanian); dan perencanaan pertanian di daerah (dinas dan UPT lingkup Pertanian provinsi dan kabupaten/kota).

SARAN DAN REKOMENDASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Dinamika lingkungan strategis pembangunan pertanian terus bergerak semakin cepat dan kompleks sehingga program dan kegiatan pembangunan pertanian

juga terus bergerak menjadi semakin kompleks dan dinamis. Sejalan dengan itu, seluruh proses pembangunan pertanian mulai dari perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi dituntut pula ikut berproses secara dinamis.

Proses perencanaan pembangunan pertanian saat ini dan ke depan dituntut lebih mengarah kepada program pembangunan kawasan pertanian skala luas (*food estate*) berbasis korporasi yang lebih memberdayakan kelembagaan ekonomi petani menuju peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan petani serta mendorong peningkatan perekonomian wilayah/daerah dalam upaya mewujudkan kebangkitan ekonomi nasional.

Dalam kaitan itu, pentingnya lebih ditegaskan akan peran pemerintah (Kementerian Pertanian) sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator agar kemampuan membangun kawasan pertanian skala luas (*food estate*) berbasis korporasi tersebut berjalan secara efisien dan dinamis. Sistem perencanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian harus tidak lagi dimulai dari penentuan target yang kemudian dibagi habis kepada setiap daerah, tetapi rancangan perencanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian harus merupakan rangkuman dari usulan kebutuhan fasilitasi yang diminta dari petani yang mengelola kawasan pertanian skala luas (*food estate*) berbasis korporasi di daerah.

Untuk itu perlu perencanaan pembangunan pertanian terintegrasi dan terdesentralisasi agar dihasilkan kebijakan dan program pembangunan pertanian yang sesuai kebutuhan, serta sebagai acuan dalam fasilitasi program, anggaran, dan implementasinya yang sesuai dengan kebijakan dan strategi yang digariskan dalam upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, kehadiran Jabatan Fungsional Perencana di Kementerian Pertanian diharapkan dapat berperan sebagai *think tank* dan motor penggerak bagi institusi perencanaan Kementerian Pertanian di pusat dan daerah dalam merencanakan pembangunan pertanian yang didasari oleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman atas isu-isu strategis yang berkembang secara *up to date* baik tingkat regional, nasional, maupun global.

DAFTAR BACAAN

- Baharsyah, S.; F. Kasryno dan E. Pasandaran. 2014. *Reposisi Politik Pertanian Meretas Arah Baru Pembangunan Pertanian*. Yayasan Pertanian Mandiri.
- Bappenas, 2011. *Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran*. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan. Jakarta.
- Kusno Hadiutomo (2020), *Perencanaan Pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi, Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2020), *Permenpan RB No. 4 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana*. Kemnpan RB. Jakarta.
- Kementerian Pertanian (2019), *Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Kementerian Pertanian (2020), *Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024. Edisi Revisi*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Kementerian Pertanian (2014), *Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015 – 2045, Pembangunan Pertanian Bioindustri Berkelanjutan Solusi Pembangunan Pertanian Indonesia Masa Depan*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Muljana B.S. (2011), *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*, UI-Press. Jakarta
- Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 90 tahun 2010.
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Riyadi, Deddy Supriady B. (2003), *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang No 33 tahun 2004 tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. ■

PROFIL PENULIS

Kusno Hadiutomo merupakan Perencana Ahli Utama di Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian



KONSEP PERUBAHAN POLA PIKIR, PENGUATAN KARAKTER, DAN UPAYA MENEMUKEMBANGKAN DIRI

DALAM MENINGKATKAN PERAN ASN PADA MASA PEMULIHAN EKONOMI

Oleh: Sigit Novianto Suhardi

Tahun 2020 menjadi tahun penuh kenangan dan tantangan. Tidak hanya karena adanya pukulan pandemi Covid-19, tahun 2020 juga menjadi momentum perubahan langkah dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara serentak.

Kajian ini setidaknya akan menyoroti tentang (1) bagaimana konsep yang tepat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berperan dalam masa tersebut dan (2) bagaimana konsep menemukembangkan diri yang sesuai agar ASN memiliki nilai dan tindakan nyata bagi masyarakat. Hasil kajian terhadap literatur, kajian terdahulu, dan telaah kebijakan menemukan setidaknya terdapat tiga proses yang harus dilalui oleh ASN untuk meningkatkan perannya, yaitu (1) mengubah pola pikir untuk menggabungkan

antara *critical thinking* dengan *creative thinking*; (2) menguatkan karakter perilaku dengan budaya SATRIYA; (3) mulai melakukan upaya menemukembangkan diri dengan konsep IKIGAI, serta pada akhirnya nanti perlu adanya evaluasi diri agar semangat, motivasi, dan jiwa pengabdian muncul secara berkesinambungan.

LATAR BELAKANG

Tahun 2020 akan menjadi tahun yang akan diingat bersama seluruh masyarakat di Indonesia

dan juga dunia. Tahun yang menghadirkan ingatan bahwa ancaman nyata pandemi Covid-19 telah membatasi setiap ruang gerak, memunculkan sekat-sekat dan jengjang ekonomi yang beragam di tengah masyarakat. Setiap orang berjuang dengan caranya sendiri, mengoptimalkan apapun yang dimiliki untuk dapat melanjutkan hidup, bahkan tidak terkecuali bagi ASN di seluruh pelosok tanah air. Adanya perubahan arah penganggaran untuk lebih fokus terhadap penanganan pandemi, baik sebelum maupun sesudah, telah memangkas peruntukan anggaran yang semula diarahkan untuk menguatkan pelayanan masyarakat dan memperbaiki kesejahteraan aparatur. Apalagi ditambah dengan adanya potensi pendapatan, baik negara maupun daerah, yang semakin berkurang, membuat daerah perlu membuat desain ulang dalam pola penganggaran dalam beberapa tahun mendatang.

Bagi beberapa daerah, tahun 2020 juga diwarnai dengan pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Kabupaten Sleman menjadi salah satunya dengan melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021–2024 pada bulan September 2020. Bagi daerah-daerah yang mengikutinya, perhelatan tersebut memiliki makna bahwa pada saat yang sama perlu menyelaraskan ulang visi-misi Kepala Daerah-nya dengan perubahan pola penganggaran karena adanya desakan fokus ulang penanganan Covid-19 dan keterbatasan sumber pendapatan daerah pada kurun waktu dua tahun terakhir. Peran ASN sebagai perencana sekaligus penentu

kebijakan umum di suatu daerah tentu akan sangat vital. Tidak hanya dari sisi kreativitas ide, tetapi juga dari sisi perilaku dan tindakan nyata di masyarakat.

Perubahan pola pikir dan karakter ASN di suatu daerah untuk secara nyata berperan aktif dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi dalam situasi yang serba terbatas tentu sangat diharapkan oleh masyarakat. Kondisi eksternal seperti ancaman pandemi yang belum berakhir dan masih belum jelasnya arah penanganan pemulihan ekonomi pascapemilihan Kepala Daerah akan menjadi tantangan tersendiri bagi ASN di daerah termasuk para perencana untuk dapat secara arif memilah kepentingan pribadi dengan keterikatan batin pengabdian seperti yang selalu ditegaskan melalui peraturan-peraturan terkait.

PERMASALAHAN DAN METODE PENGKAJIAN

Terdapat dua kondisi khusus yang menyebabkan perlunya perubahan dan pembenahan dalam cara berpikir dan cara bertindak bagi ASN (dalam kasus ini di Kabupaten Sleman) setelah tahun 2020. Pertama, adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan keterbatasan bagi ASN untuk bekerja, berinteraksi, dan berdiskusi langsung, baik di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Kedua, adanya pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan serentak secara nasional yang memaksa ASN perlu beradaptasi kembali dengan kepemimpinan Bupati baru serta perlunya secara aktif meningkatkan peran dalam berbagai bidang yang digeluti.

Kedua kondisi tersebut memunculkan permasalahan yang akan diangkat dalam kajian ini.

1. Bagaimana pola perubahan yang diperlukan bagi ASN untuk dapat meningkatkan peran dalam penguatan ekonomi pascapandemi (khususnya di Kabupaten Sleman)?
2. Bagaimana konsep menemukembangkan diri agar ASN punya manfaat lebih bagi masyarakat dan berperan utuh dalam masa penguatan ekonomi pascapandemi (khususnya di Kabupaten Sleman)?

Pengkajian akan dilakukan dengan metode *desk study* dan normatif yuridis, yang menggabungkan data-data hasil penelitian sebelumnya, teori-teori pendukung, dan peraturan perundangan yang berlaku serta keterkaitannya dalam mendukung identifikasi peran ASN secara menyeluruh.

PERUBAHAN POLA BERPIKIR

Indonesia dihadapkan pada tantangan pembangunan ASN yang termaktub dalam rencana besar/ peta jalan hingga tahun 2024. Dimulai pada RPJM 1 (2005–2009) dengan "*Good Governance*", kemudian RPJM 2 (2010–2014) dengan "*Reformasi Birokrasi*", lalu pada RPJM 3 (2015–2019) dengan "*Sistem Merit*", dan diakhiri pada RPJM 4 (2020–2024) dengan "*Birokrasi Berkelas Dunia*". ASN yang berkelas dunia diharapkan mampu menghadirkan profil ASN yang memiliki integritas, nasionalisme tinggi, berwawasan global, menguasai bahasa asing dan teknologi, memiliki jaringan yang kuat, serta memiliki jiwa melayani yang tulus. Untuk dapat meningkatkan kualitas ASN sesuai

peta jalan tersebut, tidak hanya diperlukan sistem yang tepat, tetapi juga keyakinan dari individu setiap ASN untuk terus memperbaiki diri baik dari pola pikir, karakter tindakan, maupun langkah nyata dalam perannya di instansi masing-masing.

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa ASN setidaknya memiliki peran untuk

1. melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
3. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memperkuat peran tersebut, selain menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, ASN perlu memperkuat kekompakan lingkungan kerja, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. ASN (serta Jabatan Fungsional Perencana dalam hal ini) perlu merekonstruksi pola berpikir, tidak hanya pada sisi *critical thinking* (berpikir kritis), tetapi juga menyeimbangkannya dengan *creative thinking* (berpikir kreatif) dan *analytical thinking* (berpikir analitis) sehingga menghasilkan sikap profesional dan berorientasi pada layanan publik.

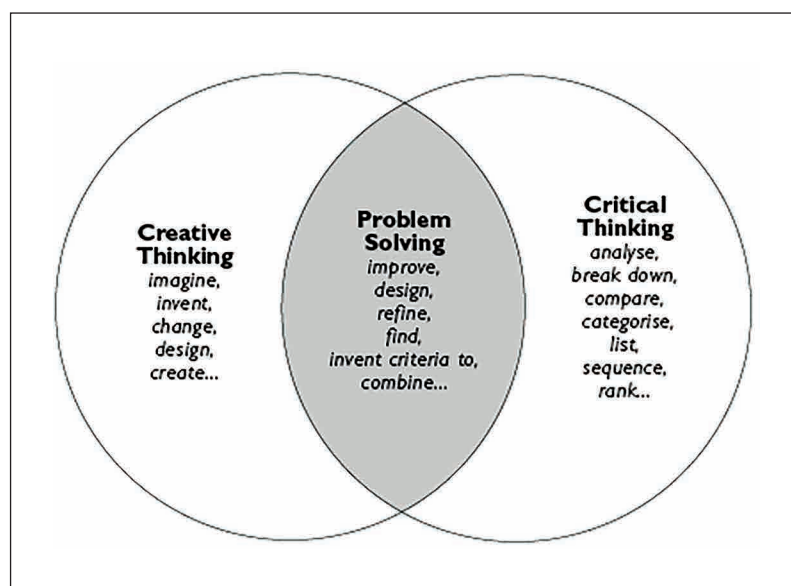
Johnson dan Lamb (dalam Juita, 2011) menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas

yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Kritis berkaitan dengan ketajaman dalam menganalisis suatu hal atau persoalan dan pengambilan keputusan. Semakin tajam seseorang menganalisis suatu permasalahan maka akan semakin tajam pula keputusan yang diambil seseorang tersebut.

Ennis dalam Hassoubah (2007) menjelaskan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif menekankan kepada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Definisi lain disampaikan oleh Murti (2015) yang menjabarkan berpikir kritis sebagai kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen.

PNS dirasa telah memiliki kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) mengingat dalam proses penerimaan, ketika melakukan tugas dan menyampaikan pertanggungjawaban suatu kegiatan senantiasa didahului dengan analisis terhadap data-data yang ada, meskipun dalam tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Sikap yang diperlukan untuk tahapan lebih tinggi apalagi dalam upaya menguatkan peran PNS di masa pemulihan ekonomi saat ini adalah kemampuan untuk berpikir kreatif dan kemudian semakin mengerucut kepada kemampuan analitis atau *problem solving*.

Kreativitas adalah bentuk pemikiran tidak “biasa” yang menjangkau hampir setiap aspek kehidupan. “*Creativity is a complex construct and is most commonly expressed through a broad range of intelligences during linguistic, musical, mathematical,*



Gambar 1. Kombinasi *Creative Thinking* dan *Critical Thinking*

Sumber: <https://sikasmiffy14.files.wordpress.com/2010/08/venn.gif>

spatial, kinesthetic, interpersonal, and perhaps even intrapersonal" (Gardner, 1985). Berpikir kreatif merupakan upaya memecahkan permasalahan tidak hanya dari satu sisi. Berbagai sudut pandang bahkan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya menjadi salah satu keunggulan dari ASN yang memiliki kemampuan berpikir kreatif. Munandar (2013) mengemukakan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah kuantitas, ketepatan, dan keragaman jawaban. Secara lebih khusus, diungkapkan pula bahwa "*creative thinking can be defined as the entire set of cognitive activities used by individuals according to a specific object, problem, and condition, or a type of effort toward a particular event and the problem based on the capacity of the individuals. They try to use their imagination, intelligence, insight, and ideas when they face to such situations. They solve the problem with the help of discovering and finding new applications whereby each individual realizes his/her knowledge deficits and tries to bridge this gap while obtaining new viewpoints by looking at the problem from multiple perspectives*" (Glass, 2004; Young & Balli, 2014).

Cukup berat memang mengubah pola pikir seorang ASN, apalagi jika sejak semula niatan untuk menjadi pegawai tidak jauh dari hanya sekedar mencari penghasilan. Duduk, diam, kerjakan, pulang menjadi ritme konvensional yang hanya dibumbui sedikit cara berpikir kritis, tetapi tanpa analisis dan jelas tidak termasuk ke dalam

struktur berpikir kreatif. Fatmawati (2019) dalam penelitiannya tentang korelasi antara *critical thinking*, *creative thinking*, dan *learning achievement* menyebutkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif dengan kontribusi sebesar 20,6%, dan juga kedua pola berpikir ini nantinya ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap hasil kerja mencapai 75%. Pada teori lainnya, disebutkan bahwa *creative thinking* akan berhubungan erat dengan *critical thinking* dan juga *problem solving*.

Secara umum, *creative thinking* berhubungan erat dengan *critical thinking* serta pemecahan masalah. Aslan, 2007 dan Sternberg, 2009 mengungkapkan setidaknya terdapat tiga dimensi dalam *creative thinking*: memadukan, menghubungkan, mengimajinasikan.

- **Memadukan:** dimensi ini termasuk berbagai aktivitas seperti mengambil keuntungan dari berpikir searah, menarik kesimpulan dari bagian-bagian kecil, serta menyajikan alur serta saran yang utuh hingga terwujud jalan keluar dari permasalahan.
- **Menghubungkan:** dimensi ini melibatkan penyatuan pengetahuan lama dan baru dengan bantuan pemikiran baru, membentuk hubungan yang luar biasa sehingga menghasilkan solusi yang dipercaya dan mampu diwujudkan secara konkrit dengan dukungan imajinasi dan kelengkapan pendukungnya.
- **Mengimajinasikan:** dimensi ini terdiri atas pembentukan kerangka hubungan yang kuat, valid, dan reliabel, penyajian alternatif jalan keluar yang fleksibel dengan dukungan

imajinasi, hingga kemudian memunculkan ide jalan keluar yang berbeda seiring dengan pemikiran merumuskan cara yang tepat dan dapat diterima.

Kesimpulannya, dalam kondisi *extraordinary* di luar kebiasaan umum seperti saat ini, untuk mampu berperan optimal, seorang ASN perlu meningkatkan kemampuannya dengan mengawalinya melalui perubahan pola pikir yang konvensional dengan pola pemikiran yang merupakan kombinasi antara kreatif dan kritis. Muaranya adanya pemikiran yang bisa memberikan jalan keluar dengan ciri khas seperti peningkatan etos kerja, variasi desain dan jalan keluar dari permasalahan, serta terus-menerus meningkatkan inovasi dan pengabdian dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

PENGUATAN SIKAP DAN KARAKTER

Tidak hanya berhenti pada pola pikir. ASN yang aktif dan mampu berkontribusi positif pada masa-masa sulit seperti saat ini memerlukan penguatan sikap dan karakter yang harus terus dijaga dan diaplikasikan dalam setiap aktivitasnya. Pada dasarnya, perubahan pola pikir dan penguatan karakter telah terumuskan dalam skema manajemen perubahan yang tujuan akhirnya menjadikan ASN adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga mampu beradaptasi terhadap kondisi sesulit apapun. Namun, penguatan sikap dan karakter perilaku tersebut memerlukan tindak lanjut dan dukungan nyata dari masing-masing pimpinan daerah. Konsep penguatan karakter perilaku yang dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY) termasuk di Kabupaten Sleman setidaknya telah memberikan gambaran arah bagaimana ASN perlu bersikap dan berperilaku ke depannya. Melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Sleman, terdapat konsep sederhana yang dirasa akan efektif jika dilaksanakan di seluruh organisasi pemerintahan yang ada saat ini.

Landasan konsep budaya pemerintahan "SATRIYA" ini adalah filosofi "*Hamemayu Hayuning Bawana*" yang menjadi nilai luhur kehidupan masyarakat DIY dengan mengandung makna kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Budaya pemerintahan "SATRIYA" sendiri

memiliki setidaknya dua makna:

- SATRIYA sebagai watak ksatria, yaitu memiliki sikap memegang teguh ajaran moral *sawiji, greget, sengguh ora mingkuh* (konsentrasi), semangat, percaya diri, rendah hati, dan bertanggung jawab;
- SATRIYA sebagai akronim dari selaras, akal budi luhur-jati diri, teladan-keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin percaya diri, dan ahli profesional.

Kedua makna tersebut memiliki tujuan akhir yang selaras dan nantinya tentu akan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi serta upaya-upaya yang dilakukan di dalamnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi. Permasalahan yang masih terus terjadi adalah tidak adanya keteladanan langsung yang terlihat selama ini dari ASN yang diberikan

kesempatan untuk memimpin sebuah organisasi.

Rata-rata pimpinan sebuah perangkat organisasi masih belum sepenuhnya menilai perilaku sebagai salah satu tolak ukurnya, meskipun cara berpikir kritis dan kreatif telah menjadi salah satu pertimbangannya. Hal inilah yang harus terus menjadi perhatian dan perlu adanya perubahan menyeluruh, bukan hanya dalam berpikir, tetapi juga bertindak dan berperilaku, serta perlu diimbangi dengan peraturan pendamping terkait penghargaan dan hukuman yang adil.

Lalu bagaimana contoh sikap berkarakter yang sebaiknya dibangun dan diperbaiki berdasarkan sikap SATRIYA ini? Tabel 1 berikut sedikit menjelaskannya.

TABEL 1. SIKAP "SATRIYA" SEBAGAI NILAI LUHUR KEHIDUPAN MASYARAKAT DIY

NO.	NILAI	SIKAP
1	SELARAS	Kesadaran dalam beribadah, kepedulian dalam menghemat energi dan kebersihan lingkungan bekerja, kepedulian dengan rekan kerja
2	AKAL BUDI LUHUR	Keluhuran budi (tanggung rasa, sopan santun, demokratis, dan tidak memaksakan kehendak)
3	TELADAN	Keteladanan (aktif dalam kegiatan kedinasan maupun masyarakat)
4	RELA MELAYANI	Kemauan dan kemampuan melayani dengan prima, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi/golongan
5	INOVATIF	Kemauan berinovasi (cara bekerja, ide yang bermanfaat dan efisien)
6	YAKIN DAN PERCAYA DIRI	Keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi (diimbangi dengan pengetahuan yang memadai)
7	AHLI PROFESIONAL	Profesional dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam mematuhi jam kerja dan berpakaian

Sumber: Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 72/2008 (diolah)

Perubahan yang diharapkan melalui penguatan karakter nantinya tidak hanya berpengaruh terhadap diri pribadi, tetapi juga orang lain seperti rekan kerja dan masyarakat umum. Peningkatan kemampuan berpikir dan bertindak inilah yang secara selaras ada dalam tujuan akhir manajemen perubahan yang selama ini berusaha digaungkan oleh Kementerian PANRB serta BKN sebagai langkah tindak lanjut adanya UU ASN di tahun 2014.

KONSEP MENEMUKEMBANGKAN DIRI

Upaya memulihkan kembali perekonomian di daerah tetap harus berjalan seimbang dengan proses perumusan langkah-langkah penanganan pandemi secara cepat dan efektif. Ujung tombak pelaksananya tentu saja di tangan ASN dengan berbagai posisi yang dimilikinya. Lalu bagaimana menyeimbangkan perubahan pola pikir dan penguatan sikap serta perilaku?

Perlulah kita mengenal konsep yang bernama Ikigai. Ikigai muncul dalam penelitian yang dilakukan oleh Akihiro Hasegawa (psikolog dan profesor di Universitas Toyo Eiwa) pada tahun 2001 yang menempatkan Ikigai bagian dari bahasa sehari-hari di Jepang. Ikigai menjelaskan kesenangan dan makna dari kehidupan. Kata tersebut secara harfiah meliputi *iki* yang berarti kehidupan dan *gai* yang berarti nilai. Ikigai sering kali dipahami sebagai prinsip hidup bahagia yang dapat mengatasi rasa jenuh dalam menghadapi rutinitas sehari-hari. Prinsip hidup inilah yang juga harus dimiliki ASN pada masa mendatang, sehingga muncul adanya motivasi berkelanjutan

atau gairah dan semangat dalam menyambut setiap hari baru.

Manfaat penerapan konsep Ikigai ini akan sangat positif dalam menyeimbangkan peran ASN setelah adanya perubahan pola pikir dan penguatan sikap, secara khusus dengan munculnya etos kerja yang lebih baik karena mereka meyakini pekerjaan yang nantinya dilakukan memiliki dampak yang baik pula untuk orang lain.

Konsep Ikigai terdiri dari empat aspek yang kemudian beririsan membentuk fase-fase.

1. **Mission:** Irisan pertama ini dapat diartikan bahwa kita melakukan pekerjaan yang memang kita senangi sekaligus mempunyai manfaat bagi banyak orang. Namun, pada irisan ini, kita dianggap tidak bekerja sesuai dengan kemampuan kita dan cenderung dihargai dengan bayaran yang rendah;
2. **Vocation:** Irisan kedua ini dapat diartikan bahwa kita melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang banyak dan dibayar sepadan dengan apa yang kita lakukan. Sayangnya pada fase ini kita melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian serta keinginan yang kita miliki saat ini;
3. **Profession:** Irisan ketiga ini dapat diartikan bahwa kita melakukan pekerjaan yang sangat kita kuasai dan dibayar sepadan untuk pekerjaan tersebut. Namun, pada irisan ini, pekerjaan yang kita lakukan bukan merupakan pekerjaan yang kita senangi dan tidak memberikan manfaat bagi banyak orang;
4. **Passion:** Irisan keempat ini dapat diartikan bahwa kita

melakukan pekerjaan yang sangat kita senangi dan sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Namun, di tahap ini, pekerjaan yang kita lakukan tersebut tidak memberikan manfaat untuk banyak orang dan kita diberikan penghargaan jauh dari yang seharusnya.

Lalu bagaimana upaya kita agar konsep ini mampu diterapkan dalam masa pemulihan ekonomi pascapandemi ini? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan konsep utuh dari Ikigai ini, berikut di antaranya.

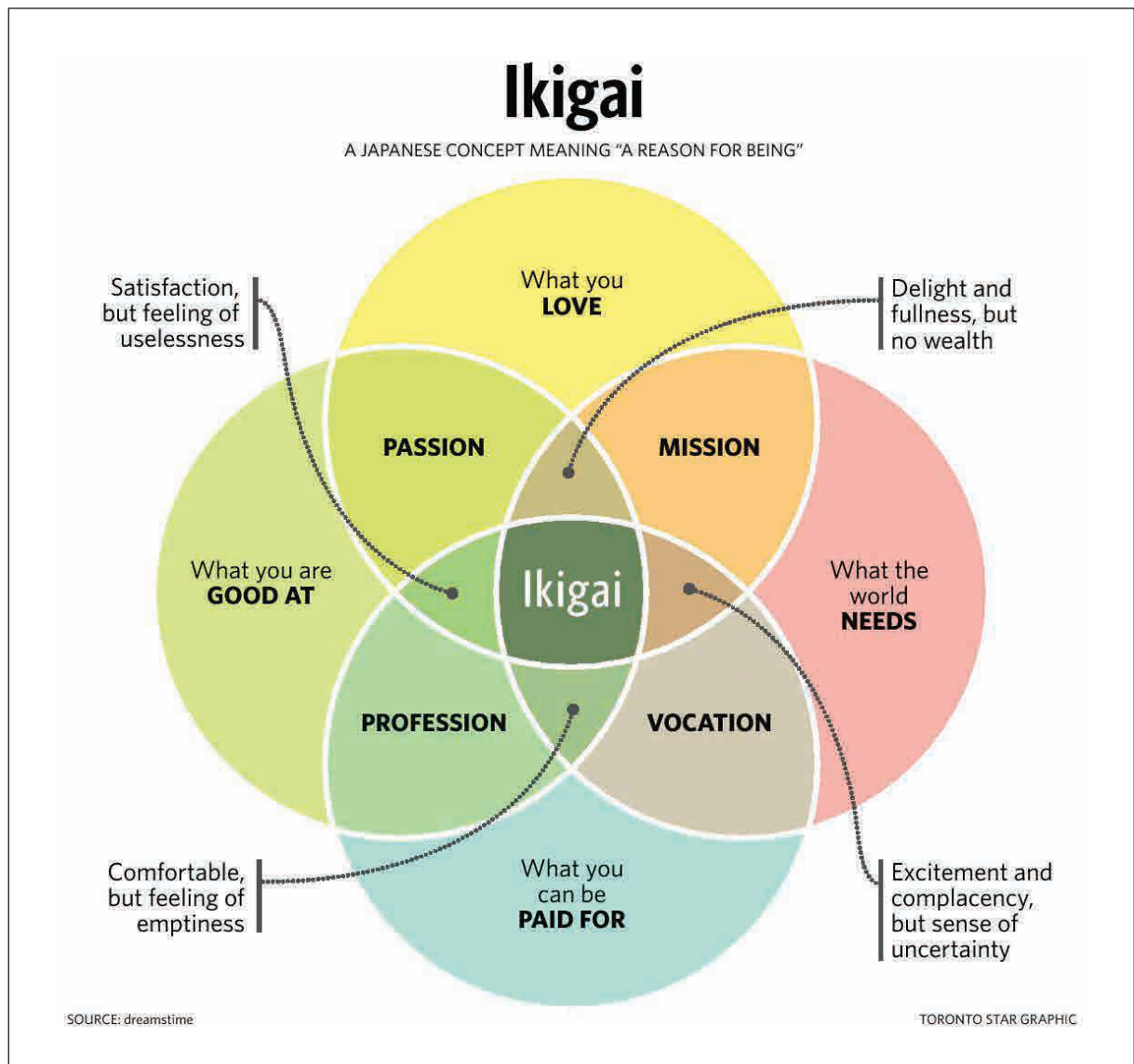
- a) ASN perlu menemukan tujuan yang diyakini dan berarti tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga pengaruhnya bagi orang lain. Setiap penempatan kerja yang ditentukan bagi ASN sering kali tidak akan memenuhi hasrat dan keinginan tiap-tiap individu. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah ASN perlu merumuskan tujuan dalam sudut pandang yang lebih luas, seperti misalnya tujuan awal untuk menjadi ASN adalah mampu memberikan jalan keluar bagi masyarakat dengan keahlian yang dimiliki saat ini. Cara seperti ini diharapkan mampu mendorong motivasi ASN untuk mulai menemukan teman, lingkungan, dan cara kerja yang efektif dan pada akhirnya menyenangkan pekerjaan yang diberikan.
- b) ASN harus mulai berpikir dan bertindak saat ini juga. Upaya memulihkan ekonomi dan menurunkan potensi risiko pandemi tidak dapat menunggu kita untuk berubah dengan fase-fase yang lambat. Saat kita telah menyenangkan pekerjaan dan juga termotivasi untuk

memberikan manfaat bagi orang lain, maka kita perlu sesegera mungkin mewujudkannya dengan tindakan dan pemikiran yang kreatif dan menghasilkan solusi. Seperti misalnya dengan adanya peran secara langsung

bagi Perencana di daerah untuk berperan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode 2021-2026.

c) ASN perlu menyadari bahwa tekad dan semangat tidak

harus selalu dibarengi dengan kelancaran dan kemudahan dalam mencapainya. Rintangan berupa penolakan, tindakan intimidasi, meremehkan, dan bahkan hujatan mungkin saja mewarnai upaya sumbangsih



Gambar 2. Konsep Ikigai



Foto: vecteezy.com

pemikiran dan tindakan yang kita tawarkan. Namun, penting untuk diingat, pada fase menuju ketercapaian Ikigai, reformasi tindakan dan tekad juga harus mengikuti agar setiap irisan yang ada terwujudkan dalam persentase keseimbangan yang diinginkan.

SIMPULAN

Konsep menemukembangkan diri bagi ASN menjadi poin kritis yang perlu diwujudkan sesegera mungkin. Tidak hanya dalam rangka mewujudkan misi akhir dari peta jalan reformasi birokrasi, tetapi juga sebagai upaya menguatkan dedikasi dan peran ASN bagi masyarakat pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi saat ini. Dimulai dengan upaya memperbaiki pola pikir yang mengarah kepada *problem solving*, penguatan karakter dengan konsep SATRIYA, dan kemudian bertindak aktif melalui penanaman budaya IKIGAI sebagai bagian hidup bermasyarakat dan juga mengabdikan diri kepada negara. Keseluruhan tindakan tersebut kemudian bermuara pada konsep evaluasi diri yang akan membuat ASN menjadi pribadi yang baru setiap harinya atau bahkan setiap menjalankan kewajiban yang harus ditunaikannya.

REFERENSI

- A. Fatmawati, et al. (2019). Critical Thinking, Creative Thinking, and Learning Achievement: How They are Related. *Journal of Physics: Conference Series*. 1417 (2019) 012070
- Baker, M, Rudd, R, Pomeroy, C, (2001). Relationship Between Critical and Creative Thinking. *Journal of Southern Agricultural Education Research* Vol. 51, Number 1
- Birgili, B. (2015). Creative and Critical Thinking Skills in Problem-based Learning Environments. *Journal of Gifted Education and Creativity*. 2(2) 71-80
- Fatimah, E, et al. (2017). Manajemen ASN: Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara
- Juita, Yulia Agustin Surya. (2011). Efektivitas Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar, Kemampuan Berpikir Kritis, dan Berpikir Kreatif Siswa Kelas VIII SMP1 Sabilillah. Malang: Universitas Negeri Malang
- Lai, E.R (2011). *Critical Thinking: A Literature Review*. New York. Pearson Education
- Rasheva-Yordanova, K, et al (2018). Analytical Thinking As a Key Competence for Overcoming The Data Science Divide. Proceedings of EDULEARN18 Conference. 7892-7898
- Sternberg, R. J. (2009). Academic intelligence is not enough WICS: An expended model for effective practice in school and later in life. Retrieved from: <https://www.clarku.edu/research/mosakowskiinstitute/conferences/mar12/papers/Sternberg.pdf>
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Sleman <https://satupersen.net/blog/mengenal-ikigai-konsep-hidup-bahagia akses tanggal 2 Juli 2021> ■

PROFIL PENULIS

Sigit Novianto Suhardi saat ini diberikan amanah untuk menjadi Perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. Sangat tertarik untuk melakukan eksplorasi dan penelitian mendalam terkait isu-isu tentang kemiskinan, ketimpangan sosial, pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan sumber daya manusia, dan permasalahan pembangunan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui nomor **081804122148** atau melalui pos-el sigit_ns@slemankab.go.id



PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL, PEMANGKASAN ANGGARAN TIDAK BISA DIHINDARI

(PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI BADAN PUSAT STATISTIK)

Oleh: Kartika Sukma Oktanidya

Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia pada triwulan I tahun 2020, ekonomi dunia terbawa dalam resesi ekonomi yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia.

LATAR BELAKANG/ PENDAHULUAN

Kontraksi ekonomi yang cukup dalam juga dialami Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2020 hanya sebesar 2,97% (*year on year* atau YoY), pertumbuhan ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2019 (YoY), yaitu sebesar 5,07%. Bahkan pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot hingga minus 5,32% (YoY). Pemerintah menanggapi krisis ini dengan

memfokuskan kembali pada kebijakan fiskal dengan menstimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang fokus pada bidang kesehatan, pengamanan sosial dan stabilitas ekonomi.

Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan mendukung dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) melalui Peraturan Presiden RI

Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Penghematan tersebut dilakukan pada belanja modal yang tidak terkait dengan penanggulangan Covid-19 dan belanja modal untuk proyek yang dapat diperpanjang ke tahun berikutnya, belanja pegawai akibat penundaan kenaikan tunjangan kinerja dan pengangkatan CPNS, serta belanja barang yang tidak terkait dengan penanggulangan Covid-19. *Refocusing*/penghematan anggaran juga terjadi pada tahun 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penghematan belanja K/L yang kedua lebih difokuskan pada alokasi Tunjangan Kinerja sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 63 Tahun 2021.

Dengan adanya *refocusing* tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) harus mengambil beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di BPS sehingga *output* yang diharapkan tetap tercapai. Kegiatan di BPS yang merupakan pelaksanaan lapangan sensus dan survei tentunya mengalami kendala pada saat pandemi Covid-19 dan adanya *refocusing* anggaran. Mitigasi resiko yang diambil sebagai dampak adanya *refocusing* anggaran di antaranya perubahan proses bisnis pelaksanaan sensus dan survei serta penundaan survei pada tahun 2020 dan 2021.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan melambatnya perekonomian dunia termasuk perekonomian Indonesia. Kinerja perekonomian pada tahun 2021 pun masih diliputi ketidakpastian sehingga peran vital konsumsi pemerintah masih diperlukan. Pemerintah masih membutuhkan dukungan anggaran sebagai penyangga fiskal (*fiscal buffer*), dan penstabil otomatis (*automatic stabilizer*) dalam jumlah yang cukup sehingga dilakukan kembali *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga pada awal tahun 2021.

Penghematan belanja dalam *refocusing* dan realokasi belanja K/L lebih menasar pada belanja yang bersumber pada Rupiah Murni yang meliputi belanja honorarium (tim dan narasumber), belanja perjalanan dinas dalam/ luar negeri, paket meeting (FGD, rapat kerja, *workshop*, seminar, konsinyering, dan lain-lain) serta belanja jasa yang tidak berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Pemotongan anggaran ini tentunya akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan di Kementerian/Lembaga khususnya di BPS. Bahkan, beberapa kegiatan harus ditunda pelaksanaannya karena adanya pemotongan anggaran ataupun kegiatan yang tidak dalam koridor prioritas terkait dengan penanggulangan pandemi Covid-19.

Identifikasi Masalah

Bagaimana peran perencana anggaran dalam menyusun alokasi anggaran BPS dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya

pemangkasan anggaran dan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan?

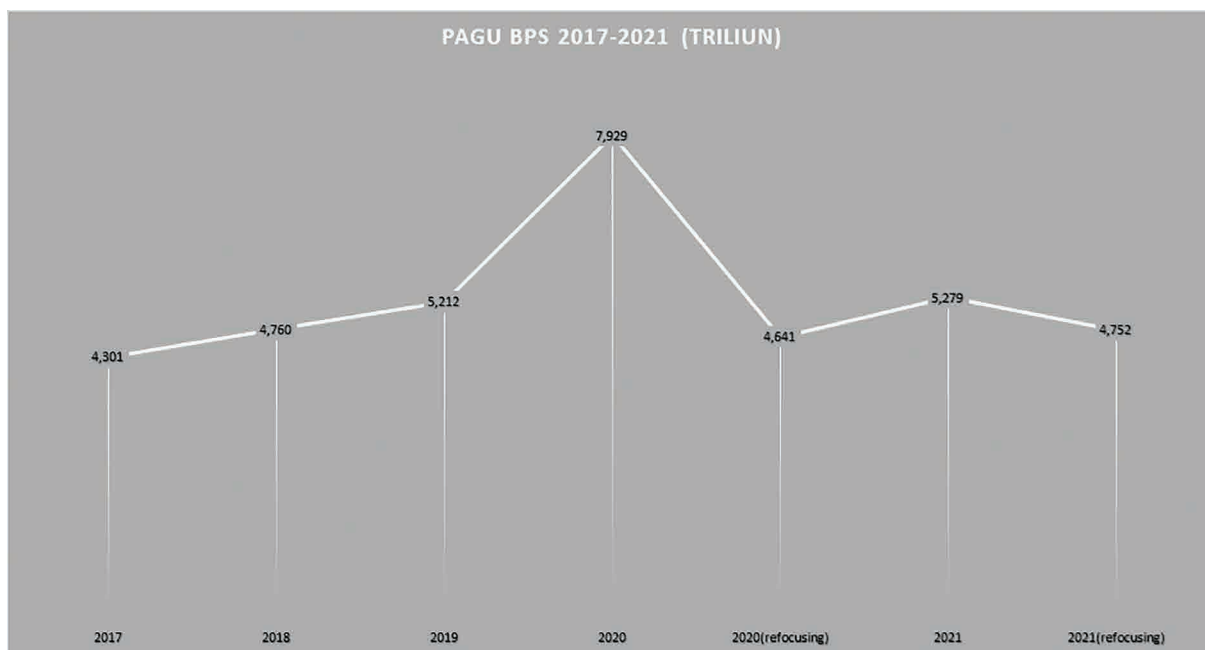
Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui peran perencana anggaran menyusun alokasi anggaran dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang timbul dengan adanya pemangkasan anggaran pada tahun 2020 dan 2021 terhadap pelaksanaan kegiatan di BPS.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Proses *refocusing* yang pendek tentunya membuat perencana anggaran mengambil langkah cepat dalam merealokasi anggaran agar kebutuhan pemerintah dapat segera terpenuhi. Sebelum merealokasi anggaran, perencana anggaran menyusun terlebih dahulu potensi sumber anggaran yang dapat dilakukan penghematan, mengingat tahun anggaran yang telah berjalan sehingga beberapa kegiatan di BPS juga telah terlaksana. Selain itu, perencana juga harus melakukan koordinasi dengan *subject matter* teknis terkait dengan potensi sumber penghematan anggaran agar tidak menimbulkan dampak terhadap pelaksanaan sensus/ survei.

Di samping itu, perencana anggaran sebagai penyusun *masterplan* dan *network planning* Sensus Penduduk 2020 juga harus melakukan *review* dan evaluasi terhadap dokumen tersebut karena adanya perubahan proses bisnis pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 akibat adanya penghematan anggaran. *Masterplan* dan *network planning* Sensus Penduduk 2020 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sensus yang harus selalu dilakukan



Gambar 1. Gambaran Pagu BPS Tahun 2017—2021 (triliun)

update seiring dengan adanya perubahan proses bisnis pada saat pelaksanaannya.

Sesuai dengan tema RKP 2021, yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" maka ditekankan kepada seluruh K/L supaya berpartisipasi dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020 dan Rp 627,9 triliun pada tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional. Anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional diperoleh dengan memangkas anggaran APBN K/L maupun APBD.

Beberapa langkah-langkah ditempuh BPS dalam upaya penanganan pandemi Covid-19

dengan alokasi anggaran yang telah mengalami pemotongan. Seperti pada tahun 2020, anggaran awal BPS pada tahun tersebut adalah Rp7,929 triliun, mengalami *refocusing* menjadi sebesar Rp4,641 triliun. Penghematan sebesar Rp3,487 triliun di BPS secara langsung memberikan dampak yang signifikan pada pelaksanaan kegiatan di BPS.

Tahun 2021 anggaran BPS kembali mengalami penghematan, dari pagu awal sebesar Rp5,279 triliun menjadi Rp4,752 triliun. Penghematan anggaran pada 2021 sudah dilakukan sebanyak dua kali sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 dan S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021. Gambaran pagu anggaran BPS dari tahun 2017 sampai dengan

pertengahan tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada pertengahan Maret 2020 membuat perencanaan anggaran harus mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19 di BPS sesuai dengan arahan kebijakan pimpinan. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan masker/*hand sanitizer*, pengadaan *thermogun/infrared thermometer*, pengadaan lisensi aplikasi *video conference* sampai dengan satu tahun, pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh, biaya penyemprotan disinfektan di area kantor, biaya komunikasi dalam bentuk pulsa untuk petugas pendataan lapangan, pengadaan alat pelindung diri (APD)/alat uji medis/*rapid test* dan sejenisnya,

serta pengadaan tempat cuci tangan *portable* maupun permanen. Pagu anggaran BPS tahun 2020 sebesar Rp4,641 triliun dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp83,366 miliar atau 2% dari keseluruhan pagu BPS. Sementara realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 adalah sebesar Rp71,098 miliar (85,3%).

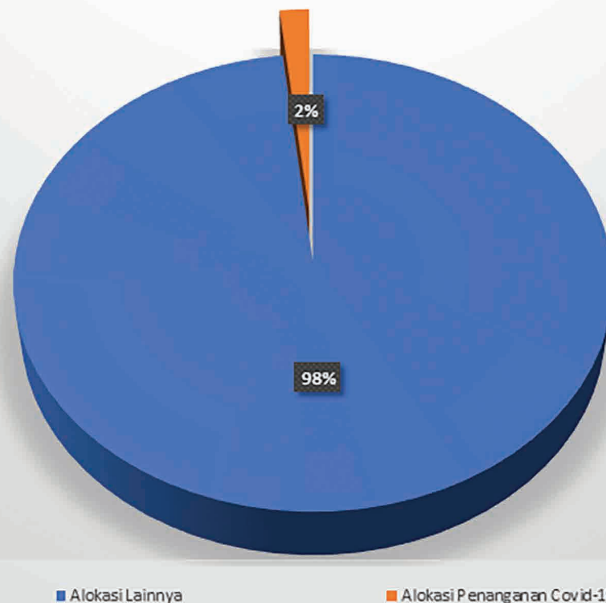
Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut pada tahun 2021 menyebabkan BPS kembali mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 tahun 2021 sebesar Rp102,76 miliar (kondisi sampai dengan 21 Juni 2021) dari pagu BPS sebesar Rp4,751 triliun. Alokasi

anggaran penanganan Covid-19 di BPS cenderung kecil karena banyaknya kegiatan sensus/survei yang ada di BPS serta jumlah satker di BPS yang mencapai 517 satker di seluruh Indonesia. Jumlah aktivitas sensus/survei di BPS tahun 2020 mencapai 127 aktivitas, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 139 aktivitas.

Pemangkasan anggaran pada tahun 2020 tentunya berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan sensus dan survei di BPS, khususnya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021. Sebagai antisipasi agar Sensus Penduduk 2020 tetap berjalan maka dilakukan perubahan proses bisnis menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran,

diantaranya pelatihan petugas dilakukan secara *online* di seluruh Indonesia dan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 *short form* yang diperpendek jangka waktunya karena keterbatasan anggaran untuk honor petugas lapangan. Selain itu, terdapat kegiatan survei yang pelaksanaannya pada tahun 2020 ditunda, yaitu Pendataan Industri Penggilingan Padi. Sementara itu, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilakukan perubahan proses bisnis, di antaranya kuesioner yang digunakan lebih ringkas mengingat kondisi di lapangan yang masih rawan dan ketidaknyamanan masyarakat sebagai responden dalam wawancara.

Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 BPS Tahun 2020



Gambar 2. Gambaran Pagu BPS Tahun 2017–2021 (triliun)

Kebijakan dalam pelaksanaan anggaran juga diambil pada tahun 2021 dengan adanya pemotongan anggaran kembali pada awal tahun, di antaranya pelatihan petugas lapangan dilakukan secara *online* (kecuali di daerah susah sinyal, pelatihan dilakukan secara *offline*/tatap muka), pembatasan perjalanan dinas supervisi, dan paket *meeting*.

Memasuki penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022, fokus penekanan terhadap pemantapan pemulihan sosial ekonomi untuk mendukung reformasi struktural yang optimal, konsisten dengan tema RKP Tahun 2022. Terdapat lima prioritas utama kebijakan fiskal yang ditekankan, yaitu memprioritaskan sektor kesehatan, melanjutkan program perlindungan sosial, perbaikan kualitas SDM, optimalisasi pendapatan negara dan menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal berjalan optimal. Hal ini berarti pembatasan anggaran di 2022 masih berlanjut sehingga diperlukan beberapa kebijakan dalam pelaksanaan anggaran 2022 sesuai dengan ketersediaan anggaran.

SARAN DAN REKOMENDASI

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan adanya pemangkasan anggaran di tahun 2020 dan 2021 sebagai salah satu upaya percepatan penanganan di bidang kesehatan. Hal ini tentunya memberikan dampak yang signifikan pada kegiatan di BPS. Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan di antaranya sebagai berikut.

1. Penambahan alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 pada tahun 2021 yang digunakan untuk peningkatan

pengadaan masker/*hand sanitizer*, APD, penyediaan alat medis, dan menambah intensitas *swab test* antigen maupun *swab test* PCR bagi pegawai.

2. Penyediaan APD dan *swab test* antigen untuk petugas lapangan seluruh sensus/survei agar pendataan dapat berjalan lancar dan masyarakat sebagai responden merasa nyaman.
3. Perencana anggaran diharapkan lebih cermat lagi dalam menyusun anggaran sehingga alokasi belanja barang yang bukan merupakan kegiatan prioritas dapat dialihkan untuk pemulihan ekonomi nasional.
4. Perencana anggaran agar menyusun potensi-potensi sumber anggaran yang bisa dilakukan penghematan lebih dini sebagai antisipasi adanya *refocusing*/penghematan tahap ketiga di tahun 2021.
5. Mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 pada tahun 2022 sebagai antisipasi pandemi Covid-19 yang masih berlanjut dan sesuai dengan tema RKP 2022 di mana salah satu prioritas utama adalah sektor kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perkembangan Ekonomi dan Refocusing Anggaran untuk Penangan Covid-19 di Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id>. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021 Pukul 21.02
- Briefing Paper Diskusi Greenpeace Indonesia-IDEF 16 September 2020, Pemulihan Ekonomi Nasional: Business as Usual atau Pro-Lingkungan? Diunduh

pada tanggal 31 Mei 2021 Pukul 19.08

Rabbani, Deden Rafi Syafiq, dkk. Selayang Pandang Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Refocusing dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah): Sebuah Urusan Yang Belum Usai, <https://fh.unpad.ac.id>. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021 Pukul 21.05

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 Hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 Hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Sajiah, Faslan Syam. 2021. Artikel dan Opini: Realokasi Belanja untuk Mengatasi Pandemi, <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini>. Dilihat pada tanggal 13 Juni 2021 Pukul 18.40. ■

PROFIL PENULIS

Kartika Sukma Oktanidya

merupakan Aparatur Sipil Negara di Badan Pusat Statistik
Pos-el: ksukma@bps.go.id



PLBN Aruk

Foto: Indonesia.go.id

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR ENERGI

DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI ARUK, MOTAAIN DAN SKOUW

Oleh: Agus Nurhudoyo

Keberhasilan pengelolaan daerah PLBN (Pos Lintas Batas Negara) adalah ketersediaan cadangan BBM (bahan bakar minyak) yang kuat sebagai penopang kegiatan transportasi dan ketersediaan listrik yang andal dan terjangkau dari sumber EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai penopang kegiatan rumah tangga, komersial, dan industri.

Untuk menopang kegiatan di atas, harus ada dukungan percepatan pembangunan ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain, dan Skouw. Ketiganya merupakan perbatasan darat dengan negara tetangga Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Adapun kebutuhan ketersediaan tenaga listrik sebesar 130 persen dan cadangan BBM minimal tiga hari dengan mengikuti tren volume penjualan BBM. Kapasitas tangki timbun BBM yang harus disediakan adalah sebesar cadangan BBM ditambah kapasitas tangki pengangkut pengiriman BBM yang biasa digunakan.

LATAR BELAKANG

Tantangan percepatan pembangunan ekonomi kawasan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Aruk, Motaain, dan Skouw adalah sebagai berikut.

1. Jenis dan besaran produk yang dibutuhkan negara tetangga (a) Malaysia (Sarawak); (b) Timor Leste (Dili dan Bobonaro); (c) Papua Nugini (Vanimo/Sepik Barat).
2. Produk yang dibutuhkan di kawasan ekonomi Aruk, Motaain, dan Skouw.
3. Produk yang dapat diproduksi di kawasan ekonomi Aruk, Motaain, dan Skouw.

4. Produk yang tidak dapat diproduksi di kawasan ekonomi.
5. Produk yang perlu didatangkan dari luar kawasan ekonomi.
6. Pembangunan yang diperlukan bagi tumbuhnya sentra baru ekonomi, industri, dan perdagangan.

Untuk mendukung pemenuhan tantangan tersebut di atas perlu adanya penyediaan energi yang cukup guna mendukung pengembangan ekonomi daerah perbatasan negara, di mana pembangunan infrastruktur energi (listrik maupun nonlistrik) tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan energi belaka, tetapi harus dapat menjadi penggerak ekonomi.

Merupakan suatu kunci keberhasilan pengelolaan daerah PLBN adalah ketersediaan BBM dengan cadangan yang kuat sebagai penopang kegiatan transportasi dan ketersediaan listrik yang handal dan

terjangkau dari sumber EBT sebagai penopang kegiatan rumah tangga, komersial, dan industri.

PERMASALAHAN DAN TUJUAN

Permasalahan dalam pengembangan ekonomi daerah PLBN adalah minimnya ketersediaan BBM dan listrik sehingga dukungan infrastruktur energi dalam percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw kurang berperan.

Tujuan penulisan makalah ini adalah memberikan masukan percepatan pengembangan ekonomi daerah PLBN dalam segi ketersediaan BBM dan ketenagalistrikan.

PEMBAHASAN

Secara umum, daerah PLBN yang merupakan titik lalu lalang produk yang dibutuhkan dua negara, berpotensi rawan penyelundupan. Produk yang dapat diproduksi di kawasan perbatasan seperti mebelair, peternakan, dan pertanian

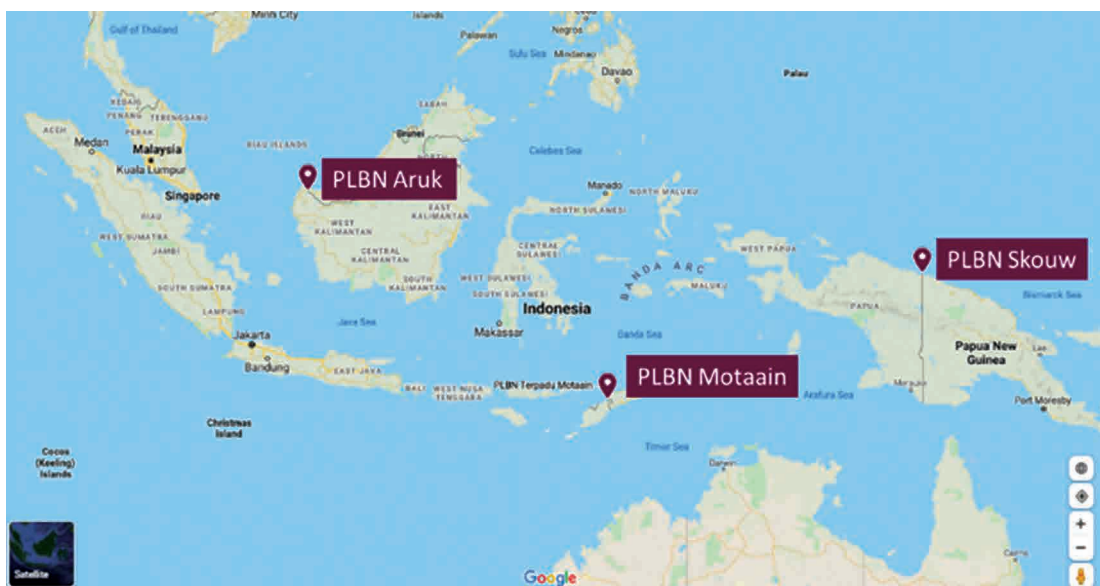
cukup potensial dan menjanjikan. Selain itu, produk yang perlu didatangkan dari luar daerah seperti makanan dan minuman, *spare part*, semen, kain dan pakaian, bahan bangunan, besi, beton dan tripleks cukup berpotensi dan menjanjikan apabila diupayakan menjadi ladang usaha. Oleh sebab itu, perlu dukungan suplai energi yang cukup, yaitu ketersediaan BBM yang cukup dan pasokan listrik yang andal.

Secara khusus terdapat permasalahan, yaitu minimnya pasokan BBM dan listrik sehingga perkembangan ekonomi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Lokasi PLBN sebagaimana Gambar 1.

Kondisi umum kebutuhan energi di daerah perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw adalah sebagai berikut.

1. Aruk

Kebutuhan BBM meliputi BBM solar dan bensin diasumsikan untuk melayani truk, mobil angkutan



Gambar 1. Lokasi PLBN

umum, mobil pribadi, dan sepeda motor sebesar 2.000 liter solar/hari dan 2.000 liter bensin/hari, serta minyak tanah sebesar 2.000 liter/hari (+5 liter/jiwa/bulan)

Kebutuhan listrik diasumsikan untuk melayani kebutuhan rumah tangga, komersial, dan industri sebesar 1.200 kwh/kapita/tahun.

3. Motaain

Kebutuhan BBM meliputi BBM solar dan bensin diasumsikan untuk melayani truk, mobil angkutan umum, mobil pribadi, dan sepeda motor sebesar 1.000 liter solar/hari dan 1.000 liter bensin/hari, serta minyak tanah sebesar 700 liter/hari.

Kebutuhan listrik diasumsikan untuk melayani kebutuhan rumah tangga, komersial, dan industri sebesar 1.150 kwh/kapita/tahun.

3. Skouw

Kebutuhan BBM meliputi BBM solar dan bensin diasumsikan untuk melayani truk, mobil angkutan umum, mobil pribadi, dan sepeda motor sebesar 500 liter solar/hari dan 500 liter bensin/hari, serta minyak tanah sebesar 350 liter/hari.

Kebutuhan listrik diasumsikan untuk melayani kebutuhan rumah tangga, komersial, dan industri sebesar 1.100 kwh/kapita/tahun.

Melihat kondisi umum dari ketiga daerah perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw, bahwa untuk mewujudkan pengembangan ekonomi wilayah daerah perbatasan negara yang paling ideal, perlu arah strategi pengelolaan perbatasan negara antara lain :

“Mewujudkan peningkatan pelayanan BBM dan listrik lintas

batas negara, serta peningkatan kerja sama ekonomi lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antarnegara”.

Jika melihat arah strategi di atas, sektor pelayanan energi merupakan kunci keberhasilan dari pengembangan wilayah daerah perbatasan negara. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah unsur pertahanan keamanan, ekonomi, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Layanan energi dapat dikatakan "darah" dari perekonomian daerah PLBN yang mau tidak mau harus diwujudkan secara mendasar dan berkelanjutan yang sesuai kaidah penyediaan infrastruktur energi sebagai penggerak ekonomi. Hal tersebut diwujudkan melalui ketersediaan BBM dengan cadangan yang kuat sebagai penopang kegiatan transportasi dan ketersediaan listrik yang andal dan terjangkau dari sumber EBT sebagai penopang kegiatan rumah tangga, komersial, dan industri.

Kegiatan distribusi BBM terkait cadangan BBM pada daerah PLBN perlu dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah volume BBM yang harus tersedia pada SPBU. Hal ini untuk mengatasi adanya gangguan dari sisi penyediaan (jarak pengiriman jauh dari lokasi Depot BBM) dan pendistribusian (setiap saat ada pengambilan dari konsumen), serta adanya gangguan alam misal jalan longsor, hujan deras, banjir dan cuaca buruk lainnya. Untuk itu, perlu disediakan besaran cadangan BBM pada SPBU minimal cukup untuk kebutuhan tujuh kali waktu tempuh pengiriman BBM dari Depot

BBM ke SPBU PP. Sementara itu, kapasitas tangki timbun BBM yang harus disediakan adalah sebesar cadangan BBM ditambah kapasitas tangki pengangkut pengiriman BBM yang biasa digunakan.

Kebutuhan listrik pada kawasan PLBN diprediksikan untuk tahun 2022 sebesar 1.100 sampai dengan 1.200 kwh/kapita/tahun (*GSEN 2021*), ketersediaan pembangkit listrik dari EBT dengan *reserve margin* pembangkit 30 persen.

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara yang perlu didukung layanan energi yang kuat dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Kawasan Perbatasan Negara Aruk

Tahun 2017, PT Pertamina (Persero) telah mengoperasikan SPBU (Non-BBM Satu Harga) di Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Saat ini, SPBU tersebut belum menerapkan adanya cadangan BBM sehingga sering terjadi kelangkaan BBM, mana kala terjadi keterlambatan pasokan.

Pengiriman BBM dari Depot BBM Pontianak ke daerah PLBN Aruk pulang-pergi diperlukan waktu 18 jam sehingga stok BBM yang diperlukan cukup untuk 6 hari. Jadi, kapasitas tangki timbun yang diperlukan adalah sebesar volume 6 hari penjualan BBM ditambah volume kapasitas tangki pengangkut pengiriman BBM yang biasa digunakan, yaitu sebesar 17.000 liter untuk BBM solar, 17.000 liter untuk BBM bensin, dan 17.000 liter minyak tanah.



Gambar 2. Lokasi Infrastruktur Energi PLBN Aruk

Kondisi Kelistrikan

- Pasokan listrik disuplai dari sistem distribusi tenaga listrik 20 kV interkoneksi lintas negara PLN Sajingan–SESCO Biawak dengan daya sebesar 800 kVA (impor dari Malaysia).
- Pembangunan jaringan listrik \pm 20 kms untuk melistriki Dusun Asuansang, Desa Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar. Sudah diusulkan dalam RKAP PLN Tahun 2021.
- Pembangunan jaringan listrik \pm 8,5 kms untuk melistriki Dusun Sungai Tengah, Desa Sebusub, Kecamatan Paloh. Sudah diusulkan dalam RKAP PLN Tahun 2021.
- Kondisi saat ini sedang direncanakan peningkatan keandalan sistem melalui

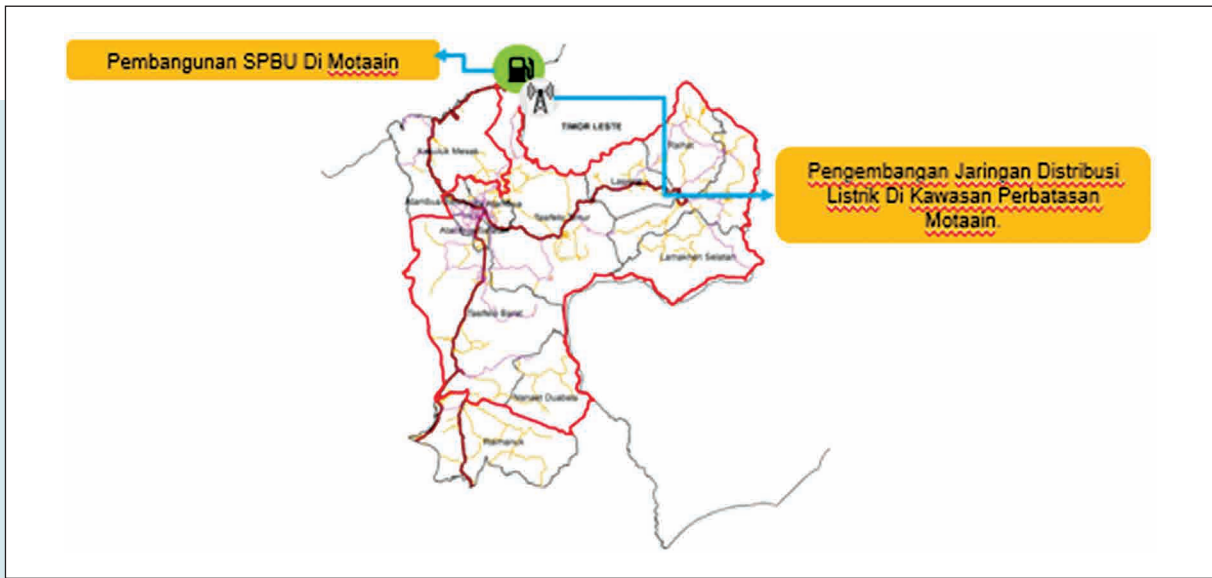
1. perpanjangan kontrak kerja sama pembelian listrik dari *Sarawak Electricity Supply Company Limited* (SESCO), Malaysia dengan negosiasi ulang harga pembelian listriknya;
2. Percepatan penggantian kebutuhan pasokan listrik dari PLN Sajingan dengan PLTD CPO atau PLTS serta pembangunan Jaringan Tegangan Menengah dari Gardu Induk (GI) Sambas.

Pada masa mendatang, dengan asumsi kebutuhan listrik untuk daerah PLBN Aruk sebesar 1.200 kwh/kapita/tahun, dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2022 sekitar 12.000 jiwa maka akan dibutuhkan kapasitas pembangkit

listrik sebesar 2.137 kw. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi dengan pembangkit EBT PLTD CPO sebesar 1 MW dan PLTS Bateray sebesar 5.685 kw yang tersebar di berbagai lokasi, sesuai dengan komunitas pemukiman, komersial, dan industri.

2. Kawasan Perbatasan Negara Motaain

Kondisi layanan BBM di Motaain, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu masih sangat memprihatinkan, yaitu minyak solar dan minyak bensin merupakan komoditi yang diperdagangkan di pasar sehingga kondisi ini harus diperbaiki dengan adanya layanan BBM satu harga. Kondisi saat ini sedang diupayakan perizinan untuk pembangunan SPBU BBM satu harga.



Gambar 3. Lokasi Infrastruktur Energi PLBN Motaain

Pengiriman BBM dari Depot BBM Kupang ke daerah PLBN Motaain pulang-pergi diperlukan waktu sekitar 14 jam sehingga stok BBM yang diperlukan cukup untuk 5 hari. Jadi, kapasitas tangki timbun yang diperlukan adalah sebesar volume 5 hari penjualan BBM ditambah volume kapasitas tangki pengangkut pengiriman BBM yang biasa digunakan, yaitu sebesar 10.000 liter untuk BBM solar, 10.000 liter untuk BBM bensin, dan 8.500 liter minyak tanah.

Kondisi kelistrikan

Secara umum, saat ini semua desa di kawasan perbatasan Motaain, Motamasin telah berlistrik. Beberapa kegiatan pembangunan kelistrikan dan statusnya sebagai berikut.

1. Pembangunan Jaringan Listrik (JTM 5,5 kms dan JTR 8,9 kms) Dusun Dilumil, Webua, Aitimuk dan Takarabat yang berbatasan dengan Distrik Maliana (100%).
2. Pembangunan Jaringan Listrik (JTM 4,2 kms) jalur Sabuk Merah Perbatasan Atambua–Motaain untuk mendukung Layanan Premium PLBN Motaain (Oebua) (100 %).
3. Pembangunan Jaringan Listrik (JTM 2,9 kms dan JTR 0,85 kms) di Dusun Manekiik Desa Sarabau Kecamatan Tasifeto Timur (35 %).
4. Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun Susuk, Desa Dualaus dan Dusun Weain, Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak (45 %).
5. Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun Hanowai, Desa Debululik, Kecamatan Lamaknen Selatan(45 %).
6. Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun Welorlaran Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat (45 %).
7. Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun Makokon, Desa Nanaenoe dan Dusun Halidais, Desa Nanaet, Kecamatan Nanaet Dubesi (45 %).
8. Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun Nualain, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen (45 %).
9. Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun Wenanan, Aituan, Kelis, Wanikian, Obor, Desa Rafae, Kecamatan Raimanuk (45 %).
10. Pembangunan Jaringan Listrik di Dusun Sainana dan Dusun Beremuti, Desa Faturika, Kecamatan Raimanuk (45 %).
11. Pembangunan Listrik untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, Kabupaten Belu (100 %).
12. Penyambungan listrik gratis untuk 71 pelanggan, sumbangan dari Pegawai Kementerian ESDM di kawasan Motaain (100 %).

Berdasarkan hasil survey potensi energi surya, lokasi PLBN Motaain berpotensi untuk pengembangan PLTS dan potensi demannya cukup banyak. Tidak ada potensi energi hidro.

Pada masa mendatang, dengan asumsi kebutuhan listrik untuk daerah PLBN Motaain sebesar 1.150 kwh/kapita/tahun, dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2022 sekitar 4.000 jiwa maka akan dibutuhkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 525 kw. Kebutuhan ini akan dipenuhi dengan pembangkit EBT PLTS Bateray dengan kapasitas 2.625 kwp yang tersebar di berbagai lokasi, sesuai dengan komunitas pemukiman, komersial, dan industri.

3. Kawasan Perbatasan Negara Skouw

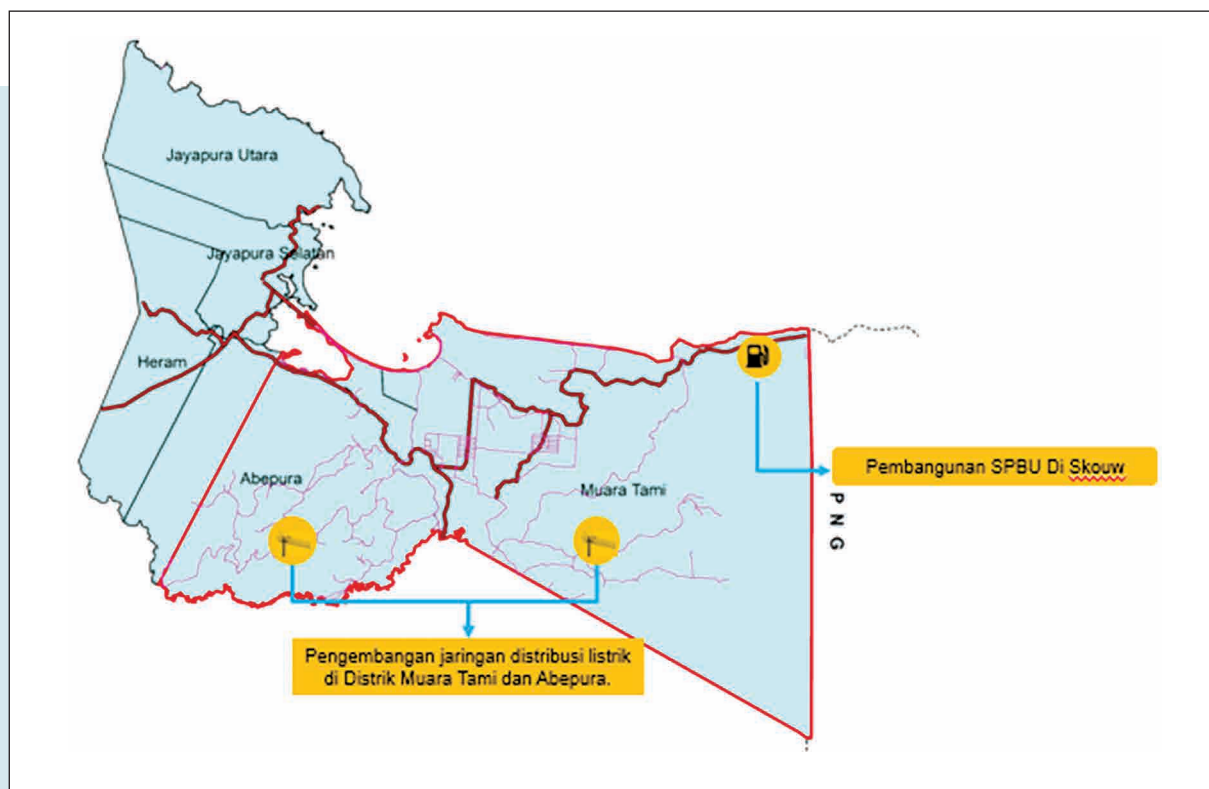
Kondisi layanan BBM di Skouw saat ini belum terdapat layanan BBM seperti SPBU, yang ada hanya layanan BBM eceran kios-kios. Tidak ada penetapan lokasi BBM satu harga di Skouw. Saat ini, sedang diupayakan lokasi pembangunan SPBU BBM satu harga.

Pengiriman BBM dari Depot BBM Jayapura ke daerah PLBN Motaain pulang-pergi diperlukan waktu 8 jam sehingga stok BBM yang diperlukan cukup untuk 3 hari. Jadi, kapasitas tangki timbun yang diperlukan adalah sebesar volume 3 hari penjualan BBM ditambah volume kapasitas tangki pengangkut

pengiriman BBM yang biasa digunakan, yaitu sebesar 7.100 liter untuk BBM solar, 7.100 liter untuk BBM bensin, dan 6.050 liter minyak tanah.

Kondisi kelistrikan

Saat ini, listrik yang tersedia di masyarakat adalah listrik dari PLTS dan SHS (*Solar Home Sistem*), jaringan listrik PLN belum tersedia. Direncanakan, pasokan listrik 7ke depannya akan melalui jaringan sistem distribusi 20 kV Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) dengan total daya sebesar 1.110 kVA yang dipasok dari PLTD dan PLTMG di sistem Jayapura. Akan dilakukan survei oleh PLN



Gambar 4. Lokasi Infrastruktur Energi PLBN Skouw

untuk pembangunan jaringan listrik di Kampung Koya Kosso, Distrik Abepura dan Kampung Skouw Mabo, Distrik Muara Tami. Dari hasil survei potensi EBT khususnya energi surya, untuk mencukupi *demand* listrik PLBN Skouw, dapat dipenuhi dari pembangkit PLTS. Tidak ada potensi energi hidro.

Pada masa mendatang, dengan asumsi kebutuhan listrik untuk daerah PLBN Skouw sebesar 1.100 kwh/kapita/tahun, dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2022 sekitar 2.000 jiwa maka akan dibutuhkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 251 kw. Kebutuhan ini akan dipenuhi dengan pembangkit EBT PLTS Baterai dengan kapasitas 1.255 kwp yang tersebar di berbagai lokasi, sesuai dengan komunitas pemukiman, komersial, dan industri .

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjamin ketahanan energi pada daerah PLBN maka kapasitas tangki timbun BBM yang harus disediakan pada SPBU sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.

Adapun untuk menjamin keandalan pasokan dan harga listrik yang terjangkau dan berkeadilan di daerah PLBN, pasokan listrik akan digantikan dengan Pembangkit EBT PLTS yang makin ekonomis dengan kapasitas sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.

REKOMENDASI

Untuk mendukung tercapainya bauran EBT 23 persen pada tahun 2025 maka pemanfaatan minyak tanah sebagai bahan bakar rumah tangga perlu diganti menjadi pemanfaatan kompor listrik sebagai bahan bakar rumah tangga, dan

akan diperlukan juga penyesuaian atau penambahan kapasitas pembangkitan listriknya sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama *stakeholder*-nya, terutama Aparatur Pemerintah/ASN, perlu melaksanakan sosialisasi pemanfaatan kompor listrik sebagai program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2012 Tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada

TABEL 1. KAPASITAS TANGKI TIMBUN BBM DI SPBU WILAYAH ARUK, MOTAAIN, DAN SKOUW

LOKASI	CADANGAN BBM		
	SOLAR (LITER)	BENSIN (LITER)	MINYAK TANAH (LITER)
Aruk	17.000	17.000	17.000
Motaain	10.000	10.000	8.500
Skouw	7.100	7.100	6.050

TABEL 2. KAPASITAS KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK DI WILAYAH WILAYAH ARUK, MOTAAIN, DAN SKOUW

LOKASI	KAPASITAS		
	PEMBANGKITAN (KW)	PLTD CPO (KW)	PLTS BATERAY (KWP)
Aruk	2.137	1.000	5.685
Motaain	525		2.625
Skouw	251		1.255



PLBN Skouw

Foto: setkab.go.id



Foto: berbagifun.com

PLBN Motaain

Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw

Keputusan Direktur Jenderal Migas No. 6.K/MG.05/DJM.O/2021 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,.. *Rencana Aksi Ketahanan Energi Nasional 2021, (GSEN 2021).*

<https://id.m.wikipedia.org> ■

PROFIL PENULIS

Agus Nurhudoyo merupakan Perencana Ahli Madya Biro Perencanaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pos-el: agus.nurhudoyo@esdm.go.id

Ponsel: 0817201011

BERBISNIS PADA MASA PANDEMI



Foto: freepik.com

Pandemi masih menghantui kehidupan masyarakat. Hampir semua bidang terhambat pergerakannya dikarenakan pandemi virus Covid-19.

Semua orang tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Para pelajar dan mahasiswa harus belajar di rumah secara *online*. Pegawai pemerintah maupun karyawan swasta pun harus bekerja dari rumah. Banyak perusahaan besar ambruk sehingga banyak orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan.

Kehidupan harus berjalan terus, meskipun pandemi melanda. Semua orang butuh sandang dan pangan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian keluarga selama pandemi adalah dengan memulai bisnis kecil-kecilan.

Berikut beberapa cara berbisnis pada masa pandemi.

1. TENTUKAN BISNISNYA

Bisnis berskala besar dianggap masih berisiko tinggi untuk dijalankan pada masa pandemi ini. Untuk itu, Anda bisa memulai dengan membuat bisnis yang membutuhkan modal kecil. Coba manfaatkan *soft skill* yang Anda miliki untuk berbisnis. Apabila Anda suka memasak, cobalah berbisnis camilan atau makanan

dengan harga terjangkau dan dijual kepada tetangga. Sebagai alternatif, Anda juga bisa menjadi *reseller/dropshipper* dari *online shop* pakaian atau makanan.

2. TENTUKAN TARGET PASAR

Bisnis sudah ditentukan, berikutnya tentukan pasar yang akan Anda targetkan sebagai pembeli setia. Pada masa pandemi yang serba sulit ini, kemungkinan target pasar yang besar bisa didapatkan dari kalangan menengah ke bawah.

3. LAKUKAN PROMOSI

Lakukan promosi dengan menekan anggaran. Anda bisa melakukan penghematan untuk promosi dengan banyak cara. Salah satunya dengan melakukan promosi dengan memanfaatkan aplikasi perpesanan (seperti Whatsapp) maupun media

sosial (seperti Facebook atau Instagram). Promosi dari mulut ke mulut ke tetangga, teman, atau kerabat dekat juga dapat dilakukan jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dilonggarkan, tentunya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan.

4. BELAJAR DIGITAL MARKETING

Apabila Anda sudah mahir dalam menggunakan media sosial, coba perdalam lagi untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana menjalankan bisnis

sampingan. Mempelajari dasar-dasar digital marketing juga akan sangat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam berbisnis.

5. KONSISTEN

Semua cara di atas akan berhasil apabila Anda melakukan semuanya dengan konsisten. Tentu saja kerja keras dan kerja pintar sangat dibutuhkan pada keadaan seperti saat ini. Tidak perlu setiap hari, apabila Anda hanya menjalankan bisnis tersebut tiga kali dalam seminggu, itu tidak masalah asal

konsisten dalam menjalankannya. Para pelanggan setia akan menunggu pada waktu yang Anda tentukan untuk menjalankan bisnis secara rutin.

Itulah beberapa cara yang dapat Anda lakukan dalam berbisnis pada masa pandemi. Terus semangat menjalankan aktivitas sehari-hari dan tetap jaga kesehatan serta kebersihan selalu. *Stay safe!*

**(Penulis: Irna Suwanti Indrayani/
Pusbindiklatren) ■**

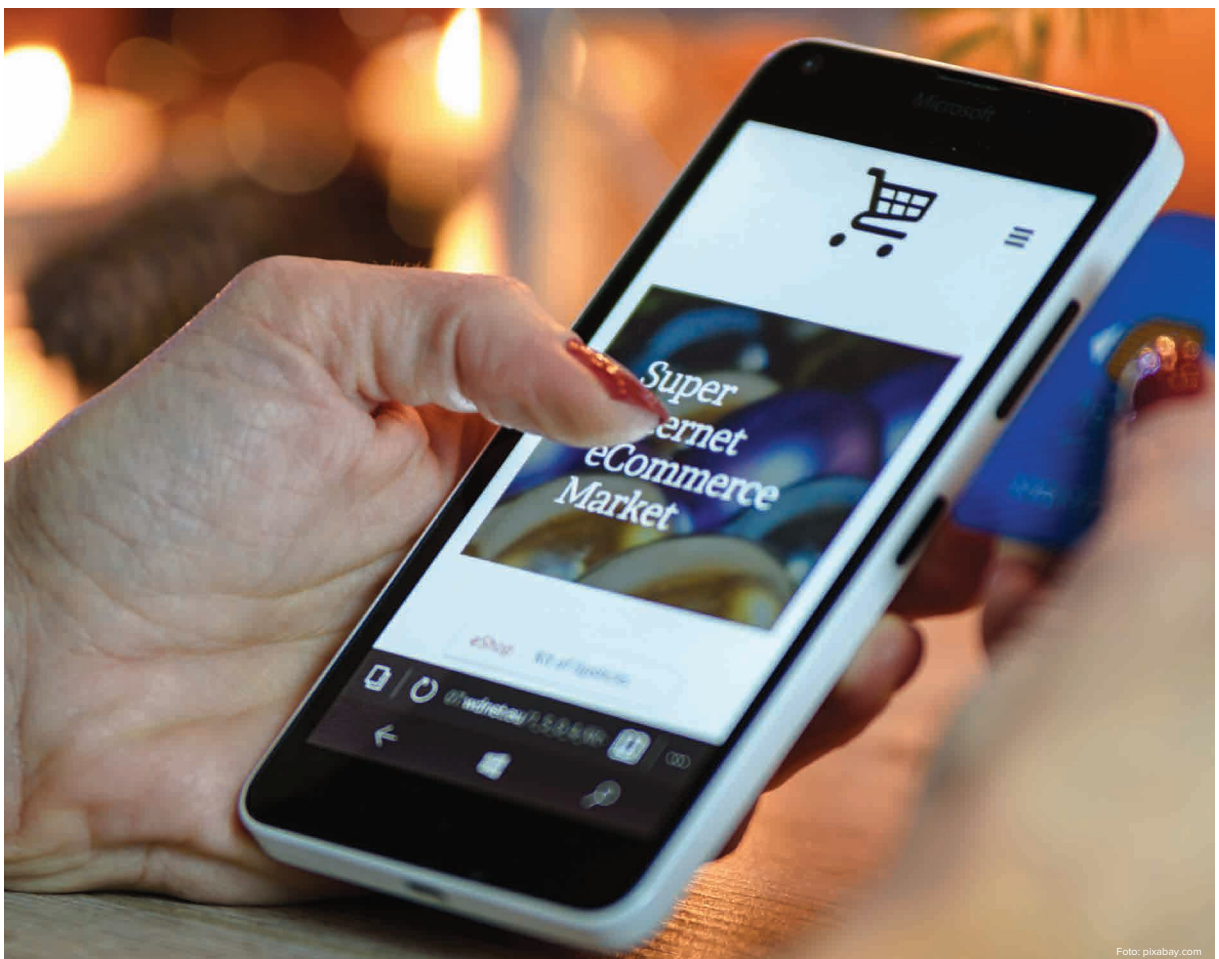


Foto: pixabay.com



KUESIONER MAJALAH SIMPUL PERENCANA VOLUME 40 TAHUN 2021

I. TAMPILAN MAJALAH SIMPUL PERENCANA

1. Tampilan cover majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021:
 - a. menarik
 - b. kurang menarik
2. Tampilan cover majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021 sudah mencerminkan tema:
 - a. sudah
 - b. belum
3. Susunan warna dan tata letak foto-foto ilustrasi dalam isi majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021:
 - a. menarik
 - b. kurang menarik

II. SUBSTANSI/ISI MAJALAH SIMPUL PERENCANA

1. Tema yang diangkat dalam majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021:
 - a. menarik
 - b. kurang menarik
2. Tema yang diangkat dalam majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021 sudah sesuai dengan isu terkini:
 - a. sudah
 - b. belum

3. Susunan atau struktur konten dalam majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021 sudah baik:
 - a. sudah
 - b. belum
4. Bahasa dan ilustrasi (gambar, grafik, dan tabel) dalam majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021 mudah dipahami:
 - a. iya
 - b. tidak
5. Majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021 memberikan informasi terkini dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan:
 - a. iya
 - b. tidak

III. PENYEBARLUASAN MAJALAH SIMPUL PERENCANA

1. Majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021 yang dikirimkan oleh Pusbindiklatren Bappenas dapat diterima dengan baik:
 - a. iya
 - b. tidak
2. Apakah majalah Simpul Perencana yang telah Saudara terima juga diinformasikan kepada staf Saudara?
 - a. iya
 - b. tidak

3. Selain Pusbindiklatren mengirimkan majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021 kepada instansi Saudara, kami juga telah memuat dalam situs web Pusbindiklatren Bappenas (karena keterbatasan cetak), apakah saudara menginformasikan/disposisikan kepada staf atau kolega untuk mengakses majalah Simpul Perencana volume 40 tahun 2021 di situs web Pusbindiklatren Bappenas?
 - a. iya
 - b. tidak

KETENTUAN:

- Lingkari jawaban pada huruf a atau b sesuai pilihan Anda.
- Kuesioner yang telah selesai dijawab selanjutnya dipotret dengan kamera. Usahakan hasil foto tidak kabur (*blur*) sehingga tulisan dan jawaban dapat terbaca dengan jelas.
- Hasil foto selanjutnya dikirim melalui pos-el (*e-mail*) ke: **pusbindiklatren@bappenas.go.id**
- Pengisian kuesioner evaluasi Majalah Simpul Perencana juga dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui tautan (*link*) berikut: **bit.ly/evaluasi-simpul**



Langkah **HINDARI NARKOBA**



Tolak ajakan merokok. Merokok adalah pintu gerbang penyalahgunaan narkotika.



Isi waktu luang dengan kegiatan positif seperti olahraga, bermain musik, belajar, dan lainnya.

Kenali temanmu. Pilihlah teman yang selalu mengajak kepada kebaikan.



Ingat bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan penyalahgunaan narkoba.

Hindari kelompok/teman nongkrong yang tidak sehat. Sapa lalu pergi, lakukan dalam tiga detik.



Ada keluarga yang menyayangi kita. Ciptakan komunikasi yang baik dengan keluarga.

Sehat Bahagia Tanpa Narkoba



Kewajiban bagi Tamu

Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas
untuk Menunjukkan Hasil
Tes PCR/Antigen/Tes GeNose



Mengacu pada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.



Mempertimbangkan peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia serta sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, bersama ini kami sampaikan bahwa :

- ▶ Seluruh tamu yang akan berkunjung ke Kantor Kementerian PPN/Bappenas **wajib** menunjukkan surat keterangan Uji Tes PCR/Antigen dengan **hasil negatif** yang masih berlaku pada saat berkunjung (**Hasil Tes PCR/Antigen berlaku 2 x 24 jam**).
- ▶ Bagi tamu yang tidak memiliki surat keterangan negatif Tes PCR/Antigen, **wajib mengikuti Tes GeNose** di Kementerian PPN/Bappenas.

Apabila **Tes GeNose menunjukkan hasil negatif** maka yang bersangkutan diperkenankan untuk melanjutkan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

Kebijakan ini berlaku sejak 29 April 2021, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.